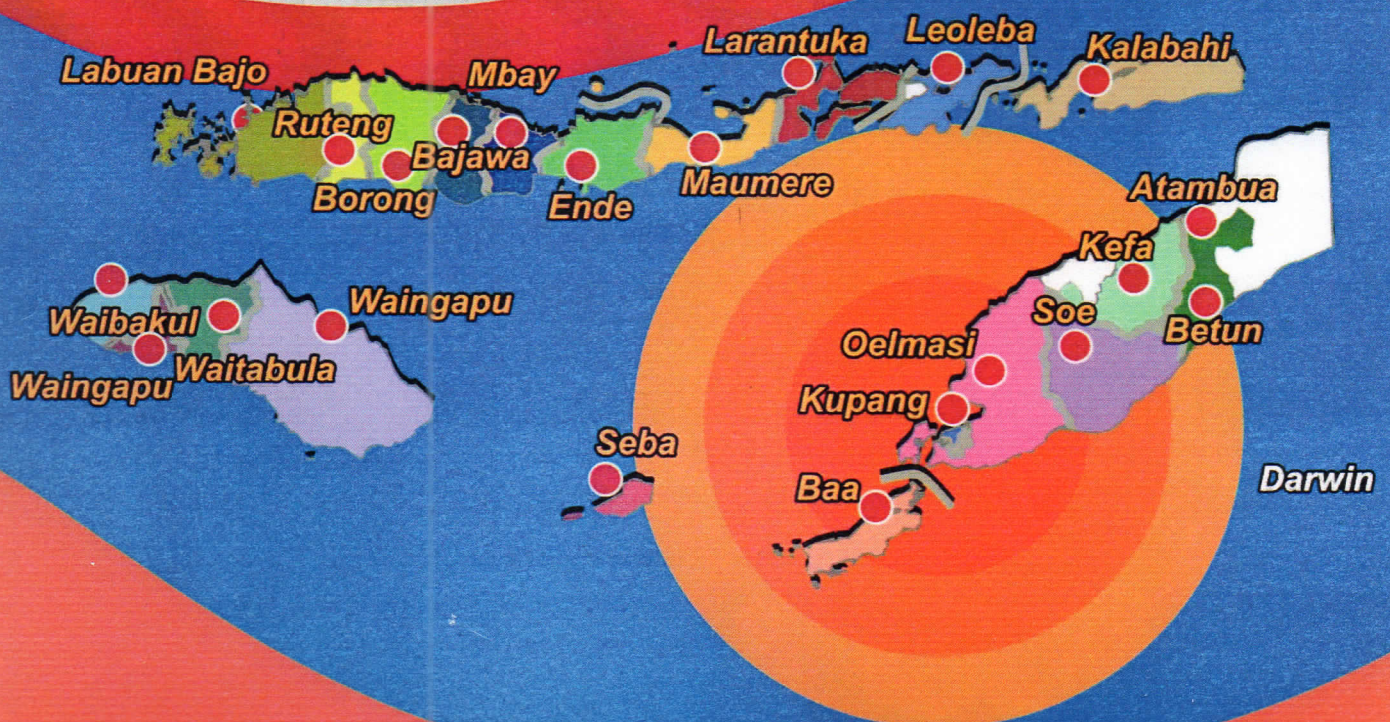




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 129 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Memerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata caara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pememerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 8 (delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - f. BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. BABVIII Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019, sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Gubernur menyampaikan Dokumen RKPD Tahun 2019 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

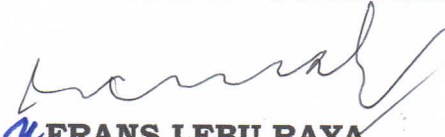
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2018

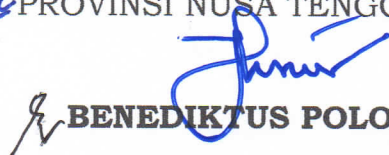
✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

2018

SEKRETARIS DAERAH
✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *✓*


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 28 TAHUN 2018

TANGGAL : 10 JULI 2018

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

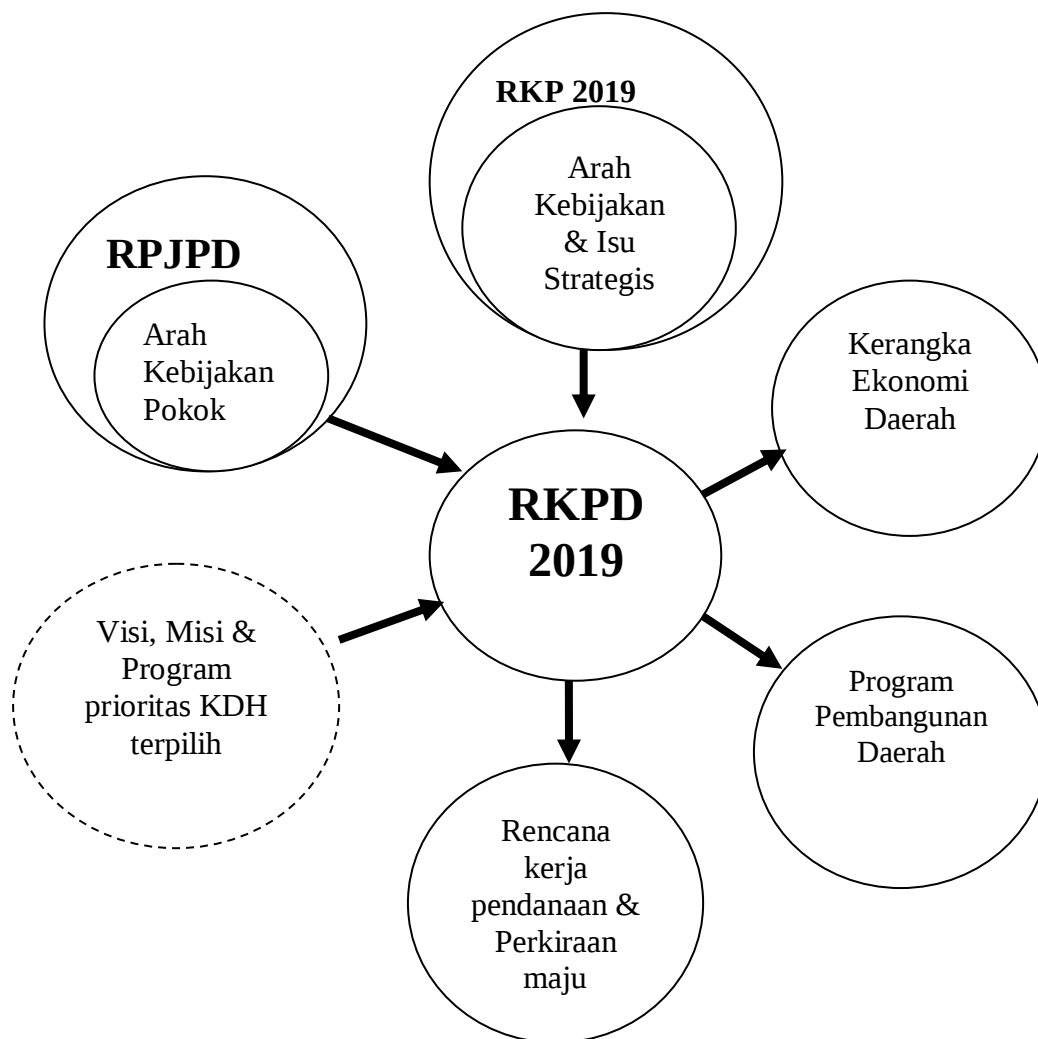
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Visi dan Misi Gubernur terpilih. RKPD disusun untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan tahunan dapat dicapai. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya serta rangkaian tindakan yang tepat dan cepat melalui berbagai kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, setiap daerah termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyusun RKPD sebagai satu kesatuan perencanaan secara nasional.

RKPD Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJPD periode IV 2005 – 2025. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan antar negara baik dengan Timor Leste maupun dengan Timor Leste, sedangkan di sisi lain, Nusa Tenggara Timur belum mampu lepas dari kondisi sebagai daerah tertinggal karena 18 dari 22 kab/kota masih merupakan daerah tertinggal. Karena itu Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dapat menata, membangun dan meningkatkan segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya dan politik untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks ini RKPD 2019 memegang peranan penting untuk menjawab berbagai tuntutan yang ada, sekaligus memastikan target-target yang ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025 dapat dicapai.

Pasca pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018, RKPD Tahun 2019 juga merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023. Pasal 147 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah dan kebijakan pokok RPJPD Provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

Mengingat RKPD Tahun 2019 merupakan tahun awal RPJMD Tahun 2018-2023, maka RKPD Tahun 2019 perlu mengantisipasi visi misi dan program kepala daerah terpilih. Muatan RKPD Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Substansi Muatan RKPD Tahun 2019



RPJPD 2005 – 2025 mengusung visi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 Yaitu :**“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah, dimana periode 2018 – 2023 merupakan periode pembangunan tahap ke-4, atau tahap akhir RPJPD 2005-2025. Arah kebijakan periode keempat adalah : **Percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.**

Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJPD 2005 – 2025, maka RKPD 2019 yang mengambil Tema : **“Perluasan dan Percepatan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”** diarahkan untuk semakin memperkuat perekonomian, yang dilandasi dengan pemenuhan pelayanan dasar baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur dengan bertumpu pada SDM Nusa Tenggara Timur yang berkualitas. Upaya ini disinergikan dengan pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Pendekatan Penyusunan RKPD Provinsi NTT dilakukan dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, *top down*, *bottom up*, dan partisipatif sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan politik digunakan dalam menyusun RKPD Provinsi NTT dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT yang sekaligus merupakan aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, reses, maupun surat-surat masuk ke DPRD Provinsi NTT. Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah dalam menganalisis masalah secara sistematis dengan data-data yang akurat. Pendekatan *top down* dilakukan dengan mengacu pada 9 (sembilan) agenda prioritas nasional (*NAWA CITA*) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan 5 (lima) Prioritas Nasional pada RKP 2019 sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota, serta musrenbang Provinsi. Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang berbasis rakyat, artinya seluruh prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan telah melalui tahapan konsultasi dengan masyarakat, para tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat NTT dengan telah dimuatnya rancangan RKPD Provinsi NTT di website Bappeda Provinsi NTT.

Selanjutnya RKPD Tahun 2019 akan menjadi Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan rancangan APBD untuk tahun 2019 serta sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

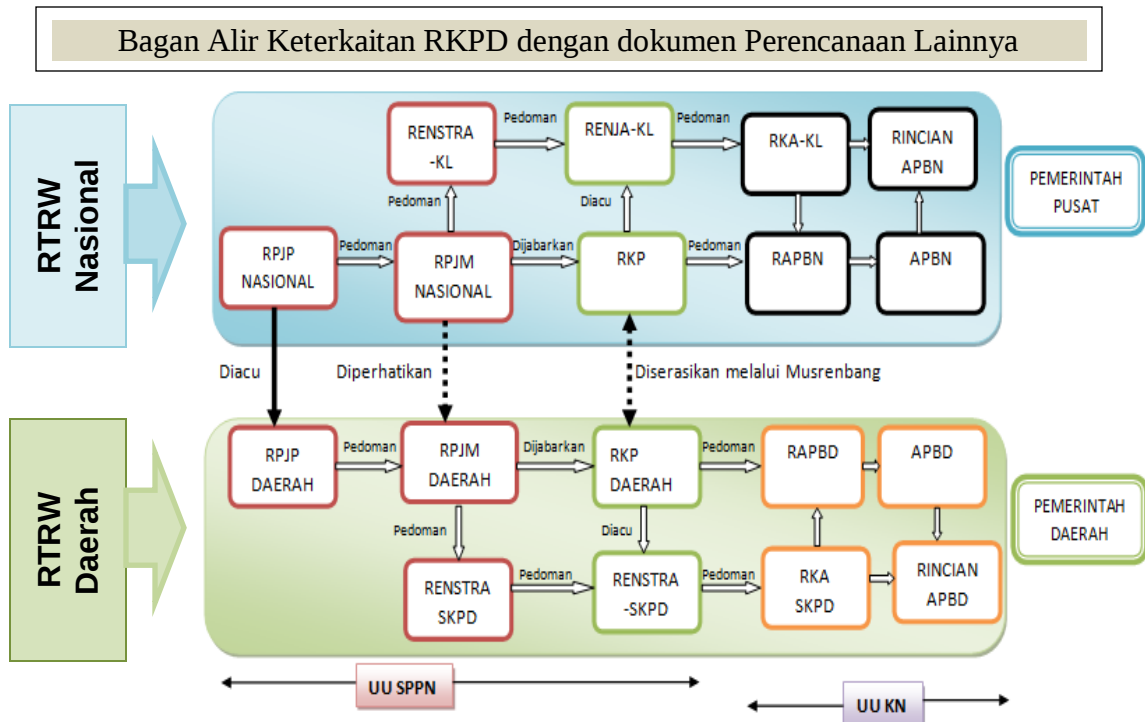
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar I.1



Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Dengan demikian, RKPD Tahun 2019 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030. Tentu saja dengan tetap menjaga keserasian terhadap RTRW Nasional, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTR Kawasan Strategis Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

RKPD Tahun 2019 selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2019. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2019 serta dasar penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2019. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD TA 2019.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.

2. Tujuan

Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah:

- 1) Menjadi acuan bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2019 dan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2019;

- 2) Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
- 3) Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019;
- 4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

1.5. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta sistematika dokumen RKPD.

Bab II. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah.

Bab ini menguraikan tentang kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro ekonomi, IPM), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2017 dan 2018 Triwulan I, evaluasi pelaksanaan RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah.

Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan perincian sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah (tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana); arah kebijakan ekonomi daerah; analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi uraian tentang prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian capaian kinerja RPJMD, identifikasi permasalahan daerah dan rancangan kerangka ekonomi daerah.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi

Bab ini memuat kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana RPJMD Kabupaten/Kota dan arahan kebijakan pembangunan

Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi sebagai pedoman Kabupaten/Kota.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan secara rinci program dan kegiatan pokok RKPD tahun 2019 lengkap dengan instansi pelaksana/Perangkat Daerah, indikator capaian masing-masing program serta pagu indikatifnya. Bab ini menampilkan tabel yang menjabarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah pelaksana, Program dan pagu indikatif program tahun 2019.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan

Bab VIII. Penutup

Bab ini menguraikan tentang penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1.192 pulau, 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Pulau besar berpenghuni biasa disebut dengan Flobamorata (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 47.931,54 km². Luas wilayah daratan 47.931,54 km² tersebar pada 1.192 pulau (43 pulau dihuni dan 1.149 pulau tidak dihuni). Sebagian besar wilayahnya bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah. Memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25 – 118 kilometer.

Wilayah administrasi di NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 km² (14,61%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38%) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km² (0,96%). Karena merupakan Provinsi kepulauan, akses menuju ibu kota Provinsi NTT, Kupang, ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat/transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk Kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut ataupun udara.

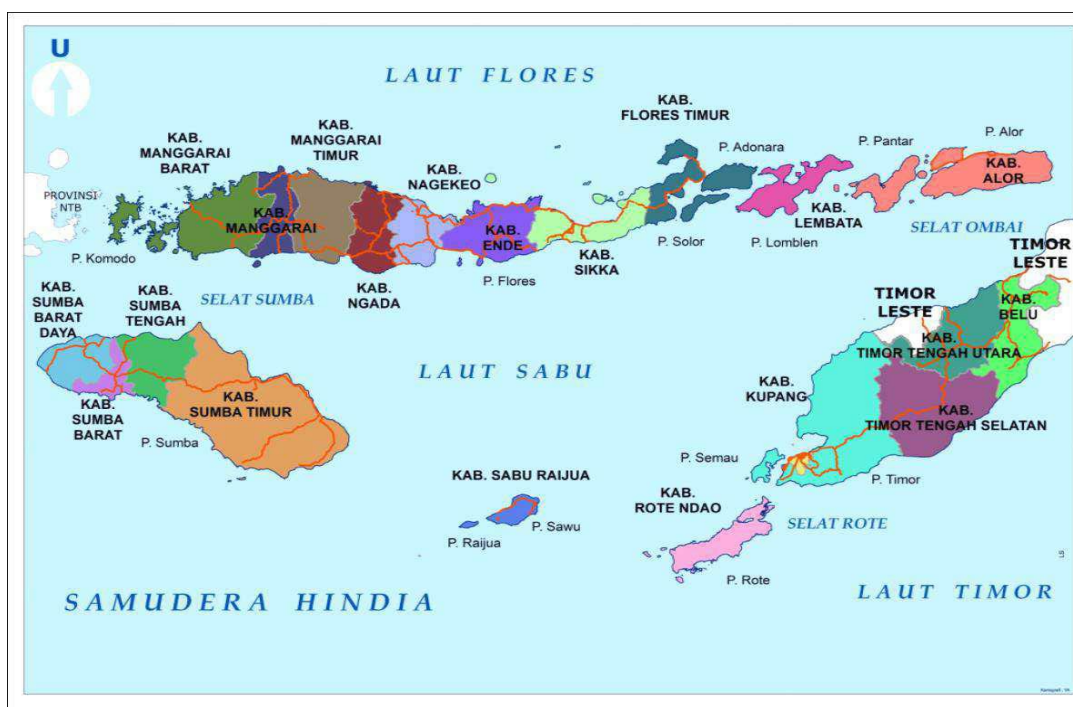
A. Posisi astronomis

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di sebelah selatan katulistiwa pada posisi 8°–12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur. Batas-batas wilayah; sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Negara Timor Leste dan sebelah barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Posisi geostrategis

1. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
5. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia/Lautan Indonesia.

Gambar 2.1
Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur



C. Kondisi/kawasan

1. Pedalaman

Kondisi kawasan pedalaman dikembangkan melalui pengembangan habitat Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau lokasi tempat habitat berada yaitu :

- 1) Dataran rendah dan atau daerah rawa;
- 2) Dataran tinggi dan atau daerah pegunungan;
- 3) Pedalaman dan atau daerah perbatasan;
- 4) Diatas perahu dan atau pesisir pantai.

2. Terpencil

Permasalahan yang menyebabkan suatu wilayah menjadi terisolasi (terpencil) antara lain:

- 1) Pengaruh Geografis yang membagi wilayah dalam berbagai keadaan/kondisi (Pulau, Pesisir, Dataran Rendah ataupun Dataran Tinggi) dengan pembatas alami seperti Laut, Sungai, Gunung, dan lain-lain;
- 2) Kurangnya Sarana Aksesibilitas yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain seperti Jalan, Jembatan, Dermaga atau Bandar Udara;
- 3) Gangguan Akibat Bencana yang menyebabkan rusaknya Sarana Aksesibilitas yang telah ada;
- 4) Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang secara sadar memisahkan diri dari lingkungan sosial di luar wilayahnya (Self Isolation), serta menolak intervensi.

3. Pegunungan

Tabel 2.1`
Nama dan Ketinggian Gunung Berapi Aktif di
Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Ketinggian (m)
1 Alor	- Sirung	862
2 Lembata	- Batu Tara	748
3 Flores Timur	- Lewotobi Laki-laki	1.584
	- Lewotobi Perempuan	1.703
	- Lera Boleng	1.117
	- Ile Boleng	1.659
	- Ile Lewotolo	1.319
	- Ile Werung	-
	- Hobal	-
4 Sikka	- Egon	1.703
5 Ende	- Iya	637
	- Kelimutu	1.640
	- Roka Tenda	875
6 Ngada	- Innie Lika	1.559
	- Ebo Lobo	2.123
	- Innie Ria	2.230
7 Manggarai	- Anak Ranaka	2.248

Sumber: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

4. Kepulauan

Tabel 2.2
Luas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Pulau

Pulau	Luas Daerah (km2)	Persentase (%)
01. Timor (Indonesia)	± 14 200	29,63
02. Flores	± 14 000	29,21
03. Sumba	± 11 005	22,96
04. Alor	± 2 119	4,42
05. Lembata	± 1 250	2,61
06. Rote	± 1 200	2,5
07. Pantar	± 728	1,52
08. Adonara	± 509	1,06
09. Sabu	± 414	0,86
10. Komodo	± 390	0,81
11. Semau	± 219	0,46
12. Solor	± 219	0,46
13. Rinca	± 207	0,43
14. Lainnya	± 1 471	3,07
Nusa Tenggara Timur	± 47 931	100,00

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT

D. Topografi

Topografis NTT berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada gugusan yang sempit. Pada semua pulau dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, dataran-dataran yang sempit memanjang sepanjang pantai atau diapit oleh dataran tinggi atau sistem perbukitan. Ditinjau dari ketinggian lahan, 48,78% dari

luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada rentang ketinggian 100 – 500 meter dari atas permukaan air laut atau sekitar 2.309.747 Ha. Sedangkan wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 m hanya sebagian kecil, yaitu sebesar 3,65 %. Sesuai catatan yang ada, lahan dengan kemiringan 15–40 persen mencapai luasan 38,07% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% mencapai 35,46%. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran sangat terbatas baik pertanian lahan basah maupun lahan kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah-daerah dengan kemiringan yang curam sehingga produktivitas menjadi rendah.

E. Geologi

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan Circum – Pasifik sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores, memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan). Pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik, sedangkan pulau Sumba, Sabu, Rote, Sema, Timor, dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Dengan kondisi ini maka jalur pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan subur namun sering mengalami bencana alam yang dapat mengancam kehidupan penduduk yang menetap di daerah tersebut.

Dibalik kondisi geologi tersebut ternyata Provinsi ini memiliki berbagai macam deposit, baik mineral maupun sumber – sumber energi lainnya. Hampir 100 lokasi di daerah ini mengandung mineral dari sumber energi bumi/bahan bakar minyak, seperti di Pulau Sumba, Timor dan disepanjang pantai Flores bagian timur. Sumber energi dapat dikembangkan dari sungai-sungai besar, seperti Noelmina, Benain, Aesesa dan sungai Kambaniru. Mineral yang terkandung di Provinsi ini adalah: Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Emas (Au), Flourspor (Fs), Barit (Ba), Belerang (S), Posfat (Po), Zeolit (Z), Batu Permata (Gs), Pasir Kwarsa (Ps), Pasir (Ps), Gypsum (Ch), Batu Marmer (Mr), Batu Gamping, Granit (Gr), Andesit (An), Balsitis, Pasir Batu (Pa), Batu apung (Pu), Tanah Diatomea (Td) Lempung/Clay (Td).

F. Hidrologi

1. Daerah aliran sungai

Gambaran kondisi Hidrologi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama air permukaan tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan. Daerah Aliran Sungai (DAS) dibentuk dari beberapa sungai dan Danau. Diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 27 DAS dengan luas keseluruhan 1.527.900 Ha. Sungai yang terpanjang di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah Sungai Benenai (100 Km) yang mencakup Kabupaten TTS, TTU dan Belu dengan DAS

seluas: 4500 Km di Kabupaten Belu. DAS terluas adalah DAS Benenai yaitu 329.841 Ha.

Tabel 2.3
Keputusan Presiden 12 tahun 2012
tentang penetapan wilayah sungai (WS)

NO.	WS NTT	DAS
1	WS Flores	472
2	WS Flotim Kepulauan-Lembata-Alor	439
3	WS Benanain	45
4	WS Noelmina	186
5	WS Sumba	130
	Total	1272

2. Sungai, danau dan rawa

Base flow andalan dari 194 sungai adalah 122,5 m3/detik atau 3,86 milyar m3/tahun 94 buah diantaranya merupakan sungai rawan banjir, dengan perkiraan luas genangan mencapai 55.974 Ha.

3. Debit

Curah hujan rata-rata di NTT adalah 1.200 mm, dengan baseflow andalan dari 194 sungai 122,50 m3/det setara dengan 3,863 Milyar m3/tahun. Dengan demikian kebutuhan air di NTT: penduduk=4,6 Juta x 1200= 5,520 Milyar setara dengan 175,038 m3/det dan itu berarti NTT mengalami devisa air= 175,038 – 122,5 = 52,538 m3/det setara dengan 1,657 Milyar m3/tahun.

G. Klimatologi

Iklim dipengaruhi geografis wilayah yang letaknya di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra Hindia dan Pasifik. Secara umum beriklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Musim hujan berlangsung antara bulan November hingga Maret dan musim kemarau antara bulan April hingga Oktober. Rata-rata curah hujan tahunan berkisar 850 mm terjadi di Sabu, Maumere, dan Waingapu, sementara curah hujan tahunan kisaran 2500 mm terjadi di Ruteng, Kuwus, Mano, Pagal dan Lelogama. Fenomena iklim global (El Nino dan La Nina) juga mempengaruhi kondisi iklim secara umum wilayah. Pada saat terjadinya fenomena El Nino (1997/1998;2002/2003;2009/2010), awal musim hujan umumnya mundur 1-3 dasarian, periode musim hujan semakin pendek dan sifat hujan umumnya dibawah normal sehingga berdampak pada kekeringan. Sebaliknya saat La Nina, awal musim hujan umumnya maju 1-3 dasarian, periode musim hujan semakin panjang dan sifat hujan diatas normal dan berpotensi menyebabkan banjir.

1. Tipe

Konfigurasi Geografis NTT sebagai Provinsi Kepulauan dan letaknya posisi silang di antara dua benua Asia dan Australia dan diantara dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik, menentukan

karakteristik iklim di wilayah ini. Wilayah Provinsi NTT secara umum termasuk ke dalam tipe iklim tropis dengan variasi Suhu dan Penyinaran Matahari yang rendah rata-rata suhu minimum dan maksimum masing-masing 24^0 C dan 32^0 C dengan panjang hari ± 12 jam. Pola umum iklim wilayah ini adalah pola musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung antara bulan November sampai Maret dan musim kemarau antara bulan April dan Oktober. Pola iklim demikian dikendalikan oleh pola angin Moonsoon dari Tenggara yang relatif kering dan dari arah Barat Laut yang membawa banyak uap air. Konfigurasi kepulauan dan topografi wilayah juga merupakan pengendali iklim lokal yang berpengaruh terhadap karakteristik iklim lokal. Akibatnya keragaman iklim antar wilayah di daerah ini juga sangat besar. Dari aspek curah hujan rata-rata curah hujan tahunan bervariasi antara 850 mm di daerah-daerah seperti Sabu, Maumere dan Waingapu sehingga lebih dari 2500 mm di Ruteng, Kuwus dan Lelogama.

2. Kelembaban

Secara umum, iklim wilayah NTT termasuk ke dalam kategori iklim semi-arid, dengan periode hujan yang hanya berlangsung 3-4 bulan dan periode kering 8-9 bulan. Kondisi iklim demikian mendeterminasi pola pertanian tradisional NTT yang hanya mengusahakan tanaman semusim, yang ditanam dalam periode musim hujan. Keadaan demikian juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pertanian yang tergolong sangat rendah (jumlah jam kerja < 5 jam/minggu), akibat dari waktu kerja bertani yang hanya berlangsung 3-4 bulan dalam setahun.

Persoalan curah hujan di NTT juga diperparah oleh pengaruh iklim global, terutama fenomena El Nino dan La Nina serta fenomena perubahan iklim global yang kurang menguntungkan. Dampak dari pengaruh iklim global dimaksud antara lain adalah waktu *on set* dan *off set* musim hujan yang sulit diprediksi dan fenomena kondisi musim kemarau dan musim hujan yang ekstrim. Akibatnya adalah antara lain: kekeringan, gagal tanam, gagal panen, banjir dan gangguan hama dan penyakit tanaman yang serius.

Kelembaban nisbi terendah terjadi pada Musim Timur Tenggara (63-76%) yaitu bulan Juni sampai November dan kelembaban tertinggi pada Musim Barat Daya (82-88%) yaitu bulan Desember sampai bulan Mei. Curah hujan tertinggi di wilayah Flores bagian barat, Sumba bagian barat dan Timor bagian tengah (2000-3000 mm/thn). Kecepatan angin rata-rata pada Bulan November sampai April 03-05 Knot dan angin Musim Timur Tenggara terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober dengan kecepatan dapat mencapai 06-10 Knot (apabila ditunjang angin permukaan).

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi NTT, meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah Provinsi NTT;
- b. PKNp terdapat di Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere di Kabupaten Sikka;
- c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdapat di Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Ende di Kabupaten Ende, Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
- d. PKWp terdapat di Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Bajawa di Kabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat dan Kota Atambua di Kabupaten Belu dan Kota Mbay di Kabupaten Nagekeo;
- e. PKL terdapat di Kota Oelamasi di Kabupaten Kupang, Kota Ba'a di Kabupaten Rote Ndao, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Kota Lewoleba di Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi di Kabupaten Alor, Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
- f. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) terdapat di Atambua di Kabupaten Belu, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kalabahi di Kabupaten Alor.

Tabel 2.4
 Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi NTT

No.	Potensi Pengembangan Wilayah	Lokasi
1.	PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	Kota Kupang
2.	PKNp	Kota Waingapu, Kota Maumere
3.	(PKW) Pusat Kegiatan Wilayah	Kota Tambolaka, Kota Bajawa, Kota Larantuka, Kota Waikabubak, Kota Atambua, Kota Labuan Bajo.
4.	PKWp	Kota Tambolaka, Kota Bajawa, Kota Larantuka, Kota Waikabubak, Kota Atambua, Kota Mbay
5.	PKL	Kota Oelamasi, Kota Ba'a, Kota Seba, Kota Lewoleba, Kota Kalabahi, Kota Waibakul, Kota Borong
6.	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Kota Atambua, Kota Kefamenanu dan Kota Kalabahi

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Nusa Tenggara Timur perlu kewaspadaan bencana alam karena memiliki beberapa daerah rawan bencana longsor, banjir, geologi dan pergeseran tanah. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur. Kawasan rawan banjir terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndonga di Kabupaten Ende.

Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas: kawasan rawan gempa terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Alor; Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami terdapat di Maumere Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Belu, Pantai Selatan Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara Flores Timur, Pantai Selatan Lembata, dan Pantai Selatan Pulau Timor, Pantai Selatan Pulau Sabu dan Pantai Selatan Pulau Rote; kawasan rawan gunung berapi meliputi: Kawasan Gunung Inelika, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan di Kabupaten Flores Timur; Kawasan Gunung Anak Ranakah di Kabupaten Manggarai; Kawasan Gunung Iya dan Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende; Kawasan Gunung Inerie di Kabupaten Ngada; Kawasan Gunung Ebulobo di Kabupaten Nagekeo; Kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon di Kabupaten Sikka; Kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor; dan Kawasan Gunung Batutara dan Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata.

A. Demografi Wilayah

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur meningkat yaitu 5.120.061 jiwa tahun 2015 dan tahun 2016 meningkat menjadi 5.203.514 jiwa. Dibandingkan tahun 2015 terjadi peningkatan penduduk sebanyak 83.453 jiwa.

Jumlah Penduduk Provinsi NTT untuk tahun 2016 sebesar 5.203,514 orang dengan perbandingan laki-laki sebesar 2.577.953 dan perempuan 2.625.561 orang. Kepadatan penduduk NTT tahun 2016 mencapai 109 jiwa/Km². Wilayah Flores-Lembata mencapai 106 jiwa/Km², Wilayah Timor-Alor mencapai 69 jiwa/Km²-Rote 120 jiwa/Km²-Sabu 193 jiwa/Km² dan Wilayah Sumba-Sumba Barat 168 Jiwa/Km²-Sumba Tengah 38 jiwa/Km² dan sumba Barat Daya 225 jiwa/Km². Kota Kupang merupakan wilayah terpadat 2.232 jiwa/Km² disusul Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Manggarai. Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Kupang merupakan Kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk rendah yaitu 36 jiwa/Km², 38 jiwa/Km² dan 65 jiwa/Km². Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) laki-laki per 100 perempuan menunjukkan tingkat Provinsi 98(*sex ratio*) sebagai mana Tabel 2.5.

Tabel 2.5
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KEPADATAN PENDUDUK
PROVINSI NTT MENURUT KAB/KOTA

Wilayah	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KEPADATAN PENDUDUK PROV NTT MENURUT KAB/KOTA						
	Penduduk		Jumlah	Persen	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan Penduduk per km²
	Laki2	Perempuan					
	2016						
Sumba Barat	64.018	59.895	123.913	2,38	107	737,42	168
Sumba Timur	128.201	121.405	249.606	4,80	106	7 005,00	36
Kupang	184.314	175.914	360.228	6,92	105	5 525,83	65
TTS	227.877	233.804	461.681	8,87	97	3 947,00	117

TTU	122.209	125.007	247.216	4,75	98	2 669,70	93
Belu	105.187	105.120	210.307	4,04	100	1 248,94	168
Alor	98.287	103.228	201.515	3,87	95	2 928,88	69
Lembata	62.986	71.587	134.573	2,59	88	1 266,39	106
Flores Timur	118.779	130.110	248.889	4,78	91	1 754,98	143
Sikka	149.189	166.288	315.477	6,06	90	1 731,91	182
Ende	128.230	142.656	270.886	5,21	90	2 068,00	131
Ngada	75.823	80.278	156.101	3,00	94	1 722,24	91
Manggarai	158.378	165.636	324.014	6,23	96	1 915,62	169
Rote Ndao	78.328	75.464	153.792	2,96	104	1 284,41	120
Manggarai Barat	127.409	130.173	257.582	4,95	98	3 141,47	82
Sumba Tengah	35.913	33.693	69.606	1,34	107	1 817,88	38
SBD	167.195	158.504	325.699	6,26	105	1 445,32	225
Nagekeo	68.594	72.716	141.310	2,72	94	1 416,96	100
Maggarai Timur	136.792	139.828	276.620	5,32	98	2 502,24	111
Sabu Raijua	45.406	43.420	88.826	1,71	105	460,47	193
Malaka	88.709	94.678	183.387	3,52	94	1 160,61	158
Kota Kupang	206.129	196.157	402.286	7,73	105	180,27	2232
Provinsi NTT	2.577.953	2.625.561	5.203.514	100	98	47 931,54	109

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan keadaan perekonomian penduduk suatu wilayah/daerah. Ukuran yang dihasilkan dari penghitungan PDRB antara lain adalah rata-rata pendapatan perkapita, struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dari Lapangan Usaha yang ada. Berdasarkan harga berlaku, PDRB NTT mengalami kecenderungan naik dari tahun 2016, Rp. 84.172 milyar menjadi Rp. 91.160 milyar pada tahun 2017.

Berdasarkan Atas dasar harga Konstan, PDRB NTT mengalami kecenderungan naik dari tahun 2016, Rp. 59.775 milyar menjadi Rp. 62.778 milyar pada tahun 2017 Lihat table 2.6).

Tabel 2.6
PRDB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha [Seri 2010]	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT		PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT	
	2016	2017	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.315	26.184	16. 504	17.311
Pertambangan dan Penggalian	1.166	1.186	880	898
Industri Pengolahan	1.034	1.147	745	800
Pengadaan Listrik dan Gas	59	66	46	47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48	50	40	41
Konstruksi	9.095	9.787	6 .543	6.867
Perdagangan Besar dan Eceran;	9.321	10.072	6. 933	7.241

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				
Transportasi dan Pergudangan	4.528	4.943	3 .036	3.269
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	586	676	386	439
Informasi dan Komunikasi	5.878	6.195	5 .256	5.524
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.362	3.726	2 .361	2.498
Real Estate	2.209	2.348	1 .506	1.581
Jasa Perusahaan	257	279	169	172
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.664	11.697	7 .656	7.883
Jasa Pendidikan	8.103	8.917	5 .163	5.486
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.767	1.941	1 .287	1.382
Jasa lainnya	1.771	1.945	1 .258	1.347
PDRB	84 172	91.160	59 .775	62.788

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT

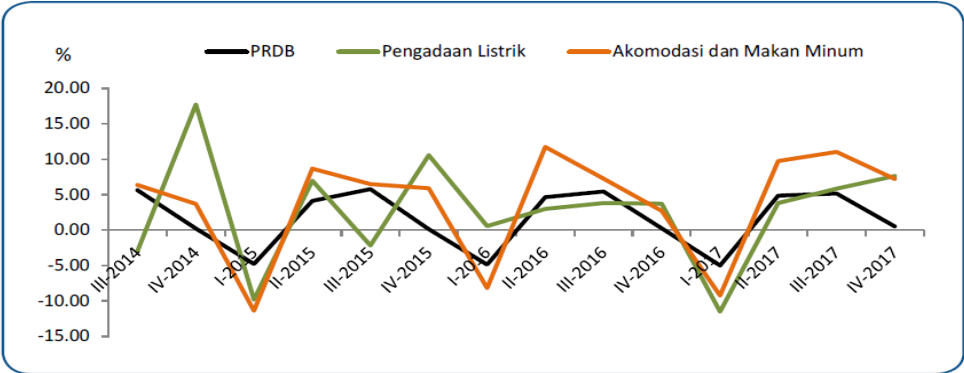
Pertumbuhan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh aktifitas konsumsi, sehingga fondasi ekonomi yang tercipta kurang kokoh dalam jangka menengah dan jangka panjang. Kenyataan tersebut berpengaruh juga pada kondisi kesejahteraan penduduk, akibatnya angka kemiskinan penduduk masih tinggi yaitu 21,85. Perekonomian Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 5,16 persen, dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5,18 persen.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2015–2017

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT		
	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.93	2.23,	4,88
Pertambangan dan Penggalian	6.42	5.66	2,07
Industri Pengolahan	5.23	4.98	7,36
Pengadaan Listrik dan Gas	10.19	14.61	0,70
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.07	0.38	1,43
Konstruksi	5.22	8.46	6,12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.09	6.77	4,45
Transportasi dan Pergudangan	5.49	6.73	7,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.17	14.46	13,59
Informasi dan Komunikasi	7.14	6.76	5,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.76	8.47	5,81
Real Estate	3.85	3.41	4,96
Jasa Perusahaan	4.61	2.83	1,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.09	5.63	2,96
Jasa Pendidikan	4.85	4.18	6,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.52	6.19	7,36
Jasa lainnya	3.72	3.55	6,99
PDRB	5.02	5.18	5,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

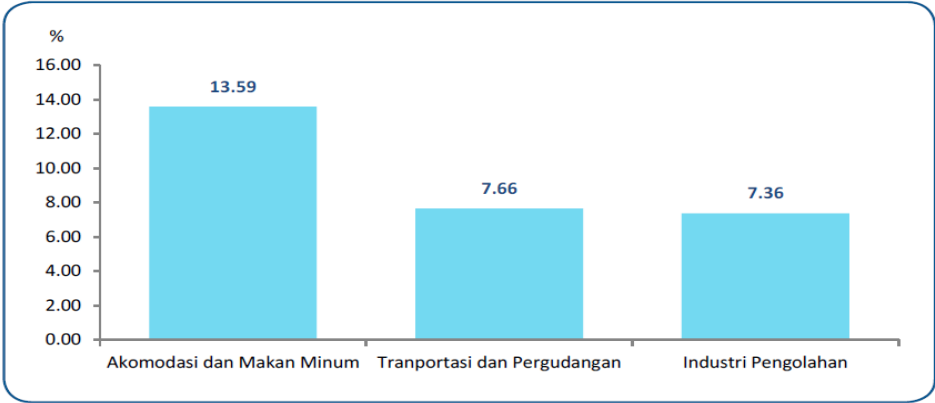
Grafik 2.2
 Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2017 (q-to-q)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

Ekonomi NTT tahun 2017 dibanding tahun 2016 (c-to-c) tumbuh 5,16 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,59 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,66 persen; serta Industri Pengolahan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,36 persen.

Grafik 2.3
 Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2017 (c-to-c)

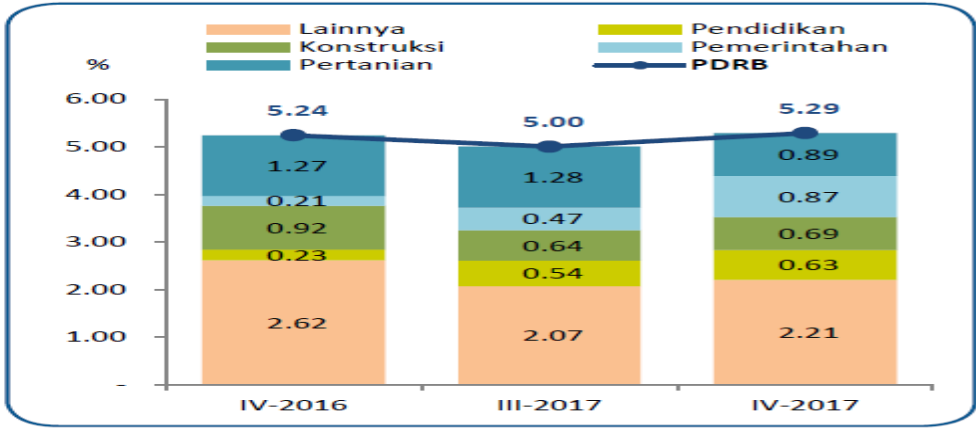


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Sedangkan struktur ekonomi NTT pada tahun 2017 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan sumbangan sebesar 28,72 persen. kemudian diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha konstruksi; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha informasi dan komunikasi; dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 5 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV-2017 (y-on-y), Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,89 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Perdagangan Besar-Eceran sebesar 0,87 persen; dan Konstruksi sebesar 0,69 persen.

Grafik 2.4
 Sumber Pertumbuhan Beberapa
 Lapangan Usaha Triwulan IV-2017(y-on-y)



Tabel 2.8
 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha
 Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2015-2017(persen)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,88	28,89	28,72
Pertambangan dan Penggalian	1,41	1,39	1,30
Industri Pengolahan	1,23	1,23	1,26
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	10,38	10,81	10,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,86	11,07	11,05
Transportasi dan Pergudangan	5,23	5,38	5,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,64	0,70	0,74
Informasi dan Komunikasi	7,19	6,98	6,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,93	4,00	4,09
Real Estat	2,70	2,62	2,58
Jasa Perusahaan	0,31	0,31	0,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,30	12,67	12,83
Jasa Pendidikan	9,59	9,63	9,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,08	2,10	2,13
Jasa lainnya	2,15	2,10	2,13
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT

2.2.1.2. Laju Inflasi

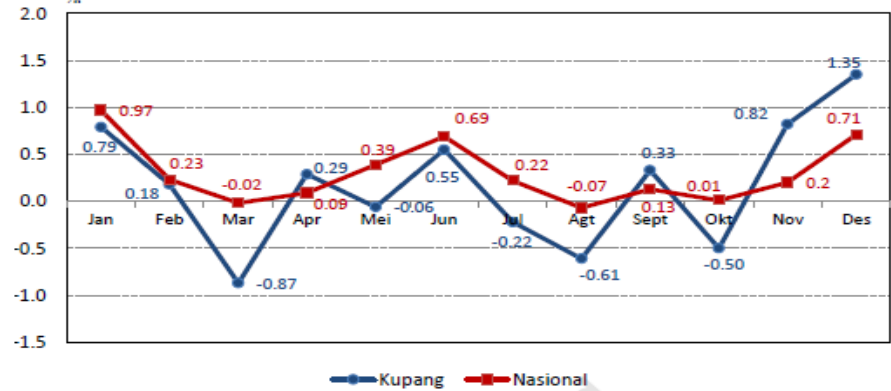
Pada tahun 2017 ini, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 2,05 persen,lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 2,31 persen. Inflasi ini dipicu oleh naiknya harga semua kelompok komoditas pengeluaran kecuali kelompok komoditas bahan makanan. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi di tahun 2017 terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 5,05 persen, diikuti kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 3,98 persen, dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang naik sebesar 3,49 persen. Pada Tahun 2017 inflasi Kota Kupang sebesar 2,05 persen lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,61 persen.

Tabel 2.9
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Kelompok Pengeluaran (=100), 2016–2017 (Persentase)

Wilayah Inflasi	IHK Desember 2016	IHK Desember 2017	2016	2017
			Tahunan	Tahunan
Bahan Makanan	128.73	125.46	3,88	-2,54
Makan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	144.23	148.7	9,10	3,10
Perumahan/Housing	124.17	129.11	0,10	3,98
Sandang/Clothing	126.87	131.24	3,86	3,44
Kesehatan/Healthy	115.85	117.29	2,63	1,24
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	124.6	130.89	3,04	5,05
Transportasi & Komunikasi	132.6	137.23	-2,40	3,49
Kupang	129.07	131.71	2.31	2.05
Nusa Tenggara Timur	128.12	130.68	2.48	2,00
Nasional	126.71	131.28	3.02	3.61

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017

Gambar 2.5
Laju Inflasi/Deflasi Kota Kupang dan Nasional Tahun 2017 (%)



Dari gambar diatas, terlihat bahwa selama tahun 2017, kecenderungan inflasi yang terjadi di Kota Kupang masih mengikuti pola inflasi Nasional, artinya bahwa inflasi yang terjadi di Kota Kupang tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Kota Kupang sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi secara Nasional. Diawal tahun 2017 pada bulan Januari, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,79 persen yang disebabkan karena naiknya harga-harga pada kelompok bahan makanan akibat perubahan cuaca. Puncak inflasi terjadi pada bulan Desember 2017 yang mencapai 1,35 persen yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas bahan makanan dan transportasi yang bertepatan dengan hari raya Natal dan Tahun Baru.

Selama tahun 2017, Kota Kupang mengalami lima kali deflasi, yakni pada bulan Maret, Mei, Juli, Agustus dan Oktober. Deflasi pada bulan Maret sebesar 0,87 persen disebabkan karena menurunnya harga komoditas bahan makanan seiring dengan membaiknya kondisi cuaca dari bulan sebelumnya. Deflasi pada bulan Mei sebesar 0,06 persen disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas bahan makanan. Deflasi pada bulan Juli sebesar 0,22 persen, dan Agustus sebesar 0,61 persen disamping disebabkan karena menurunnya harga komoditas bahan makanan juga disebabkan karena menurunnya harga tiket pesawat setelah mengalami kenaikan sehubungan dengan musim liburan sekolah serta hari raya Idul Fitri pada bulan sebelumnya. Deflasi pada bulan

Oktober sebesar 0,50 persen disebabkan adanya penurunan harga komoditas bahan makanan.

Tabel 2.10
Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap
Inflasi Kota Kupang Tahun 2017 (2012=100)

No.	Kelompok Barang dan Jasa	IHK Desember 2016	IHK Desember 2017	Inflasi/ Deflasi (%)	Andil (%)
1	2	3	4	5	6
	UMUM / T O T A L	129.07	131.71	2.05	
1	Bahan Makanan	128.73	125.46	-2.54	-0.63
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	144.23	148.70	3.10	0.44
3	Perumahan,Air,Listrik,Gas & Bahan Bakar	124.17	129.11	3.98	0.98
4	Sandang	126.87	131.24	3.44	0.18
5	Kesehatan	115.85	117.29	1.24	0.08
6	Pendidikan, Rekreasi Dan Olah Raga	124.60	130.89	5.05	0.35
7	Transport, Komunikasi Dan Jasa Keuangan	132.60	137.23	3.49	0.60

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Tabel 2.11
Inflasi dan Andil Inflasi Nusa Tenggara Timur Januari 2018

Kelompok Pengeluaran	Januari 2018	
	Perubahan (%)	andil (%)
(1)	(2)	(3)
Umum	0.94	0.94
Bahan Makanan	5.26	1.26
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0.81	0.12
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0.09	0.03
Sandang	-0.25	-0.01
Kesehatan	0.21	0.01
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	0.20	0.02
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-2.65	-0.48

Dilihat dari andil yang diberikan oleh masing-masing kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar memberikan andil tertinggi terhadap inflasi Kota Kupang di tahun 2017 ini yakni sebesar 0,98 persen, diikuti kelompok pengeluaran. Sedangkan kelompok bahan makanan memberikan andil negatif sebesar 0,63 persen. Bulan Januari 2018 adalah kelompok bahan makanan dengan andil sebesar 1,26 persen, disusul kelompok makanan jadi sebesar 0,12 persen. Kelompok transpor dan sandang memberikan andil negatif bagi inflasi bulan Januari 2018 sebesar 0,48 dan 0,01 persen.

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Berdasarkan angka-angka PDRB perkapita di setiap Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur seperti yang disajikan pada Tabel 2.12 tampak bahwa tingkat kemakmuran di wilayah ini masih cukup bervariasi. Pada kurun 2014-2016 ada wilayah yang memiliki PDRB perkapita lebih dari 16 juta rupiah tetapi masih ada kabupaten lain yang PDRB per kapitanya berada di bawah 10 juta rupiah.

PDRB perkapita di Kota Kupang merupakan yang tertinggi pada tahun 2016, yaitu sekitar 46,96 juta rupiah. Angka PDRB perkapita yang dicapai Kota Kupang ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun yang sama dengan pencapaian sebesar 16,18 juta rupiah. Sementara itu PDRB perkapita di Kabupaten Manggarai Timur merupakan yang paling rendah pada tahun 2016, yaitu sebesar 9,01 juta rupiah. Kabupaten lain yang PDRB per kapitanya dibawah 10 juta rupiah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya (9,19 juta rupiah).

Tabel 2.12
PDRB Perkapita Nusa Tenggara Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2016
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	2014	2015*)	2016**)	Peringkat 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sumba Barat	12.244.080	13.473.851	14.761.399	9
2. Sumba Timur	16.657.799	18.307.246	19.953.499	2
3. Kupang	14.511.301	15.685.345	16.761.607	6
4. Timor Tengah Selatan	10.914.692	12.097.515	13.416.064	10
5. Timor Tengah Utara	11.163.349	12.154.867	13.380.782	11
6. Belu	13.633.555	14.917.512	16.433.093	7
7. Alor	10.036.064	11.013.487	12.025.936	16
8. Lembata	9.309.593	10.103.287	10.930.709	19
9. Flores Timur	14.258.471	15.431.954	16.864.702	5
10. Sikka	10.580.246	11.501.203	12.535.985	14
11. Ende	15.324.187	16.781.538	18.398.962	3
12. Ngada	14.970.620	16.366.648	18.012.681	4
13. Manggarai	9.481.168	10.327.448	11.308.070	18
14. Rote Ndao	13.302.039	14.357.714	15.467.284	8
15. Manggarai Barat	8.941.052	9.605.812	10.292.185	20
16. Sumba Tengah	11.133.712	12.098.714	13.173.936	12
17. Sumba Barat Daya	7.737.759	8.436.562	9.190.347	21
18. Nagekeo	10.622.041	11.645.195	12.552.391	13
19. Manggarai Timur	7.593.960	8.272.677	9.012.350	22
20. Sabu Raijua	10.420.267	11.267.112	12.273.877	15
21. Malaka	10.085.649	10.929.100	11.871.271	17
22. Kota Kupang	38.979.345	42.790.316	46.962.778	1
NTT	13.599.729	14.880.849	16.176.114	

*) Angka Sementara **) Angka sangat sementara

Sumber: BPS NTT, PDRB NTT Menurut Kabupaten dan Kota 2016

PDRB perkapita merupakan besaran yang menunjukkan rata-rata nilai PDRB untuk setiap penduduk suatu wilayah. Ukuran ini secara kasar menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah. Dalam kurun 2014-2016 PDRB perkapita Nusa Tenggara Timur telah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan (Tabel 2.12). Pada tahun 2014 PDRB perkapita Nusa Tenggara Timur sekitar 13,60 juta rupiah dan telah menjadi sekitar 16,18 juta rupiah pada tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan PDB perkapita secara nasional, tampak bahwa PDRB perkapita Nusa Tenggara Timur masih jauh lebih rendah. Pada saat PDRB perkapita NTT mencapai sekitar 13,60 juta rupiah di tahun 2014, PDB perkapita Indonesia telah mencapai 41,92 juta rupiah. Begitu juga pada saat PDRB perkapita NTT mencapai 16,18 juta rupiah tahun 2016, PDB perkapita Indonesia telah menjadi 47,96 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara kasar tingkat kemakmuran penduduk Nusa Tenggara Timur telah mengalami peningkatan, namun demikian masih harus puas berada jauh di bawah rata-rata tingkat kemakmuran penduduk Indonesia secara keseluruhan.

Tabel 2.13
PDRB Perkapita Nusa Tenggara Timur dan
PDB Perkapita Indonesia, 2014-2016 (Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita NTT	PDB Perkapita Indonesia
(1)	(2)	(3)
2014	13.599.728,9	41.915.863,4
2015*)	14.880.849,0	45.140.688,0
2016**)	16.176.114,3	47.957.363,8

*) Angka Sementara **) Angka sangat sementara :Sumber: BPS NTT, PDRB Menurut Lapangan Usaha

2.2.1.4. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan September 2017 sebesar 1.134,74 ribu orang (21,38 persen) menurun sekitar 16.050 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2017 yang berjumlah 1.150,79 ribu orang (21,85 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2017 – September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan menurun sebanyak 17.690 orang (dari 1.033,39 ribu orang menjadi 1.015,70 ribu orang) dan untuk perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 1.640 orang (dari 117,40 ribu orang menjadi 119.04 ribu orang).

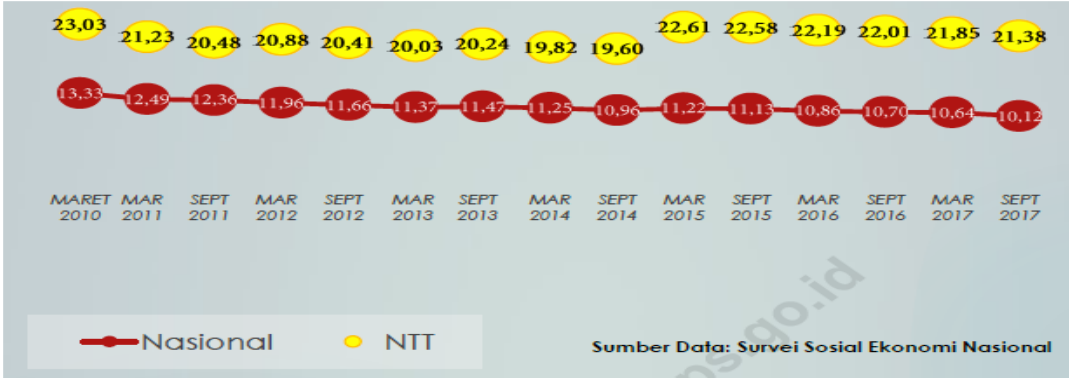
Tabel . 2.14
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, September 2016 – Maret 2017

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2016	112,48	10,17
Maret 2017	117,40	10,32
September 2017	119,04	10,11
Perdesaan		
September 2016	1.037,60	25,19
Maret 2017	1.033,39	25,03
September 2017	1.015,70	24,59
Kota+Desa		
September 2016	1.150,08	22,01
Maret 2017	1.150,79	21,85
September 2017	1.134,74	21,38

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2016, Maret 2017 dan September 2017

Perkembangan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional, Dalam kurun waktu 2010-2017, tingkat kemiskinan baik secara nasional maupun dalam level regional Provinsi NTT cenderung menurun, Hal ini menunjukkan upaya-upaya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan sedikitnya memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dalam kurun waktu tersebut, Penurunan angka kemiskinan yang relatif melambat ini pun tentunya tidak terlepas dari pengaruh beberapa indikator-indikator makro lainnya.

Gambar 2.6
Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT, 2010 – 2017



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sebagai salah satu indikator makro dalam pembangunan, penurunan kemiskinan NTT dalam 3 tahun terakhir sejalan dengan pertumbuhan ekonomi NTT, Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase

penduduk miskin di NTT terus menurun dari 22,61 persen hingga menjadi 21,38 persen, Ekonomi NTT bertumbuh diharapkan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat, Tingkat kemiskinan NTT September 2017 mengalami penurunan sebesar 0,63 jika dibandingkan kondisi September tahun 2016.

Tabel 2.15
Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah,
September 2016 – September 2017

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2016	277.266	112.395	389.661
Maret 2017	290.711	116.262	406.973
September 2017	292.048	117.333	409.382
Perubahan Mart'17-Sept'17 (%)	0,46	0,92	0,59
Perdesaan			
September 2016	254.257	56.039	310.296
Maret 2017	268.004	58.316	326.320
September 2017	268.253	60.883	329.136
Perubahan Mart'17-Sept'17 (%)	0,09	4,40	0,86
Kota+Desa			
September 2016	258.985	68.018	327.003
Maret 2017	272.537	70.859	343.396
September 2017	273.325	73.412	346.737
Perubahan Mart'17-Sept'17 (%)	0,29	3,60	0,97

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2016- September 2017

Periode Maret 2017– September 2017, Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 0,97 persen, yaitu dari Rp 343.396,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 346.737,- per kapita per bulan pada September 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2017 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 79.37 persen, dan pada September 2017 sebesar 78.83 persen.

Gambar 2.7
Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan dan
Indeks Keparahan Kemiskinan NTT Tahun 2015-2017



Sumber Data: BPS

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan” Pada periode Maret 2017 - September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) terlihat mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 4,340 pada Maret 2017 menjadi 4,158 pada September 2017. Sementara Indeks Kearifan Kemiskinan menunjukan sedikit kenaikan yaitu dari 1,166 menjadi 1,174 pada periode yang sama (gambar 7). Jika diamati secara total pada periode September 2016 - September 2017, kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Indeks Kearifan NTT tahun dalam 3 tahun terakhir berfluktuasi, Sempat mengalami kenaikan akan tetapi kembali turun pada tahun 2016, Ini menunjukkan bahwa ketimpangan atau gap pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menyempit pada periode tersebut, Indeks Kearifan kemiskinan NTT pada periode September 2017 sebesar 1,174, Meningkat 0,686 poin jika dibandingka Maret 2017, Indeks Kearifan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantarapenduduk miskin, Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpanganpengeluaran diantara penduduk miskin, Selain itu, dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2017

Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp. 000)		IPM		
									Capaian		Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016-2017
Sumba Barat	66,15	66,20	12,64	12,87	6,45	6,51	6.914	6.997	61,85	62,30	0,73
Sumba Timur	64,00	64,12	12,30	12,79	6,48	6,73	9.004	9.093	63,22	64,19	1,53
Kupang	63,33	63,49	13,48	13,49	6,93	7,10	7.217	7.301	62,39	62,79	0,64
Timor Tengah Selatan	65,60	65,65	12,53	12,54	6,27	6,39	6.36	6.676	60,37	61,08	1,18
Timor Tengah Utara	66,14	66,19	13,27	13,28	7,13	7,14	5.93	6.164	61,54	62,03	0,80
Belu	63,21	63,42	12,02	12,24	7,06	7,07	7.199	7.251	61,04	61,44	0,66
Alor	60,35	60,47	11,64	12,08	7,76	7,77	6.468	6.553	58,99	59,61	1,05

Lembata	66,02	66,19	12,23	12,25	7,52	7,58	7.01	7.084	62,81	63,09	0,45
Flores Timur	64,36	64,45	12,38	12,88	6,99	7,12	7.237	7.442	61,90	62,89	1,60
Sikka	66,20	66,30	11,91	12,34	6,55	6,56	7.74	7.855	62,42	63,08	1,06
Ende	64,42	64,48	13,74	13,75	7,38	7,63	8.801	8.841	65,74	66,11	0,56
Ngada	67,34	67,36	12,66	12,67	7,61	7,85	8.195	8.649	65,61	66,47	1,31
Manggarai	65,66	65,84	11,92	12,32	6,97	6,98	7.008	7.056	61,67	62,24	0,92
Rote Ndao	63,13	63,41	12,51	12,91	6,67	6,98	6.11	6.32	59,28	60,51	2,07
Manggarai Barat	66,19	66,19	10,67	11,09	6,82	7,14	7.149	7.269	60,63	61,65	1,68
Sumba Tengah	67,73	67,74	11,93	12,31	5,21	5,51	5.907	5.946	58,52	59,39	1,49
Sumba Barat Daya	67,71	67,76	13,02	13,03	6,30	6,31	6.079	6.134	61,31	61,46	0,24
Nageko	66,31	66,36	11,98	12,45	7,34	7,52	8.054	8.119	63,93	64,74	1,27
Manggarai Timur	67,39	67,40	10,58	11,04	6,44	6,45	5.396	5.643	57,50	58,51	1,76
Sabu Raijua	58,69	59,00	13,00	13,11	5,68	6,02	4.923	5.12	54,16	55,22	1,96
Malaka	64,27	64,29	12,28	12,75	6,31	6,32	5.658	5.726	58,29	58,90	1,05
Kota Kupang	68,46	68,58	15,76	15,77	11,44	11,45	12.986	13.028	78,14	78,25	0,14
Nusa Tenggara Timur	66,04	66,07	12,97	13,07	7,02	7,15	7.122	7.35	63,13	63,73	0,95

Sumber : BPS (Statistik Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2016

Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT Menurut Komponen, 2015-2017

Komponen	Satuan	2015	2016	2017
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	65,96	66,04	66,07
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,84	12,97	13,07
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,93	7,02	7,15
Pengeluaran per Kapita	Rp. 000	7.003	7.122	7.35
IPM	-	62,67	63,13	63,73
Pertumbuhan IPM	%	0,65	0,73	0,95

2.2.2.2. Angka Melek Huruf

Data Susenas 2017 menunjukkan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas Nusa Tenggara Timur sebesar 91,68 persen atau masih terdapat 8,32 persen penduduk Nusa Tenggara Timur yang buta huruf. Perbandingan gender menunjukkan bahwa penduduk perempuan Nusa Tenggara Timur yang buta huruf lebih banyak (9,89 persen) dibandingkan dengan penduduk laki-laki (6,67 persen). Sementara penduduk perdesaan yang buta huruf hampir empat kali lebih besar dibandingkan penduduk yang tinggal di perkotaan.

Tabel 2.18
Angka Melek Huruf Menurut Daerah
Tempat Tinggal dan Kelompok Usia, Tahun 2017

Tempat Tinggal	Kelompok Usia		
	15 Tahun ke atas	15-24 Tahun	15-59 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Nusa Tenggara Timur	91,68	98,49	94,52
Perkotaan	97,46	99,57	98,83
Perdesaan	89,97	98,13	93,21
Laki-Laki	93,33	98,43	95,18
Perempuan	90,11	98,56	93,88

Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

Tabel 2.19
PERKEMBANGAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA MELEK
HURUF PROV. NTT

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah	Angka Melek Huruf
2010	6,50	88,59
2011	6,60	88,34
2012	6,71	89,23
2013	6,76	90,34
2014	6,85	86,52
2015	6,93	92,73
2016	7,54	91,52
2017	7,62	91,68

Sumber Data : BRS IPM, BPS 2015 & NTT Dalam Angka Th. 2010-2016

Pada Tabel 2.19 rata-rata lama sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur umur 15 tahun ke atas pada tahun 2017 adalah 7,62 tahun atau secara rata-rata penduduk Nusa Tenggara Timur hanya mencapai pendidikan pada kelas 7 atau tahun pertama di SMP/ sederajat. Rata-rata lama sekolah merupakan cerminan dari partisipasi sekolah penduduk atas setiap jenjang pendidikan. Pencapaian pendidikan pada jenjang dasar dan menengah pertama di Nusa Tenggara Timur memang telah menunjukkan adanya pemerataan antara penduduk laki-laki dan perempuan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Akan tetapi pada jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi agaknya membutuhkan upaya bersama yang lebih berdampak bagi pencapaian pendidikan yang lebih merata.

Selain pada kelompok umur 15 tahun ke atas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga mensyaratkan kelompok penduduk usia 15-24 tahun dan usia penduduk dewasa (15-59 tahun) sebagai sasaran ketercapaian target 4. AMH penduduk 15-24 tahun di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 sebesar 91,68 persen atau dapat dikatakan bahwa 1-2 dari 100 penduduk usia 15-24 di Nusa Tenggara Timur tidak dapat membaca dan menulis. Sementara pada kelompok penduduk dewasa, sedikitnya 5 dari 100 penduduk usia 15-59 tahun tidak dapat membaca dan menulis.

Tabel 2.20
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017

Kabupaten/ Kota (1)	2015 (2)	Tahun 2016 (3)	2017 (4)
Sumba Barat	80,27	84,09	82,33
Sumba Timur	92,53	90,54	90,65
Kupang	91,35	90,70	91,84
Timor Tengah Selatan	85,82	85,04	86,79
Timor Tengah Utara	89,03	90,97	90,96
Belu	87,33	87,45	88,53
Alor	94,99	95,44	95,57
Lembata	93,71	94,98	96,86
Flores Timur	91,71	94,02	93,71
Sikka	92,93	91,71	90,11
Ende	95,59	93,97	96,86
Ngada	97,16	98,51	98,19
Manggarai	94,07	94,14	94,38
Rote Ndao	91,76	90,91	90,29
Manggarai Barat	95,78	96,01	95,28
Sumba Tengah	88,89	88,91	81,92
Sumba Barat Daya	81,06	79,12	78,17
Nagekeo	94,65	94,30	95,03
Manggarai Timur	96,91	95,67	95,34
Sabu Raijua	86,79	86,64	88,80
Malaka	80,46	85,18	85,11
Kota Kupang	98,71	99,49	98,98
Nusa Tenggara Timur	91,45	91,52	91,68

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas 2015-2017

Hingga tahun 2017, masih sekitar 8,32 persen penduduk Nusa Tenggara Timur yang berusia 15 tahun tidak dapat membaca dan menulis. Angka ini memang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar 8,55 persen. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, maka persentase buta huruf pada penduduk perempuan di Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017

Kabupaten/ Kota (1)	2015 (2)	Tahun 2016 (3)	2017 (4)
Sumba Barat	19,73	15,91	17,67
Sumba Timur	7,47	9,46	9,35
Kupang	8,65	9,30	8,16
Timor Tengah Selatan	14,18	14,96	13,21
Timor Tengah Utara	10,97	9,03	9,04
Belu	12,67	12,55	11,47
Alor	5,01	4,56	4,43
Lembata	6,29	5,02	3,14
Flores Timur	8,29	5,98	6,29
Sikka	7,07	8,29	9,89
Ende	4,41	6,03	3,14
Ngada	2,84	1,49	1,81
Manggarai	5,93	5,86	5,62
Rote Ndao	8,24	9,09	9,71
Manggarai Barat	4,22	3,99	4,72
Sumba Tengah	11,11	11,09	18,08
Sumba Barat Daya	18,94	20,88	21,83
Nagekeo	5,35	5,70	4,97
Manggarai Timur	3,09	4,33	4,66
Sabu Raijua	13,21	13,36	11,20
Malaka	19,54	14,82	14,89
Kota Kupang	1,29	0,51	1,02
Nusa Tenggara Timur	8,55	8,48	8,32

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas 2015-2017

2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK pada jenjang pendidik SD hingga SMA/SMK tahun 2015-2017 sebagaimana tabel 2.22.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2017

Jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	2015	2016	2017
SD/MI	116.46	114.12	114.05
SMP/MTs	88.96	89.56	91.35
SMA/SMK/MA	75.54	79.34	78.83

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) hasil olahan PDE Bappeda

Sesuai tabel 2.22, untuk tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 pencapaiannya yaitu APK tingkat SD/MI/SDLB 114.05% atau turun 0.07%, APK tingkat SMP/MTs/SMPLB 91.35% naik 1,79%, sedangkan APK tingkat SMA/MA/SMK sebesar 78,83% turun sebesar 0.51%.

2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menyatakan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Peningkatan yang signifikan terjadi pada angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA dan SMP yang melampaui target > 20% lebih. Sedangkan peningkatan APM tingkat SD memang tidak terlalu tinggi karena capaian persentase sudah tinggi yaitu di atas 90%.Tingkat capaian APM semua jenjang pendidikan sebagaimana Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2011-2017

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (%)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI	92,13	92,40	93,60	94,56	94,95	95,24	95.40
SMP/MTs	56,74	55,93	59,24	65,86	66,32	66,56	67.16
SMA/SMK/MA	40,84	38,62	47,31	52,15	52,51	52,87	53.32

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) hasil olahan PDE Bappeda

Sesuai dengan tabel 2.23 Kondisi capaian APM tahun 2017 untuk tingkat SD/MI/SDLB 95,40% naik sebesar 0,16 %, APM SMP/MTs/SMPLB67. 16% naik0,6%, dan APM tingkat SMA/MA/SMK 53.32% naik 0,45%.

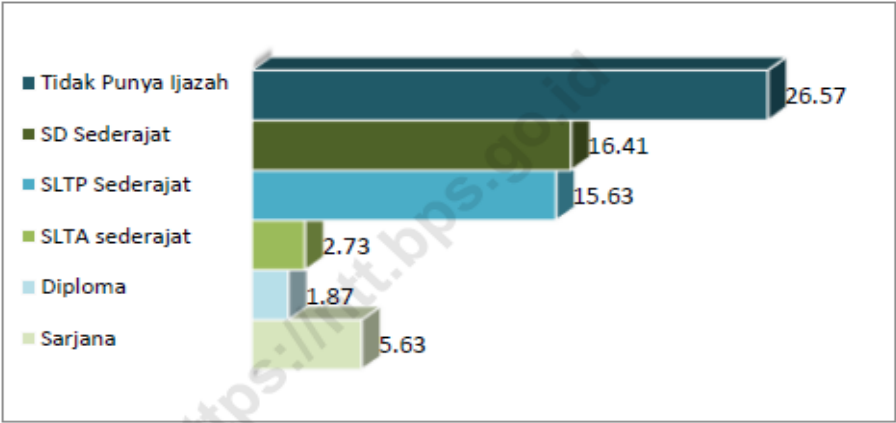
2.2.2.5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Permasalahan pokok yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah tingginya persentase penduduk Nusa Tenggara Timur usia 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah. Data Susenas menunjukkan bahwa sekitar 26-27 dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah, karena tidak pernah mengenyam pendidikan atau karena tidak menyelesaikan pendidikan SD/ sederajat. Kelompok penduduk ini sudah dapat dipastikan tidak dapat terserap pada pasar tenaga kerja yang menuntut adanya capaian tingkat pendidikan tertentu. Pendidikan informal dan non formal perlu digalakkan dalam menjangkit 26 persen penduduk usia 15 tahun ke atas ini.

Poin lainnya adalah memastikan bahwa anak usia sekolah dasar dan menengah dapat menyelesaikan jenjang pendidikannya dengan tuntas. Gambar 2.8 memotret kondisi pencapaian pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur, yaitu tidak lebih dari 11 persen dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas menamatkan pendidikan tinggi.

Sejalan dengan itu, maka sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur merupakan lulusan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Pilihan rumah tangga atau anak sendiri untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi oleh karena berbagai sebab perlu mendapat perhatian bersama baik pemerintah, masyarakat dan keluarga bagikemajuan pencapaian pendidikan di Nusa Tenggara Timur.

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi NTT Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

2.2.2.6. Angka Kematian Bayi (AKB)

Data kematian pada suatu komunitas dapat diperoleh melalui survei karena sebagian besar kematian terjadi di rumah, sedangkan kematian di fasilitas kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan. Indikator ini terkait langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia berasal dari berbagai sumber, yaitu Sensus Penduduk, Riskesdas, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan Sensus Penduduk (SP).

Tabel 2.24
DATA JUMLAH LAHIR HIDUP, KEMATIAN IBU DAN KEMATIAN BAYI
DI PROVINSI NTT TAHUN 2007 – 2016

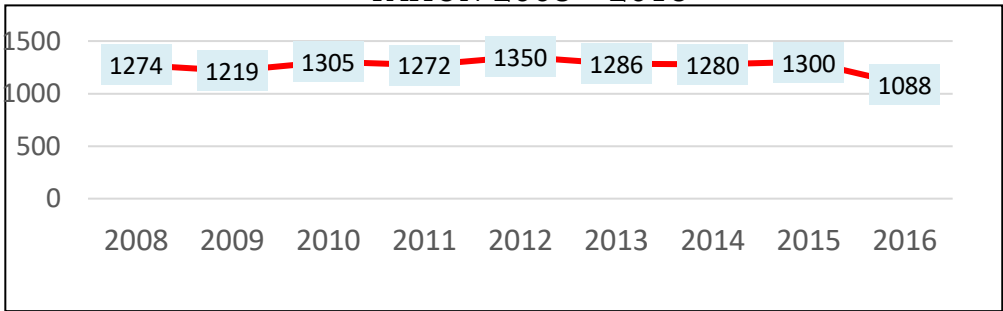
Tahun	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kematian Bayi
2007	94.114	251	1.159
2008	118.236	330	1.274
2009	87.928	272	1.219
2010	87.249	252	1.305
2011	93.531	208	1.272
2012	97.131	192	1.350
2013	93.338	176	1.286
2014	92.702	158	1.280
2015	92.567	176	1.300
2016	86.126	182	1.088

Sumber Data: Laporan F1 – F8 dan Laporan Indikator Antara Revolusi KIA NTT Kabupaten/ Kota Tahun 2008- 2016 melalui Bidang Kesmas Dinkes NTT

Berdasarkan hasil konversi jumlah kasus kematian pada bayi mengalami fluktuasi dari tahun 2007–2016. Pada tahun 2014 sebanyak 1.280 atau 12,8 per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 1.300 kematian atau 13per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2016 mengalami penurunan kembali dimana

kematian sebesar 1.088 atau 10,9 per 1000 kelahiran hidup. Berikut ini adalah gambaran Konversi Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2007 – 2016 di Provinsi NTT.

Grafik 2.9
JUMLAH KEMATIAN BAYI DI PROVINSI NTT
TAHUN 2008 – 2016

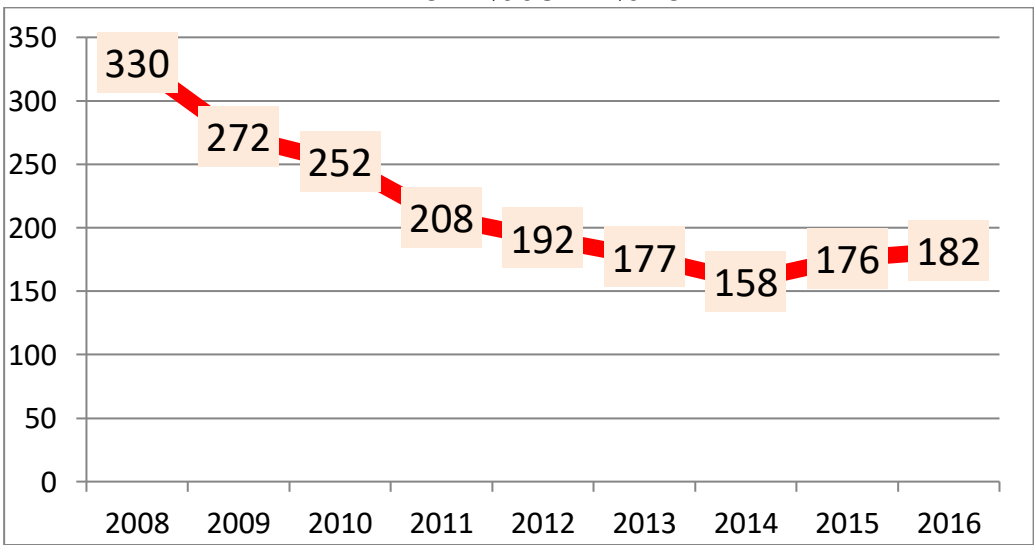


Sumber Data: Laporan F1 – F8 dan Laporan Indikator Antara Revolusi KIA NTT Kabupaten/Kota Tahun 2008- 2016 melalui Bidang Kesmas Dinkes NTT

2.2.2.7. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI Provinsi NTT pada periode 2008–2016 cenderung mengalami penurunan yang cukup bermakna. Pada tahun 2012 AKI NTT sebesar 192 per 100.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 176 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013. Namun berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2016, AKI meningkat menjadi 182 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan angka nasional 259 per 100.000 kelahiran hidup (SP,2010), maka AKI NTT sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, maka Provinsi NTT telah menginisiasi terobosan-terobosan dengan Revolusi KIA dengan motto semua ibu melahirkan di Fasiitas Kesehatan yang memadai. Yang mana capaian indikator antaranya adalah menurunnya peran dukun dalam menolong persalinan atau meningkatkan peran tenaga kesehatan terampil dalam menolong persalinan.

Grafik 2.10
JUMLAH KEMATIAN IBU DI PROVINSI NTT
TAHUN 2008 – 2016



Sumber Data: Laporan F1 – F8 dan Laporan Indikator Antara Revolusi KIA NTT Kabupaten/Kota Tahun 2008- 2016 melalui Bidang Kesmas Dinkes NTT

2.2.2.8. Balita Gizi Buruk

Balita dengan gizi buruk 2.367 pada tahun 2016. Kondisi status gizi balita tahun 2006-2016 dapat dilihat pada tabel 2.25 di bawah ini.

Tabel 2.25
KASUS GIZI BURUK DI PROVINSI NTT TAHUN 2006- 2016

NO	TAHUN	GIZI BURUK
1	2006	9.992
2	2007	11.917
3	2008	9.809
4	2009	6.856
5	2010	6.018
6	2011	4.561
7	2012	3.791
8	2013	3.704
9	2014	3.364
10	2015	3.357
11	2016	2.367

Sumber Data: Laporan F1 – F8 dan Laporan Indikator Antara Revolusi KIA NTT Kabupaten/Kota Tahun 2006- 2016 melalui Bidang Kesmas Dinkes NTT

Selain kasus kematian ibu dan bayi, status gizi Balita juga menjadi perhatian serius pemeritah Provinsi NTT karena data capaiannya bersifat fluktuatif.Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2007, Riskesdas 2013 serta data pemantauan Status Gizi menempatkan NTT sebagai Provinsi dengan masalah gizi Buruk tertinggi.

Tabel 2.26
Statu Gizi Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

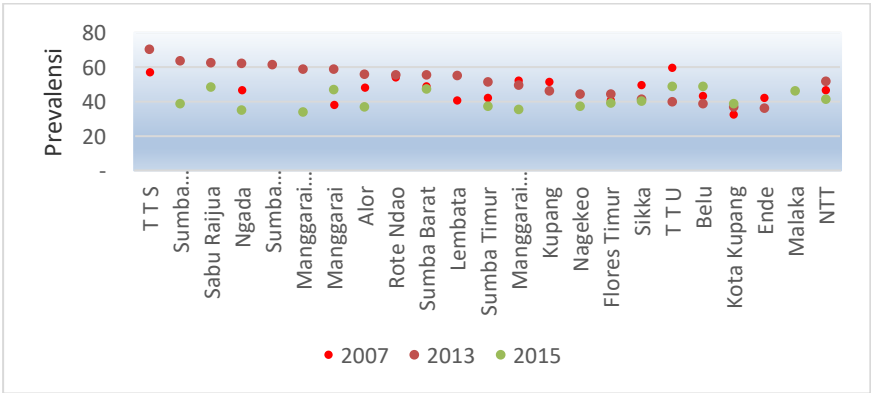
Kabupaten	Berat Badan di Bawah Standard Anak (<5 tahun) (<i>Underweight</i>)			Tinggi Badan di Bawah Standard Anak (<5 tahun) (<i>Stunting</i>)			Berat Badan Menurut Tinggi Badan Anak <5 tahun di Bawah Standar (<i>Wasting</i>)		
	Riskesdas 2007	Riskesdas 2013	PSG 2015	Riskesdas 2007	Riskesdas 2013	PSG 2015	Riskesdas 2007	Riskesdas 2013	PSG 2015
Sumba Barat	30.30	37.73	26.90	49.10	55.35	47.40	17.10	9.22	10.30
Sumba Timur	24.70	29.34	25.30	42.30	51.31	37.20	17.10	9.74	16.40
Kupang**)	37.90	33.39		51.40	46.22		21.10	35.33	
T T S**)	40.20	46.48		57.00	70.43		15.30	14.00	
T T U	37.50	29.90	27.60	59.60	39.94	48.60	16.00	15.49	12.80
Belu	33.90	29.73	27.50	43.40	38.57	48.60	20.30	28.18	11.30
Alor	31.60	29.61	21.80	48.30	55.66	36.90	16.40	8.12	15.00
Lembata**)	31.00	37.90		40.90	55.08		19.50	15.47	
Flores Timur	29.80	39.72	22.70	40.80	44.25	39.00	13.10	22.41	13.00
Sikka	36.70	29.75	25.00	49.60	41.26	40.10	19.80	15.42	13.80
Ende**)	33.60	23.24		42.20	35.99		20.80	11.76	
Ngada	26.60	26.29	22.30	46.80	62.14	35.10	13.40	6.41	14.40
Manggarai	37.30	27.34	23.00	38.30	58.78	47.00	33.30	13.72	9.40
Rote	40.80	41.09		54.20	55.38		15.70	13.92	

Kabupaten	Berat Badan di Bawah Standard Anak (<5 tahun) (<i>Underweight</i>)			Tinggi Badan di Bawah Standard Anak (<5 tahun) (<i>Stunting</i>)			Berat Badan Menurut Tinggi Badan Anak <5 tahun di Bawah Standar (<i>Wasting</i>)		
	Riskesda 2007	Riskesda 2013	PSG 2015	Riskesda 2007	Riskesda 2013	PSG 2015	Riskesda 2007	Riskesda 2013	PSG 2015
Ndao**)									
Manggarai Barat	30.10	33.82	19.70	52.20	49.31	35.50	18.50	17.36	17.00
SBD*)**)		33.82			61.22			18.70	
Sumba Tengah*)		34.06	23.20		63.61	38.70		10.86	12.90
Nagekeo*)		28.59	22.00		44.33	37.30		11.38	12.80
Manggarai Timur*)		27.40	17.10		58.92	34.00		14.16	12.60
Sabu Raijua*)		39.05	41.50		62.49	48.20		13.32	16.50
Malaka*)			32.30			46.00			18.30
Kota Kupang	14.30	27.31	30.10	32.50	36.77	38.80	17.00	14.92	12.10
Total NTT	33.60	33.07	25.60	46.70	51.73	41.20	20.00	15.44	13.60
Total Indonesia	18.40	19.60	18.80	36.80	37.20	29.00	13.60	12.10	11.90

*) Masih tergabung dengan kabupaten induk
**) PSG 2015 tidak dilakukan di kabupaten tersebut
Sumber: Riskesda 2017 dan 2013, PSG 2015, KEMENKES

Hasil Riskesda 2013, menunjukkan bahwa terdapat 14 kabupaten yang memiliki angka balita pendek (*stunting*) yang berada di atas 41.7 persen yang jika mengacu pada kategorisasi permasalahan *stunting* yang ditetapkan WHO, sejumlah 4 Kabupaten termasuk dalam kategori berat, yaitu prevalensinya sebesar 30-39 persen dan 17 Kabupaten termasuk dalam kategori serius, yaitu prevalensinya ≥ 40 persen (Riskesda, 2013). Perkembangan prevalensi Anak Balita Pendek Tahun 2007-2015 Berdasarkan Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.11
Prevalensi Anak Balita Pendek Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2007-2015



Sumber: Riskesda 2007, 2013 dan PSG 2015

Stunting menyebabkan kerusakan pada Sel Otak, Terganggunya perkembangan kognitif, Kemampuan Belajar Rendah (Kehilangan 5-11 IQ Points), dan saat dewasa Produktivitas rendah yang berdampak pada Kemampuan Bersaing dan Pendapatan.

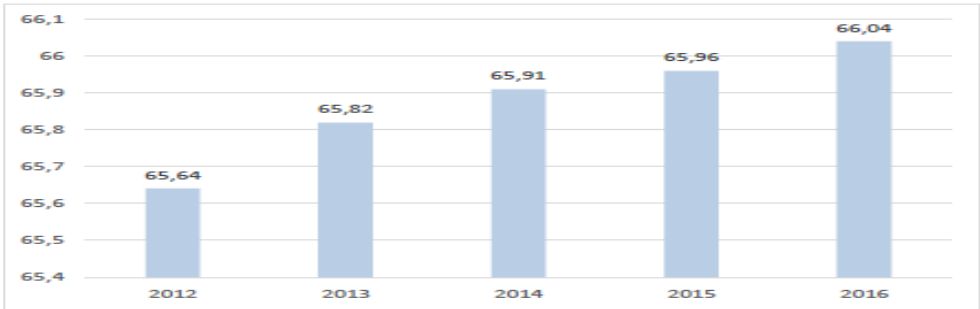
Selain pendek (*stunting*), kurus (*wasting*) juga merupakan situasi gizi yang harus mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat. Anak kurus

dapat menjadi sangat kurus (gizi buruk) jika tidak mendapatkan asupan makanan bergizi dan mengalami berbagai penyakit dan infeksi seperti diare, malaria, pneumonia dan HIV. Anak sangat kurus (gizi buruk) mengalami gangguan pada sistem kekebalan tubuh, meningkatkan lama dan keparah penyakit menular yang di deritanya dan juga resiko kematian. Anak sangat kurus memiliki resiko kematian 11,6 kali lebih tinggi dari pada anak dengan status gizi normal. Gizi buruk berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak dalam jangka panjang.

2.2.2.9. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2016, NTT telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,4 tahun atau tumbuh sebesar 0,61 persen. Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup saat lahir di NTT sebesar 66,04 tahun.

Gambar 2.12
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) NTT (tahun), 2012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2016

2.2.2.10. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Jumlah PUK mengacu pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan secara semesteran yaitu Februari dan Agustus. Kondisi tahun 2014-2017 diwakili oleh Agustus 2014-2017 karena dianggap lebih mendekati kondisi pertengahan tahun.

Tabel 2.27
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah di NTT, Agustus 2014-2017

PUK	Tahun								Δ%
	2014		2015		2016		2017		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Jenis Kelamin									
Laki-laki	1.592.960	48,84	1.628.065	48,86	1.662.622	48,87	1.697.137	48,88	2,13
Perempuan	1.668.379	51,16	1.704.335	51,14	1.739.453	51,13	1.774.719	51,12	2,08
L+P	3.261.339	100,00	3.332.400	100,00	3.402.075	100,00	3.471.856	100,00	2,11
Daerah									
Kota	667.059	20,45	754.201	22,63	787.953	23,16	821.888	23,67	7,28
Desa	2.594.280	79,55	2.578.199	77,37	2.614.122	76,84	2.649.968	76,33	0,71
K+D	3.261.339	100,00	3.332.400	100,00	3.402.075	100,00	3.471.856	100,00	2,11

Sumber: Sakernas, Agustus 2014-2017

Rata-rata pertumbuhan PUK selama 2014-2017 sebesar 2,11 persen. PUK tahun 2017 sebanyak 3,47 juta orang terdiri dari PUK perempuan 1,77 juta orang atau 51,12 persen sedangkan laki-laki sebanyak 1,70 juta atau 48,88 persen. Meskipun PUK perempuan lebih banyak dibanding laki-laki tetapi rata-rata pertumbuhan PUK perempuan lebih rendah yaitu 2,08 persen dibanding laki-laki yang sebesar 2,13 persen. Dirinci menurut daerah, sebagian besar PUK tinggal di perdesaan yaitu 2,65 juta orang atau 76,33 persen sedangkan di perkotaan 0,82 juta orang atau 23,67 persen. Namun demikian, pertumbuhan PUK di perkotaan lebih tinggi yaitu 7,28 persen sedangkan di perdesaan 0,71 persen.

a. Penduduk Usia Kerja (PUK) Menurut Jenis Kegiatan Utama

Kegiatan utama Penduduk Usia Kerja terbagi atas Angkatan Kerja (AK) yang aktif secara ekonomi baik bekerja maupun mencari pekerjaan; dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) yang tidak aktif secara ekonomi baik sedang sekolah atau sibuk dengan pekerjaan rumah tangga atau alasan lainnya.

Tabel 2.28
Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin di NTT, 2017

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	L+P	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkatan Kerja	1.357.673	1.040.936	2.398.609	69,09
Bukan Angkatan Kerja	339.464	733.783	1.073.247	30,91
Total PUK	1.697.137	1.774.719	3.471.856	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Menurut kegiatan utama yang dilakukan, terdapat sebanyak 2,40 juta orang atau 69,09 persen Angkatan Kerja (AK) dan 1,07 juta orang atau 30,91 persen Bukan Angkatan Kerja (BAK) atau dengan kata lain sebagian besar PUK adalah AK dengan besarnya AK atau penduduk yang aktif secara ekonomi 2 kali penduduk yang tidak aktif.

b. Angkatan Kerja

Angkatan Kerja tahun 2017 sebanyak 2,40 juta orang dengan pertumbuhan rata-rata Angkatan Kerja 2,19 persen pertahun. Angkatan Kerja laki-laki mempunyai proporsi keterlibatan di pasar kerja yang lebih besar dibanding perempuan. Angkatan Kerja laki-laki sebesar 1,36 juta orang atau 56,60 persen sedangkan perempuan 1,04 juta orang atau 43,40 persen. Namun pertumbuhan Angkatan Kerja laki-laki lebih rendah yaitu 2,14 persen dibanding perempuan 2,28 persen. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pertumbuhan Angkatan Kerja perempuan biasanya lebih rendah dari laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran makna tugas perempuan hanyalah mengurus rumah tangga.

Tabel 2.29
Angkatan Kerja (AK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah di NTT, 2014-2017

AK	Tahun								Δ%
	2014		2015		2016		2017		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Jenis Kelamin									
Laki-laki	1.274.336	56,70	1.311.858	56,85	1.324.755	56,29	1.357.673	56,60	2,14
Perempuan	973.102	43,30	995.879	43,15	1.028.893	43,71	1.040.936	43,40	2,28
L+P	2.247.438	100,00	2.307.737	100,00	2.353.648	100,00	2.398.609	100,00	2,19
Daerah									
Kota	388.987	17,31	440.178	19,07	506.468	21,52	478.616	19,95	7,57
Desa	1.858.451	82,69	1.867.559	80,93	1.847.180	78,48	1.919.993	80,05	1,11
K+D	2.247.438	100,00	2.307.737	100,00	2.353.648	100,00	2.398.609	100,00	2,19

Sumber: Sakernas, Agustus 2014-2017

c. Bukan Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja tahun 2017 sebesar 1,07 juta orang. Rata-rata pertumbuhan Bukan Angkatan Kerja 1,92 persen per tahun. Tidak seperti Angkatan Kerja laki-laki yang lebih banyak dari pada perempuan, BAK perempuan 2 kali lebih banyak dibanding laki-laki. Bukan Angkatan Kerja laki-laki 0,34 juta orang atau 31,63 persen dan perempuan 0,73 juta orang atau 68,73 persen. Di perkotaan Bukan Angkatan Kerja bertambah 8,17 persen per tahun, sedangkan di perdesaan berkurang 0,11 persen per tahun. Proporsi Bukan Angkatan Kerja yang tinggal di perdesaan lebih besar dibanding dengan di perkotaan. Untuk daerah perdesaan terdapat 0,73 juta orang atau 68,02 persen, sedangkan di perkotaan hanya 0.34 juta orang atau 31,98 persen atau Bukan Angkatan Kerja di perdesaan hampir 2 kali dibanding Bukan Angkatan Kerja di perkotaan.

Tabel 2.30
Bukan Angkatan Kerja (BAK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah di NTT, 2014-2017

BAK	Tahun								Δ%
	2014		2015		2016		2017		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Jenis Kelamin									
Laki-laki	318.624	31,43	316.207	30,86	337.867	32,23	339.464	31,63	2.19
Perempuan	695.277	68,57	708.456	69,14	710.560	67,77	733.783	68,37	1.82
L+P	1.013.901	100,00	1.024.663	100,00	1.048.427	100,00	1.073.247	100,00	1.92
Daerah									
Kota	278.072	27,43	314.023	30,65	281.485	26,85	343.272	31,98	8.17
Desa	735.829	72,57	710.640	69,35	766.942	73,15	729.975	68,02	-0.11
K+D	1.013.901	100,00	1.024.663	100,00	1.048.427	100,00	1.073.247	100,00	1.92

Sumber: Sakernas, Agustus 2014-2017

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja NTT tahun 2017 sebesar 69,09 persen, dengan kata lain dari 100 orang Penduduk Usia Kerja, sekitar 69 orang termasuk Angkatan Kerja atau dari 10 orang PUK terdapat 7 orang AK. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki tahun 2017 sebesar 80,00 persen sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan lebih rendah yaitu 58,65 persen. Secara umum, selama

tahun 2014-2017 masih terlihat kesenjangan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki dan perempuan dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki lebih tinggi 1,4 kali dibanding perempuan.

Tabel 2.31
Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di NTT, 2014-2017

TPAK	Tahun				Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	
Jenis Kelamin					
Laki-laki	80,00	80,58	79,68	80,00	80,07
Perempuan	58,33	58,43	59,15	58,65	58,64
L+P	68,91	69,25	69,18	69,09	69,11
Daerah					
Kota	58,31	58,36	64,28	58,23	59,80
Desa	71,64	72,44	70,66	72,45	71,80
K+D	68,91	69,25	69,18	69,09	69,11

Sumber: Sakernas, Agustus 2014-2017

e. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

TPT NTT tahun 2017 sebesar 3,27 persen yang berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 3 orang yang menganggur. Rata-rata TPT selama periode 2014-2017 sebesar 3,40 persen, dengan TPT di perkotaan lebih tinggi 4 kali dibanding di perdesaan.

Tabel 2.32
Indikator TPT di NTT, 2014-2017

TPT	Tahun				Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	
Jenis Kelamin					
Laki-laki	3,23	3,19	2,88	3,41	3,18
Perempuan	3,30	4,68	3,73	3,10	3,70
L+P	3,26	3,83	3,25	3,27	3,40
Daerah					
Kota	8,05	8,80	5,56	8,66	7,77
Desa	2,25	2,66	2,62	1,93	2,37
K+D	3,26	3,83	3,25	3,27	3,40

Sumber: Sakernas, Agustus 2014-2017

Penganggur di NTT tahun 2017 sebanyak 78,5 ribu orang, dengan penganggur terdidik berpendidikan SMA keatas sebesar 71,86 persen. Bila dipilah menurut jenis kelamin, penganggur berpendidikan SMA keatas lebih banyak didominasi perempuan, sedangkan berpendidikan SMP kebawah didominasi laki-laki. Bila kita pilah menurut daerah tempat tinggal, penganggur berpendidikan SMA keatas lebih banyak tinggal di perkotaan, dan berpendidikan SMP kebawah lebih banyak tinggal di perdesaan.

Tabel 2.33
Tingkat Pendidikan Penganggur Menurut Jenis Kelamin dan Daerahdi NTT, 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Daerah				Total	
	Laki-laki		Perempuan		Kota		Desa			
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<=SD	10.503	22,67	4.482	13,91	6.507	15,70	8.478	22,85	14.985	19,08
SMP	4.618	9,97	2.498	7,75	3.508	8,46	3.608	9,73	7.116	9,06
SMA Umum	15.739	33,98	8.774	27,23	12.259	29,57	12.254	33,03	24.513	31,21
SMA Kejuruan	5.919	12,78	4.692	14,56	6.430	15,51	4.181	11,27	10.611	13,51
Diploma I/II/III	2.164	4,67	2.082	6,46	1.800	4,34	2.446	6,59	4.246	5,41
Universitas	7.379	15,93	9.698	30,09	10.949	26,41	6.128	16,52	17.077	21,74
Total	46.322	100,00	32.226	100,00	41.453	100,00	37.095	100,00	78.548	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.4.1.1. Pendidikan

Untuk menjamin kesamaan mutu pendidikan, maka pemerintah berupaya konsisten mengoptimalkan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Perkembangan pembangunan pendidikan sesuai indikator utama sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah

Selanjutnya angka partisipasi sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun pada semua jenjang pendidikan. APS tahun 2017 yaitu SD/MI sebesar 98,27, SMP/MTS sebesar 94,76 selengkapnya sebagaimana Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (%), 2014-2017

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (%)			
	2014	2015	2016	2017
(7-12)	97,99	98,13	98,24	98.27
(13-15)	94,26	94,39	94,60	94.76
(16-18)	73,96	74,25	74,56	74.65

Sumber : Susenas 2017

Pentingnya peningkatan APS untuk mendukung pencapaian rata-rata lama sekolah lebih tinggi yang dicapai tahun 2017. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indukator kunci yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b. Rasio Guru/Murid

Pembangunan pendidikan dipengaruhi ketersediaan sekolah, guru dan murid. Sehubungan dengan itu, maka untuk mempercepat akses dan kualitas pendidikan dilaksanakan pemenuhan atas tiga aspek strategis pembangunan pendidikan tersebut. Tingkat pendidikan dasar didominasi oleh SD selanjutnya MI dan SDLB sebesar 15,41% pada tahun 2016.

Tabel 2.35
 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2016

Jenjang pendidikan	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Menurut Tingkat Pendidikan							
	Sekolah		Murid		Guru		Ratio Murid Guru	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
SD/MI	5 116	5 171	840.208	823 742	54 827	53 447	15.32	15.41
SMP/MTs	1 599	1 667	328 827	342 498	24 567	23 757	13.38	14.42
SMA/SMK/MA	748	792	223 436	253 361	17 509	18 452	12.76	13.73

Sumber : Susenas 2017

2.4.1.2. Kesehatan
 a. Sarana Kesehatan

Sampai dengan Tahun 2016 terdapat 45 Rumah Sakit di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis fasilitas di 21 Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2016

Kabupaten / Kota	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Polindes	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Polindes
	2015					2016				
Sumba Barat	2	0	9	108	22	3	-	9	219	-
Sumba Timur	3	0	22	153	96	3	-	22	560	72
Kupang	1	0	26	636	2	1	-	26	710	13
Timor Tengah Selatan	2	1	35	329	70	1	1	35	788	60
Timor Tengah Utara	2	0	26	489	0	2	-	26	508	139
Belu	4	0	17	261	45	4	-	17	419	41
Alor	2	0	24	136	38	2	-	24	433	40
Lembata	3	0	9	192	67	3	-	9	318	-
Flores Timur	2	0	20	403	0	-	-	20	555	80
Sikka	2	0	23	586	96	3	-	23	625	120
Ende	2	0	24	28	75	2	-	24	635	86
Ngada	1	0	14	168	13	1	-	14	344	42
Manggarai	2	0	21	206	20	2	-	21	575	20
Rote Ndao	1	0	12	31	7	1	-	12	374	-
Manggarai Barat	0	0	18	416	18	2	-	18	455	18
Sumba Tengah	1	0	8	34	29	1	-	8	186	-
Sumba Barat Daya	1	0	12	461	0-	1	-	12	465	57
Nagekeo	0	0	7	68	47	-	-	7	261	47
Manggarai Timur	0	0	22	443	11	-	-	23	559	20
Sabu Raijua	1	0	6	211	0	1	-	6	211	-
Malaka	1	0	17	533	49	1	-	17	520	50
Kota Kupang	12	1	11	62	5	10	2	11	313	39
Jumlah	45	2	383	5 954	710	44	3	384	10 033	944

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

b. Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan juga merupakan salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan. Pada tahun 2016 jumlah dokter sebanyak 760, perawat sebanyak 7.704 orang dan bidan sebanyak 95.273 orang, apoteker 776 orang, paramedis non perawat sebanyak 660 orang. Komposisi tenaga kesehatan tahun 2015-2016 sebagaimana Tabel 2.37 dan Tabel 2.38.

Tabel 2.37

Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Dokter Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan (Jiwa)			Jumlah Dokter Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan (Jiwa)		
	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
	2015			2016		
Puskesmas	14	251	100	5	270	99
Rumah Sakit	174	171	38	152	187	23
Institusi Diknakes	-	-	-	-	2	-
Sarana Kesehatan lain	-	-	-	-	-	-
Dinkes Kabupaten/Kota	-	-	-	-	22	-
Jumlah	188	422	138	157	481	122

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2.38

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)				Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)			
	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kebidanan	Tenaga Keperawatan	Tenaga Medis	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kebidanan	Tenaga Keperawatan	Tenaga Medis
	2015				2016			
Sumba Barat	9	49	20	11	6	55	276	26
Sumba Timur	40	165	229	-	49	251	508	47
Kupang	17	262	196	17	16	284	187	21
Timor Tengah Selatan	17	169	164	29	41	183	265	48
Timor Tengah Utara	57	259	241	35	59	297	307	48
Belu	31	184	307	-	28	213	458	49
Alor	38	285	364	11	56	358	455	11
Lembata	20	267	221	9	54	335	315	29
Flores Timur	37	306	76	31	49	212	426	28
Sikka	25	305	336	-	28	215	319	11
Ende	35	150	244	40	30	182	383	18
Ngada	21	167	176	17	39	120	316	14
Manggarai	29	439	497	37	34	556	703	34
Rote Ndao	33	81	123	-	-	-	-	-
Manggarai Barat	39	302	570	22	36	232	409	22
Sumba Tengah	8	67	154	7	13	84	167	7
Sumba Barat Daya	24	127	328	25	32	146	463	17
Nagekeo	14	167	275	18	-	159	277	3

Manggarai Timur	27	290	727	24	33	450	791	21
Sabu Raijua	9	34	12	-	13	111	135	6
Malaka	15	83	131	-	46	298	293	2
Kota Kupang	26	172	172	48	114	532	251	198
NTT	571	4 330	5 563	381	776	5 273	7 704	660

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

c. Kesehatan Masyarakat

Menurut data Susenas 2017, persentase penduduk Nusa Tenggara Timur yang mengalami mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2017 mencapai 34,86 persen dari total penduduk Nusa Tenggara Timur, meningkat 3,05 persen poin dibandingkan tahun 2016. Jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal, penduduk Nusa Tenggara Timur di daerah perkotaan yang mengalami keluhan kesehatan cenderung meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan.

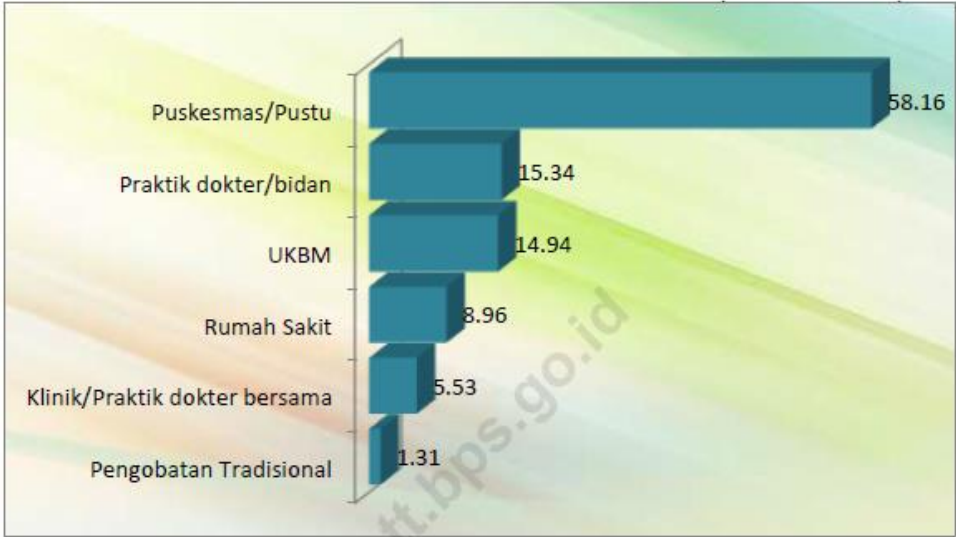
Gambar 2.13
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Sebulan yang Laludi Nusa Tenggara Timur, 2016-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017)

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 58,16 persen penduduk Nusa Tenggara Timur yang sakit memilih puskesmas sebagai tempat berobat jalan. Selain puskesmas, praktek dokter/bidan juga menjadi pilihan sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur (15,34 persen) untuk berobat jalan, karena dianggap lebih praktis dan dapat menghemat waktu karena dapat dikunjungi pada sore/malam hari ataupun waktu libur, diluar jam kerja padaumumnya.

Gambar 2.14
Persentase Penduduk Nusa Tenggara Timur
Menurut Tempat Berobat Jalan, 2017

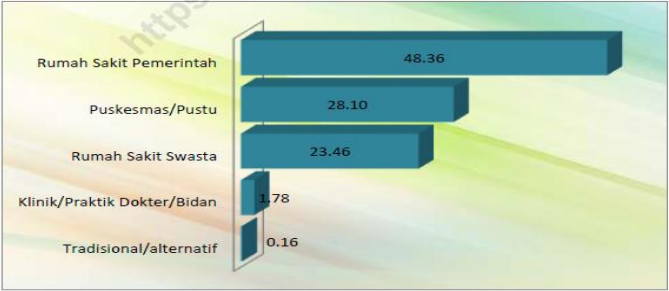


Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017)

Gambar 2.14 menunjukkan persentase penduduk Nusa Tenggara Timur yang berobat jalan menurut tempat berobat jalan. Sebanyak 14,94 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan masih memanfaatkan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) untuk berobat jalan. UKBM umumnya tersedia di wilayah perdesaan dengan bentuk pelayanan kesehatan dasar di poskedes, polindes, posyandu, pos obat desa dan balai pengobatan. Mengingat UKBM terbentuk hampir di seluruh wilayah perdesaan, maka pelayanan UKBM lebih mudah diakses sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Data Susenas 2017 menunjukkan bahwa rumah sakit pemerintah masih merupakan fasilitas kesehatan pilihan sebagian besar penduduk (48,36 persen) untuk rawat inap. Rumah sakit menjadi tempat rujukan untuk rawat inap karena fasilitas dan ketersediaan tenaga kesehatan profesionalnya lebih terjamin. Rumah sakit juga berfungsi sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi keluhan kesehatan dengan tingkat resiko yang tinggi.

Gambar 2.15
Persentase Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Tempat Rawat Inap, 2017



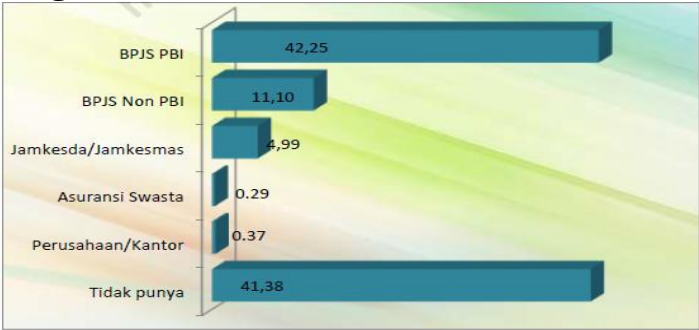
Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017)

Sebanyak 28,10 persen penduduk Nusa Tenggara Timur memanfaatkan rawat inap di puskesmas/pustu. Lokasi puskesmas atau pustu yang mudah dijangkau serta pertimbangan biaya menjadi salah satu alasan mengapa puskesmas/pustu dimanfaatkan sebagai tempat

untuk rawat inap. Selain itu, upaya perbaikan pelayanan kesehatan yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat antara lain sarana prasarana puskesmas lebih memadai dan tersedianya tenaga kesehatan yang professional, yang menjadikan puskesmas sebagai pilihan fasilitas rawat inap.

Persentase penduduk Nusa Tenggara Timur yang memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2017 sebesar 58,62 persen. Sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur memiliki BPJS Kesehatan (53,36 persen), diikuti oleh kepemilikan jamkesda (4,99 persen). Sementara itu, masih terdapat 41,38 persen penduduk Nusa Tenggara Timur yang tidak memiliki jaminan kesehatan untuk berobat.

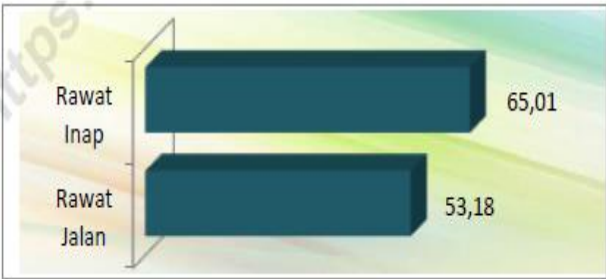
Gambar 2.16
Persentase Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki untuk Berobat Jalan dan Rawat Inap, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017)

Sementara itu, lebih dari separuh penduduk yang melakukan rawat jalan (53,18 persen) memanfaatkan jaminan kesehatan untuk biaya berobat jalan. Penggunaan jaminan kesehatan untuk berobat jalan memang berlaku pada fasilitas-fasilitas kesehatan tertentu, dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, menerima pasien dengan jaminan kesehatan untuk berobat.

Gambar 2.17
Persentase Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dan Rawat Inap, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017)

2.4.1.3. Pekerjaan Umum

a. Irigasi

Areal potensial lahan basah untuk pengembangan lahan irigasi seluas 310.093 Ha, dengan tingkat fungsional seluas 126.168 Ha atau 40,7%. Saat ini ada 52 DI Pusat yang luas potensialnya 133.929 Ha

dengan luas fungsional 31.356 Ha, 36 DI Provinsi yang luas potensialnya 49.326 Ha dengan luas fungsional 27.589 Ha dan Di Kabupaten/Kota yang luas fungsional 67.223 Ha.

Tabel 2.39
 Status Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang
 Dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

NO	Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi Permukaan	Jumlah D.I.	Luasan (Ha)	Keterangan
a	Kab. Belu			
1	D.I. Fatu Besi		1.650	
2	D.I. Maubusa		1.350	
3	D.I. Obor		1.815	
b	Kab. Flores Timur			
1	D.I. Konga		1.100	
2	D.I. Waikelak		1.080	
3	D.I. Waiwadan		1.450	
c	Kab. Kupang			
1	D.I. Enorain		1.100	
2	D.I. Kolidoki		1.071	
3	D.I. Netenmanu		1.350	
d	Kab. Lembata			
1	D.I. Wai Matan Boto		1.350	
e	Kab. Malaka			
1	D.I. Alas		1.650	
2	D.I. Weliman		1.000	
f	Kab. Manggarai			
1	D.I. Cancar		2.500	
2	D.I. Golowoi		1.500	
3	D.I. Satar Lenda		1.525	
4	D.I. Wae Ces 1-4		2.750	
g	Kab. Manggarai Barat			
1	D.I. Wae Ganggang		1.281	
2	D.I. Wae Paku		1.050	
3	D.I. Wae Tiwo Lawo		1.200	
4	D.I. Waeracang		1.200	
h	Kab. Manggarai Timur			
1	D.I. Wae Mokel I, II		1.007	
2	D.I. Waerana		1.022	
i	Kab. Nagekeo			
1	D.I. Malawitu		1.000	
j	Kab. Ngada			
1	D.I. Ganggong		1.000	
2	D.I. Luwurweton		1.000	
3	D.I. Malatawa		1.344	
4	D.I. Nuakua		1.200	
k	Kab. Rote Ndao			
1	D.I. Manubulu		1.250	
l	Kab. Sikka			
1	D.I. Kolesia		1.250	
m	Kab. Sumba Barat			
1	D.I. Loli		2.390	
2	D.I. Wanokaka		2.653	
n	Kab. Sumba Barat Daya			
1	D.I. Mataliku		1.089	
2	D.I. Waekeloh Sawah		2.500	
o	Kab. Sumba Timur			
1	D.I. Mangili		2.666	
2	D.I. Mataiayang		1.579	
3	D.I. Melolo		1.215	
p	Kab. Timor Tengah Selatan			
1	D.I. Oebelo		1.089	
q	Kab. Timor Tengah Utara			
1	D.I. Ponu		1.430	

Sumber: Kementerian PUPR RI

Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi hanya 2,9% dari 1.229 daerah irigasi dengan tingkat fungsional 55,6%. Kondisi kerusakan jaringan irigasi mencapai 61%.Untuk mengatasi kekurangan air akibat kekeringan telah embung kecil sebanyak 334 buah dan embung irigasi sebanyak 24 buah.

b. Jalan dan Jembatan

Jumlah jalan beraspal dominan baik pada jalan Negara maupun jalan Provinsi. Proporsi jenis dan kualitas jalan di Nusa Tenggara Timur sebagai mana table 2.40

Tabel 2.40
Rekapan jalan Provinsi (berdasarkan Status Jalan)

STATUS I			Masuk Jin Nas			STATUS II		
SK.GUB. 339/2007 Jln. Prov. (Km)	(NON STATUS) (Km)	Total (Km)	SK.GUB. 339/2007 (Km)	(NON STATUS) (Km)	Total (Km)	SK.GUB. 339/2007 (Km)	(NON STATUS) (Km)	Total (Km)
1.737,37	1.412,33	3.149,70	121,88	327,83	449,71	1.615,49	1.084,50	2.699,99

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT

Tabel 2.41
REKAPITULASI JEMBATAN PROVINSI
PADA RUAS JALAN PROVINSI

NO	L O K A S I PULAU/KAB/KOTA	SEMULA			MENJADI		
		PANJANG JEMBATAN (M)	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN (M)	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN
1	KABUPATEN ALOR	331	2	26	331	2	26
2	KABUPATEN LEMBATA	63	1	5	-	-	-
3	KABUPATEN FLOTIM	163	2	14	163	2	14
4	KABUPATEN SIKKA	341	7	27	341	7	27
5	KABUPATEN ENDE	699	6	31	699	6	31
6	KABUPATEN NAGEKEO	113	2	10	66	1	6
7	KABUPATEN NGADA	840	9	40	840	9	40
8	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	184	1	15	184	1	15
9	KABUPATEN MANGGARAI	1.005	4	34	763	3	19
10	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	75	1	3	75	1	3
11	KABUPATEN SUMBA TIMUR	1.117	8	61	344	3	28
12	KABUPATEN SUMBA TENGAH	38	1	6	38	1	6
13	KABUPATEN SUMBA BARAT	107	2	4	107	2	4
14	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	107	1	7	107	1	7
15	KOTA KUPANG	-	-	-	-	-	-
16	KABUPATEN KUPANG	1.272	5	69	1.272	5	69
17	KABUPATEN TTS	970	7	37	970	7	37
18	KABUPATEN TTU	909	4	53	909	4	53
19	KABUPATEN BELU	1.110	6	57	1.110	6	57
20	KABUPATEN ROTE NDAO	252	3	24	-	-	-
21	KABUPATEN SABU RAIJUA	-	-	-	-	-	-
		9.692	72	523	8.315	61	442

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT

Tabel 2.42
Jalan Nasional

FUNGSI JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR 1 BUKAN JALAN TOL (SK-2014)							
NO.	NOMOR RUAS			N A M A R U A S	PANJANG RUAS (KM)	ARTERI (KM)	KOLEKTOR 1 (KM)
	BARU						
1	001			LABUHAN BAJO - MALWATAR	62,157	62,157	0,000

2	001	11	K	JLN. WAETAMA (LABUHAN BAJO)	1,600	0,000	1,600
3	001	12	K	JLN. VAN BEKKUM (LABUHAN BAJO)	0,810	0,000	0,810
4	001	13	K	JLN. YOHANIS SAHADUN (LABUHAN BAJO)	1,100	0,000	1,100
5	002			MALWATAR - BTS. KOTA RUTENG	61,152	61,152	0,000
6	002	11	K	JLN. KOMODO (RUTENG)	3,752	3,752	0,000
7	003			BTS. KOTA RUTENG - KM. 210	46,250	46,250	0,000
8	003	11	K	JLN. A. YANI (RUTENG)	1,203	1,203	0,000
9	003	12	K	JLN. RANAKA (RUTENG)	0,605	0,605	0,000
10	004			KM. 210 - BATAS KAB. MANGGARAI	46,316	46,316	0,000
11	005			BATAS KAB. MANGGARAI - SP. BAJAWA	40,819	40,819	0,000
12	006			BTS. KOTA BAJAWA - MALANUZA	15,514	15,514	0,000
13	006	11	K	JLN. GATOT SUBROTO (BAJAWA)	2,150	2,150	0,000
14	006	12	K	JLN. AHMAD YANI (BAJAWA)	0,457	0,457	0,000
15	006	13	K	JLN. SOEKARNO - HATTA (BAJAWA)	0,804	0,804	0,000
16	007			MALANUZA - GAKO	18,052	18,052	0,000
17	008			GAKO - AEGELA	32,662	32,662	0,000
18	009			AEGELA - BTS. KOTA ENDE	53,556	53,556	0,000
19	009	11	K	JLN. ARAH BAJAWA (ENDE)	0,997	0,997	0,000
20	009	12	K	JLN. PERWIRA (ENDE)	0,122	0,122	0,000
21	009	13	K	JLN. SOEKARNO (ENDE)	0,400	0,400	0,000
22	009	14	K	JLN. KATEDRAL (ENDE)	0,727	0,727	0,000
23	010			BTS. KOTA ENDE - DETUSOKO	27,635	27,635	0,000
24	010	11	K	JLN. A. YANI (ENDE)	1,419	1,419	0,000
25	010	12	K	JLN. GATOT SUBROTO (ENDE)	2,735	2,735	0,000
26	010	13	K	JLN. KESEHATAN (ENDE)	0,563	0,563	0,000
27	011			DETUSOKO - WOLOGAI	9,068	9,068	0,000
28	012			WOLOGAI - JUNCTION	9,191	9,191	0,000
29	013			JUNCTION - WOLOWARU	13,475	13,475	0,000
30	014			WOLOWARU - LIANUNU	13,968	13,968	0,000
31	015			LIANUNU - HEPANG	47,694	47,694	0,000
32	016			HEPANG - NITA	6,971	6,971	0,000
33	017			NITA - WOLOARA	5,037	5,037	0,000
34	018			WOLOARA - BTS. KOTA MAUMERE	3,913	3,913	0,000
35	018	11	K	JLN. GAJAH MADA (MAUMERE)	1,267	1,267	0,000
36	018	12	K	JLN. NONGMEAK (MAUMERE)	0,685	0,685	0,000
37	018	13	K	JLN. SUGIYO PRANOTO (MAUMERE)	0,440	0,440	0,000
38	019			BTS. KOTA MAUMERE - WAEPARE	4,999	4,999	0,000
39	019	11	K	JLN. A. YANI (MAUMERE)	1,864	1,864	0,000
40	019	12	K	JLN. SUDIRMAN (MAUMERE)	1,988	1,988	0,000
41	020			WAEPARE - KM 180	26,689	26,689	0,000
42	021			KM 180 - WAERUNU	36,108	36,108	0,000
43	022			WAERUNU - BTS. KOTA LARANTUKA	64,047	64,047	0,000
44	022	11	K	JLN. BASUKI RAHMAT (LARANTUKA)	4,447	4,447	0,000
45	022	12	K	JLN. HERMAN FERNANDES (LARANTUKA)	1,178	1,178	0,000
46	022	13	K	JLN. YOAKIM BL. DEROSARI (LARANTUKA)	1,982	1,982	0,000
47	022	14	K	JLN. RENHA ROSARI (LARANTUKA)	1,943	1,943	0,000
48	022	15	K	JLN. YOS SUDARSO (LARANTUKA)	0,935	0,935	0,000
49	023			BOLOK - TENAU	4,332	4,332	0,000
50	024	11	K	JLN. KE TENAU (KUPANG)	5,258	5,258	0,000
51	024	13	K	JLN. PAHLAWAN (KUPANG)	2,815	2,815	0,000
52	024	14	K	JLN. SUKARNO (KUPANG)	0,770	0,770	0,000

53	024	15	K	JLN. A. YANI (KUPANG)	1,100	1,100	0,000
54	024	16	K	JLN. URIP SUMOHARJO (KUPANG)	0,300	0,300	0,000
55	025	13	K	JLN. TIMOR TIMUR (KUPANG)	6,713	6,713	0,000
56	026	11	K	SIMPANG OESAPA - LAP.TERBANG ELTARI	3,847	3,847	0,000
57	026	12	K	JLN. RAYA ELTARI (KUPANG)	8,103	8,103	0,000
58	026	13	K	JLN. MOH. HATTA (KUPANG)	0,450	0,450	0,000
59	026	14	K	JLN. SOEDIRMAN (KUPANG)	1,750	1,750	0,000
60	026	15	K	JLN. JLN. SOEHARTO (KUPANG)	1,500	1,500	0,000
61	026	16	K	JLN. A. NISNONI (KUPANG)	6,600	6,600	0,000
62	027			OESAPA - OESAO	16,330	16,330	0,000
63	027	11	K	OESAPA - OESAO	3,491	3,491	0,000
64	028			OESAO - BOKONG	41,981	41,981	0,000
65	029			BOKONG - BATUPUTIH	7,019	7,019	0,000
66	030			BATUPUTIH - BTS. KOTA SOE	28,085	28,085	0,000
67	030	11	K	JLN. GAJAH MADA (SOE)	4,305	4,305	0,000
68	030	12	K	JLN. SUDIRMAN (SOE)	0,200	0,200	0,000
69	031			BTS. KOTA SOE - NIKINIKI	20,402	20,402	0,000
70	031	11	K	JLN. DIPONEGORO (SOE)	1,025	1,025	0,000
71	031	12	K	JLN. A. YANI (SOE)	5,361	5,361	0,000
72	032			NIKINIKI - NOELMUTI	44,218	44,218	0,000
73	033			NOELMUTI - BTS. KOTA KEFAMENANU	6,114	6,114	0,000
74	033	11	K	JLN. PATTI MURA (KEFAMENANU)	0,975	0,975	0,000
75	033	12	K	JLN. KARTINI (KEFAMENANU)	1,581	1,581	0,000
76	033	13	K	JLN. ELTARI (KEFAMENANU)	7,512	7,512	0,000
77	034			BTS. KOTA KEFAMENANU - MAUBESI	12,698	12,698	0,000
78	034	11	K	JLN. A. YANI (KEFAMENANU)	4,393	4,393	0,000
79	035			MAUBESI - NESAM (KIUPUKAN)	13,958	13,958	0,000
80	036			NESAM (KIUPUKAN) - HALILULIK	32,881	32,881	0,000
81	037			HALILULIK - BTS. KOTA ATAMBUA	16,219	16,219	0,000
82	037	11	K	JLN. SUPRAPTO (ATAMBUA)	1,418	1,418	0,000
83	037	12	K	JLN. SUPOMO (ATAMBUA)	1,032	1,032	0,000
84	037	13	K	JLN. M. YAMIN (ATAMBUA)	1,178	1,178	0,000
85	037	15	K	JLN. SOEKARNO (ATAMBUA)	1,339	1,339	0,000
86	038			BTS. KOTA ATAMBUA - MOTOAIN	30,459	30,459	0,000
87	038	11	K	JLN. MARTADINATA (ATAMBUA)	0,946	0,946	0,000
88	038	12	K	JLN. YOS SUDARSO (ATAMBUA)	2,383	2,383	0,000
89	038	13	K	JLN. KI HAJAR DEWANTORO (ATAMBUA)	1,200	1,200	0,000
90	038	14	K	JLN. SUTOMO (ATAMBUA)	0,150	0,150	0,000
91	039			BTS. KOTA KEFAMENANU - OLEFAUB	19,307	0,000	19,307
92	040			WAIKELO - WAITABULA	5,039	0,000	5,039
93	041			WAITABULA - BTS. KOTA WAIKABUBAK	32,291	0,000	32,291
94	041	11	K	JLN. SUDIRMAN (WAIKABUBAK)	5,547	0,000	5,547
95	042			BTS. KOTA WAIKABUBAK - BATAS KAB. SUMBA TIMUR	61,438	0,000	61,438
96	042	11	K	JLN. SUDIRMAN (WAIKABUBAK)	4,253	0,000	4,253
97	043			BATAS KAB. SUMBA TIMUR - KM. 35.00	32,815	0,000	32,815
98	044			KM. 35,00 - BTS. KOTA WAINGAPU	28,382	0,000	28,382
99	044	11	K	JLN. SUPRAPTO (WAINGAPU)	0,835	0,000	0,835
100	044	12	K	JLN. PANJAITAN (WAINGAPU)	0,526	0,000	0,526
101	044	13	K	JLN. MT. HARYONO (WAINGAPU)	0,705	0,000	0,705
102	044	14	K	JLN. A. YANI (WAINGAPU)	1,189	0,000	1,189

103	044	15	K	JLN. DIPONEGORO (WAINGAPU)	0,922	0,000	0,922
104	044	16	K	JLN. GAJAH MADA (WAINGAPU)	0,608	0,000	0,608
105	044	17	K	JLN. ADAM MALIK (WAINGAPU)	2,657	0,000	2,657
106	044	18	K	JLN. MATAWI AMAHUL (WAINGAPU)	2,164	0,000	2,164
107	044	19	K	JLN. NANSI MESI (WAINGAPU)	0,695	0,000	0,695
108	045			WAINGAPU - MELOLO	57,850	0,000	57,850
109	045	11	K	JLN. GATOT SUBROTOA (WAINGAPU)	1,820	0,000	1,820
110	045	12	K	JLN. PATTIMURA (WAINGAPU)	0,720	0,000	0,720
111	045	13	K	JLN. ANGKASA (WAINGAPU)	0,780	0,000	0,780
112	045	14	K	JLN. CENDANA (WAINGAPU)	2,310	0,000	2,310
113	046			MELOLO - BAING	56,700	0,000	56,700
114	047			BTS. KOTA KALABAHU - TARAMANA	40,650	0,000	40,650
115	047	11	K	JLN. KARTINI (KALABAHU)	0,271	0,000	0,271
116	047	12	K	JLN. DEWI SARTIKA (KALABAHU)	0,944	0,000	0,944
117	047	13	K	JLN. SUDIRMAN (KALABAHU)	1,345	0,000	1,345
118	047	14	K	JLN. PANGLIMA POLIM (KALABAHU)	0,631	0,000	0,631
119	047	15	K	JLN. GATOT SUBROTO (KALABAHU)	0,419	0,000	0,419
120	047	16	K	JLN. SAMRATULANGI (KALABAHU)	0,745	0,000	0,745
121	047	17	K	JLN. PATTIMURA (KALABAHU)	1,125	0,000	1,125
122	048			TARAMANA - LANTOKA - MARITAING	57,671	0,000	57,671
123	049			JUNCTION - LAPANGAN TERBANG MALI	8,423	0,000	8,423
124	050			JLN. LINGKAR LUAR KOTA KUPANG	22,000	22,000	0,000
125	057			BTS. KOTA RUTENG - REO - KEDINDI	63,409	0,000	63,409
126	057	11	K	JLN. MUTANG RUA (RUTENG)	0,660	0,000	0,660
127	057	12	K	JLN. WAE CEES (RUTENG)	1,405	0,000	1,405
128	057	13	K	JLN. SATOR TACIK (RUTENG)	1,380	0,000	1,380
129	058			PAPELA - PANTEBARU	25,950	0,000	25,950
130	059			PANTEBARU - BAA	30,750	0,000	30,750
131	060			BOLOW - SEBA	25,150	0,000	25,150
132	061			SEBA - MESARA	20,120	0,000	20,120
133	062			JUNCTION - KELIMUTU	13,400	0,000	13,400
134	063			AEGELA - DANGA (MBAY)	29,460	0,000	29,460
135	064			DANGA (MBAY) - NILA - MARAPOKOT	12,000	0,000	12,000
136	065			WAILEBE - SP. SAGU	38,363	0,000	38,363
137	066			SP. SAGU - SP. WITIHAMA - PELABUHAN DERI (ASDP)	13,700	0,000	13,700
138	067			WAEJARANG - BALAURING	61,450	0,000	61,450
139	068			BARANUSA - KABIR	33,100	0,000	33,100
JUMLAH					1.857,911	1.052,327	805,584

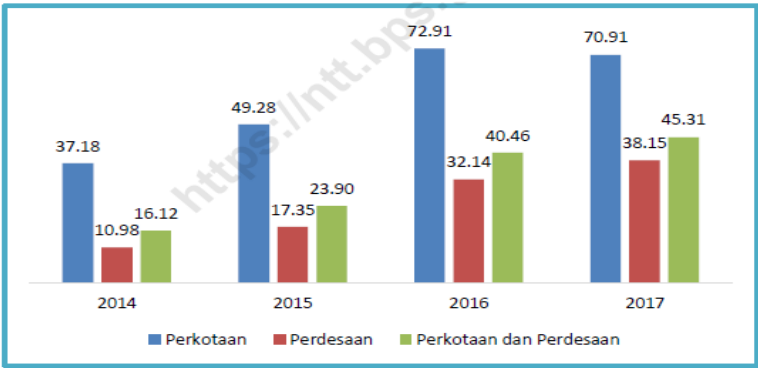
Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT

c. Sanitasi Lingkungan

Sanitasi dasar yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak adalah rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, kloset leher angsa, dan tangki septik pembuangan akhir kotoran. Gambar 2.18 memperlihatkan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi layak selama kurun waktu 2014-2017. Pada tahun 2014 rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 16,12 persen, mengalami kenaikan

sebesar 29,19 poin pada tahun 2017 menjadi 45,31 persen. Hal ini tidak saja dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, namun juga ketersediaan air serta penggunaan dan perawatan fasilitas tersedia.

Gambar 2.18
Persentase Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak
Menurut Klasifikasi Daerah, Tahun 2014-2017



Sumber : Susenas 2014-2017

2.4.1.4. Perumahan

Pelayanan pada urusan perumahan terkait dengan rumah tangga menurut status penguasaan tempat tinggal, rumah yang layak huni, sumber air minum, tempat buang air besar dan penerangan. Gambaran kondisi capaian layanan sebagaimana disajikan pada tabel berikut

a. Rumah Tidak Layak Huni

Pada Tabel 2.43 rumah tangga tidak layak huni pada tahun 2016 sebanyak 399.739 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 426.990 rumah tidak layak huni atau terjadi peningkatan sebesar 6,82 %.

Tabel 2.43
Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi NTT Tahun 2016-2017

No	Nama Kabupaten	Backlog	Backlog	RTLH	Backlog	Backlog	RTLH
		Penghunian	Kepemilikan	NTT	Penghunian	Kepemilikan	NTT
		2016			2017		
1	Sumba Barat	10.563	2.084	12.310	8.154	2.347	3.380
2	Sumba Timur	8.127	6.91	20.130	4.436	6.457	20.13
3	Kupang	80.417	72.422	26.583	87.258	72.422	26.583
4	TTS	7.433	3.072	68.428	53.972	843	52.784
5	TTU	14.026	5.552	22.040	3.346	4.299	30.046
6	Belu	6.013	4.191	14.911	1.263	4.763	18.402
7	Alor	13.357	3.080	13.466	15.516	4.529	10.931
8	Lembata	7.604	3.361	5.974	9.158	4.370	9.606
9	Flores Timur	26.723	5.149	8.274	26.115	5.150	8.274
10	Sikka	21.189	7.547	21.636	5.875	6.809	21.636
11	Ende	14.382	5.552	12.769	13.970	5.546	17.795
12	Ngada	5.020	3.030	6.156	3.240	8.432	6.156
13	Manggarai	22.714	9.478	16.508	21.864	9.484	16.508
14	Rote Ndao	10.234	2.651	10.832	17.416	784	13.453
15	Manggarai Barat	8.026	7.445	21.834	7.750	7.446	21.834
16	Sumba Tengah	7.055	383	7.578	7.055	333	7.578

17	Sumba Barat Daya	28.985	869	40.398	28.841	870	70.213
18	Nagekeo	9.638	1.332	4.912	5.355	1.812	9.056
19	Manggarai Timur	3.725	1.412	27.769	3.625	1.413	27.769
20	Sabu Raijua	5.249	939	12.448	340	1.027	11.192
21	Kota Kupang	67.684	40.586	6.083	11.918	18.161	4.964
22	Malaka	6.581	2.556	18.700	6.581	2.556	18.700
Jumlah		384.743	189.629	399.739	343.048	169.853	426.990

Sumber : Pokja PKP

Tabel 2.44
 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal, Tahun 2014-2017

Status Penguasaan Tempat Tinggal	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Milik Sendiri	65,75	71,16	68,24	66,67
Kontrak/sewa	17,98	17,03	20,49	20,30
Bebas Sewa	1,94	9,71	10,11	11,17
Dinas	12,01	1,40	1,05	1,53
Lainnya	2,31	0,71	0,12	0,34
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdesaan				
Milik Sendiri	91,35	93,00	93,73	92,05
Kontrak/sewa	0,95	0,69	0,79	0,93
Bebas Sewa	0,96	4,37	4,15	5,80
Dinas	5,29	1,47	0,93	0,97
Lainnya	1,46	0,48	0,40	0,25
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00
Perkotaan+Perdesaan				
Milik Sendiri	86,33	88,52	88,53	86,50
Kontrak/sewa	4,29	4,04	4,81	5,17
Bebas Sewa	1,15	5,46	5,36	6,97
Dinas	6,61	1,45	0,95	1,09
Lainnya	1,63	0,52	0,34	0,27
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas Tahun 2014-2017

b. Sumber Air Minum

Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (± 8 gelas), artinya apabila satu rumah tangga ada lima orang anggota rumah tangga, maka dalam satu hari rumah tangga tersebut membutuhkan minimal 7,5 liter air (40 gelas) untuk keperluan minum. Oleh karena itu, perlu pengadaan air minum yang cukup untuk setiap rumah tangga. Pada tahun 2017, sebanyak 60,11 persen rumah tangga di Nusa Tenggara Timur mengkonsumsi air bersih, yaitu air minum yang berasal dari air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa dan sumber terlindung lainnya seperti sumur dan mata air (dengan jarak ke tempat pembuangan akhir lebih dari 10 meter). Sementara 24,67 persen rumah tangga lainnya belum menikmati air bersih. Jika ditinjau menurut daerah tempat tinggalnya, penduduk perkotaan yang menikmati air bersih hampir dua kali lipat dibandingkan penduduk perdesaan. Sekitar 83,62 persen penduduk perkotaan sudah menikmati air bersih, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 53,53 persen. Persentase penduduk menurut sumber air minum terdapat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama,
Tahun 2014-2017

Tahun	Sumber Air Minum Utama						
	Air kemasan/ Isi ulang	Ledeng	Sumur bor/ pompa	Sumur terlin- dung	Mata air terlin- dung	Sumur/Mata air tidak terlindung	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2014	6,10	12,16	3,31	19,26	31,55	19,78	7,84
2015	5,10	13,89	3,58	18,37	32,92	17,72	8,42
2016	5,69	13,49	3,60	18,05	30,56	20,81	7,79
2017	8,10	12,42	4,99	18,31	31,51	17,82	6,85

Sumber : Susenas 2014-2017

c. Tempat Buang Air Besar

Pada tahun 2017, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air dan digunakan sendiri oleh anggota rumah tangganya sebesar 69,21 persen. Rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar bersama rumah tangga lainnya atau memanfaatkan fasilitas umum masing-masing sebesar 13,89 persen dan 1,50 persen. Sementara sekitar 15,40 persen rumah tangga tidak memanfaatkan atau tidak memiliki fasilitas buang air besar.

Selama kurun waktu 2014-2017, penggunaan jenis kloset leher angsa sebesar 66,67 persen atau meningkat 7,38 poin dibandingkan tahun 2014. Sementara persentase rumah tangga yang menggunakan kloset cemplung atau cubluk sebesar masih cukup banyak mencapai 12,31 persen di tahun 2017. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius agar tercipta kesehatan lingkungan yang lebih baik.

Tabel 2.46
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Fasilitas Buang Air
Besar Menurut Jenis Kloset yang Digunakan, Tahun 2014-2017

Tahun	Jenis Kloset		
	Leher Angsa	Pleng-sengan	Cemplung/ Cubluk
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	59,29	19,18	21,34
2015	62,52	16,67	17,76
2016	66,27	17,43	16,31
2017	69,67	18,01	12,31

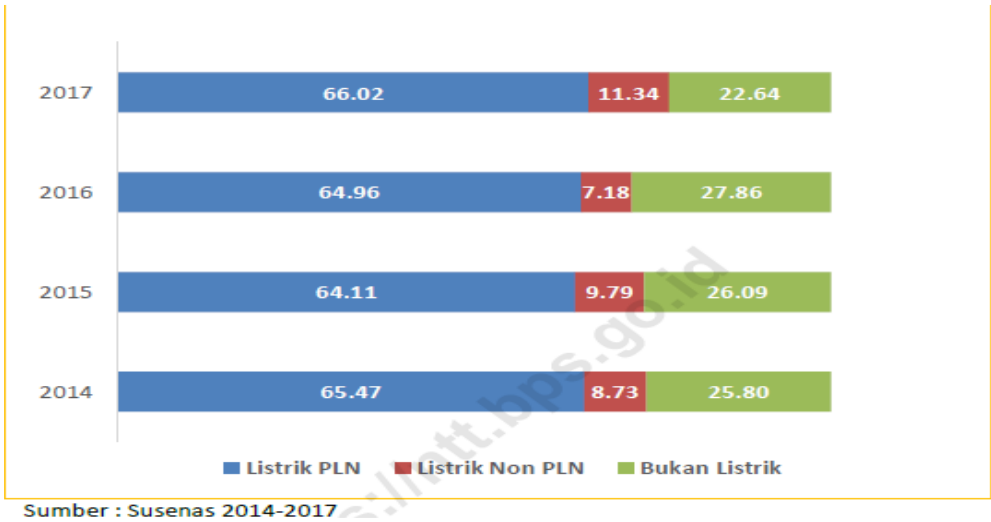
Sumber : Susenas 2014-2017

Persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat akhir pembuangan air besarnya pada tahun 2017 di Nusa Tenggara Timur sebesar 58,38 persen. Penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai tempat penampungan kotoran atau tinja tidak lebih dari 1 persen. Sementara 0,46 persen rumah tangga di Nusa Tenggara Timur masih memilih sungai, pantai, tanah lapang atau kebun sebagai tempat pembuangan akhir tinjanya.

d. Sumber Penerangan

Berbagai sumber penerangan yang dapat digunakan sebagai fasilitas penerangan baik listrik (PLN dan non PLN) maupun bukan listrik (petromak, aladin, pelita, sentir dan obor). Listrik merupakan sarana yang cukup penting untuk rumah tangga yaitu sebagai sumber penerangan dan merupakan kebutuhan penting masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan akan sumber penerangan ini bagi warga negaranya.

Gambar 2.18
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama,
Tahun 2014-2017



Persentase rumah tangga yang menikmati listrik sebagai sumber penerangan di Nusa Tenggara Timur sekitar 77,36 persen, yang terdiri dari 66,02 persen merupakan listrik yang dikelola oleh PLN dan sisanya dikelola oleh non PLN. Hal ini berarti bahwa masih terdapat 22,64 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik sebagai sumber penerangan. Di daerah perdesaan Nusa Tenggara Timur, sebesar 28,64 persen rumah tangga memanfaatkan pelita atau senter atau petromaks sebagai sumber penerangan. Hal ini tentunya perlu menjadi prioritas dalam program pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat perdesaan akan listrik.

2.4.1.5. Perhubungan

a. Perhubungan Darat

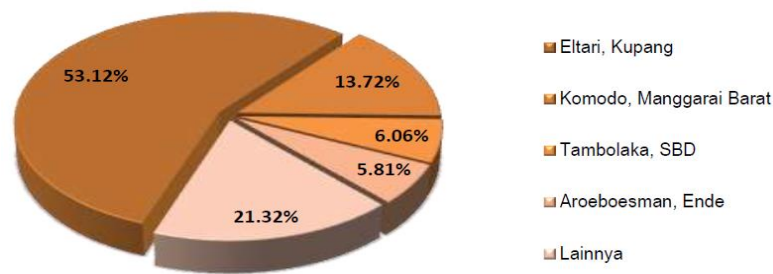
Peningkatan akses transportasi darat didukung terminal yang melayani jasa transportasi pedesaan, antar kota dalam wilayah provinsi dan antar kota provinsi/negara. Terminal dimaksud yaitu tipe A 2 unit (Terminal Motaain-Belu & Terminal Naiola-TTU, tipe B, 16 unit dan terminal tipe C, 4 unit.

b. Perhubungan Udara

Jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke NTT pada bulan Desember 2017 sebanyak 170.292 orang sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 162.386 orang. Pada Desember 2017, empat bandara sipil dengan jumlah penumpang datang dan berangkat

terbanyak adalah Bandara Eltari (53,12 persen), Komodo (13,72 persen), Tambolaka (6,06 persen) dan Aroeboesman (5,81 persen).

Gambar 2.19
Persentase Penumpang Angkutan Udara Menurut Bandara Sipil di NTT, Desember 2017



Tabel 2.47
Jumlah Penumpang Angkutan Udara menurut Bandara Sipil di NTT November – Desember 2017

NO	BANDARA	PENUMPANG DATANG			PENUMPANG BERANGKAT			JUMLAH PENUMPANG		
		November	Desember	Perubahan (%)	November	Desember	Perubahan (%)	November	Desember	Perubahan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eltari, Kupang	82 888	90 206	8,83	79 281	86 514	9,12	162 169	176 720	8,97
2.	Komodo, Manggarai Barat	17 377	23 825	37,11	18 758	21 745	15,92	36 135	45 570	26,11
3.	H. H. Aroeboesman, Ende	8 293	9 956	20,05	8 082	9 397	15,97	16 375	19 329	18,04
4.	Tambolaka, Sumba Barat Daya	8 707	10 391	19,34	8 947	9 754	9,02	17 654	20 145	14,11
5.	Frans Seda, Sikka	7 207	7 207 *)	0,00	7 190	7 190 *)	7 190	14 397	14 397 *)	0,00
6.	Umbu Mehang Kunda, Sumba Timur	6 077	7 529	23,89	6 193	7 343	18,57	12 270	14 872	21,21
7.	Mali, Alor	4 818	4 762	-1,16	5 286	4 900	-7,30	10 104	9 662	-4,37
8.	Frans Sales Lega, Ruteng	1 234	607	-50,81	1 036	533	-48,55	2 270	1 140	-49,78
9.	Gewayantana, Flores Timur	3 630	4 665	28,51	3 759	4 333	15,27	7 389	8 998	21,78
10.	Tureleleo, Bajawa	2 598	3 310	27,41	2 715	3 120	14,92	5 313	6 430	21,02
11.	Wunopito, Lembata	1 360	1 019	-25,07	1 409	991	-29,67	2 769	2 010	-27,41
12.	Terdamu, Sabu	487	497	2,05	563	565	0,36	1 050	1 062	1,14
13.	A. A. Bere Tallo, Belu	3 940	3 706	-5,94	3 707	3 470	-6,39	7 647	7 176	-6,16
14.	Lekunik, Rote	1 905	2 612	37,11	2 136	2 555	19,62	4 041	5 167	27,86
JUMLAH		150 521	170 292	13,14	149 062	162 386	8,94	299 583	332 678	11,05

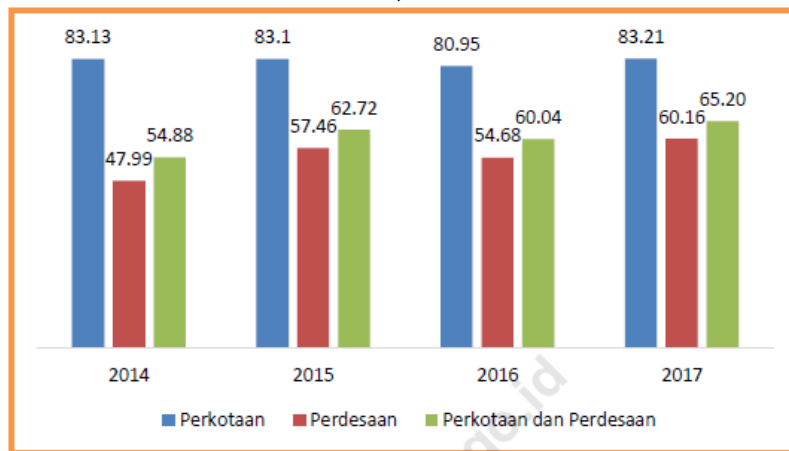
*) data Desember 2017 belum tersedia, menggunakan data November 2017

2.4.1.6. Lingkungan Hidup

a. Akses Air Minum

Sumber air minum layak adalah sumber air berkualitas meliputi air leding, air hujan, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak lebih dari atau sama dengan 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Gambar 2.20
 Persentase Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Menurut
 Klasifikasi Daerah, Tahun 2014-2017



Sumber : Susenas 2014-2017

Pada tahun 2017 sebesar 65,20 persen rumah tangga di Nusa Tenggara Timur memiliki akses terhadap air minum layak. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka terjadi kenaikan sebanyak 10,52 poin. Akan tetapi jika dipilah menurut daerah tempat tinggal, maka terlihat perbedaan yang besar antara akses air layak penduduk perkotaan dan perdesaan. Masih sekitar 40 persen penduduk perdesaan Nusa Tenggara Timur masih mengkonsumsi air tidak layak.

b. Kawasan Kritis

Dari total kawasan hutan seluas 1.648.492 Ha yang tidak kritis seluas 120.972 Ha atau 7.34%. Selanjutnya lahan tidak kritis di luar kawasan hutan seluas 33.536 Ha atau 1,09% dari total lahan di luar kawasan hutan seluas 3.086.508 Ha

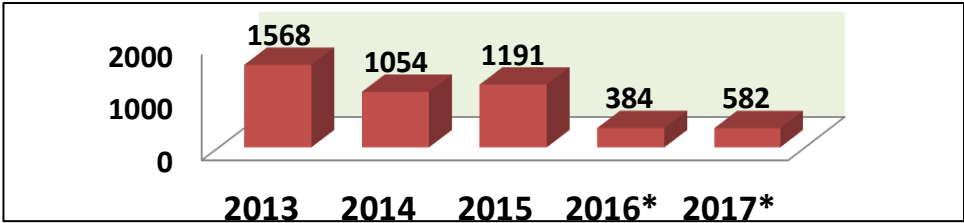
c. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.227 buah dan tersebar di 1.192 pulau baik pulau kecil maupun pulau besar di NTT. Dari DAS yang ada, maka 27 DAS memiliki peran yang dominan dengan cakupan luas 1.527.900 Ha perlu pengelolaan intensif dengan memanfaatkan Rencana pengelolaan DAS terpadu.

2.4.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjuk dengan indikator: Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dimana DP3A mencatat terdapat 4.542 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2013-2017, Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak pada tahun 2017 sebesar 305, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TKPK) Perempuan yaitu Sebesar 64,41% lebih rendah dari laki-laki sebesar 81,23%, perempuan yang bekerja pada kegiatan formal hanya sebesar 35,52% dan yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 45,52% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perempuan secara total sebesar 3,30% dan laki-laki sebesar 3,23%

Gambar 2.21
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Di Provinsi NTT 2013-



Sumber : Data Olahan DP3A NTT

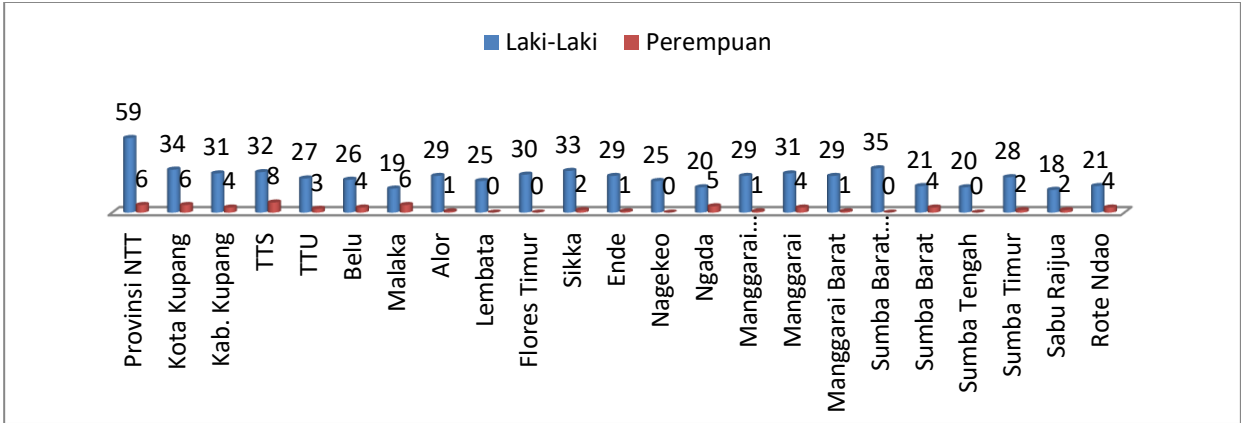
Tabel 2.48
Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi NTT Tahun 2017

NO	KAB / KOTA	GENDER		TOTAL
		L	P	
1	Kabupaten Nagekeo	0	1	1
2	Kabupaten Alor	1	5	6
3	Kabupaten Belu	1	16	17
4	Kabupaten Ende	2	10	12
5	Kabupaten Flores Timur	0	0	0
6	Kabupaten Kupang	1	19	20
7	Kabupaten Lembata	3	25	28
8	Kabupaten Malaka	0	0	0
9	Kabupaten Manggarai	0	0	0
10	Kabupaten Manggarai Barat	1	9	10
11	Kabupaten Manggarai Timur	0	12	12
12	Kabupaten Ngada	1	1	3
13	Kabupaten Rote Ndao	2	21	24
14	Kabupaten Saburajua	0	9	9
15	Kabupaten Sikka	0	1	1
16	Kabupaten Sumba Barat	0	25	25
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	0	1	1
18	Kabupaten Sumba Tengah	0	0	0
19	Kabupaten Sumba Timur	0	4	4
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan	4	18	22
21	Kabupaten Timor Tengah Utara	3	67	70
22	Kota Kupang	2	40	42
TOTAL		21	282	305

Sumber : Data Olahan DP3A NTT

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT periode 2014-2019 berjumlah 715 orang anggota, yang terdiri dari anggota laki-laki sebanyak 615 orang (91,04%) dan anggota perempuan sebanyak 64 orang (8,95%). Jumlah Perwakilan anggota perempuan terbanyak yaitu di kabupaten Malaka 24 %, TTS 20 % dan Ngada 20 %, sedangkan Kabupaten Lembata, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah tidak memiliki perwakilan anggota perempuan di DPRD.

Grafik 2.22
Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2019



Sumber : Data Olahan DP3A NTT

2.4.1.8. Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera

Data Susenas menunjukkan bahwa 37,51 persen perempuan berusia 15-49 tahun yang kawin di Nusa Tenggara Timur sedang menggunakan alat/cara KB. Di daerah perkotaan, keikutsertaan KB sedikit lebih tinggi (39,93persen) dibandingkan dengan daerah perdesaan (36,92 persen). Sementara pilihan alat kontrasepsi, baik penduduk perkotaan maupun perdesaan pilihan sebagian besar PUS adalah alat kontrasepsi modern.

Tabel 2.49
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin yang Sedarang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2017

Uraian	Alat/Cara KB (%)		Sedarang Menggunakan (%)
	Modern	Tradisional	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nusa Tenggara Timur	91,26	8,74	37,51
Perkotaan	80,07	19,93	39,93
Perdesaan	93,95	6,05	36,92

Sumber :BPS, Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017

Penggunaan alat dan cara KB bagi PUS di Nusa Tenggara Timur terlihat pada Gambar 2.23. Sebagian besar PUS menggunakan suntik sebagai alatkontrasepsi (47,72 persen). MOW/tubektomi dan MOP/vasektomi yang merupakan alat kontrasepsi paling efektif, digunakan oleh 6,84 persen PUS. Sementara 8,74 persen PUS memilih cara tradisional seperti seperti menyusui, pantang berkala atau kalender atau lainnya dalam membatasi atau menjarangkan kehamilan.

Gambar 2.23
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan, 2017



Sumber :BPS, Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017

2.4.1.9. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa kabupaten

seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang perlu ditangani secara serius.

Tabel 2.50
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2016

Wilayah	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara								
	2016								
	Anak Korban Tindak Kekerasan	Komunitas Adat Terpencil	Keluarga Fakir Miskin	Penyandang HIV/AIDS	Penyandang Cacat	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Anak Cacat	Anak Jalanan	Anak Terlantar
Sumba Barat	17	494	16 006	45	300	3 609	234	-	8 554
Sumba Timur	-	348	25 853	149	57	950	-	234	5 114
Kupang	82	192	35 880	99	1 757	4 056	237	167	9 638
Timor Tengah Selatan	115	254	75 327	204	3 847	1 875	377	126	11 601
Timor Tengah Utara	100	212	31 383	62	1 807	1 593	252	350	7 761
Belu	10	375	20 965	562	880	1 493	348	5	4 907
Alor	-	233	26 176	42	330	9 625	525	-	6 309
Lembata	39	141	17 214	166	496	3 764	229	-	2 869
Flores Timur	14	478	22 121	250	1 422	3 602	536	93	2 460
Sikka	16	143	34 239	464	5 829	2 676	477	32	6 726
Ende	1	129	27 759	176	2 374	1 281	985	4	6 099
Ngada	28	113	11 877	89	1 064	1 735	116	-	2 567
Manggarai	18	203	36 690	150	3 116	1 535	84	-	1 140
Rote Ndao	15	259	18 613	18	1 398	3 872	243	-	3 073
Manggarai Barat	45	276	34 216	56	1 145	3 741	102	48	12 526
Sumba Tengah	6	129	9 446	12	425	689	151	-	2 777
Sumba Barat Daya	-	225	46 125	159	739	2 907	126	52	7 482
Nagekeo	7	173	11 249	56	937	616	-	2	2 964
Manggarai Timur	4	411	39 665	41	1 379	1 774	706	-	7 327
Sabu Raijua	-	154	14 694	5	36	767	25	-	1 624
Malaka	2	129	22 359	151	577	4 933	22	-	2 220
Kota Kupang	-	-	19 556	744	485	143	-	146	5 138
Nusa Tenggara Timur	519	5 071	597 413	3 700	30 400	57 236	5 775	1 259	120 876

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2016

2.4.1.10. Ketenagakerjaan
a. Angkatan Kerja

Kegiatan utama PUK terbagi atas Angkatan Kerja (AK) yang aktif secara ekonomi baik bekerja maupun mencari pekerjaan; dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) yang tidak aktif secara ekonomi baik sedang sekolah atau sibuk dengan pekerjaan rumah tangga atau alasan lainnya.

Tabel 2.51
Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin di NTT, 2017

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	L+P	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkatan Kerja	1.357.673	1.040.936	2.398.609	69,09
Bukan Angkatan Kerja	339.464	733.783	1.073.247	30,91
Total PUK	1.697.137	1.774.719	3.471.856	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Menurut kegiatan utama yang dilakukan, terdapat sebanyak 2,40 juta orang atau 69,09 persen Angkatan Kerja (AK) dan 1,07 juta orang atau 30,91 persen Bukan Angkatan Kerja (BAK) atau dengan kata lain sebagian besar PUK adalah AK dengan besarnya AK atau penduduk yang aktif secara ekonomi 2 kali penduduk yang tidak aktif.

b. Lapangan Usaha

Indikator penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama penting untuk mengetahui sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Perubahan kontribusi sektor dalam menyerap tenaga kerja dalam suatu kurun waktu tertentu memberikan gambaran perubahan struktur perekonomian daerah. Lapangan usaha pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 yang membagi lapangan pekerjaan ke dalam sembilan sektor. Bila dilihat menurut sembilan sektor, empat sektor menempati posisi teratas yaitu pertanian, jasa, perdagangan dan industri. Tenaga kerja mayoritas terserap di Pertanian 1,27 juta orang atau 54,81 persen, diikuti Sektor Jasa 0,34 juta orang atau 14,60 persen, Perdagangan sebesar 0,24 juta orang atau 10,23 persen, dan Industri 0,21 juta orang atau 8,85 persen. Sektor lainnya seperti transportasi, konstruksi, pertambangan dan lembaga keuangan dibawah 5 persen dan sektor yang menyerap tenaga kerja terendah adalah Sektor Listrik.

Tabel 2.52
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di NTT, 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki		Perempuan		L+P	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	728.881	55,58	542.653	53,80	1.271.534	54,81
2. Pertambangan dan Penggalian	19.764	1,51	5.922	0,59	256.86	1,11
3. Industri	62.335	4,75	142.979	14,17	205.314	8,85
4. Listrik, Gas dan Air Minum	5.605	0,43	568	0,06	6.173	0,27
5. Konstruksi	95.896	7,31	2.069	0,21	97.965	4,22
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	98.187	7,49	139.142	13,79	237.329	10,23
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	95.501	7,28	6.744	0,67	102.245	4,41
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	25.231	1,92	9.966	0,99	35.197	1,52
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	179.951	13,72	158.667	15,73	338.618	14,60
Total	1.311.351	100,00	1.008.710	100,00	2.320.061	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Bila dipilah menurut jenis kelamin, pekerja perempuan lebih banyak dibanding laki-laki pada sektor perdagangan dan industri. Bahkan pada sektor Industri tenaga kerja perempuan mendominasi 2,3 kali dibanding laki-laki. Pekerja perempuan di sektor industri sebanyak 142,98 ribu penduduk perempuan atau 14,17 persen dari seluruh pekerja perempuan sedangkan laki-laki 62,3 ribu atau 4,75 persen dari seluruh pekerja laki-laki. Industri yang umum terdapat di NTT adalah industri tenun ikat yang dilakukan para perempuan secara tradisional dan menjadi keahlian yang diwariskan secara turun temurun bagi perempuan NTT di perdesaan.

Bila kita ringkas sembilan sektor menjadi tiga sektor: sektor primer atau *agriculture* untuk pertanian, sektor sekunder atau *manufacturing* yang terdiri dari empat sektor: Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, dan sektor tersier atau *services* yang terdiri dari empat sektor: Perdagangan, Angkutan, Keuangan dan Jasa, maka sektor primer masih menempati urutan teratas dimana mayoritas tenaga kerja terserap di sektor primer sebesar 1,27 juta orang atau 54,81 persen, diikuti sektor tersier 0,71 juta orang atau 30,75 persen dan sektor sekunder sebesar 0,34 juta orang atau 14,44 persen. Sektor tersier memiliki trend yang semakin meningkat dalam kurun waktu 2014-2017, sebaliknya pada tahun 2017 sektor primer mengalami penurunan.

Tabel 2.53
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di NTT, 2014-2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun								Δ%
	2014		2015		2016		2017		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Primer	1.321.274	60,77	1.368.296	61,65	1.214.060	53,32	1.271.534	54,81	-0,99
Sekunder	269.599	12,40	233.492	10,52	309.532	13,59	335.138	14,44	9,15
Tersier	583.355	26,83	617.503	27,82	753.476	33,09	713.389	30,75	7,52
Total	2.174.228	100,00	2.219.291	100,00	2.277.068	100,00	2.320.061	100,0	2,19

Sumber: Sakernas, Agustus 2014-2017

2.4.1.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tahun 2016 terdapat 4.059 3,752 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Aktif sebanyak 3,752 unit dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 307 unit. Jumlah anggota koperasi tahun 2016 sebanyak 997,050 orang. Usaha kecil berkembang pesat dengan indikasi meningkatnya penyaluran kredit usaha dan pemberdayaan ekonomi produktif yang dilaksanakan. Program Desa Mandiri Anggur Merah. Tahun 2016 telah terbentuk 5.185.107. Unit usaha kecil menengah juga tumbuh dari pembinaan melalui PNPM Mandiri dan program pembangunan lainnya.

Tabel 2.54
Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Juta Rupiah), 2012-2016

Wilayah	Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota				
	2012	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	109 414	140 266	159 302	178 723	196 776
Sumba Timur	166 819	199 159	250 912	315 887	285 662
Kupang	118 276	153 317	282 959	358 554	250 208
TTS	99 795	146 167	192 695	183 922	222 649
TTU	154 816	184 293	199 357	252 668	258 080
Belu	256 866	312 413	371 850	448 287	395 189
Alor	87 174	109 026	148 649	197 028	199 395
Lembata	85 870	128 674	147 018	172 141	173 248
Flores Timur	151 982	202 693	246 921	265 089	259 639
Sikka	285 649	325 970	379 041	457 177	388 000
Ende	229 101	282 965	328 495	366 365	350 590
Ngada	149 083	189 759	213 234	221 728	244 543
Manggarai	279 241	373 573	444 541	428 623	368 092
Rote Ndao	20 934	42 521	85 051	125 518	85 025
Manggarai Barat	39 744	49 556	98 557	152 212	213 325
Sumba Tengah	3 004	8 376	16 942	19 907	21 420
SBD	8 962	17 238	52 751	77 125	91 367
Nagekeo	12 606	33 278	70 226	119 054	117 496
Maggarai Timur	9 070	40 869	75 018	98 524	107 877
Sabu Raijua	-	1 873	5 578	16 068	20 128
Malaka	-	-	-	-	-
Lainnya / Others Kota / Municipality	-	-	-	-	1 432
Kota Kupang	1 028 806	1 184 524	1 465 060	1 746 060	934 966
Jumlah / Total	3 297 212	4 126 507	5 234 157	6 201 300	5 185 107

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro Prov. NTT

Tahun 2016 terdapat 4,059 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Aktif sebanyak 3,752unit dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 307 unit. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah Koperasi mengalami peningkatan sebesar 352 unit. Sedangkan di sisi lainnya jumlah Koperasi Aktif mengalami peningkatan 358 unit dan jumlah Koperasi Tidak Aktif mengalami penurunan dari 313 menjadi 307 unit (Tabel 2.55) Jumlah anggota koperasi tahun 2015 sebanyak 811,825 orang dan tahun 2016 sebanyak 997,050 orang antara tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar 185,225 orang.

Tabel 2.55
Jumlah Koperasi (Aktif dan Tidak Aktif) di
Provinsi NTT tahun 2008-2016

Tahun	Realisasi Koperasi Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
2008	1,325	-	-
2009	1,397	339	1,736
2010	1,599	318	1,917
2011	2,004	318	2,322
2012	2,222	312	2,534
2013	2,408	312	2,720
2014	2,818	312	3,130
2015	3,394	313	3,707
2016	3,752	307	4,059

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
Kecil dan Mikro Prov. NTT

Tabel 2.56
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2012-2016

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
581,975	585,695	698,470	811,825	997,050

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro Prov. NTT

2.4.1.12. Penanaman Modal

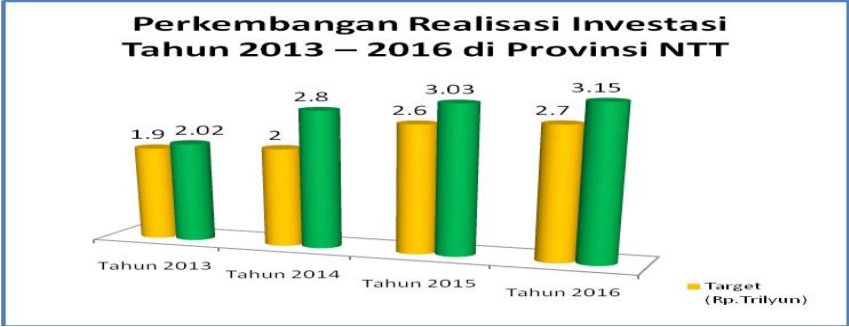
Invetasi di Nusa tenggara Timur belum belum optimal dengan indikasi jumlah investor yang melaksanakan penanaman modal berjumlah 289 perusahaan. Perusahaan PMA berjumlah 252 perusahaan. Sedangkan jumlah PMDN sebanyak 37 perusahaan. Jenis bidang investasi yang menonjol yaitu perkebunan kakao, budidaya mutiara, pengembangan ternak babi dan unggas, industri semen, industri pengolahan jagung, pembangunan hotel dan travel dan pengembangan usaha penerbangan dan kapal cepat. Aspek pendukung peningkatan investasi kedepan yaitu; sebagai daerah yang aman investasi, masyarakatnya kooperatif, jumlah tenaga kerja cukup tersedia, masyarakatnya religius dan koordinasi dengan pemerintah baik.

Permasalahan utama kurangnya investasi swasta adalah; keterbatasan infrastruktur, masalah kompetensi tenaga kerja, kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, masalah status tanah dan daya saing investasi. Selanjutnya masalah terkait dengan investor yaitu rendahnya tingkat kepatuhan investor menyampaikan LKPM; data dan realisasi ada yang tidak sesuai fakta proyek; dan penyimpangan pengguna izin dan fasilitas investasi.

Tabel 2.57
Data Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2013 – 2016 di
Provinsi NTT

Tahun	Target (Rp.Trilyun)	Realisasi (Rp.Trilyun)
Tahun 2013	1.9	2.02
Tahun 2014	2	2.8
Tahun 2015	2.6	3.03
Tahun 2016	2.7	3.15

Grafik 2.24

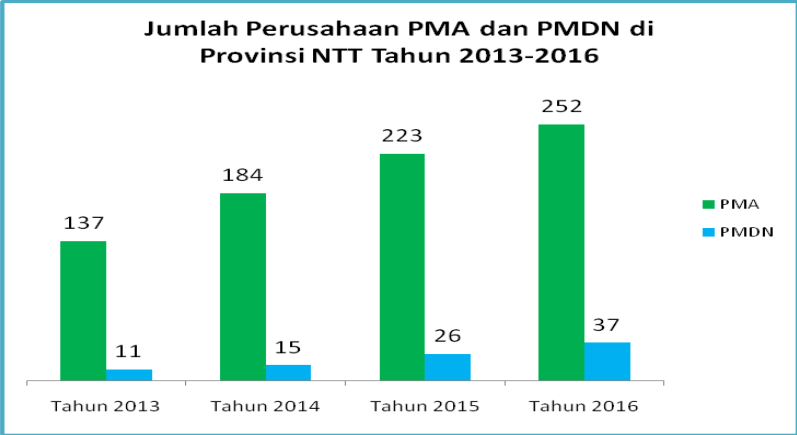


Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2.58
Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di
Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Tahun	PMA	PMDN
Tahun 2013	137	11
Tahun 2014	184	15
Tahun 2015	223	26
Tahun 2016	252	37

Grafik 2.25



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.4.1.13. Kebudayaan

Sebagai Provinsi kepulauan, Nusa Tenggara Timur mempunyai kekayaan budaya yang spesifik. Untuk menjamin kelestariannya maka pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui pengkajian, pembinaan, pendataan, pelestarian, pengembangan terhadap berbagai aspek kebudayaan yaitu permuseuman, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan kepada Tuhan, kesenian, dan bahasa dan sastra.

2.4.1.14. Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan melalui berbagai peningkatan jumlah dan kualitas organisasi pemuda, Organisasi Olah Raga serta pembangunan gelanggang remaja dan lapangan olah raga. Organisasi pemuda yang melaksanakan pembinaan dan pengkaderan anggota secara berkesimbangan yaitu PMKRI, GMNI, GAMKI, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Peradah serta Organisasi Kemahasiswaan, karang taruna dan lainnya. Sedangkan organisasi keolahragaan ditangani makin profesional dengan meningkatnya keterlibatan partisipasi masyarakat.

2.4.1.15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Pembinaan Ormas dan LSM,OKP

Ormas, LSM dan OKP merupakan mitra pembangunan pemerintah dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah dilaksanakan kerjasama sebagai berikut: (i) Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan bagi TNI, POLRI Unsur KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, TTU, LSM, Yayasan, PMKRI dan GMNI; (ii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FKUB, (iii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FPK; dan (iv) peningkatan wawasan dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan dan rasa cinta tanah air bagi 350 orang dari unsur Pengurus FKUB, FKDM, FPK, Kominda, LSM, Ormas Pemuda, Toga, Komisi A DPRD serta Aparatur Kesbangpol dan Linmas.

b. .Peningkatan Ketahanan Seni Budaya

Pengembangan Seni budaya daerah dalam rangka memperkaya puncak-puncak seni budaya nasional yang pada gilirannya dapat memperkuat jati diri bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan serta toleransi kehidupan beragama. 22 Kabupaten/Kota kaya dengan potensi seni dan budaya serta keragaman yang tersebar di berbagai pulau, memerlukan pengelolaan dalam sebuah wadah seni dan budaya seperti *art and culture center*.

2.4.1.16. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan didukung kebijakan NTT sebagai provinsi jagung, sebagai provinsi ternak dan pengembangan perikanan dan kelautan, (ii) Kebijakan gerakan konsumsi pangan lokal, (iii) memberikan tambahan biaya operasional pendampingan (BOP) bagi para PPL, dan (iv) Kebijakan program Desa Mandiri Anggur Merah. Daya dukung wilayah heterogen berbasis pulau yang mendukung keanekaragaman pangan utama juga sangat bervariasi. Sumber pangan utama masyarakat yaitu jagung, padi, ubi kayu, hasil ternak dan perikanan yang bersumber dari kekayaan alam daerah.

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.2.1. Pertanian

Faktor utama penentu kapasitas produksi pertanian adalah lahan dan air yang sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah dan tantangan dalam pembangunan pertanian di NTT. Dari sekitar 3.795.168 Ha lahan untuk pertanian, baru sekitar 210.774 Ha yang difungsikan sebagai lahan sawah. Sebagian besar lahan di NTT (75,70%) digunakan sebagai lahan tegal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam, tanaman kayu kayuan dan perkebunan. Hal yang menjadi perhatian bahwa masih ada sekitar 19,85 persen dari 4.734.991 Ha lahan NTT yang difungsikan sebagai rumah dan pekarangan termasuk juga lahan yang belum diusahakan. Masih luasnya lahan yang belum diusahakan merupakan peluang bagi pengembangan sektor pertanian di masa datang.

a. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian. Hal ini tercermin dari produksi tanaman pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, kacang-kacangan,umbi-umbian) dan sumber protein nabati (sayur dan buah).

Tanaman padi tahun 2016 dengan luas panen 280.162 Ha menghasilkan produksi sebesar 924.403 Ton, menurun 23.685 Ton atau 2,6 % dari tahun sebelumnya sebesar 948.088 Ton. Penurunan Produksi Padi dipengaruhi oleh iklim yang kurang mendukung serta penggunaan bibit/benih bermutu. Tanaman Jagung tahun 2016 dengan luas panen 265.317 Ha menghasilkan produksi sebesar 688.432 ton, meningkat 3.351 atau 0,4% dari tahun sebelumnya sebesar 685.081 Ton. Peningkatan produksi ini dipengaruhi oleh meningkatnya produktivitas jagung .

Tabel 2.59
Luas Tanam Jagung Tahun 2009 - 2016

Uraian	T a h u n							2016
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Luas Tanam Jagung (ha)	268.423	288.152	276.618	305.523	273.850	269.447	277.437	265.317

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.60
Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Komoditi	Luas Tanam	Produksi	Luas Tanam	Produksi	Luas Tanam	Produksi
	2014		2015		2016	
Padi	254.133	825.729	272.712	948.088	280.162	924.403
Padi Sawah	177.273	662.365	192.792	778.808	195.654	751.529
Padi Ladang	76.860	163.364	79.920	169.280	84.508	172.874

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.61
Perkembangan Produksi Tanaman Padi dan Palawija di Nusa Tenggara Timur, 2010–2016
(Kw per hektar)

Jenis Tanaman	Perkembangan Produksi Tanaman padi dan Palawija di Nusa Tenggara Timur, 2010–2016 (Kw per hektar)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
01. Padi / Paddy	555 493	591 370	698 566	739 667	825 728	948 088	924 403
02. Jagung / Maize	653 620	524 638	629 386	707 643	647 108	685 081	688 432
03. Ubi Kayu / Cassava	1 032 538	962 129	892 145	811 165	677 578	637 315	...
04. Ubi Jalar / Sweet Potato	121 284	129728	151 864	78 944	60 033	60 746	...
05. Kacang Tanah / Peanut	20 069	23 685	21 562	16 057	14 886	10 620	...
06. Kacang Kedelai / Soybean	1 780	1 379	2 781	1 675	2 710	3 615	...
07. Kacang Hijau / Green Pea	13 462	10 408	11 478	10 139	9 121	9 717	...

Komoditas tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan yaitu ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kedele. Sedangkan hortikultura yang dikembangkan dengan produksi yang menonjol yaitu; (i) komoditas hortikulutra; alpukat, jeruk keprok, mangga dan pisang; (ii) komoditas biofarmaka; jahe, dan (iii) komoditas sayur-sayuran: bawang merah, bawang putih, cabe besar dan cabe rawit.

Tabel 2.62

Jumlah Tanaman, Rata-rata Produksi (Ton) dan Rata-rata Produksi Buah-Buahan (Ton/Pohon) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun2016

Buah-buahan	Panen		Jumlah Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Pohon)
	Pohon	Hektar		
	2016			
Alpukat / Avocado	134 992	-	10 178	0,08
Belimbing / Star fruit	8 876	-	769	0,09
Duku / Kokosan	222	-	14	0,06
Durian / Durian	22 590	-	1 690	0,07
Jambu biji / Guava	88 061	-	3 817	0,04
Jambu air / Rose apple	13 252	-	956	0,07
Jeruk keprok / Tangerine	194 889	-	14 684	0,08
Jeruk besar / Pomelo	35 888	-	2 431	0,07
Mangga / Mango	962 012	-	88 998	0,09
Manggis / Mangosteen	156	-	5	0,03
Nangka / Jack fruit	197 800	-	20 922	0,11
Nenas / Pinneapple	998 508	-	5 227	0,01
Pepaya / Papaya	793 554	-	63 208	0,08
Pisang / Banana	2 361 734	-	140 825	0,06
Rambutan / Rambutan	84 403	-	5 426	0,06
Salak / Salacca	48 540	-	1 107	0,02
Sawo / Star apple	8 975	-	845	0,09
Markisa / Marquisa	661	-	37	0,06
Sirsak / Soursop	62 415	-	2 153	0,03
Sukun / Bread fruit	36 233	-	2 462	0,07
Apel / Apple	590	-	20	0,03
Anggur / Grape	6	-	-	-
Melinjo / Melinjo	6 463	-	191	0,03
Petai / Twisted cluster bean	2 012	-	149	0,07
Jengkol / Jengkol	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	6 062 832	-	366 113	0,06

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

b. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang baik antara lain Kelapa, Jambu Mete, Kopi, Kakao, Cengkeh, Vanili, Tembakau dan Kapas.Hasil perkebunan umumnya dipasarkan secara lokal, regional maupun ekspor.Produksilima komoditas utama perkebunan Tahun 2015-2016 sebagaimana tabel 2.63.dibawah ini.

Tabel 2.63
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Tanaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur (ton)

Kabupaten/ Kota	Kelapa	Kopi	Lada	Kakao	Vinili	Pinang	Kelapa	Kopi	Lada	Kakao	vanili	Pinang
	2015						2016					
Sumba Barat	1 114	70	-	34	-	227	1 114	254	-	38	-	684
Sumba Timur	1 352	245	-	26	-	-	1 352	-	-	-	-	-
Kupang	4 837	108	-	31	-	619	4 436	122	-	41	-	621
Timor Tengah Selatan	1 430	64	-	39	-	-	1 463	-	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	780	167	-	48	2	428	780	187	-	58	3	449
Belu	340	78	-	0	-	-	340	-	-	-	-	-
Alor	1 220	138	2	54	66	179	1 359	130	-	47	64	188
Lembata	2 419	163	-	162	-	-	2 419	-	-	-	-	-
Flores Timur	9 067	1 313	11	2 272	32	91	9 142	1 353	-	2 316	37	100
Sikka	10 208	638	33	8 652	-	-	10 312	-	-	-	-	-
Ende	9 084	3 336	26	4 107	47	336	9 084	3 368	-	4 130	72	352
Ngada	2 212	3 459	14	211	-	-	2 217	-	-	-	-	-
Manggarai	565	1 738	-	229	-	38	546	2 277	-	557	1	57
Rote Ndao	3 483	-	-	-	-	-	3 474	-	-	-	-	-
Manggarai Barat	588	1 896	10	520	18	44	594	2 124	-	530	31	52
Sumba Tengah	800	243	-	33	-	292	800	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	3 925	2 161	-	970	17	1 447	3 925	2 163	-	967	18	1 466
Nagekeo	4 171	368	4	535	-	-	4362	-	-	-	-	-
Manggarai Timur	601	4 809	4	429	3	98	601	5 072	-	479	3	102
Sabu Raijua	856	-	-	-	-	-	860	-	-	-	-	-
Malaka	9 057	17	-	56	2	28	9 057	17	-	64	5	31
Kota Kupang	108	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	68 217	21 011	104	18 408	401	4 835	68 347	22 228	-	19 096	463	4 984

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

c. **Peternakan**

Kawasan pengembangan peternakan pada RTRWP berupa hamparan padang penggembalaan untuk Peternakan Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing seluas 832.228 Ha tersebar di Kabupaten/Kota. Kawasan pengembangan peternakan lainnya dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan usaha tanaman pangan dan perkebunan. Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang populasinya menonjol pada tahun 2016 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2016 (Ribu ekor)

Kabupaten/Kota	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
	2016					
Sumba Barat	1 395	12 052	5 457	2 613	31	52 251
Sumba Timur	65 453	37 189	34 023	52 515	1 042	50 124
Kupang	217 146	1 772	8 846	23 628	151	213 071
Timor Tengah Selatan	185 139	316	2 886	24 851	-	180 778
Timor Tengah Utara	123 406	388	2 864	23 243	39	83 124
Belu	58 350	1 044	3 339	12 003	26	71 230
Alor	4 782	-	104	39 320	-	90 937
Lembata	5 254	-	1 958	40 677	508	66 531
Flores Timur	2 599	13	2 173	62 050	1 811	96 772
Sikka	15 072	1 908	3 232	53 211	229	125 139

Ende	34 497	2 580	2 998	29 500	13	85 220
Ngada	37 009	13 644	6 490	24 730	2 118	133 644
Manggarai	24 348	7 551	1 309	20 674	-	70 667
Rote Ndao	57 399	11 373	5 355	51 114	36 679	83 438
Manggarai Barat	10 304	21 269	1 408	13 505	58	50 042
Sumba Tengah	7 750	8 933	10 267	10 090	-	41 687
Sumba Barat Daya	2 926	12 146	5 845	12 545	-	50 273
Nagekeo	33 553	6 398	3 972	44 124	2 900	100 745
Manggarai Timur	13 792	10 227	6 414	30 753	-	61 115
Sabu Raijua	3 761	7 628	1 997	41405	21 229	17 744
Malaka	74 720	470	1 550	19 151	-	90 240
Kota Kupang	5853	26	70	6 267	50	30 636
Jumlah	984 508	156 927	112 557	637 969	66 884	1 845 408

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

perkembangan populasi per komoditinya cendrung menunjukkan angka positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi (1.854.408) diikuti Sapi (984.508) Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan tekad menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak.

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 66 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdiri dari 54 RPH pemerintah dan 2 RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH. Jumlah ternak yang dipotong tahun 2016 adalah babi sebesar 158.459 ekor dan sapi sebanyak 69.121 ekor per tahun

d. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/dayabeli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di NTT pada Januari 2018, NTP di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan dibandingkan Desember 2017 yaitu sebesar 0,01 persen. Untuk indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga sendiri mengalami peningkatan lebih tinggi dibanding indeks harga hasil produksi pertanian. Ditinjau per subsektor dengan membandingkan NTP Januari 2018 dengan NTP Desember 2017, maka subsektor yang mengalami peningkatan adalah subsektor tanaman hortikultura (0,50%), subsektor perikanan (1,51%) dan subsektor peternakan (0,13%). Subsektor yang mengalami penurunan adalah subsektor perkebunan rakyat (0,58%) dan subsektor tanaman padi-palawija (0,09%).

1. Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT)

Indeks harga yang diterima petani dari kelima subsektor menunjukkan fluktuasi harga beragam komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada Januari 2018, indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,51 persen dibandingkan Desember 2017 yaitu dari 132,94 menjadi 133,61.

2. Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)

Melalui indeks harga yang dibayar petani dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar di pedesaan serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Pada Januari 2018 indeks harga yang dibayar petani dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan Desember 2017 yaitu dari 126,86 menjadi 127,51 atau naik sebesar 0,52 persen. Karena **Ib** naik lebih tinggi dari perubahan **It**, maka hal itu menyebabkan NTP bulan Januari mengalami penurunan.

3. NTP Subsektor

a. Subsektor Padi & Palawija

NTP subsektor padi dan palawija di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan sebesar 0,09 persen pada Januari 2018. Hal ini disebabkan karena **It** naik sebesar 0,39 persen dan **Ib** naik sebesar 0,48 persen. Naiknya **It** dipengaruhi oleh naiknya subkelompok padi (2,74%) dan turunnya subkelompok palawija (0,67%). Sedangkan **Ib** dipengaruhi oleh naiknya subkelompok konsumsi rumah tangga (0,51%) dan naiknya BPPBM/biaya produksi dan penambahan biaya modal (0,34%).

b. Subsektor Hortikultura

NTP untuk subsektor hortikultura mengalami peningkatan sebesar 0,50 persen pada Januari 2018. Hal ini disebabkan oleh naiknya **It** sebesar 0,86 persen dan **Ib** naik sebesar 0,35 persen. **It** dipengaruhi perubahan pada subkelompok sayur-sayuran (2,14%), buah-buahan (0,53%), dan tanaman obat (-0,45 persen). Sedangkan **Ib** utamanya dipengaruhi oleh perubahan subkelompok konsumsi rumah tangga (0,38%) dan BPPBM (0,18%).

c. Subsektor Perkebunan Rakyat

NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat Januari 2018 turun sebesar 0,58 persen dibandingkan periode Desember 2017. Hal ini terjadi karena **It** turun sebesar 0,12 persen dan **Ib** yang naik sebesar 0,46 persen. Pada **Ib** subkelompok konsumsi rumah tangga naik sebesar 0,44 persen sedangkan indeks subkelompok BPPBM naik sebesar 0,57 persen pada periode Januari 2018.

d. Subsektor Peternakan

NTP subsektor peternakan naik pada Januari 2018 sebesar 0,13 persen. Hal ini disebabkan oleh naiknya **It** sebesar 0,88 persen sedangkan **Ib** naik yaitu sebesar 0,75 persen. **It** dipengaruhi oleh perubahan subkelompok ternak besar (1,77%), subkelompok ternak kecil (-0,73%), subkelompok unggas (2,05%), dan subkelompok hasil ternak (2,34%). Untuk **Ib** subkelompok konsumsi rumah tangga naik sebesar 0,59 persen dan subkelompok BPPBM naik 1,20 persen pada periode Januari 2018.

e. Subsektor Perikanan

NTP subsektor perikanan secara umum naik sebesar 1,51 persen pada Januari 2018. Hal ini disebabkan **It** naik sebesar 2,00 persen, lebih tinggi dari **Ib** yang naik sebesar 0,48 persen. Kenaikan **It** disebabkan oleh naiknya subkelompok tangkap sebesar 2,23 persen dan subkelompok budidaya 1,32 persen. **Ib** dipengaruhi oleh naiknya subkelompok konsumsi rumah tangga sebesar 0,44 persen dan BPPBM naik sebesar 0,57 persen pada Januari 2018.

f. Subkelompok Penangkapan Ikan

NTP subkelompok penangkapan ikan mengalami peningkatan 1,70 persen dari 112,86 pada Desember 2017 menjadi 114,78 pada Januari 2018. Hal ini disebabkan naiknya **It** sebesar 2,23 persen dan **Ib** naik lebih rendah yaitu sebesar 0,52 persen. Perubahan pada **Ib** disebabkan oleh naiknya subkelompok konsumsi rumah tangga sebesar 0,44 persen dan subkelompok BPPBM naik sebesar 0,70 persen.

g. Subkelompok Budidaya Perikanan

NTP subkelompok budidaya perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,94 persen dari 96,93 pada Desember 2017 menjadi 97,84 pada Januari 2018. Terjadi peningkatan **It** sebesar 1,32 persen sedangkan **Ib** naik sebesar 0,38 persen. Naiknya **Ib** dipengaruhi oleh peningkatan subkelompok konsumsi rumah tangga sebesar 0,43 persen dan subkelompok BPPBM turun sebesar 0,25 persen.

2.4.2.2. Kehutanan

Pembangunan kehutanan mampu mendukung pembangunan ekonomi produktif melalui pengembangan secara proporsional kawasan hutan produksi. Sebaran kawasan produksi menurut jenisnya tersebar pada kabupaten/kota sebagai berikut: (i) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas $\pm 280.993,19$ Ha; (ii) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dengan luas $\pm 189.561,06$ Ha; (iii) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas $\pm 3.569,18$ Ha; dan (iv) Kawasan hutan rakyat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. dengan rincian sebagaimana Tabel 2.65.

Tabel 2.65
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (ha)

Fungsi Hutan	Luas		Luas		Luas		Luas	
	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%
	2013		2014		2015		2016	
Hutan Lindung	731 220,00	40.42	684,40	38,35	687 826,30	38,6	687 826,30	38,6
Suaka Alam dan Pelestarian Alam	350 330,00	19.37	516,70	28,95	508 093,90	28,5	508 093,90	28,5
Hutan Produksi Terbatas	197 250,00	10.9	173,98	9,75	189 561,06	10,6	189 561,06	10,6
Hutan Produksi Tetap	428 360,00	23.68	296,05	16,59	280 993,19	15,8	280 993,19	15,8
Hutan Produksi Dapat Dikonversi	101 830,00	5.63	113,60	6,37	3 569,18	0,2	3 569,18	0,2
Jumlah	1 808 990,00	100	1 784,74	100	1 670 043,63	100	1 670 043,63	100

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.4.2.3. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016 sebanyak 496 081 wisatawan yang terbagai atas Wisatawan Manca Negara 65 499 dan Wisatawan Nusantara 430 582. Nusa Tenggara Timur memiliki keunikan (kekhasan) yang layak sebagai destinasi wisata utama dan sebagai gerbang wisata di Selatan Indonesia. Beberapa permasalahan pembangunan di bidang pariwisata yaitu: (i) Belum memadainya dukungan infrastruktur, (ii) Belum optimalnya pengembangan kawasan kepariwisataan, (iii) Masih lemahnya promosi pariwisata; dan (iv) Belum terintegrasinya pemaketan perjalanan wisata. Masuknya Taman Nasional Komodo sebagai salah satu dari 7 (tujuh) keajaiban dunia dan “Sail Komodo” 2013 merupakan *entrypoint* menuju keberhasilan kepariwisataan. Secara bertahap kerja sama 3 (tiga) provinsi, NTT-Bali-NTB, yang telah dipelopori sejak tahun 2010 akan diorientasikan pada implementasi pembangunan kepariwisataan secara professional. Karena alasan tersebut, keterkaitan manajemen kepariwisataan dengan aspek-aspek sosial dan kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan kepariwisataan perlu dijadikan fokus dan prioritas pembangunan.

Tabel 2.66
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2014-2016

Wilayah	2014			2015			2016		
	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)			Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)			Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)		
	Manca negara	Domestik	Jumlah	Manca negara	Domestik	Jumlah	Manca negara	Domestik	Jumlah
Sumba Barat	583	2 456	3 039	496	3 697	4 193	546	3 766	4 312
Sumba Timur	634	9 589	10 223	600	10 908	11 508	722	13 205	13 927
Kupang	2	1 703	1 705	0	1 782	1 782	2	1 846	1 848
Timor Tengah Selatan	90	11 680	11 770	61	11 268	11 329	44	11 627	11 671
Timor Tengah Utara	156	5 624	5 780	182	4 542	4 724	285	6 065	6 350
Belu	2 327	16 369	18 696	2 894	17 792	20 686	3 831	24 999	28 830
Alor	38	1 670	1 708	33	2 743	2 776	27	2 289	2 316
Lembata	53	3 459	3 512	8	1 065	1 073	33	2 097	2 130

Flores Timur	285	20 063	20 348	160	19 020	19 180	105	21 154	21 259
Sikka	967	17 643	18 610	887	17 696	18 583	2 964	29 079	32 043
Ende	8 266	19 297	27 563	8 489	23 354	31 843	7 434	22 638	30 072
Ngada	4 418	5 480	9 898	5 668	4 470	10 138	3 233	4 617	7 850
Manggarai	4 928	15 683	20 611	4 786	16 816	21 602	2 778	13 034	15 812
Rote Ndao	83	584	667	443	660	1 103	112	657	769
Manggarai Barat	38 891	38 504	77 395	34 274	37 407	71 681	36 843	54 758	91 601
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	459	2 182	2 641	279	5 004	5 283	421	4 705	5 126
Nagekeo	36	7 078	7 114	34	7 262	7 296	13	7 393	7 406
Manggarai Timur	83	1 573	1 656	18	2 244	2 262	49	1 638	1 687
Sabu Raijua	33	1 053	1 086	18	1 751	1 769	12	1 566	1 578
Malaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Kupang	3 607	149 914	153 521	7 530	184 975	192 505	6 045	203 449	209 494
Nusa Tenggara Timur	65 939	331 604	397 543	66 860	374 456	441 316	65 499	430 582	496 081

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2016

2.4.2.4. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan didukung potensi panjang garis pantai ±5.700 Km dan luas wilayah laut mencapai 15.141.773,10Ha. Potensi yang mendukung sektor perikanan adalah Hutan Mangrove seluas ±51.854,83 Ha (11 spesies), Terumbu Karang sebanyak ±160 Jenis. Sumber daya laut sangat potensial untuk perikanan tangkap dan budidaya, dengan arah pengembangan masing-masing yaitu: (i) Kawasan peruntukan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota,(ii) Pengembangan kawasan minapolitan untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Sumba Timur, Sikka, Lembata, Rote Ndao, Alor, Kota Kupang, dan (iii) Pengembangan Komoditas Garam rakyat di Kabupaten Nagekeo, Ende, Timor Tengah Utara, Kupang, Lembata dan Alor. *Potensi Perikanan Tangkap*, terdiri dari: Potensi Lestari; Jumlah Ikan Ekonomis: (1) Ikan Pelagis (Tuna, Cakalang, Tenggiri, Layang, Selar, Kembung); (2) Ikan Demersal (Kerapu, Ekor Kuning, Kakap, Bambang, dll);(3) Komoditi Lainnya: (Lobster, Cumi-cumi, Kerang Darah, dll).

Potensi Perikanan Budi Daya, terdiri dari budidaya Laut seluas 5,870 Ha (Rumput Laut, Mutiara, Kerapu); Budidaya Air Payau seluas 35,455 Ha (Udang dan Bandeng); Budidaya Air Tawar yang meliputi kolam air tawar seluas 8,375 Ha dan Mina Padi seluas 85 Ha. *Potensi Budidaya Rumput Laut*; Kabupaten yang budidaya rumput lautnya telah berkembang yaitu: Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai Barat. Komunitas rumput laut unggulan yang dibudidaya adalah *Echeuma CoTonii*, *Eucheuma Sp*, dan Alga Merah (*red algae*). Luas lahan potensial untuk budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 51.870 Ha, dengan potensi produksi sebesar 1.836.847 Ton/tahun.

Tabel 2.67

Produksi Perikanan Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ton)

Produksi Perikanan Laut	2012	2013	2014	2015	2016
Paperek	453.67	505.31	633.6	676.8	1 058,18
Kakap Merah Red Snappers	2 466,22	2 225,11	2 413,90	2 886,6	4 603,20
Kerapu	4 050,81	3 784,41	4 410,90	4 877,0	8 847,71
Kakap	465.82	780.39	1 024,10	1 092,7	902.29
Ekor Kuning	699.47	1 345,90	1 434,20	1 530,9	562.49
Kembung	3,354.95	3 939,26	3 653,90	3 896,2	8 203,00
Pari	293.83	639.64	525.3	560.3	279.23
Selar	4,347.78	4 378,12	4 493,70	4 797,2	5 611,84
Ikan Terbang	989.88	1 907,05	1 974,60	2 106,6	3 444,48
Julung-Julung	1 368,99	2 721,11	2 560,20	2 730,4	4 342,06
Teri	2 598,40	2 698,95	2 766,90	2 950,3	2 414,95
Tenggiri	649.19	1 864,93	1 802,40	1 921,6	919.78
Cakalang	8 037,0	11 516,48	11 451,30	14 289,4	4 217,18
Tongkol	5 386,29	11 625,25	11 595,40	12 354,8	10 373,57
Biji Nangka	936.6	1 024,40	1 152,50	1 231,5	1 117,99
Layang	4 408,36	9 460,74	9 609,10	10 244,1	21 176,63
Tembang	6,595.34	10 645,21	10 580,50	11 295,0	10 457,68
Tuna	1 708,90	3 653,22	3 762,60	4 012,3	1 069,17
Ikan Lainnya	16 809,97	27 770,16	29 559,10	32 585,0	82 063,73
Udang Barong	9.08	21.34	24.8	26.4	1.52
Udang lainnya	92.07	105.14	78.4	83.7	632.1
Cumi-cumi	833.21	911.67	1 549,30	1 665,0	752.85
Teripang	194.84	34.72	35.3	37.6	22.98
Rumput Laut	1 185 014,50	1 802 090,33	1 967 844,70	2 056 151,51	1 836 847,09
Komoditas Laut Lainnya	469.93	872.67	875.6	927.6	1.52

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2.68

Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut Menurut Kategori Usaha Tahun 2015 – 2016

Kategori Usaha	2015	2016	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanpa Perahu	4.828	1.365	-71,73
Perahu Tanpa Motor	13.302	10.393	-21,87
Motor tempel	5.516	5.625	1,98
Kapal Motor	7.115	7.619	7,08
< 5 GT	4.291	4.467	4,10
5 GT ke atas	2.824	3.152	11,61
Jumlah	37.876	32.621	-13,87

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari Tabel 2.68. diketahui bahwa usaha perikanan laut masih lebih banyak dilakukan dengan menggunakan perahu tanpa motor yaitu sebanyak 10.393 rumah tangga, walaupun jumlah ini mengalami penurunan 21,87 persen dibanding tahun sebelumnya, diikuti oleh rumah tangga yang berusaha dengan motor tempel sebanyak 5.625 rumah tangga atau meningkat 1,98 persen, sedangkan yang paling sedikit adalah rumah tangga yang berusaha tanpa perahu sebanyak 1.365 rumah tangga.

Tabel 2.69
Produksi Tangkap & Budidaya Sektor Perikanan Provinsi NTT

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
Produksi tangkap (ton)	108,000	118,827	173 296
Produksi Budidaya (ton)	1,971,793	2,061,408	1,841,935
Jumlah produk ekspor (ton)	692	1,190	1,259
Tingkat konsumsi ikan	24.75	25.63	26.21

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menurunnya jumlah rumah tangga usaha perikanan laut pada tahun 2016 tidak mempengaruhi jumlah produksi perikanan laut. Pada Tahun 2015 produksi perikanan laut tercatat sebesar 118 292,40 ton meningkat menjadi 173. 296 ton pada Tahun 2016 atau mengalami peningkatan produksi sebesar 45,84 persen.

2.4.2.5. Perdagangan

Kegiatan perdagangan Nusa Tenggara Timur didukung perdagangan dalam Negeri melalui perdagangan daerah dan perdagangan keluar daerah melalui perdagangan antar pulau dan ekspor. Tujuan ekspor dominan yaitu Timor Leste dan China serta Amerika Serikat. Perkembangan ekspor dan Impor periode 2008-2016 sebagaimana table 2.70 dibawah ini.

Tabel 2.70
Perkembangan ekspor dan Impor tahun 2013-2016

Tahun	Nilai (juta US \$)		
	Ekspor	Impor	Selisih
2013	21.24	27.06	-5.82
2014	20.78	31.92	-11.13
2015	23.94	7.92	16.12
2016 (Jan)	1.62	0.70	0.91

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Maret 2016

2.4.2.6. Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Daerah. Pengembangan industri di desa dan di kelurahan kondisinya yaitu; Industri Kulit 11 Desa (0,37%), Industri dari Kayu 940 Desa/Kelurahan (31,69%), industri dari bahan logam mulia 102 Desa (3.44%), Industri Anyaman 344 Desa (11.60%), Industri Gerabah/Keramik/Batu 289 Desa (9.74%), Industri dari Kain/Tenun 999 Desa (33.68%) Industri Makanan dan Minuman 560 Desa (18.88%) dan industri lainnya 172 Desa (5.80%).

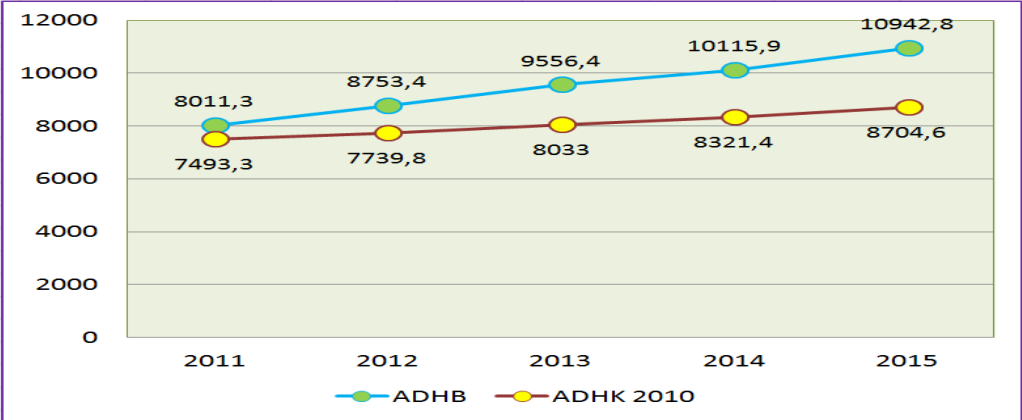
2.5. Aspek Daya Saing Daerah

2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami peningkatan baik dalam nominal (Atas dasar harga berlaku) maupun Riil (Atas Dasar harga Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.26 berikut ini:

Gambar 2.26
Rata-Rata Konsumsi Akhir Rumah Tangga Perkapita/Tahun (Ribuan Rupiah)

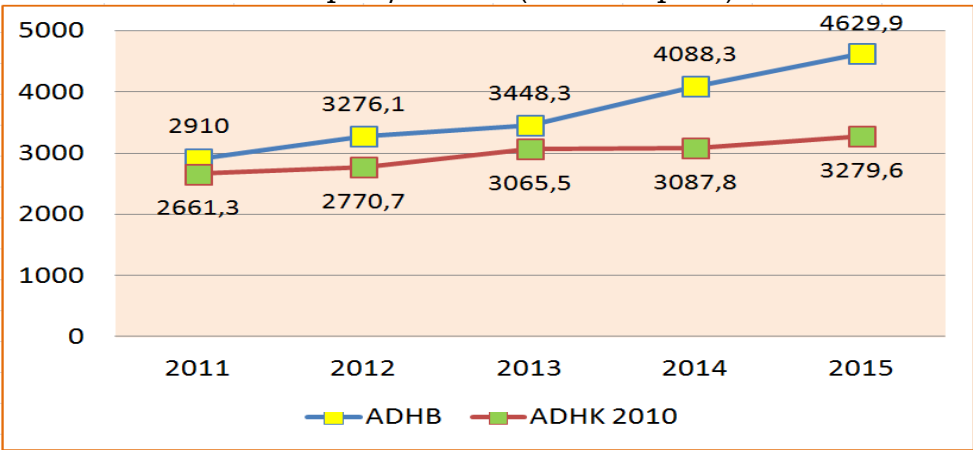


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2016

2.5.1.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Perkapita

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita adalah Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas.

Gambar 2.27
Rata-Rata Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Perkapita/Tahun (Ribuan Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2016

2.5.1.3. Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita menunjukkan perkembangan sebagai dampak dari peningkatan pendapatan masyarakat. Tingkat pengeluaran penduduk sebagaimana tabel 2.71 dibawah ini.

Tabel 2.71
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita tahun 2011-2013

No	Pengeluaran per Kapita	2011	2012	2013	Perkembangan (+/-)
1	Makanan	219,818	233,972	247.517	13.545
	Prosentase (%)	58.56	56.94	56,05	(5,79)
2	Bukan makanan	155,579	176,935	194.059	17.124
	Prosentase (%)	41.44	43.06	43,95	9,68
	NTT	375,397	410,907	441.576	30.669

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2013

2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.5.2.1. Panjang Jalan dan Status Jalan sesuai Kewenangan

Panjang Jalan pada Tahun 2016 secara keseluruhan berjumlah 18.728,68 Km yang terdiri atas Jalan Negara sejumlah 1.340,92 Km, Jalan Provinsi sejumlah 2.683,63 Km dan Total Jalan Kabupaten/Kota sejumlah 17.450,47 Km. Pada Tahun 2016 jumlah panjang jalan Provinsi menjadi 2.471,64 Km. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.72 dibawah ini.

Tabel 2.72
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Km) Tahun 2014-2016

Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya Jalan (km)											
	Jalan Negara	Jalan Provins i	Jalan Kan/ Kota*	Jumlah	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kab/ Kota*	Jumlah	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kab/ Kota*	Jm lh
	2014				2015				2016			
Sumba Barat	15,00	74,54	444,38	533,92	-	37,60	-	37,60	...	37,60	...	...
Sumba Timur	67,90	407,72	1 101,40	1 577,02	na	243,09	-	243,09	...	264,62	...	...
Kupang	65,10	170,88	697,47	933,45	-	271,76	-	271,76	...	271,76	...	...
Timor Tengah Selatan	88,70	306,34	1 192,90	1 587,94	-	306,34	-	306,34	...	306,34	...	...
Timor Tengah Utara	71,53	128,25	848,85	1 048,62	na	127,04	-	127,04	...	127,04	...	...
Belu	73,00	156,11	524,31	753,42	-	64,18	-	64,18	...	64,18	...	...
Alor	145,43	62,13	1 129,93	1 309,35	-	65,57	-	65,57	...	65,57	...	...
Lembata	-	21,00	547,29	568,29	na	21,00	-	21,00	...	21,00	...	...
Flores Timur	73,00	165,21	583,46	821,67	16	159,89	-	175,89	...	159,89	...	...
Sikka	-	28,57	811,29	839,86	-	90,34	-	90,34	...	90,34	...	...
Ende	130,30	160,30	824,60	1 115,20	13,14	146,16	-	159,30	...	146,16	...	...
Ngada	75,35	211,14	1 041,62	1328,11	-	260,49	-	260,49	...	260,49	...	...
Manggarai	166,94	34,50	1 149,80	1 351,24	na	87,50	-	87,50	...	87,50	...	...
Rote Ndao	-	79,01	459,83	538,84	25,95 +na	28,01	-	28,01	...	28,01	...	...
Manggarai Barat	89,70	159,05	702,60	951,35	-	143,80	-	143,80	...	143,80	...	...
Sumba Tengah	58,00	27,00	615,50	700,50	-	43,98	-	43,98	...	43,98	...	...
Sumba Barat Daya	37,20	63,20	859,30	959,70	-	90,02	-	90,02	...	107,64	...	...
Nagekeo	60,47	171,60	935,75	1 167,82	29,46	60,36	-	89,82	...	21,36	...	...
Manggarai Timur	85,95	166,00	1 281,29	473,26	-	113,00	-	113,00	...	113,00	...	...
Sabu Rajiua	-	45,00	124,12	169,12	20,12+na	-	-	0,00	...	-	...	...
Malaka	-	-	-	-	-	90,48	-	90,48	...	90,48	...	...
Kota Kupang	37,35	46,08	1 574,78	1 658,21		20,88	-	51,08	...	20,88	...	...
Jumlah	1 340,92	2 683,63	17 450,47	18 728,68	88,80	2.471,49	-	2.560,29	...	2.471,64	...	...

na : ada jalan Nasional tidak ada data
-): tidak ada jalan nasional
...): Data tidak ada di NTT dalam Angka Tahun 2017

2.5.2.2. Kondisi Jalan Provinsi

Total panjang Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2016 yaitu sejumlah 2.471,64Km dengan Jenis Permukaan yang diaspal sejumlah 2.338,66 Km dan yang belum diaspal sejumlah 132,98 Km dengan kondisi jalan baik 1.248,96 tahun 2016. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.73. dibawah ini.

Tabel 2.73
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (km), Tahun 2015-2016

Kabupaten/Kota	Jenis Permukaan Jalan			Jenis Permukaan Jalan		
	Aspal	Tidak Diaspal	Jumlah	Aspal	Tidak Diaspal	Jumlah
	2015			2016		
Sumba Barat	37.6	-	37.6	37.6	-	37.6
Sumba Timur	586.17	-	586.17	264.62	-	264.62
Kupang	271.76	-	271.76	271.76	-	271.76
Timor Tengah Selatan	241.23	65.11	306.34	244.23	62.11	306.34
Timor Tengah Utara	127.04	-	127.04	127.04	-	127.04
Belu	63.28	0.9	64.18	63.28	0.9	64.18
Alor	65.57	-	65.57	65.57	-	65.57
Lembata	21	-	21	21	-	21
Flores Timur	159.89	-	159.89	159.89	-	159.89
Sikka	90.34		90.34	90.34	-	90.34
Ende	146.16	-	146.16	146.16	-	146.16
Ngada	223.93	35.31	259.24	225.18	35.31	260.49
Manggarai	87.5	-	87.5	87.5	-	87.5
Rote Ndao	28.01	-	28.01	28.01	-	28.01
Manggarai Barat	143.81	-	143.81	143.8	-	143.8
Sumba Tengah	43.98	-	43.98	43.98	-	43.98
Sumba Barat Daya	280.06	-	280.06	107.64	-	107.64
Nagekeo	60.36	-	60.36	21.36	-	21.36
Manggarai Timur	78.34	34.66	113	78.34	34.66	113
Sabu Raijua	-	-	0	-	-	0
Malaka*)	90.48	-	90.48	90.48	-	90.48
Kota Kupang	20.88	-	20.88	20.88	-	20.88
Jumlah/Total	2 867,39	135.98	3 003,37	2 338,66	132.98	2 471,64

Keterangan/Notes: *) Tergabung dengan Kabupaten Belu/Included in Belu Regency
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Masing-masing Kabupaten/Kota

2.5.2.3. Perkembangan Angkutan Udara Sipil

Jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke NTT pada bulan November 2017 sebanyak 150.521 orang yang datang sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 149.062 orang. Pada tahun 2016

jumlah yang datang 1.687.407 orang/tahun dan jumlah penumpang yang berangkat 1.653.065 orang/tahun, dapat dilihat pada table 2.74.

Tabel 2.74
Jumlah Penumpang Angkutan Udara menurut Bandara Sipil di NTT
November – Desember 2017

Pelabuhan Udara	Arus Penumpang yang Datang dan Berangkat Lewat Pelabuhan Udara Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)					
	Datang		Berangkat		Datang (Kondisi) November	Berangkat (Kondisi) November
	2015	2016	2015	2016	2017	2017
Tambolaka	64 048	75 755	66 964	78 331	8 707	8 947
Umbu Mehang Kunda	56 881	76 083	55 974	77 027	6 077	6 193
Terdamu	7 660	6 024	8 837	6 631	487	563
A. A. Bere Tallo, Belu	11 425	36 773	11 146	37 936	3 940	3 707
Mali	34 150	50 804	33 401	51 197	4 818	5 286
Wunopito	11 932	12 843	12 253	13 101	1 360	1 409
Gewayantana	25 162	37 566	24 300	36 906	3 630	3 759
Frans Seda	72 464	107 493	68 548	108 988	7 207	7 190
H.H. Aroebusman	74 066	97 094	77 046	91 389	8 293	8 082
Tureleleo	22 863	30 773	23 735	34 161	2 598	2 715
Frans Sales Lega	16 507	12 701	16 270	9 805	1 234	1 036
Lekunik	12 349	21 309	12 653	20 420	1 905	2 136
Komodo	112 851	174 404	120 437	189 755	17 377	18 758
El Tari	752 429	947 785	754 940	897 418	82 888	79 281
Jumlah	1 274 787	1 687 407	1 286 504	1 653 065	150 521	149 062

Sumber : BPS Tahun 2017

2.5.2.4. Jumlah Kantor Bank di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah Kantor Bank diseluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2014 adalah sejumlah 407 dengan jumlah terbanyak berada di Kota Kupang sejumlah 140 kantor. Rincian Jumlah Bank menurut Kabupaten Kota di Provinsi Nua Tenggara Timur Tahun 2014 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.74 dibawah ini

Tabel 2.75
Jumlah Kantor Bank menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014

Kabupaten	KANTOR BANK			
	BRI ***)	BPD	Lainnya **)	Jumlah
01. Sumba Barat	6	4	-	10
02. Sumba Timur	12	12	-	24
03. Kupang	-	-	-	-
04. Timor Tengah Selatan	13	8	-	21
05. Timor Tengah Utara	9	6	-	15
06. Belu	11	7	-	18
07. Alor	6	6	-	12
08. Lembata	-	8	-	8
09. Flores Timur	13	4	-	17
10. Sikka	8	6	6	20
11. Ende	11	10	11	32
12. Ngada	13	4	-	17
13. Manggarai	14	10	-	24

Kabupaten	KANTOR BANK			
	BRI ***)	BPD	Lainnya **)	Jumlah
14. Rote Ndao	-	4	-	4
15. Manggarai Barat	-	5	-	5
16. Sumba Tengah	-	3	-	3
17. Sumba Barat Daya	-	7	-	7
18. Nagekeo	-	3	-	3
19. Manggarai Timur	-	4	-	4
20. Sabu Raijua	-	2	-	2
21. Malaka *)	-	1	-	1
71. Kota Kupang	24	20	118	160
Jumlah	140	134	135	407

Catatan: *) data tergabung dengan Kabupaten Belu
 **) BII, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bukopin, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara, Bank Central Asia, Bank Artha Graha, Bank Muamalat, BTPN, Bank Mega, Bank Sinarmas, Bank Syariah Mandiri , Bank CIMB Niaga, Bank Pundi, Bank Perkreditan Rakyat
 ***) Kantor Cabang BRI, Tidak Termasuk BRI Unit
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015

2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi
2.5.3.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi di Provinsi NTT pada triwulan III 2017 tumbuh melambat, baik pada sektor pemerintah maupun swasta. PMTB/investasi tumbuh sebesar 3,30% (yoy), atau melambat dibandingkan triwulan II 2017 maupun periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing 7,32% (yoy) dan 3,87% (yoy). Perlambatan PMTB/investasi pada triwulan laporan terindikasi dari menurunnya realisasi proyek baru. Berdasarkan data BCI Asia, proyek-proyek baru yang dibangun pada triwulan III 2017 hanya bernilai total sekitar Rp. 927,06 miliar, menurun dibandingkan triwulan II 2017 yang mencapai Rp. 2,34 triliun. Proyek baru tersebut meliputi 10 kategori dengan tiga terbesar untuk pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur senilai Rp. 531,28 miliar, fasilitas kesehatan senilai Rp. 86,58 miliar dan hotel senilai Rp. 80 miliar. Pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur sumber daya air masih menjadi fokus investasi pemerintah, di antaranya pengendalian arus air di sungai, saluran irigasi dan embung. Pembangunan infrastruktur sipil pengendalian arus air sungai dan pemecah ombak di tiga Kabupaten (Belu, Malaka dan Ende) menjadi yang terbesar dengan nilai proyek sebesar Rp. 177,16 miliar. Pengembangan irigasi di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Ende menduduki peringkat kedua terbesar dengan nilai sebesar Rp. 144,66 miliar, sementara pembangunan irigasi yang baru hanya sebesar Rp. 12 miliar. Selanjutnya pembangunan embung di Pulau Sumba (Kabupaten Sumba Timur, Tengah, Barat dan Barat Daya) serta di Kabupaten Sabu Raijua menjadi proyek infrastruktur terbesar ketiga dengan nilai proyek Rp. 73,97 miliar. Pembangunan RSUD Mgr. Gabriel Manek di Kota Atambua, Kabupaten Belu menjadi pembangunan fasilitas kesehatan terbesar pada triwulan laporan dengan nilai Rp. 37,23 miliar, selain juga pembangunan pusat layanan kesehatan di berbagai wilayah Pulau Timor, Alor dan Flores bernilai total Rp. 49,35 miliar.

Adapun proyek strategis nasional yang sedang berjalan di Provinsi NTT saat ini seperti Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang telah memasuki tahap penyelesaian (progress ±96%) dan direncanakan dan diresmikan oleh Presiden pada tanggal 20 Desember 2017 bertepatan dengan hari ulang tahun NTT. Pekerjaan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu telah mencapai 88,33% dari target hingga Desember 2018. Sementara itu, pekerjaan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka (*progress* saat ini 11,89%, target selesai Desember 2020) dan Temef (target selesai tahun 2022) di Kabupaten TTS saat ini dalam tahap persiapan *groundbreaking*. Di sisi lain, perlambatan kegiatan investasi pemerintah tidak sejalan dengan realisasi anggaran investasi pemerintah sampai dengan triwulan III 2017 yang naik 20,40% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota memang lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 sebesar -35,81% dan -2,63%. Namun demikian, realisasi anggaran investasi APBN, sebagai anggaran investasi utama di Provinsi NTT naik sebesar 2,51% sehingga mendorong peningkatan realisasi anggaran investasi pemerintah secara keseluruhan sampai dengan triwulan III 2017.

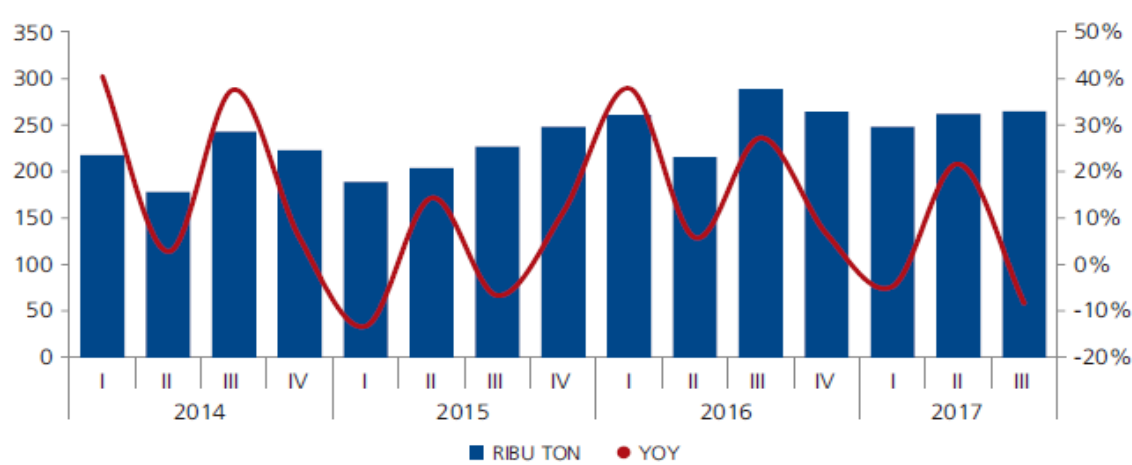
Tabel 2.76 PDRB Komponen PMTB/Investasi Provinsi NTT Triwulan III 2017

URAIAN	TOTAL		2016		2017		Bobot	III yoy
	2015	2016	II	IV	I	II		
PMTB BANGUNAN	24.089.547	28.518.052	6.481.168	7.683.971	7.918.129	8.311.883	85,10	5,76
PMTB NON BANGUNAN	6.906.516	7.206.932	2.026.258	1.657.954	1.417.992	1.455.059	14,90	-11,39
PMTB	30.996.063	35.724.984	8.507.426	9.341.925	9.336.121	9.766.942	100,0	3,30

Sumber: BPS (diolah)

Perlambatan pertumbuhan PMTB/investasi tercermin pula dari konsumsi semen di Provinsi NTT yang terkontraksi pada triwulan laporan. Pertumbuhan konsumsi semen turun menjadi -8,39% (yoy) dari triwulan II 2017 dan periode yang sama tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 21,62% (yoy) dan 27,23% (yoy).

GRAFIK 2.28
REALISASI KONSUMSI SEMEN PROVINSI NTT

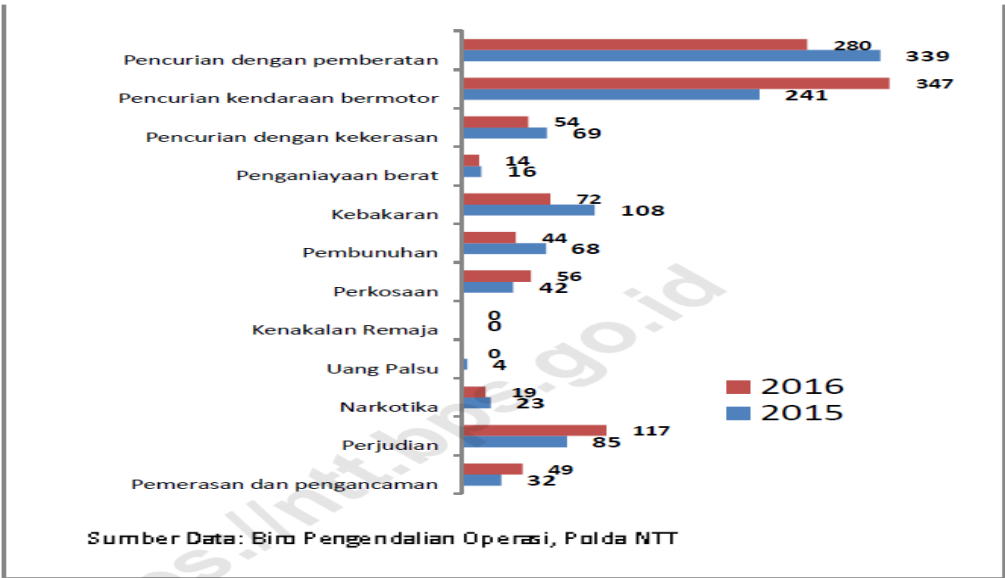


Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah

2.5.3.2. Angka Kriminalitas

Gambar 2.29 menunjukkan bahwa dari sepuluh jenis tindak kriminalitas yang tergolong sebagai tindak kriminalitas menonjol adalah kasus pencurian kendaraan bermotor paling signifikan mengalami kenaikan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2015 naik menjadi 347 kasus pada tahun 2016, peningkatan sebanyak 106 kasus. Perjudian juga mengalami kenaikan cukup banyak yaitu dari 85 kasus pada tahun 2015 menjadi 117 kasus pada tahun 2016. Sementara yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu 339 kasus pada tahun 2015 menjadi 280 kasus padatahun 2016.

Gambar 2.29 Tindak Kriminal yang Menonjol di NTT Tahun 2015-2016



Sumber : BPS Tahun 2017

2.5.3.3. Lama Proses Perizinan

Sesuai jenis izin yang dikeluarkan Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (KTSP), waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perizinan dikagorikan menjadi 3 yaitu; (i) Izin yang membutuhkan survey 7 – 14 hari kerja, (ii) Izin yang tidak membutuhkan survey 3 hari dan (iii) Izin penelitian dan izin lainnya langsung bisa diambil.

2.5.3.4. Jumlah dan Macam Pajak/Retribusi

Jumlah dan dan macam pajak/retribusi daerah untuk provinsi yang dapat mendukung daya saing daerah baik. Kondisi pencapaian untuk tahun 2013 sebagaimana tabel 2.77 dibawah ini.

Tabel 2.77

Pajak dan retribusi Provinsi Tahun 2016

No	Pajak dan Retribusi	Jumlah (Rp)
1	Pajak	721,405,575,500
2	Retribusi	32,225,453,000
	Jumlah	753,631,028,500

Sumber: Dispenda Prov. NTT, 2016

2.5.3.5. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha

Dalam rangka peningkatan iklim investasi di daerah yang kondusif maka telah ditetapkan Peraturan Daerah yang menjamin kepastian hukum setiap investasi. Peraturan daerah pendukung iklim investasi meliputi; (1) Perda Penanaman Modal Daerah, (2) Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, (3) Perda Retribusi Jasa Umum, (4) Perda Retribusi Jasa Usaha, (5) Perda Izin Usaha Perikanan, (6) Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, (7) Perda Kawasan Industri Bolok. (8) Perda Izin Trayek Kendaraan Bermotor, (9) Perda Penyertaan Modal Askrida, (10) Perda Penyertaan Modal pada BUMD, (11) Perda Pengelolaan usaha Pertambangan, (12) Perda Pajak Daerah, (13) Perda Kelembagaan kantor Perizinan Satu Pintu (KTSP), dan (14) Perda Pengelolaan Cendana.

2.5.4. Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja di NTT masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebesar 1,34 juta orang atau 57,92 persen, dengan persentase terbesar terdapat di perdesaan sebesar 65,34 persen sedangkan di perkotaan 25,96 persen.

Tabel 2.78
Tingkat Pendidikan Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerahdi NTT, 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Daerah				Total	
	Laki-laki		Perempuan		Kota		Desa		Absolut	%
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<=SD	732.706	55,87	128.835	60,58	113.477	25,96	1.230.289	65,34	1.343.766	57,92
SMP	179.811	13,71	113.260	12,77	54.394	12,44	254.252	13,50	308.646	13,30
SMA Umum	206.242	15,73	39.628	11,23	110.380	25,25	209.122	11,11	319.502	13,77
SMA Kejuruan	76.322	5,82	29.152	3,93	48.639	11,12	67.311	3,57	115.950	5,00
Diploma I/II/III	22.973	1,75	86.775	2,89	21.113	4,83	31.012	1,65	52.125	2,25
S1/S2/S3	93.297	7,12	128.835	8,60	89.160	20,40	90.912	4,83	180.072	7,76
Total	1.311.351	100,00	1.008.710	100,00	437.163	100,00	1.882.898	100,00	2.320.061	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Pekerja berpendidikan Tamat Sekolah Menengah Pertama sebesar 0,31 juta orang atau 13,30 persen. Tenaga kerja berpendidikan SMA Kejuruan memberi kontribusi sebesar 5,00 persen, lebih rendah dibanding SMA Umum yang sebesar 13,77 persen. Demikian pula tenaga kerja berpendidikan diploma lebih rendah yaitu 2,25 persen dibanding berpendidikan universitas yang sebesar 7,76 persen.

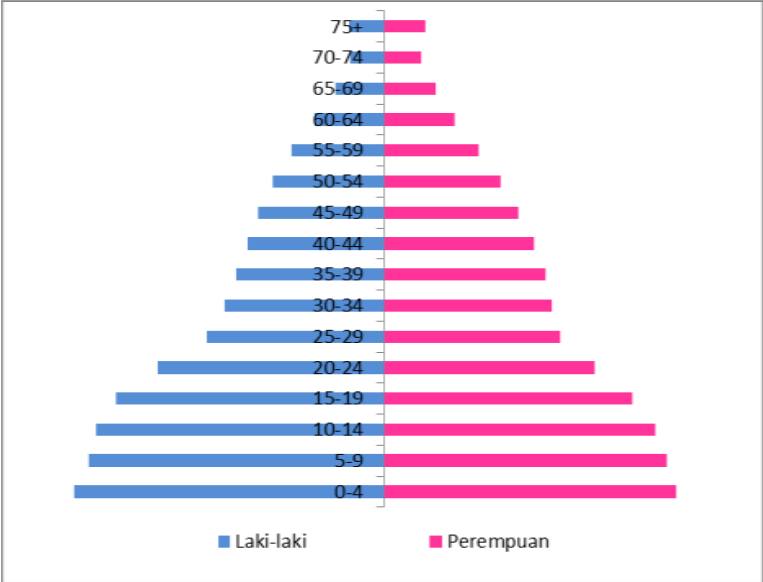
Bila kita pilah menurut jenis kelamin, pekerja perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki untuk tingkat pendidikan tamat SD ke bawah. Namun seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan kesetaraan gender, pekerja perempuan dengan tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Demikian pula bila kita pilah menurut daerah tempat tinggal,

pekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah lebih banyak di perdesaan dibanding perkotaan, sebaliknya pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih banyak di perkotaan dibanding di perdesaan.

b. Rasio Ketergantungan

Komposisi penduduk memiliki hubungan kuat dengan kesempatan kerja. Rasio antara mereka yang berumur dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun terhadap umur produktif atau *Dependency Ratio* (DR), yaitu jumlah orang yang harus ditanggung oleh tiap penduduk usia produktif. DR terendah 44 namun idealnya sebesar 50 yaitu 100 orang umur produktif menanggung 50 orang umur non produktif atau 2 orang produktif menanggung 1 orang non produktif. Penduduk NTT kondisi pertengahan tahun (Juni) 2017 sebesar 5,29 juta orang, 3,20 juta orang usia produktif dan 2,09 juta usia non produktif atau DR sebesar 65,29. DR ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 65,99, namun masih cukup tinggi. Setiap 100 orang penduduk umur produktif di NTT, menanggung 65 orang umur non produktif. DR laki-laki 66,78 dan DR perempuan 63,85. DR penduduk perkotaan 56,44 dan DR penduduk perdesaan 67,93. Tiap pencari nafkah harus menyokong sejumlah besar orang dan oleh karenanya memerlukan penghasilan yang lebih besar untuk dapat keluar dari kemiskinan, utamanya laki-laki dan di perdesaan.

Gambar 2.30
Piramida Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017



Sumber : BPS Tahun 2017

2.6. EVALUASI RKPD TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Mengingat pelaksanaan RPJMD 2013-2018 dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 telah berakhir, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai

dengan dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin.

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017 yang merupakan Tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 8 Misi Pembangunan Daerah, yaitu:

I. Misi 1: Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka Terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing.

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 3 perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT. Sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Pendidikan

- 1) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
- 2) Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
- 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 5) Program Hibah Pendidikan
- 6) Program Bantuan Sosial Kependidikan

B. Program Urusan Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

C. Program Urusan Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

D. Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- 3) Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

II. Misi 2: Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat.

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang, dengan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

- 1) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
- 3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 4) Program Peningkatan Gizi
- 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- 6) Program Manajemen Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan
- 7) Program Upaya Kesehatan Perorangan
- 8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- 9) Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
- 10) Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan

III. Misi 3: Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisata dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal.

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 11 perangkat daerah, yaitu:

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT
- Kantor P2TSP Provinsi NTT
- Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT
- Dinas Peternakan Provinsi NTT
- Dinas Kehutanan Provinsi NTT

Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Ketenagakerjaan

- 1) Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan
- 2) Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
- 3) Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi

B. Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi
- 2) Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- 3) Program Hibah Koperasi

C. Program Urusan Penanaman Modal

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 2) Program Peningkatan Investasi Daerah
- 3) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
- 5) Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 6) Program Fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha
- 7) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian

D. Program Urusan Pariwisata

- 1) Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, Destinasi dan Promosi Pariwisata
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
- 3) Program Hibah Pariwisata

E. Program Urusan Ketahanan Pangan

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
- 2) Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani

F. Program Urusan Pertanian

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 3) Program Pengembangan Benih dan Pembibitan
- 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- 6) Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan
- G. Program Urusan Kehutanan
 - 1) Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan
- H. Program Urusan Perindustrian dan Perdagangan
 - 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - 3) Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
 - 4) Program Hibah Bidang Perekonomian
- IV. Misi 4: Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah
 Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 23 perangkat daerah, yaitu:
 - 1) Bappeda Provinsi NTT
 - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
 - 3) Satpol Pamong Praja Provinsi NTT
 - 4) Biro Umum Setda Provinsi NTT
 - 5) Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
 - 6) Biro Hukum Setda Provinsi NTT
 - 7) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
 - 8) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
 - 9) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT
 - 10) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
 - 11) Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT
 - 12) Sekretariat Dewan Provinsi NTT
 - 13) Inspektorat Provinsi NTT
 - 14) Kantor Penghubung Provinsi NTT
 - 15) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
 - 16) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT
 - 17) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
 - 18) Sekretariat Dewan KORPRI Provinsi NTT
 - 19) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi NTT
 - 20) Badan Arsip Daerah Provinsi NTT
 - 21) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

Program Prioritas yang dijalankan adalah:

- A. Program Urusan Perencanaan
 - 1) Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 2) Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional
- B. Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - 1) Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitas Kewaspadaan Nasional
 - 2) Program Fasilitas Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

- 3) Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat
 - 4) Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah
 - 5) Program Hibah Pengamanan dan Ketertiban
- C. Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
 - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 - 4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
 - 6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - 7) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
 - 8) Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah
 - 9) Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
 - 10) Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
 - 11) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan dan Kependidikan
 - 12) Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan.
 - 13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - 14) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan Dan Otonomi Daerah
 - 15) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
 - 16) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - 17) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 - 18) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - 19) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat
 - 20) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penataan Aset
 - 21) Program Pendidikan Kedinasan
 - 22) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - 23) Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan KORPRI
 - 24) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
 - 25) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
 - 26) Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
 - 27) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian

- D. Program Urusan Kearsipan
 - 1) Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan
 - 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - E. Program Urusan Komunikasi Dan Informasi
 - 1) Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah
 - 2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
 - 3) Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
 - 4) Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi
 - 5) Program Pengembangan Data dan Informasi
 - F. Program Urusan Umum
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- V. Misi 5: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 8 perangkat daerah, yaitu:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT
 - 2) Dinas Kesehatan Provinsi NTT
 - 3) Dinas Perhubungan Provinsi NTT
 - 4) Bappeda Provinsi NTT
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT
 - 6) Dinas Kehutanan Provinsi NTT
 - 7) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT

Program Prioritas yang dilaksanakan adalah:

- A. Program Urusan Pekerjaan Umum
 - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 2) Program Pengolahan Sumber Daya Air
 - 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
 - 4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan
 - 5) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
 - 6) Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum
- B. Program Urusan Kesehatan
 - 1) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- C. Program Urusan Perhubungan
 - 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
 - 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- D. Program Urusan Perencanaan
 - 1) Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang
- E. Program Urusan Lingkungan Hidup
 - 1) Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

- 2) Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Hutan
 - F. Program Urusan Kehutanan
 - 1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - G. Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1) Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi
 - 2) Program Pengembangan Pertambangan
 - 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
- VI. Misi 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
- Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:
- 1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan
 - 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - 3) Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- VII. Misi 7: Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan
- Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:
- 1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
 - 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - 3) Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - 4) Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan
- VIII. Misi 8: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan
- Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah yaitu:
- 1) Bappeda Provinsi NTT
 - 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT
 - 3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT
 - 4) Dinas Sosial Provinsi NTT
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
- Program Prioritas yang dijalankan adalah:
- A. Program Urusan Perencanaan
 - 1) Program Hibah Ekonomi Produktif
 - B. Program Urusan Pemberdayaan MasyarakatDesa
 - 1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa

- 3) Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan
- 4) Program Hibah Perumahan (P2LDT)
- C. Program Urusan Perbatasan
 - 1) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- D. Program Urusan Sosial
 - 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
 - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - 3) Program Penyandang Penyakit Sosial
 - 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - 5) Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga
- E. Program Urusan Penanggulangan Bencana Daerah
- F. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2016, maka Bappeda Provinsi NTT telah melakukan sosialisasi Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD, Renja dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, baik melalui pelatihan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada Surat yang dikirimkan oleh Bappeda kepada seluruh perangkat daerah.

Laporan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja perangkat daerah ini dikompilasi kedalam laporan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 untuk keadaan triwulan IV.

Tabel 2.79
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran
Menurut 8 Misi Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2017
Keadaan Triwulan IV

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET	REALISASI		TARGET	REAL		
			(%)	Rp.	(%)	(%)	(%)	KEU	FISIK
MISI 1 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang berdaya saing									
1	DINAS PENDIDIKAN	425.485.879.000	82,68	337.288.660.567	79,27	90,79	90,82	T	T
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.948.115.000	99,97	14.832.963.860	70,81	99,97	70,81	S	S
3	DINAS KEBUDAYAAN	8.581.021.000	100,00	8.338.117.571	97,17	100,00	97,17	ST	ST
4	DINAS PERPUSTAKAAN	3.228.014.000	100,00	3.107.083.974	96,25	100,00	100,00	ST	ST
	JUMLAH MISI 1	458.243.029.000	95,66	363.566.825.972	79,34	97,69	89,70	T	T
MISI 2 : Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat									
1	DINAS KESEHATAN	50.391.120.000	100,00	38.160.650.934	75,73	100,00	75,73	S	S
2	RSUD PROF. DR. WZ. JOHANNES	188.041.317.000	100,00	115.847.703.135	61,61	100,00	61,61	R	R
	JUMLAH MISI 2	238.432.437.000	100,00	154.008.354.069	64,59	100,00	68,67	R	S
MISI 3 : Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisata dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal									
1	DINAS PERTANIAN	36.222.116.000	99,96	33.698.393.762	93,03	99,96	95,74	ST	ST
2	DINAS PARIWISATA	23.848.816.500	100,00	20.711.645.484	86,85	100,00	86,85	T	T
P3	DINAS PETERNAKAN	23.821.246.000	100,00	22.833.999.770	95,86	100,00	95,86	ST	ST
4	DINAS KEHUTANAN	13.015.269.440	100,00	11.722.907.529	90,07	100,00	90,07	T	T
5	DINAS PERDAGANGAN	5.545.758.000	100,00	5.223.761.723	94,19	100,00	94,19	ST	ST

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET (%)	REALISASI		TARGET (%)	REAL (%)		
				Rp.	(%)				
6	DINAS PERINDUSTRIAN	7.121.308.000	100,00	6.610.003.020	92,82	100,00	92,82	ST	ST
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.830.021.000	100,00	8.263.893.173	93,59	100,00	93,59	ST	ST
8	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	8.651.210.000	90,00	8.028.149.186	92,80	90,00	92,80	ST	ST
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.908.920.000	100,00	4.603.617.328	93,78	100,00	100,00	ST	ST
10	BIRO PEREKONOMIAN	3.162.978.000	100,00	3.106.432.150	98,21	100,00	98,21	ST	ST
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.578.323.000	100,00	4.499.879.126	98,29	100,00	98,29	ST	ST
	JUMLAH MISI 3	139.705.965.940	99,09	129.302.682.251	92,55	99,09	94,40	ST	ST
MISI 4 : Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah									
1	BIRO UMUM	56.755.500.000	100,00	56.060.072.831	98,77	100,00	98,77	ST	ST
2	BIRO HUKUM	2.614.506.000	100,00	2.355.775.000	90,10	100,00	90,10	T	T
3	BIRO ORGANISASI	2.282.557.000	100,00	2.216.676.275	97,11	100,00	97,11	ST	ST
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.235.369.000	98,12	5.144.815.950	98,27	98,12	98,27	ST	ST
5	BIRO PEMERINTAHAN	2.321.227.000	99,53	2.265.210.731	97,59	99,53	97,59	ST	ST
6	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	5.275.441.000	99,73	4.850.711.593	91,95	99,73	99,45	ST	ST
7	BIRO PENG. BARANG & JASA	3.463.093.000	100,00	3.416.588.935	98,66	100,00	98,66	ST	ST

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET (%)	REALISASI		TARGET (%)	REAL (%)		
				Rp.	(%)				
8	BIRO KERJASAMA	1.478.027.000	76,92	1.172.538.500	79,33	76,92	79,33	T	T
9	SEKRETARIAT DPRD	68.836.758.000	100,00	64.981.093.952	94,40	100,00	94,40	ST	ST
10	INSPEKTORAT	8.564.398.000	100,00	8.144.073.120	95,09	100,00	92,87	ST	ST
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.242.889.520	100,00	9.246.892.490	90,28	100,00	90,28	T	T
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	99.632.841.718	100,00	75.940.995.871	76,22	100,00	64,76	T	R
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.201.055.000	96,38	11.515.773.604	94,38	96,38	94,38	ST	ST
14	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	30.474.591.000	100,00	27.697.127.975	90,89	100,00	90,89	T	T
15	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.304.676.000	100,00	3.109.974.200	94,11	100,00	94,11	ST	ST
16	BADAN PENGHUBUNG PROV.NTT di JAKARTA	3.428.471.000	100,00	3.397.100.275	99,08	100,00	99,08	ST	ST
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.905.955.000	99,96	5.373.893.566	90,99	99,96	90,99	T	T
18	DINAS KEARSIPAN	3.506.193.000	100,00	3.356.326.338	95,73	100,00	95,73	ST	ST
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.082.893.000	100,00	2.864.752.930	92,92	100,00	92,92	ST	ST
20	SEKRETARIAT DP KORPRI	2.436.620.000	95,47	2.326.155.010	95,47	95,47	95,47	ST	ST
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.313.907.000	100,00	4.916.077.440	92,51	100,00	92,51	ST	ST
	JUMLAH MISI 4	336.356.968.238	98,39	300.352.626.586	89,30	98,39	92,75	T	ST

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET (%)	REALISASI		TARGET	REAL		
				Rp.	(%)	(%)	(%)		
MISI 5 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup									
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	347.110.103.000	100,00	336.490.024.095	96,94	100,00	97,64	ST	ST
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.694.864.000	100,00	23.181.020.669	86,84	100,00	83,41	T	T
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	962.725.500	100,00	652.387.640	67,76	100,00	67,76	S	S
4	DINAS PERHUBUNGAN	17.072.516.000	100,00	16.521.839.525	96,77	100,00	100,00	ST	ST
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	4.164.576.000	99,95	3.991.138.727	95,84	99,95	100,00	ST	ST
6	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	48.154.630.000	100,00	37.911.920.872	78,73	100,00	75,15	T	T
7	DINAS KEHUTANAN	15.316.652.560	100,00	12.170.591.246	79,46	100,00	79,46	T	T
	JUMLAH MISI 5	459.476.067.060	99,99	430.918.922.774	93,78	99,99	86,20	ST	T
MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak									
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.544.262.000	100,00	2.333.506.350	91,22	100,00	91,72	ST	ST
	JUMLAH MISI 6	2.544.262.000	100,00	2.333.506.350	91,72	100,00	91,72	ST	ST
MISI 7 : Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan									
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	69.592.123.550	100,00	68.081.446.069	97,83	100,00	97,83	ST	ST
	JUMLAH MISI 7	69.592.123.550	100,00	68.081.446.069	97,83	100,00	97,83	ST	ST

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET	REALISASI		TARGET	REAL		
			(%)	Rp.	(%)	(%)	(%)	KEU	FISIK
MISI 8 : Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan									
1	DINAS SOSIAL	22.697.013.000	100,00	22.361.539.368	98,52	100,00	100,00	ST	ST
2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.230.100.000	95,91	6.872.860.297	95,06	95,91	99,91	ST	ST
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.304.417.000	99,85	4.551.212.906	85,80	99,85	85,80	T	T
4	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	2.647.204.000	100,00	2.575.248.438	97,28	100,00	97,28	ST	ST
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	29.035.710.980	100,00	27.927.443.324	96,18	100,00	96,18	ST	ST
	JUMLAH MISI 8	66.914.444.980	99,15	64.288.304.333	96,08	99,15	95,83	ST	ST
	JUMLAH TOTAL (MISI 1+2+3+4+5+6+7+8)	1.771.265.297.768	100,00	1.512.852.668.404	85,41	100,00	89,64	T	T

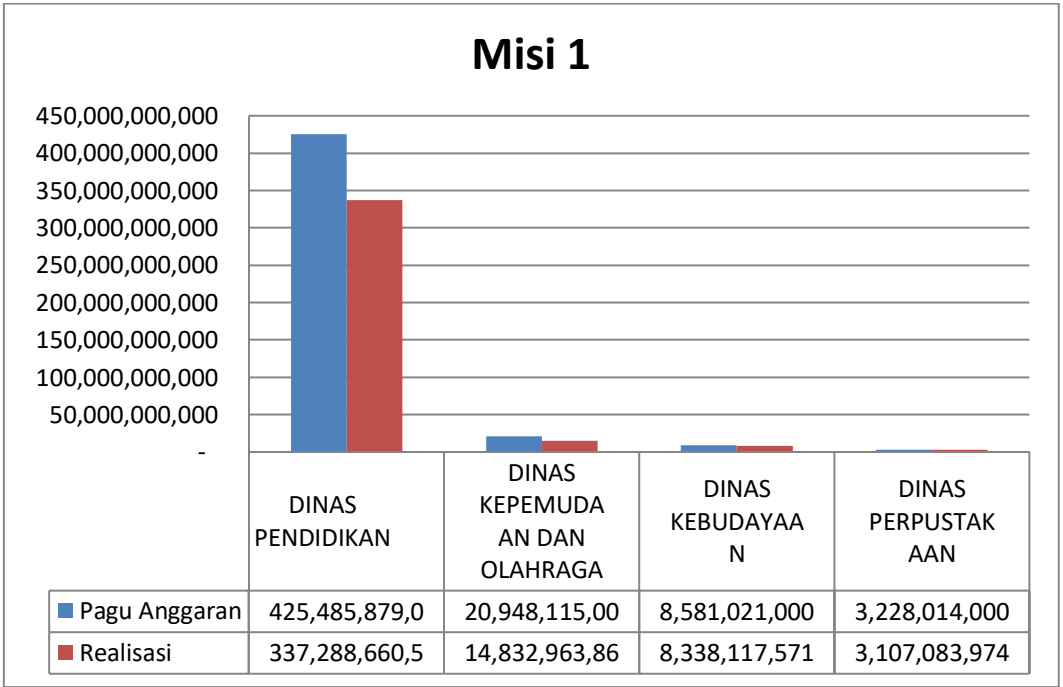
Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa data realisasi capaian anggaran pelaksanaan APBD menurut Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan sampai dengan Triwulan IV tersebut memiliki predikat sebagian besar berpredikat Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Untuk Urusan Pemerintahan yang berpredikat Sangat Tinggi (ST) dan Urusan Pemerintahan yang berpredikat Tinggi (Tinggi) dapat dilihat pada tabel diatas.

Tabel 2.80
Interval Penilaian Predikat Kinerja

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI (ST)
76% ≤ 90%	TINGGI (T)
66% ≤ 75%	SEDANG (S)
51% ≤ 65%	RENDAH (R)
≤ 50%	SANGAT RENDAH (SR)

Pagu dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Capaian Realisasi Anggaran untuk Belanja Langsung dari 49 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, sebagaimana terlihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.31
Pagudan Realisasi AnggaranPerangkat Daerah
Menurut 8 Misi Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran 2017



Misi 2

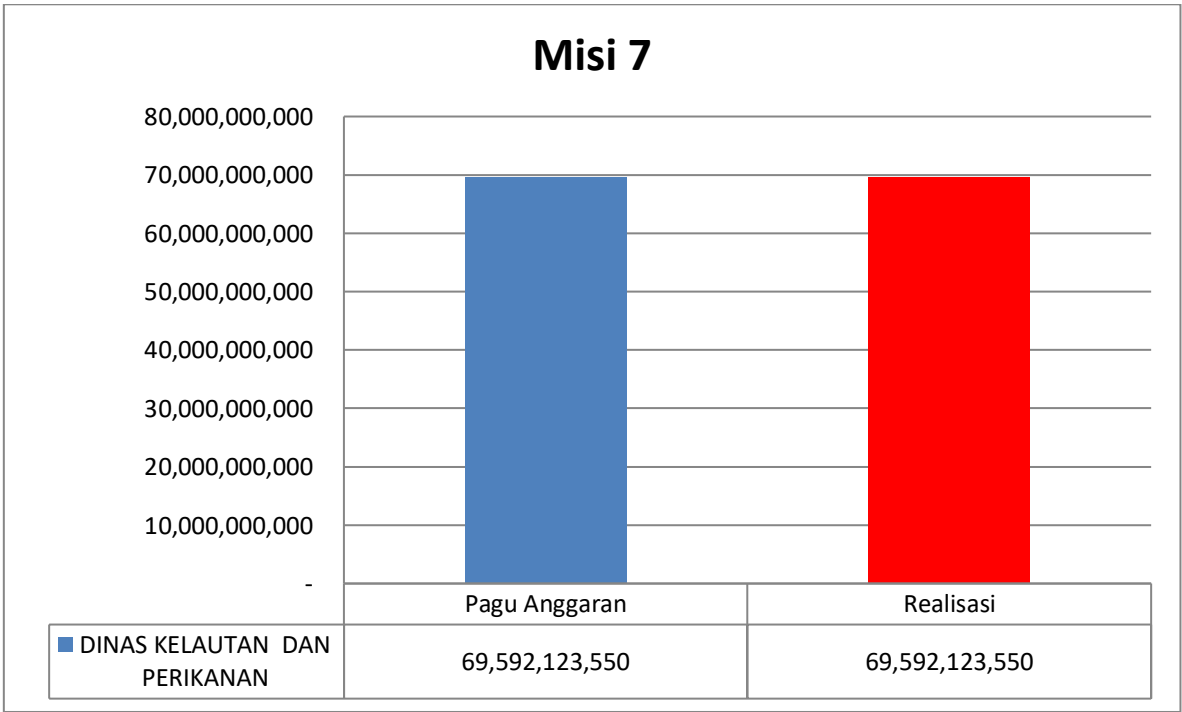
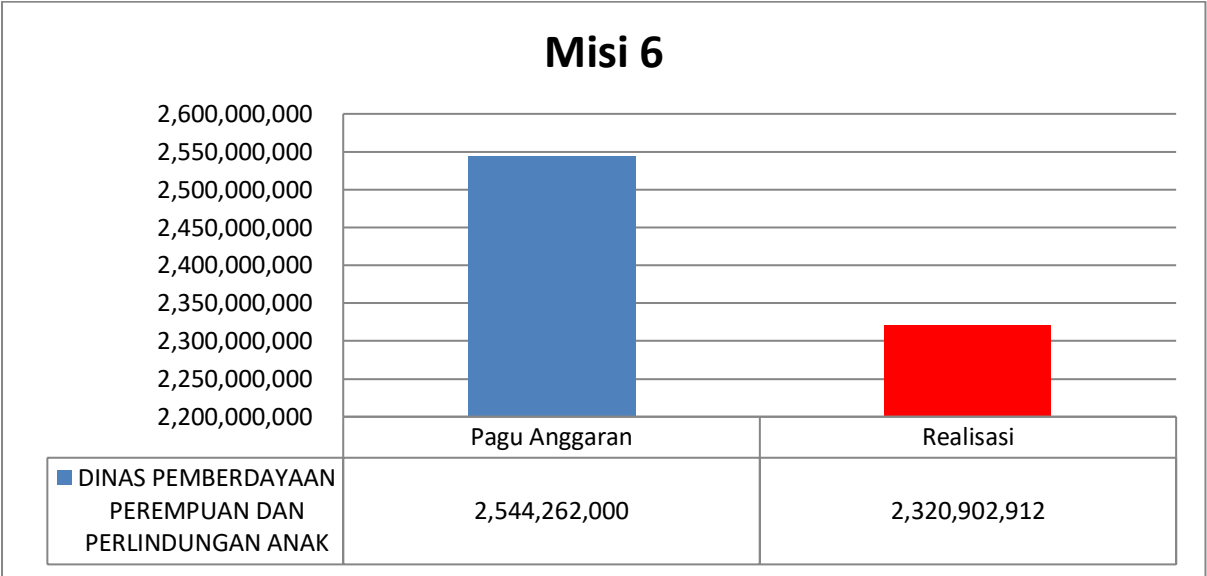
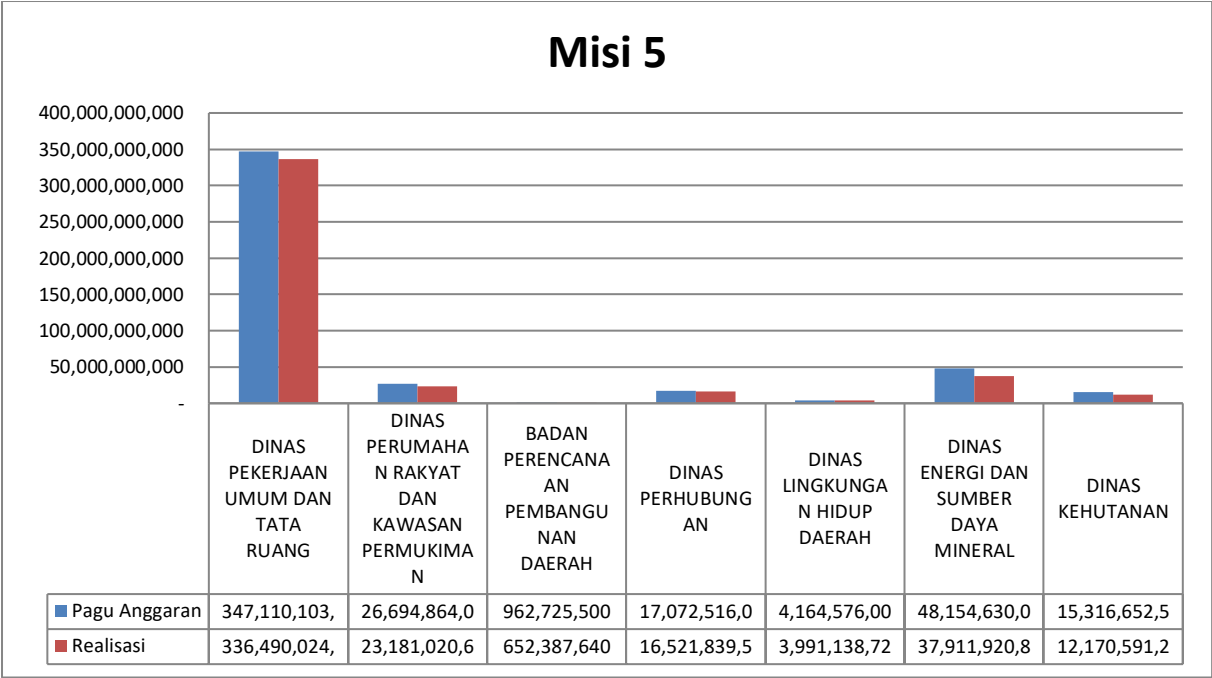
	Pagu Anggaran	Realisasi
DINAS KESEHATAN	50,391,120,000	38,160,650,934
RSUD PROF. DR. WZ. JOHANNES	188,041,317,000	115,847,703,135

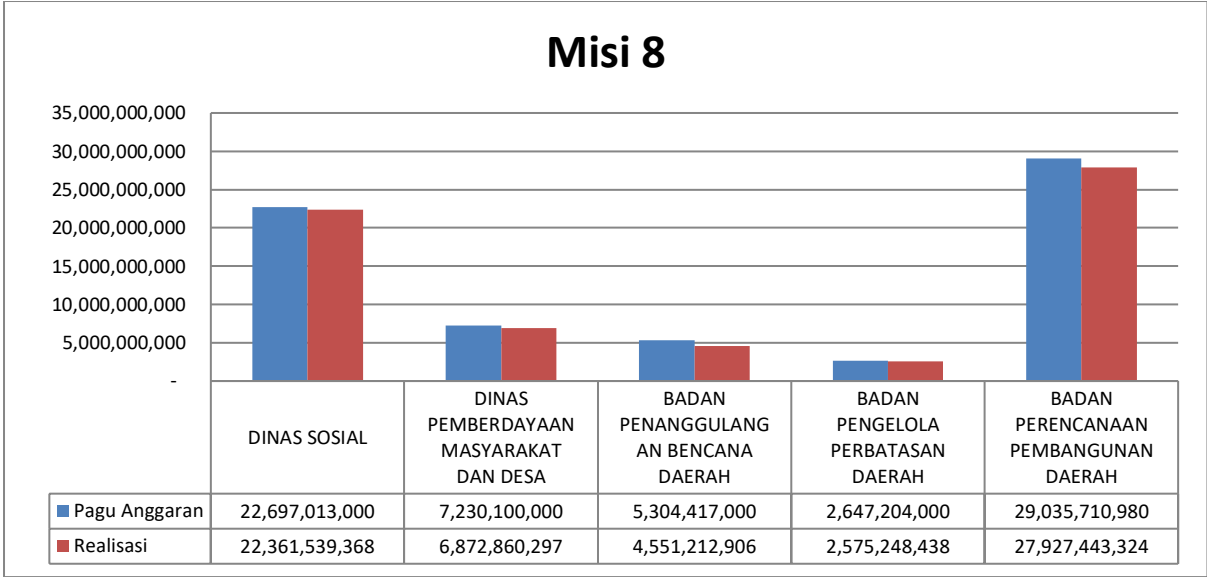
Misi 3

	DINAS PERTANIAN	DINAS PARIWISATA	DINAS PETERNAKAN	DINAS KEHUTANAN	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BIRO PERENCANAAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pagu Anggaran	36,222,1	23,848,8	23,821,2	13,015,2	5,545,75	7,121,30	8,830,02	8,651,21	4,908,92	3,162,97	4,578,32
Realisasi	33,698,3	20,711,6	22,833,9	11,722,9	5,223,76	6,610,00	8,263,89	8,028,14	4,603,61	3,106,43	4,499,87

Misi 4

Kategori	Pagu Anggaran	Realisasi
BIRU UMUM	56,000,000,000	56,000,000,000
BIRU HUKUM	2,600,000,000	2,300,000,000
BIRU ORGANISASI	2,200,000,000	2,200,000,000
BIRU KESEKRETARIATAN	5,200,000,000	5,100,000,000
BIRU PEMERINTAHAN	2,300,000,000	2,200,000,000
BIRU HUBUNGAN MASYARAKAT	5,200,000,000	4,800,000,000
BIRU PENGABANGSAAN	3,400,000,000	3,400,000,000
BIRU KERJASAMA	1,400,000,000	1,100,000,000
SEKRETARIAT DPRD	68,000,000,000	64,000,000,000
INSPEKTORAT	8,500,000,000	8,100,000,000
BADAN PERENCANAAN, PENGANTARA NASIONAL	10,000,000,000	9,200,000,000
BADAN PENGANTARA NASIONAL	99,000,000,000	75,000,000,000
BADAN KEPERAWATAN	12,000,000,000	11,000,000,000
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	30,000,000,000	27,000,000,000
BADAN PENGELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,300,000,000	3,100,000,000
BADAN PENGUNGARAN PROJEK JAKARTARA	3,400,000,000	3,300,000,000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,900,000,000	5,300,000,000
DINAS KEARSIPAN	3,500,000,000	3,300,000,000
BADAN KESATUAN BANSA DAN POLITIK	3,000,000,000	2,800,000,000
SEKRETARIAT DP KORPRI	2,400,000,000	2,300,000,000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5,300,000,000	4,900,000,000





2.7. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan pembangunan dan hasilnya cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin baiknya beberapa indikator pembangunan. Namun demikian, harus diakui bahwa dengan berbagai keterbatasan dan karakteristik wilayah NTT, belum semua indikator menunjukkan hasil yang maksimal. Provinsi NTT masih tetap menemui berbagai kendala dan tantangan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang ingin dicapai di masa mendatang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai masalah, tantangan dan kendala dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2019 yang akan datang.

Permasalahan pembangunan daerah pada tahun 2019 meliputi permasalahan masih tingginya angka kemiskinan, yang terkait erat dengan pembangunan manusia baik dari segi pendidikan maupun kesehatan, perbaikan kualitas tenaga kerja, peningkatan ketahanan sosial dan budaya termasuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dalam dunia usaha dan pariwisata, peningkatan produksi jagung dan sarana prasarana pertanian, peningkatan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan kualitas perlindungan bagi anak dan perempuan, dan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Untuk itu penyediaan infrastruktur, energi listrik, dan air bersih, perumahan dan pelayanan dasar pemukiman yang layak, aman dan terjangkau untuk semua, pembangunan transportasi, mitigasi, adaptasi dan pencegahan bencana, perubahan iklim, penanganan masalah perbatasan dan peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan juga merupakan permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Permasalahan pembangunan daerah tersebut sebagai berikut :

Permasalahan Pendidikan :

- Masih banyak sarana prasarana pendidikan menengah belum memadai,
- Peningkatan kualitas SDM pendidikan
- Peningkatan kualitas proses belajar mengajar
- Permasalahan yang masih disisakan terkait mengalihkan kewenangan (data, aset, gaji, dll)

Permasalahan kesehatan :

- Angka gizi buruk, stunting, AKI dan AKB
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan
- Keterbatasan mutu dan jumlah tenaga kesehatan
- Penyebaran tenaga kesehatan
- Pembiayaan kesehatan sebagian besar masih untuk kuratif, preventif dan promotif masih kurang

Permasalahan Infrastruktur:

- Pembangunan dan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, embung masih perlu ditingkatkan, khususnya yang menjadi kewenangan provinsi

Permasalahan perhubungan :

- Konektivitas antar wilayah, mengingat NTT wilayah kepulauan
- Dukungan untuk pelaksanaan tol laut di pulau NTT
- Biaya FS, DED dll yang sudah dikeluarkan jangan sampai mubasir karena pembangunan lanjutan dilakukan oleh Pusat, makanya permasalahan tanah harus diselesaikan oleh pemda provinsi untuk dengan pemda kab/kota

Permasalahan Perumahan dan Permukiman:

- Rumah yang layak huni, yang juga menjadi salah satu indikator kemiskinan (kebutuhan masyarakat) dihadapkan pada masalah kewenangan Provinsi.

Permasalahan Lingkungan Hidup :

- Masalah sampah, pencemaran udara, dan perubahan iklim serta efek rumah kaca harus mulai menjadi perhatian

Permasalahan Penataan Ruang:

- Kecepatan perubahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi perhatian dan perlu dilakukan secara konsisten

Permasalahan Air Bersih:

- Akses dan cakupan air bersih
- Persediaan air baku (ketergantungan pada sumur bor)

Permasalahan Ketahanan Pangan :

- Ketersediaan pangan masyarakat
- Aksesibilitas pada pangan
- Mutu dan keamanan pangan

Permasalahan Pembangunan Pertanian dan perikanan:

- Masalah sarana dan prasarana pertanian
- Ketersediaan bibit unggul dan pupuk
- Keterampilan tenaga kerja di bidang pertanian dan perikanan
- Ketersediaan sarana dan prasarana (perikanan) tangkap
- Bibit rumput laut
- *Illegal Fishing*
- Kelembagaan di tingkat masyarakat

Permasalahan Energi Listrik:

- Peningkatan kebutuhan listrik masyarakat – memenuhi target provinsi dan nasional

Permasalahan ketenagakerjaan:

- Peningkatan keterampilan tenaga kerja
- Upah dibawah standar minimum

Permasalahan Reformasi Birokrasi:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Penerapan e-government (e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-monev, ppk online, dll)

2.8. ISU STRATEGIS

Mencermati hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan capaian indikator makro daerah, serta permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi, termasuk berbagai perkembangan dan dinamika yang berkembang saat Musrenbang, maka isu strategis pada tahun 2019 adalah :

- Prioritas Daerah 1: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur
- Prioritas Daerah 2 :
 1. Penurunan Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
 2. Peningkatan akses pelayanan dasar penduduk (listrik, air, perumahan, dll)
- Prioritas Daerah 3 :
 1. Peningkatan Nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan Kehutanan
 2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk
 3. Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif
 4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
 5. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas
- Prioritas Daerah 4 :
 1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi
 2. Pemenuhan kebutuhan pangan

3. Pemantapan ketahanan Sumber Daya Air
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas LH dan antisipasi Perubahan iklim
5. Perencanaan pembangunan rendah karbon
 - Prioritas Daerah 5 :
1. Peningkatan trantibmas
2. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
3. Peningkatan penerapan e-government
4. Mendukung kesuksesan pelaksanaan PEMILU Presiden dan PEMILU Legislatif

Untuk mengatasi berbagai isu pembangunan tersebut, maka Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan kebijakan yang pada prakteknya belum berjalan optimal yaitu:

1.1. Kebijakan Nasional

1. Penetapan prioritas pembangunan dengan pendekatan Money Follow Program Prioritas;
2. Peningkatan keterpaduan pembangunan melalui kebijakan tematik-holistik, integratif dan spasial;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian 1: 50.000 Prioritas Nawa Cita;
4. Kebijakan Penyusunan RPJMD mengacu pada RPJMN dan penyusunan RTRWP dan RTRWK mengacu pada RTRWN;
5. Kebijakan Nawa Cita ketiga yaitu pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa;
6. Kebijakan alokasi dana Desa dan kebijakan pembangunan yang berfokus dan lokus pada desa untuk meningkatkan jumlah Desa Mandiri dan Maju.

1.2. Kebijakan Daerah

1. RPJMD NTT memuat lokasi program harus berbasis kewilayahan serta Desa/Kelurahan;
2. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan;
3. Peraturan Gubernur Nomor tahun 2015 tentang Nusa Tenggara Timur Satu Data yang didukung dengan kebijakan BPS tentang Flobamora Satu Data;
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tahun 2017-2022

Berdasarkan isu-isu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil pembangunan serta berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat nasional dan Pemerintah Provinsi serta untuk menjamin pelaksanaan pembangunan lebih optimal, maka dipandang penting untuk:

1. Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan dengan menggunakan Nilai Standar Prosedur Kriteria dan E-Government (E-Planning, E-Budgeting, E-Procurement, dll);
2. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dengan basis lokasi Desa /kelurahan dan penetapan target kegiatan yang terukur dengan sasaran yang jelas dan mengacu pada target RPJMD Kabupaten /Kota, RPJMD Provinsi dan mendukung capaian target RPJMN;
3. Melakukan advokasi pada Pemerintah Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok pemanfaat hasil pembangunan untuk menjamin kesinambungan pemanfaatan;
4. Mengoptimalkan peran Pemerintah Desa/Kelurahan, kelompok-kelompok ekonomi produktif, kelembagaan sosial, dan kelembagaan koperasi sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan hasil pembangunan;
5. Terkait pembangunan infrastruktur, maka Pemerintah Kabupaten/ Kota memfasilitasi secara optimal penyelesaiannya serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
6. Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan kualitas jalan provinsi, jalan non status dan jalan Kabupaten yang mengakses ke lokasi program dan kawasan strategis nasional, maka akan diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional dan jalan strategis nasional;
7. Mendukung suksesnya pelaksanaan program strategis nasional dan mendorong peningkatan program strategis nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Untuk meningkatkan daya ungkit program unggulan Kabupaten/Kota maka perlu dukungan program Provinsi dan program Kementerian /Lembaga.

**BAB
III**

**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH**

Bab ini memuat kerangka ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 dan prospek perekonomian tahun 2018 dan 2019 yang akan mempengaruhi dan berdampak pada kebijakan dan kerangka keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kondisi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan ketenagakerjaan. Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kondisi ketenagakerjaan akan mempengaruhi pendapatan daerah yang pada akhirnya berdampak pada belanja dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Nasional

Pencapaian pembangunan nasional menunjukkan hasil yang membaik, sebagaimana ditunjukkan beberapa indikator sebagai berikut :
Pertumbuhan ekomomi Indonesia tahun 2017 sebesar 5,06 naik dari 4,88 pada tahun 2015 dan 5,02 pada tahun 2016. Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan industri non migas.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016 - 2017

KOMPONEN	2016	2017				2017
		I	II	III	IV	
Komponen Rumah Tangga	5,01	4,94	4,95	4,93	4,97	4,95
Konsumsi LNPRT	6,64	8,07	8,52	6,02	5,24	6,91
Konsumsi Pemerintah	-0,14	2,69	-1,92	3,48	3,81	2,14
PMTB	4,47	4,77	5,34	7,08	7,27	6,15
Ekspor	-1,57	8,41	2,8	17,01	8,5	9,09
Impor	-2,45	4,81	0,2	15,46	11,81	8,06
Pertumbuhan Sektor						
Pertanian	3,36	7,15	3,23	2,77	2,44	3,81
Pertambangan	0,95	-1,22	2,12	1,84	0,08	0,69
Industri	4,26	4,28	3,5	4,85	4,46	4,27
Industri Non Migas	4,43	4,8	3,93	5,46	5,14	4,84
Perdagangan	4,03	4,61	3,47	5,2	4,47	4,44
Transportasi dan Pergudangan	7,45	8,06	8,8	8,88	8,21	8,49
Informasi & Komunikasi	8,88	10,46	11,06	8,82	8,99	9,81
Jasa Keuangan & Asuransi	8,9	5,99	5,94	6,16	3,85	5,48
PDB	5,03	5,01	5,01	5,06	5,19	5,07

Sumber : Rancangan RKP 2019

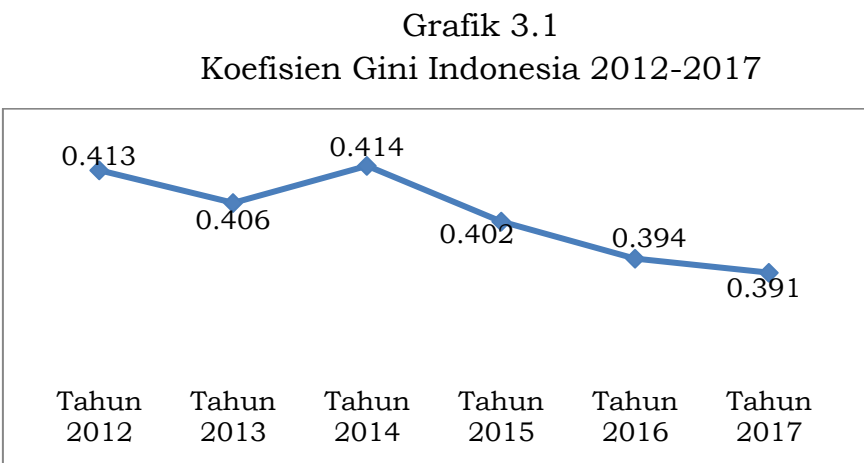
Konsumsi rumah tangga triwulan IV tahun 2017 membaik, walaupun masih di bawah 5%. Hal ini disebabkan :

- Masyarakat Indonesia dalam berbelanja sudah lebih memilih
- Lebih menyenangi aktivitas yang terkait dengan rekreasi
- Lebih banyak menabung, terutama pada kelompok menengah ke atas

Pada industri non migas pertumbuhan dalam dua kuartal terakhir cukup baik, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional

Kondisi ekonomi yang membaik ini membawa dampak pada :

- a. Ketimpangan antar kelompok pendapatan menurun yang ditandai semakin membaiknya koefisien gini.



- b. Tingkat pengangguran menurun dari 5,94persen pada Agustus 2014 menjadi 5,50 persen pada Agustus 2017 dan jumlah penganggur menurun dari 7,24 juta orang pada Agustus 2014 menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017.
- c. Tingkat Kemiskinan menurun dari 10,96 persen pada September 2014 menjadi 10,12 Persen pada September 2017 dan jumlah penduduk miskin menurun dari 27,73 juta jiwa pada September 2014 menjadi 26,58 juta jiwa pada September 2017.

Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar 5,4 persen. Inflasi diperkirakan 3,5 persen nilai tukar nominal Rp 13.500 (target dalam APBN 2018).Tahun 2018 ini Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala domestik, yaitu :

- 1) Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal karena masih rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan, keseimbangan primer yang negatif, dan tingkat defisit anggaran yang mendekati batas yang diperbolehkan
- 2) Masih lemahnya aktivitas sektor swasta
- 3) Trend penurunan pertumbuhan ekonomi potensial karena rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur.

Untuk tahun 2019 ekonomi makro Indonesia sesuai Rancangan RKP 2019 diproyeksikan bertumbuh sebesar 5,4% – 5,8%, inflasi diperkirakan 2,5% – 4,5% dan nilai tukar nominal sebesar Rp 13.500 – Rp 13.700.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator MakroEkonomi Indonesia 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,4	5,4 – 5,8
Inflasi (%)	3,61	3,5	2,5 – 4,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.382	13.500	13.500 – 13.700

Sumber : Rancangan RKP 2019

3.1.2 Provinsi Nusa Tenggara Timur

a. *Pertumbuhan Ekonomi*

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp 91,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 62,79 triliun. Ekonomi NTT triwulan IV-2017 dibanding triwulan IV-2016 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,29 persen. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2017 didorong oleh seluruh kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 18,60 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,04 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 8,53 persen.

Tabel 3.3
PRDB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw III-2017	Triw IV-2017	2017	Triw III-2017	Triw IV-2017	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.903	6.493	26.184	4.554	4.229	17.311
B. Pertambangan dan Penggalian	301	318	1.186	228	240	898
C. Industri Pengolahan	296	311	1.147	207	213	800
D. Pengadaan Listrik dan Gas	17	19	66	12	13	47
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13	13	50	10	11	41
F. Konstruksi	2.566	2.676	9.787	1.798	1.853	6.867
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.618	2.689	10.072	1.879	1.906	7.241
H. Transportasi dan Pergudangan	1.291	1.325	4.943	851	871	3.269
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	178	193	676	116	124	439
J. Informasi dan Komunikasi	1.562	1.632	6.195	1.401	1.452	5.524
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	945	986	3.726	629	647	2.498
L. Real Estat	603	620	2.348	406	414	1.581
M,N. Jasa Perusahaan	73	74	279	44	45	172
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.065	3.282	11.697	2.031	2.136	7.883
P. Jasa Pendidikan	2.303	2.461	8.917	1.387	1.464	5.486
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	495	527	1.941	351	369	1.382
R,S,T,U. Jasa Lainnya	504	515	1.945	348	353	1.347
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	23.730	24.135	91.160	16.252	16.340	62.788

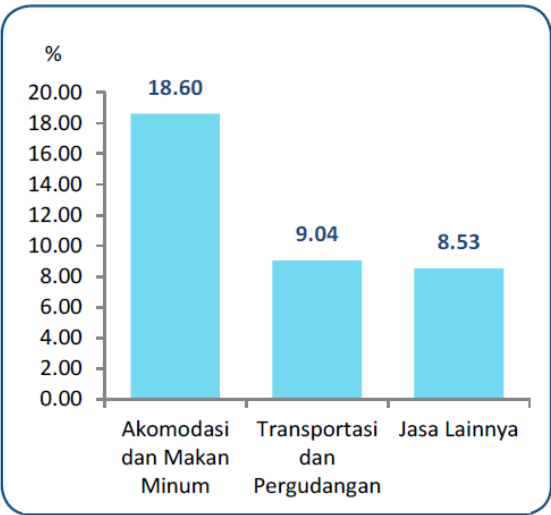
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

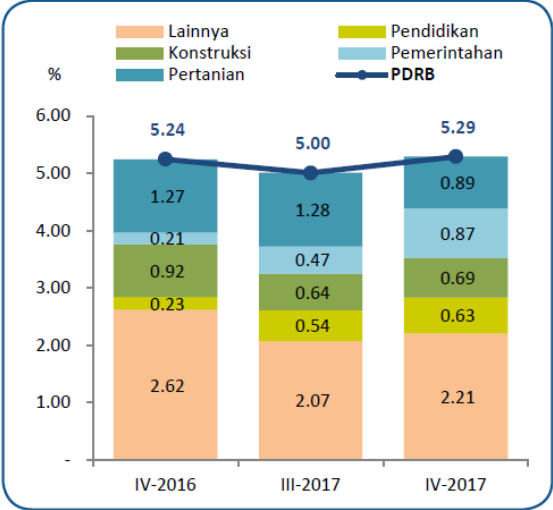
Lapangan Usaha		Triw IV-2017 Terhadap Triw III-2017 (q-to-q)	Triw IV-2017 Terhadap Triw IV-2016 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw IV-2017 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2017 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan 2017 (c-to-c)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-7,12	3,39	0,89	4,88	1,35
B.	Pertambangan dan Penggalian	5,18	3,37	0,05	2,07	0,03
C.	Industri Pengolahan	3,22	7,51	0,10	7,36	0,09
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,62	4,60	0,00	0,70	0,00
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	0,95	0,00	1,43	0,00
F.	Konstruksi	3,09	6,15	0,69	6,12	0,66
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,41	4,06	0,48	4,45	0,52
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,33	9,04	0,47	7,66	0,39
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,23	18,60	0,13	13,59	0,09
J.	Informasi dan Komunikasi	3,68	3,74	0,34	5,10	0,45
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	4,13	0,17	5,81	0,23
L.	Real Estat	1,95	4,83	0,12	4,96	0,13
M,N.	Jasa Perusahaan	1,91	0,06	0,00	1,43	0,00
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,14	6,74	0,87	2,96	0,38
P.	Jasa Pendidikan	5,61	7,12	0,63	6,24	0,54
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,03	8,37	0,18	7,36	0,16
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,23	8,53	0,18	6,99	0,15
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		0,54	5,29	5,29	5,16	5,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

Grafik 3.2
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan IV-2017 (y-on-y)



Grafik 3.3
Sumber Pertumbuhan Beberapa
Lapangan Usaha
Triwulan IV-2017 (y-on-y)

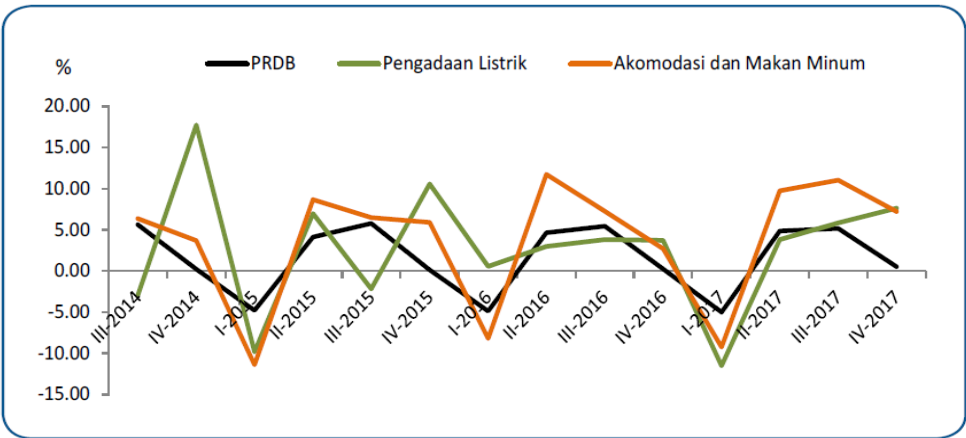


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

Struktur PDRB NTT menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan IV2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor masih mendominasi PDRB NTT. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV-2017 (y-on-y), Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,89 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Perdagangan Besar-Eceran sebesar 0,87 persen; dan Konstruksi sebesar 0,69 persen.

Ekonomi NTT triwulan IV-2017 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q)tumbuh sebesar 0,54 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maka Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan sebesar 7,62 persen; diikuti dengan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,23 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 5,61 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV-2017 (q-to-q), Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang pertumbuhan terbesar yaitu 0,64 persen, diikuti Jasa Pendidikan sebesar 0,48 persen; dan Konstruksi sebesar 0,34 persen.

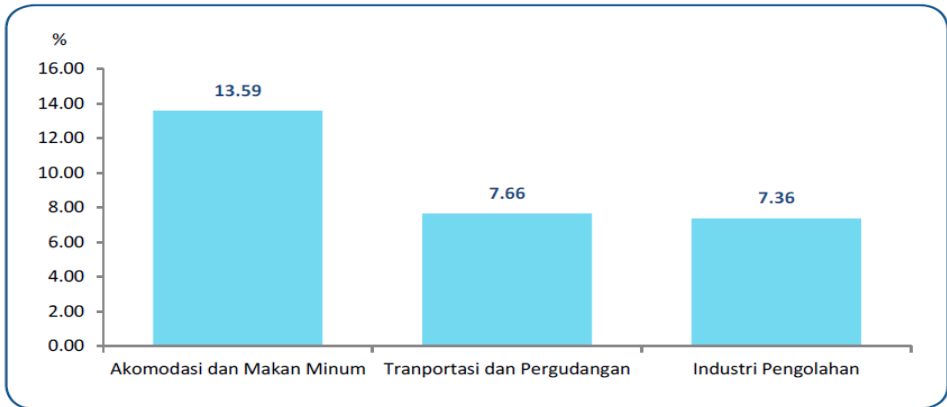
Grafik 3.4
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2017 (q-to-q)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

Ekonomi NTT tahun 2017 dibanding tahun 2016 (c-to-c) tumbuh 5,16 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,59 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,66 persen; serta Industri Pengolahan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,36 persen.

Grafik 3.5
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2017 (c-to-c)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

Sedangkan struktur ekonomi NTT pada tahun 2017 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan sumbangan sebesar 28,72 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 73,18 persen.

Tabel 3.5
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan III-2017,
Triwulan IV-2017 dan Tahun 2017

(persen)

Lapangan Usaha		Triw III-2017	Triw IV-2017	Tahun 2017
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,09	26,90	28,72
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,27	1,32	1,30
C.	Industri Pengolahan	1,25	1,29	1,26
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06
F.	Konstruksi	10,81	11,09	10,74
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,03	11,14	11,05
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,44	5,49	5,42
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,80	0,74
J.	Informasi dan Komunikasi	6,58	6,76	6,80
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,98	4,08	4,09
L.	Real Estat	2,54	2,57	2,58
M,N.	Jasa Perusahaan	0,31	0,31	0,31
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,92	13,60	12,83
P.	Jasa Pendidikan	9,70	10,20	9,78
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,09	2,18	2,13
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	2,12	2,13	2,13
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

b. Inflasi Daerah

Nusa Tenggara Timur pada Januari 2018 mengalami inflasi sebesar 0,94 persen setelah bulan sebelumnya, Desember 2017, mengalami inflasi sebesar 1,22 persen. Dengan kata lain terjadi kenaikan Indesk Harga Konsumen (IHK) dari 130,68 pada Bulan Desember 2017 menjadi 131,91 pada Bulan Januari 2018. Inflasi ini terjadi disebabkan oleh naiknya indeks harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga lima dari tujuh kelompok pengeluaran.

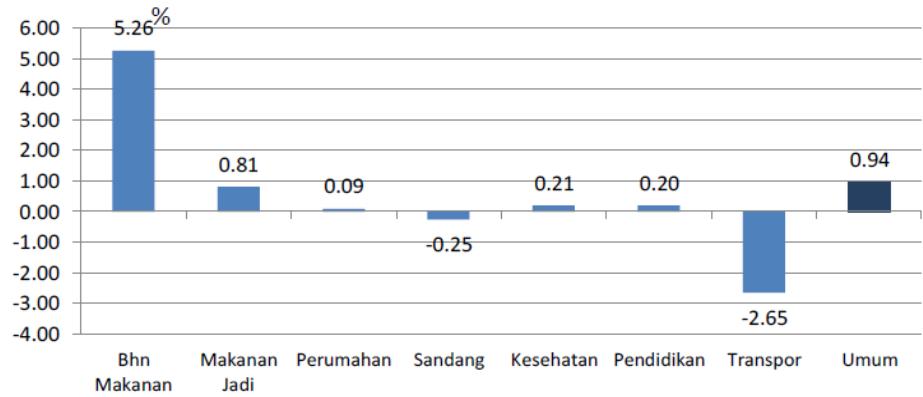
Tabel 3.6
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Januari 2018, Tahun Kalender 2018 dan *Year on Year*
menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK			Inflasi Januari 2018*)	Laju Inflasi tahun Kalender **)	Laju inflasi YOY ***)
	Des 2017	Desember 2017	Januari 2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U m u m	130.68	130.68	131.91	0.94	0.94	2.21
1 Bahan Makanan	123.63	123.63	130.13	5.26	5.26	1.26
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	148.87	148.87	150.07	0.81	0.81	3.43
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	128.50	128.50	128.62	0.09	0.09	2.95
4 Sandang	129.66	129.66	129.34	-0.25	-0.25	4.25
5 Kesehatan	117.70	117.70	117.94	0.21	0.21	1.73
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	132.66	132.66	132.92	0.20	0.20	4.22
7 Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	134.68	134.68	131.12	-2.65	-2.65	0.28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017
*) Persentase perubahan IHK bulan Januari 2018 terhadap IHK bulan sebelumnya,
**) Persentase perubahan IHK bulan Januari 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017
***) Persentase perubahan IHK bulan Januari 2018 terhadap IHK bulan Januari 2017

Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indek harga paling tinggi adalah kelompok bahan makanan yang naik sebesar 5,26 persen, diikuti oleh kelompok makanan jadi sebesar 0,81 persen. Sedangkan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan serta kelompok sandang, pada Januari 2018 ini justru mengalami penurunan indeks harga masing-masing sebesar 2,65 dan 0,25 persen.

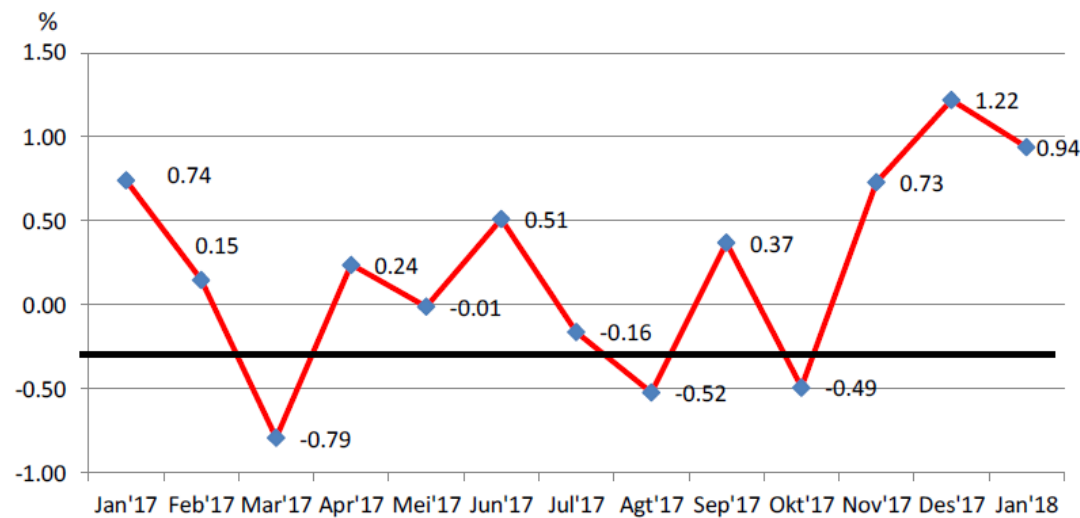
Gambar 3.6
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Nusa Tenggara Timur Januari 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT- Perkembangan Indeks Harga Konsumen Januari 2018

Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,94 persen yang terjadi pada Januari 2018 searah dan lebih besar dari inflasi yang terjadi pada Januari 2017 yang sebesar 0,74 persen.

Gambar 3.7
Perkembangan Inflasi Nusa Tenggara Timur
Januari 2017 – Januari 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Indeks Harga Konsumen Januari 2018

Menurut kelompok pengeluaran, pemberi andil terbesar dalam pembentukan inflasi di Nusa Tenggara Timur bulan Januari 2018 adalah kelompok bahan makanan dengan andil sebesar 1,26 persen, disusul kelompok makanan jadi sebesar 0,12 persen. Kelompok transpor dan sandang memberikan andil negatif bagi inflasi bulan Januari 2018 sebesar 0,48 dan 0,01 persen.

Tabel 3.7
Inflasi dan Andil Inflasi Nusa Tenggara Timur Januari 2018

Kelompok Pengeluaran	Januari 2018	
	Perubahan (%)	andil (%)
(1)	(2)	(3)
Umum	0.94	0.94
Bahan Makanan	5.26	1.26
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0.81	0.12
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0.09	0.03
Sandang	-0.25	-0.01
Kesehatan	0.21	0.01
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	0.20	0.02
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-2.65	-0.48

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Indeks Harga Konsumen Januari 2018

Dalam lima tahun terakhir, tercatat di bulan Januari Nusa Tenggara Timur selalu mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,94 persen sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,42 persen. Sedangkan di Kota Maumere terjadi inflasi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,52 persen dan terjadi deflasi sebesar 0,08 persen pada tahun 2014.

Tabel 3.8
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, *Year on year* di Maumere, Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Januari 2014 – Januari 2018

Tahun	Maumere	Kupang	Nusa Tenggara Timur
(1)	(2)	(3)	(4)
Inflasi Bulanan (Januari)			
2014	-0.08	0.50	0.42
2015	0.51	0.62	0.61
2016	0.42	0.78	0.74
2017	0.40	0.79	0.74
2018	0.17	1.06	0.94
Inflasi Tahun Kalender (Januari-Desember)			
2014	-0.08	0.50	0.42
2015	0.51	0.62	0.61
2016	0.42	0.78	0.74
2017	0.40	0.79	0.74
2018	0.17	1.06	0.94
Inflasi <i>Year on Year</i>			
2014	4.70	7.70	7.30
2015	4.62	8.46	7.96
2016	3.79	5.24	5.06
2017	3.61	2.32	2.48
2018	1.46	2.31	2.21

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Indeks Harga Konsumen Januari 2018

c. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan September 2017 sebesar 1.134,74 ribu orang (21,38 persen) menurun sekitar 16.050 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2017 yang berjumlah 1.150,79 ribu orang (21,85 persen). Menurunnya persentase penduduk miskin ini juga dibarengi dengan munurunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan. Pada periode Maret 2017 - September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 4,340 pada Maret 2017 menjadi 4,158 pada September 2017. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukan sedikit kenaikan yaitu dari 1,166 menjadi 1,174 pada periode yang sama.

Tabel 3.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di NTT Menurut Daerah, September 2016 - September 2017

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
September 2016	1,698	4,398	3,827
Maret 2017	1,823	5,034	4,340
September 2017	1,815	4,826	4,158
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)			
September 2016	0,455	1,092	0,957
Maret 2017	0,483	1,354	1,166
September 2017	0,469	1,375	1,174

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2016 – September 2017

Jika diamati secara total pada periode September 2016 - September 2017, kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Informasi ketenagakerjaan menunjukkan berapa besar jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah penganggur atau pencari kerja. Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2017 menurun 0,09 poin yaitu dari 69,18 persen pada Agustus 2016 menjadi 69,09 persen pada Agustus 2017. Secara nasional TPAK Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 66,67 persen, lebih rendah dibanding TPAK NTT. TPAK laki-laki 80,00 persen lebih tinggi dibanding perempuan 58,65 persen. Hal ini berkaitan dengan nilai -nilai dalam masyarakat yang menempatkan laki -laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Penduduk yang bekerja di NTT pada Agustus 2017 mencapai 2,32 juta orang, bertambah 43,0 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2016 sebesar 2,28 juta orang.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2017 sebesar 3,27 persen dari total angkatan kerja. Angka ini lebih tinggi 0,02 poin dibanding Agustus 2016 sebesar 3,25 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada Agustus 2017 mencapai 5,50 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT NTT.

Tabel 3.10
Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan
Februari 2016 – Agustus 2017

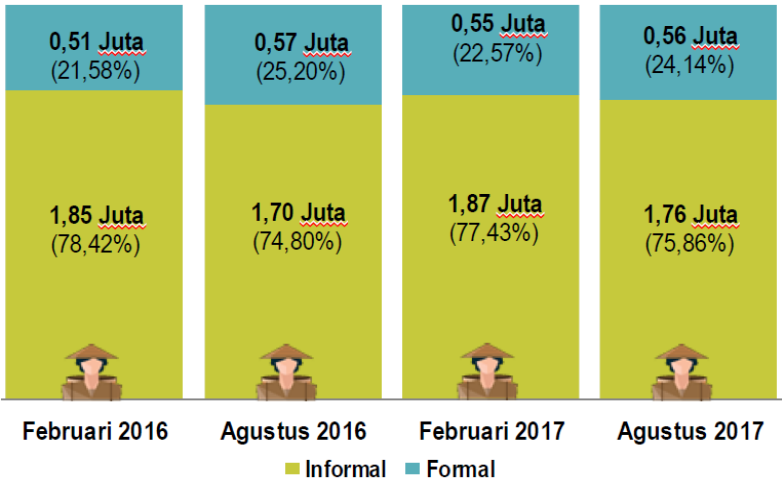
Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki+Perempuan			
	2016		2017	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Angkatan Kerja	2.445.323	2.353.648	2.503.057	2.398.609
Bekerja	2.357.624	2.277.068	2.422.809	2.320.061
Penganggur	87.699	76.580	80.248	78.548
2. TingkatPartisipasi Angkatan Kerja	72,63	69,18	72,82	69,09
Laki-laki	81,23	79,68	82,47	80,00
Perempuan	64,41	59,15	63,60	58,65
3. TingkatPengangguran Terbuka	3,59	3,25	3,21	3,27
Perkotaan	7,83	5,56	4,61	8,66
Perdesaan	2,46	2,62	2,83	1,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT – Ketenagakerjaan Agustus 2017

Bila dilihat menurut status pekerja, dapat terlihat berapa jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal yang jaminan sosialnya baik, dan berapa yang bekerja di sektor informal. Dari data terlihat indikasi belum adanya perubahan status pekerja dibandingkan dengan Agustus 2016 dimana status formal di NTT hanya sebesar 24,14 persen, dan pekerja informal NTT sebesar 75,86 persen.

Pekerja informal disebabkan tingginya pekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar yang menempati proporsi terbesar yaitu sebesar 27,76 persen, diikuti pekerja Keluarga/Tak Dibayar sebesar 25,17 persen. Rendahnya pekerja formal disebabkan Pekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang merupakan porsi terendah yaitu 2,10 persen dan Buruh/ Karyawan/ Pegawai yang sebesar 22,05 persen. Secara keseluruhan sektor informal masih menjadi andalan bagi mayoritas pekerja di NTT. Masih besarnya persentase penduduk yang bekerja di sektor informal menunjukkan bahwa penduduk NTT yang bekerja belum memiliki jaminan sosial yang baik. Umumnya jenis pekerjaan di sektor informal tidak membutuhkan persyaratan pendidikan dan keterampilan yang khusus, karenanya hampir semua orang bisa masuk ke dalam sektor ini jika ada kemauan dan sedikit modal. Hal ini berbeda dengan sektor formal yang membutuhkan pendidikan dan keterampilan khusus, sehingga hanya mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu yang bisa masuk ke sektor formal.

Gambar 3.8
Pekerja Sektor Formal dan Informal NTT pada Februari 2016 – Agustus 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT – Ketenagakerjaan Agustus 2017

3.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.2.1. Perkembangan Ekonomi Nusa Tenggara Timur

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur selama 4 (empat) tahun terakhir selalu berada di atas nasional. Konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama data tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 6,78% (yoy). Perbaikan daya beli masyarakat disebabkan peningkatan daya beli seiring adanya gaji ke-13 dan 14 PNS, peningkatan pendapatan sektor pertanian dan dorongan proyek-proyek pemerintah dan swasta. Juga dengan adanya kegiatan bersifat regional maupun nasional di Nusa Tenggara Timur seperti Hari Keluarga Nasional, Alor Expo, Sunda Kecil Expo, Pameran Pembangunan dan Tour de Flores ikut mendorong tumbuhnya konsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan lapangan usaha, 3 (tiga) terbesar komposisi PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (28,89%), sektor administrasi pemerintahan (12,67%) dan perdagangan besar dan eceran (11,07%). Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selalu menjadi penyumbang mayoritas karena mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur berprofesi sebagai petani atau nelayan. Namun demikian, pangsa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan paling tidak dalam 7 tahun terakhir terus menurun dibarengi peningkatan pangsa sektor-sektor konstruksi dan perdagangan.

Struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur yang didominasi oleh sektor primer menyebabkan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur, walaupun lebih tinggi dari nasional, namun dengan pertumbuhan sektor pertanian (yang mendominasi PDRB) relatif rendah, maka pertumbuhan konsumsi juga mengikuti daya beli masyarakat yang lebih dari 60% berprofesi sebagai petani.

Selain produk pertanian, sebagian besar kebutuhan hidup di Nusa Tenggara Timur dipenuhi dari daerah lain. Hal ini menyebabkan secara nominal nilai net impor antar daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

mencapai 45,46% (Rp 38,26 triliun) dari PDRB tahun 2016. Karena hampir semua kebutuhan pembangunan didapat dari daerah lain, maka pembangunan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Data pertumbuhan ekonomi domestik cenderung tinggi dalam 7 tahun terakhir, namun nilai PDRB hanya berada di kisaran 5%. Ini pun disebabkan oleh tingginya investasi ataupun konsumsi pemerintah. Nilainya tidak akan terlalu dirasakan oleh masyarakat karena sebagian besar pemenuhan belanja tersebut didatangkan dari luar Nusa Tenggara Timur.

Dari 21 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur, hanya Kota Kupang struktur perekonomiannya lebih digerakkan oleh sektor tersier, sedangkan 20 Kabupaten yang lain masih mengandalkan pertanian sebagai sumber utama perekonomian. Selain pertanian, belanja pemerintah juga mendominasi, dilihat dari pangsa sektor administrasi pemerintah dan jasa pendidikan. Dengan adanya konsentrasi ekonomi yang terpusat di Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi sekaligus kota jasa, bisa berakibat pada goncangan/shock ekonomi di Kota Kupang akan berdampak secara sistemik pada perekonomian Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu perlu diversifikasi ekonomi di daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur.

Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 2016 sampai dengan 2017 lebih rendah dari nasional. Berdasarkan pola inflasi selama ini, pergerakan inflasi di Nusa Tenggara Timur cenderung mengikuti pola tiga periode kenaikan, yakni periode awal tahun yang lebih disebabkan oleh adanya gangguan cuaca, periode tengah tahun bersamaan dengan adanya hari raya Idul Fitri dan masa libur sekolah, serta periode akhir tahun bersamaan dengan adanya perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru. Anomali akan terjadi lebih disebabkan adanya kenaikan harga BBM, tarif angkutan, tarif PDAM, ataupun kenaikan beberapa bahan makanan. Tingginya ketergantungan Nusa Tenggara Timur pada impor beberapa komoditas pertanian juga membuat fluktuasi harga beberapa komoditas pertanian utama di Nusa Tenggara Timur tinggi.

3.2.2. Proyeksi Ekonomi 2019

Kondisi struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur relatif tidak banyak berubah. Karena itu pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan tidak akan berubah terlalu signifikan dari tahun 2017 dan proyeksi 2018.

Pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh adanya penambahan area irigasi baru di Sumba dan Malaka. Daerah Irigasi Raknamo pada 2019 (mulai penuh setelah selesai pada 2017) baru akan berdampak pada perekonomian, namun tidak terlalu signifikan. Investasi pemerintah pusat berkaitan pembangunan perbatasan dan alokasi dana desa juga akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan berdampak pada berkurangnya alokasi untuk investasi pemerintah maupun belanja rutin pemerintah pada tahun 2019.

Memperhatikan perkembangan perekonomian indonesia dan Nusa Tenggara Timur selama ini, serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi, maka sasaran pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.11 dan 3.12 berikut.

Tabel 3.11
 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Arahan RKP 2018 dan Rancangan RKP 2019

No	Indikator Ekonomi	Tahun 2016	Tahun 2017	Proyeksi	
				Tahun 2018	Tahun 2019
1)	Pertumbuhan Ekonomi	5,18	5,16	5,00 – 5,41	5,66

Sumber : Rancangan RKP 2019

Tabel 3.12
 Proyeksi Indikator Ekonomi Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur
 2018 - 2019

No	Indikator Ekonomi	Tahun 2016	Tahun 2017	Proyeksi	
				Tahun 2018	Tahun 2019
1)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,16	5,39	5,45
2)	Indeks Gini	0,34	0,32	Menurun	Menurun
3)	Inflasi	2,48	3,861	4,44	4,1 -4,5

Sumber : BPS dan Kajian Ekonomi BI

3.2.3. Tantangan Perkonomian Daerah

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Nusa Tenggara Timur antara lain :

- 1) Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dan 2015 di atas nasional belum mampu mengurangi secara signifikan kesenjangan pendapatan perkapita dengan rata-rata pendapatan perkapita nasional;
- 2) Ketersediaan infrastruktur belum menjangkau seluruh wilayah kepulauan dan masih ada infrastruktur yang telah terbangun kualitasnya rendah sehingga tidak berfungsi optimal dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan daya tarik investasi;
- 3) Walaupun pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur berada di atas nasional, namun selain pertanian, sebagian besar kebutuhan lainnya didatangkan dari luar Nusa Tenggara Timur. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati oleh semua masyarakat;
- 4) Semua Kabupaten perekonomiannya masih didominasi oleh sektor primer, kecuali Kota Kupang yang digerakkan oleh sektor tersier. Konsentrasi ekonomi terbesar juga di Kota Kupang, sehingga perlu dikembangkan pusat-pusat ekonomi di luar Kota Kupang, yang mulai menggerakkan industri. Karena Itu sejak tahun 2017 telah mulai dilaksanakan pengembangan kampung industri di luar Kota Kupang;

- 5) Percepatan pelaksanaan kebijakan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial karena sebagian pembangunan belum secara konsisten mengacu pada arahan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 6) Peningkatan integrasi Kebijakan Nawa Cita, 8 Agenda pembangunan, 6 tekad pembangunan dan pembangunan berbasis Desa/kelurahan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota sehingga pemanfaatan sumberdaya pembangunan belum efisien dan efektif dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Kebijakan afirmatif pembangunan kawasan perbatasan Negara, daerah tertinggal, terdepan, dan tertinggal (3T), Provinsi kepulauan, pengembangan peternakan mendukung swasembada daging, pengembangan perikanan dan destinasi unggulan pariwisata belum didukung program yang tepat sesuai kebutuhan sehingga perkembangannya kurang optimal;
- 8) Kemampuan percepatan pembangunan sumberdaya manusia belum mencapai target sehingga berdampak pada lemahnya daya saing tenaga kerja dan terbatasnya kemampuan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2.4. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Arah kebijakan pembangunan ekonomi NTT sebagai bagian dari pembangunan nasional di daerah diselaraskan dengan arah pengembangan wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Peran wilayah kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat tahun 2019 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur pada RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan infra wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan antar wilayah, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan. Hal ini untuk mewujudkan arahan pembangunan RPJMN untuk wilayah Nusa Tenggara.

Sedangkan tema RKP 2019 adalah **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas”**, akan diselaraskan dengan tema pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebaaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015 - 2019 sesuai potensi dan keunggulan wilayah yaitu:

1. Pintu gerbang pariwisata eklogis, melalui pengembangan industri meeting, incentive, convention, exhibition (MICE);
2. Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut;
3. Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung
4. Pengembangan industri pangan dan tembaga.

3.2.5. Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan RKP 2019 dipertajam untuk meningkatkan efektivitas belanja. Kebijakan anggaran tidak didasarkan pada money follows program. Penganggaran Money follows program disusun berdasarkan:

- Program prioritas dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran yang kongkrit yang berimplikasi pada refocusing dan relokasi pada kegiatan prioritas
- Kewilayahan dan spasial planning

Selain itu juga dilakukan perkuatan integrasi berbagai sumber pendanaan dan langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui :

Melanjutkan implementasi Money Follow Program	Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah	Memperkuat kendali program
1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (<i>Belanja K/L – Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU</i>) 2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”) 3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran	1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan 2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional 3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional 4. Meningkatkan koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja pokok – belanja program/pembangunan)	1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu 2. Menyempurnakan format RKP- RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program 3. Melaksanakan data <i>sharing</i> (<i>Bappenas-KemKeu-Menko</i>) untuk pengendalian dan monev

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dilakukan dengan lebih cermat, tepat, dan terukur. Proyeksi penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan tahapan : 1) evaluasi kinerja pendapatan daerah untuk tahun rencana, 2) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan 3) penelaahan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya dana transfer daerah.

3.3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2017

Tabel 3.13 memperlihatkan persentase realisasi pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Tabel 3.13.
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017

No	URAIAN	2014	2015	2016	2017*)
	PENDAPATAN	101.01	98.88	104,51	98,31
1	Pendapatan Asli Daerah	105.66	101.38	99,18	104,50
	Pajak Daerah	103.94	100.60	102,17	104,13
	Retribusi Daerah	88.89	85.92	88,31	96,23
	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	113.67	99.97	99,36	99,43
	Lain-lain PAD yang Sah	117.39	112.98	87,90	110,48
2	Dana Perimbangan	99.13	96.64	106,75	96,88
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	86.67	69.25	110,09	100,88
	Dana Alokasi Umum	100.00	100.00	116,79	100,00
	Dana Alokasi Khusus	100.00	80.88	98,53	93,76
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	99.90	100.13	90,87	49,17
	Dana Hibah	100.00		62,68	14,07
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.83	100.95	100	100,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	-	-	-	-
	Pendapatan dari Jaminan Kesehatan	-	-	-	-
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	107.58	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

*) : Data sementara (unudit)

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT yang ditunjukkan oleh tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan setiap tahunnya selalu melampaui target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2015 dan 2017. Hal ini bisa berarti 2 (dua) hal, yaitu : 1) kinerja pendapatan daerah sangat

baik, ataukah, 2) penetapan target pendapatan kurang akurat, sebab target yang ditetapkan masih di bawah potensi yang sebenarnya.

3.3.1.2. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan Realisasi PAD selama kurun waktu 2013 – 2017 sebesar 40,23 %. Ini merupakan dampak dari pertumbuhan pajak daerah yang mencapai rata-rata 42,70% per tahun, Retribusi Daerah 57,66%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 33,38% per tahun dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 36,42% per tahun.

Tabel 3.14.
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2013–2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
	PENDAPATAN	6.53	15.12	32.71	16.89	21.67	18.58
1	Pendapatan Asli Daerah	14.04	40.44	127.2	12.79	6.69	40.23
	Pajak Daerah	15.36	50.91	125.49	12.5	9.22	42.70
	Retribusi Daerah	-12.79	207.46	110.69	22.9	(39.98)	57.66
	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	24.75	19.00	128.2	7.8	(12.87)	33.38
	Lain-lain PAD yang Sah	7.32	-1.54	143.52	14.71	18.10	36.42
2	Dana Perimbangan	6.08	9.72	113.29	94.24	28.35	50.34
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	-17.01	-12.85	71.98	49.97	(3.66)	17.69
	Dana Alokasi Umum	6.73	12.72	114.91	2.82	33.46	34.13
	Dana Alokasi Khusus	36.32	-12.85	135.59	1302.2	25.58	297.36
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.21	5.16	131.84	-95.81	-77.82	-6.88
	Dana Hibah	-	-	45.39	-10.13	-77.76	-8.50
	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.42	3.33	134.37	-96.49	-77.84	-7.04
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan dari Jaminan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	-	18.16	-	-	-	3.63

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah , diolah.

3.3.1.3. Rata-rata Pertumbuhan Belanja

Rata-rata belanja dihitung agar bisa memperkirakan besarnya belanja tidak langsung yang harus dianggarkan daerah untuk tahun rencana. Pertumbuhan Belanja untuk tahun 2014 – 2017 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.15. berikut.

Tabel 3.15.
Rata-Rata Pertumbuhan Belanja 2014-2017

URAIAN	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
BELANJA	22,20	(25,37)	32,81	22,95	13,15
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	11,68	14,50	41,63	24,45	23,06
Belanja Pegawai	11,09	3,62	26,20	122,94	40,96
Belanja Bunga	-		-		
Belanja Subsidi	-		-		
Belanja Hibah	(99,80)	25,44	28,18	(7,46)	(13,41)
Belanja Bantuan Sosial	9,64	(20,01)	8,54	113,39	27,89
Belanja Bagi Hasil	110,77	11,17	47,82	6,73	44,12
Belanja Bantuan Keuangan	124,71	(5,89)	26,24	(83,29)	15,44
Belanja Tak Terduga	439,00	(68,20)	243,32	275,00	222,28
<i>Belanja Langsung</i>	44,75	32,78	25,25	20,31	30,77
Belanja Pegawai	(23,58)	18,68	20,78	40,93	14,20
Belanja Barang dan Jasa	26,42	22,77	25,55	39,93	28,67
Belanja Modal	111,25	46,49	30,50	(4,42)	45,96

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

3.3.1.4. Analisis Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Analisis sumber-sumber pendapatan daerah dilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah sehingga bisa menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan, apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan target dan realisasi pendapatan daerah. Optimalisasi dimaksud terutama dilakukan pada komponen pendapatan yang relatif masih memberikan kontribusi kurang signifikan.

Tabel 3.16. menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi Dana Perimbangan sampai dengan tahun 2017 masih sebesar 78,43% dari total pendapatan daerah.

Di sisi lain, bila melihat rata-rata proporsi sumber-sumber pendapatan daerah dari tahun 2013–2017 memperlihatkan bahwa proporsi dana perimbangan mencapai 78,43% sedangkan proporsi dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 0,16%. Dengan demikian ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 78,59%.

Tabel 3.16.
Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 2013-2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00
	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	21,91	26,74	31,40	25,32	21.18
	Pajak Daerah	15,23	19,97	23,52	19,03	16.30
	Retribusi Daerah	0,36	0,96	1,17	0,83	0.53
	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,23	2,31	2,54	2,21	1.41
	Lain-lain PAD yang Sah	4,09	3,50	4,17	3,25	2.95
	<i>Dana Perimbangan</i>	48,83	46,54	51,89	73,53	78.43
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	3,52	2,66	2,16	2,21	1.82
	Dana Alokasi Umum	42,05	41,18	46,16	34,32	37.20
	Dana Alokasi Khusus	3,26	2,70	3,57	37,09	39.41
	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	29,25	26,72	34,40	1,14	0.38
	Dana Hibah	-	-	-	-	0.23
	Dana Darurat	-	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	29,02	26,05	0,19	0,27	0.16
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
	Pendapatan dari Jaminan Kesehatan	-	-	-	-	-
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	0,23	0,23	34,21	0,87	-

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berupaya melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan derajat otonomi fiskalnya, antara lain dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah dan hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3.3.1.5. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap komponen pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan antara target pendapatan daerah (dalam APBD Perubahan) dan realisasinya. Tabel 3.17 menunjukkan bahwa hampir setiap tahunnya selalu melampaui target, yaitu selalu di atas 100%, kecuali untuk tahun 2017 yang realisasinya tidak mencapai 100%, hanya sebesar 98,31%. Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui potensi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sesungguhnya.

Tabel 3.17.
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah 2013-2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
	PENDAPATAN	100,57	101,01	100,48	104,51	98,31
	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	109,76	105,66	101,38	99,18	104,50
	Pajak Daerah	112,73	103,94	100,60	102,17	104,50
	Retribusi Daerah	73,99	88,89	85,92	88,31	96,23
	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100,00	113,67	99,97	99,36	99,43
	Lain-lain PAD yang Sah	109,50	117,39	112,98	87,90	110,48
	<i>Dana Perimbangan</i>	99,39	99,13	96,64	106,75	96,88
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	92,19	86,67	69,25	110,09	100,88
	Dana Alokasi Umum	100,00	100,00	100,00	116,79	100,00
	Dana Alokasi Khusus	100,00	100,00	80,88	98,53	93,76
	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	96,43	99,90	100,13	90,87	49,17
	Dana Hibah	100,00	100,00	-	-	14,07
	Dana Darurat	-	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96,61	99,83	100,95	100	100,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
	Pendapatan dari Jaminan Kesehatan	-	-	-	-	-
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	78,00	107,58	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Menentukan proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan di tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pendapatan perkapita penduduk Nusa Tenggara Timur hanya sepertiga pendapatan perkapita nasional.
- 2) Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari meningkatnya Gini Rasio. Namun demikian, Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah Gini Ratio Nasional.

3) Pada tahun 2017 terjadi beberapa perubahan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempengaruhi penganggaran tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ini baik pendapatan maupun belanja. Pada tahun 2017 dan 2018 Pemerintah Provinsi NTT mengalami kesulitan karena terdapat penambahan ASN akibat penyerahan kewenangan dari Kabupaten/Kota tetapi penambahan DAU untuk Gaji ASN naik tidak signifikan.

Memperhatikan analisis pendapatan dan prospek ekonomi, serta kebijakan nasional terkait dana transfer ke daerah, maka Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 4,903 Trilyun lebih, bertambah Rp. 20,931 Milyar lebih atau naik 0,43% dari Tahun 2018 sebesar Rp. 4,882 Trilyun lebih, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

PAD diproyeksikan sebesar Rp. 1,082 Triliun lebih, naik Rp. 20,931 Milyar lebih atau 1,97%. Kenaikan terjadi dari komponen Pajak Daerah yang naik sebesar Rp. 6,347 Milyar lebih atau 0,77 % menjadi Rp. 829,234 Milyar dari pajak daerah tahun 2018 yang sebesar Rp. 822,886 Milyar lebih dan Retribusi Daerah yang naik sebesar Rp 722,223 juta atau 2.95% dari tahun 2018 sebesar Rp. 25,821 juta lebih.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diasumsikan besarnya sama seperti tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 3,799 Triliun Lebih.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah juga diasumsikan besarnya sama dengan Tahun Anggaran 2017, yaitu Rp. 18,163 Milyar lebih.

Tabel 3.18.
Realisasi Pendapatan TA.2017, Pendapatan TA. 2018,
dan Proyeksi Pendapatan TA. 2019

Uraian	Realisasi 2017	APBD TA. 2018	Proyeksi TA. 2019	+ / (-)	%
PENDAPATAN	4,715,481,775,278	4,882,077,980,000	4,903,009,357,387	20,931,377,387	0.43
PAD	1,061,760,494,715	1,061,828,395,000	1,082,759,772,387	20,931,377,387	1.97
Pajak Daerah	814,227,143,693	822,886,747,000	829,234,401,749	6,347,654,749	0.77
Retribusi Daerah	24,258,995,631	24,488,354,000	25,210,577,000	722,223,000	2.95
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekeayaan Daerah yg dipisahkan	67,209,561,753	72,250,000,000	72,250,000,000	-	-
Lain-lain PAD yg Sah	156,064,793,638	142,203,294,000	156,064,793,638	13,861,499,638	9.75

Uraian	Realisasi 2017	APBD TA. 2018	Proyeksi TA. 2019	+ / (-)	%
DANA PERIMBANGAN	3,644,692,862,110	3,799,586,456,000	3,799,586,456,000	-	-
Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	87,876,729,182	86,834,315,000	86,834,315,000	-	-
Dana Alokasi Umum	1,784,462,326,000	1,827,412,640,000	1,827,412,640,000	-	-
Dana Alokasi Khusus	1,772,353,806,928	1,885,339,501,000	1,885,339,501,000	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	9,028,418,453	20,663,129,000	20,663,129,000	-	-
Pendapatan Hibah	1,528,418,453	20,663,129,000	20,663,129,000	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,500,000,000	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
Penerimaan dari Pihak Ketiga	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT

Yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Untuk itu ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Peningkatan tata kelola pendapatan melalui:
 - Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
 - Pembenahan manajemen data penerimaan PAD
 - Peningkatan peran dan fungsi UPT pada dinas/badan lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Bersama Samsat.
 - Optimalisasi Samsat Online;

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah melalui:
 - a) Pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.
 - b) Mengintensifkan penerimaan retribusi daerah.
- 2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah secara profesional;
 - Memaksimalkan Kapasitas produktifitas UPTD potensial
 - Kemitraan swasta dalam pengelolaan aset daerah
 - Penyertaan modal pada Bank NTT dan Lembaga keuangan lainnya yang potensial
 - Pengembangan kawasan wisata Lasiana
 - Perbaikan sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai
- 3. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah
- 4. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian yang mengalokasikan DAK, dan menyerap DAK dengan optimal sekaligus melakukan pelaporan DAK dengan baik
- 5. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber dana kerjasama hibah luar negeri dan lembaga internasional
- 6. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah

3.3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 :

- 1) Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

- 2) Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD.
- 3) Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
- 4) Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator RPJPD untuk tahun 2018-2023.
- 5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama antar perangkat daerah.
- 6) Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya (SB), dan fungsi pelayanan.

Belanja Daerah pada tahun 2019 diarahkan untuk membiayai :

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
 - Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran pokok RPJPD;
 - Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat multi – years;
 - Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - Membiayai visi misi dan program prioritas KDH terpilih;
 - Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2018, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK
 - Kerjasama antar pemerintah daerah
 - Belanja SKPD, yang memuat belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

3.3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Penerimaan Pembiayaan

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA APBD sebelum perubahan merupakan angka estimasi.

b) Penerimaan Pokok Pinjaman Daerah

Diarahkan pada penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4.

2) Pengeluaran Pembiayaan

a) Penyertaan Modal

Penyertaan modal dilakukan kepada perusahaan daerah/BUMD/lembaga lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah daerah harus melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah akan memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 3.19.
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016– 2019

URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	APBD 2018	PROYEKSI 2019
PENDAPATAN	3.875.554.164.669	4,715,481,775,278	4,882,077,980,000	4,903,009,357,387
PENDAPATAN ASLI DAERAH	995.186.120.952	1,061,760,494,715	1,061,828,395,000	1,082,759,772,387
Pajak Daerah	745.481.335.512	814,227,143,693	822,886,747,000	829,234,401,749
Retribusi Daerah	40.418.137.792	24,258,995,631	24,488,354,000	25,210,577,000
Hasil Pengelolaan Kekeayaan Daerah yg dipisahkan	77.139.883.317	67,209,561,753	72,250,000,000	72,250,000,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	132.146.764.331	156,064,793,638	142,203,294,000	156,064,793,638
DANA PERIMBANGAN	2.839.657.758.567	3,644,692,862,110	3,799,586,456,000	3,799,586,456,000
Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	91.213.201.567	87,876,729,182	86,834,315,000	86,834,315,000
Dana Alokasi Umum	1.337.091.848.000	1,784,462,326,000	1,827,412,640,000	1,827,412,640,000
Dana Alokasi Khusus	1.411.352.709.000	1,772,353,806,928	1,885,339,501,000	1,885,339,501,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	40.710.285.150	9,028,418,453	20,663,129,000	20,663,129,000
Pendapatan Hibah	6.871.462.150	1,528,418,453	20,663,129,000	20,663,129,000
Pendapatan Dana Darurat		7,500,000,000		
Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya				
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.838.823.000			
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya				
Penerimaan dari Pihak Ketiga				

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT

Tabel 3.20.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah TA.2016– 2019

URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	APBD 2018	PROYEKSI 2019
BELANJA DAERAH	3.702.912.449.649	4,672,334,393,193	4,968,984,219,000	5,352,427,572,697
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.393.234.089.254	3,090,969,061,866	3,307,588,677,000	3,156,913,117,427
Belanja Pegawai	542.985.141.200	1,262,440,487,359	1,317,581,828,000	1,449,340,010,800
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	1.472.015.600.000	1,347,982,295,400	1,576,490,160,500	1,260,850,817,080
Belanja Bantuan Sosial	10.848.900.000	21,423,300,000	20,151,000,000	20,151,000,000
Belanja Bagi Hasil kepada kab/Kota dan Pemerintah Desa	346.786.046.455	455,802,033,792	386,942,443,500	506,091,083,107
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	19.448.994.000	3,264,679,000	1,423,245,000	2,710,934,400
Belanja Tidak Terduga	1.149.407.500	56,266,315	5,000,000,000	10,000,000,000
BELANJA LANGSUNG	1.309.678.360.395	1,581,365,331,327	1,661,395,542,000	2,240,537,515,576
Belanja Pegawai	101.681.932.485	138,547,284,538	144,139,983,138	145,100,500,000
Belanja Barang dan Jasa	605.697.383.275	964,781,723,446	962,783,760,684	1,223,037,467,576
Belanja Modal	602.299.044.635	478,036,323,343	554,471,798,178	872,339,548,000

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT

Tabel 3.21.
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016– 2019

URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	APBD 2018	PROYEKSI 2019
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	158.726.023.789	282,888,618,768	80,150,000,000	15,000,000,000
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	6.480.679.959	5,146,165,796	6,756,239,000	7,570,469,000
JUMLAH PENERIMAANPEMBIAYAAN	165.206.703.748	288,034,784,564	86,906,239,000	22,570,469,000
PENGELUARAN DAERAH				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.959.800.000	75,000,000,000	-	10,000,000,000
JUMLAH PENGELUARANPEMBIAYAAN	54.959.800.000	4,535,800,000	-	10,000,000,000

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang dilaksanakan, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 sebagaimana amanat RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005–2025. Hal ini mengingat RPJMD 2013–2018 telah berakhir pelaksanaannya pada tahun 2018. Saat penyusunan rancangan awal RKPD ini, RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 belum ditetapkan.

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005 - 2025

VISI

Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir, serta memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945.

Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat ke bawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi

kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

Kemajuan

Kemajuan, kemandirian dan keadilan adalah kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota masyarakat dan bangsa. Visi pembangunan nasional dan daerah tidak ingin mencapai kemajuan yang tidak berkeadilan, atau kemajuan yang berasal dari mewariskan ketergantungan pada sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber perubahan eksternal bangsa, sekalipun tidak terhindarkan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan negara baik secara regional maupun internasional.

Kemajuan suatu bangsa dan masyarakat dapat diukur dari berbagai bidang dan aspek. Ukuran kemajuan secara ekonomi menggunakan tingkat kemakmuran yang berindikator tingkat pendapatan dan distribusinya menurut golongan pendapatan. Peranan industri manufaktur sebagai penggerak kemajuan ekonomi juga dapat diduga melalui jumlah dan besaran sumbangannya terhadap kemakmuran. Bahkan industri IPTEK digunakan untuk mengukur tingkat daya saing bangsa.

Pengukuran kemajuan masyarakat juga diukur dari aspek sosial. Pada umumnya ukuran itu menggunakan variable nilai tambah sebagai fungsi sinergi modal sosial. Nilai tambah sosial merupakan sumbangan peran faktor kualitas sumberdaya manusia berindikator IPM dan diukur dari tingkat daya saing bangsa/masyarakat berindikator rerata, kumulatif tingkat pendidikan masyarakat dan APM serta jumlah produk IPTEKS yang dipatenkan serta jumlah industri manufaktur hasil kajian penelitian dan pengembangan yang diekspor. Kualitas kesehatan masyarakat juga dapat digunakan sebagai indikator kemajuan sosial antara lain dengan indikan angka morbiditas dan kualitas kesehatan. Kemajuan dari aspek kependudukan diukur dari pertumbuhan penduduk yang terus menurun karena penurunan angka kelahiran, kematian dan migrasi.

Kemajuan suatu masyarakat dari segi politik dapat diukur dari kualitas kehidupan berdemokrasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, kesehatan organisasi kelembagaan politik baik lembaga perwakilan, lembaga penghubung atau partai politik dan kualitas pelaku politik di lembaga suprastruktur politik maupun subordinasinya. Kemajuan politik secara proyeksi dapat diduga menggunakan kualitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpolitikan dan kualitas produk lembaga politik.

Kemandirian

Kemandirian tidak mengandung pengertian kesendirian dan keterisolasian dari interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan masyarakat.

Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal, tidak ada lagi masyarakat yang mampu hidup dalam kesendirian dan keterisolasian. Bahkan manajemen transformatif menggunakan *networking* sebagai *variable* yang dapat memberi nilai tambah yang lebih bermakna di banding keunggulan sendiri.

Kemandirian adalah hak dan tanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu apa yang dianggap baik dan bermanfaat bagi dirinya dan bagaimana cara mencapainya agar bangsa dapat bertumbuh dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Karena itu kemandirian tidak diinterpretasi secara fisik-geografis melainkan secara filosofis yaitu hak dan tanggung jawab menentukan nasib sendiri.

Pembangunan daerah selain bertujuan mencapai kemajuan tetapi juga harus mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat mensyaratkan kemampuan dan daya saing ekonomi wilayah selain ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang dapat bersaing dalam interaksi regional, nasional dan internasional. Kemandirian sudah harus mengalihkan titik berat pilihan landasan dari kekuatan modal sumberdaya alam (*natural resources capital*) ke modal sumberdaya manusia (*human resources capital*) untuk menghasilkan kemampuan ekonomi yang dipergunakan untuk mencapai kemandirian.

Fakta ekonomi menunjukkan masyarakat belum mandiri dalam kehidupan di bidang ekonomi. Pembiayaan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada sumber-sumber pembiayaan eksternal. Wilayah ini belum mandiri dalam bidang ekonomi dan hal ini berdampak pada posisi tawar politik dalam interaksi politik. Kemandirian antara lain diukur dari berapa besar ketergantungan pembangunan pada kekuatan sendiri dan seberapa kuat keberhasilan pembangunan ekonomi mendukung kemajuan dan kemandirian masyarakat dan wilayah ini.

Kemandirian juga dapat diukur dari sikap masyarakat dan bangsa untuk dengan semangatnya menyelesaikan sendiri semua persoalan di berbagai bidang. Kemandirian dalam politik tercermin dalam sikap terhadap penyelesaian masalah politik internal maupun antar bangsa. Namun sering ketidakmandirian secara ekonomi melemahkan kemandirian politik bahkan dapat merambat ke bidang-bidang yang lain.

Keadilan dan Kemakmuran

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dimana di dalam kehidupan masyarakat di segala bidang tidak dipraktekkan diskriminasi golongan, strata, gender dan wilayah; standar ganda, ketidaksamaan akses terhadap penguasaan faktor perubahan, dan sebagainya. Program Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur adalah program pembangunan kerakyatan artinya pembangunan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat.

Pembangunan yang berkeadilan tidak berwajah komutatif melainkan lebih bersifat distributif-demokratis. Pembangunan berkeadilan menunjuk pada adanya kesempatan yang sama pada semua individu untuk mengalami, mengikuti, berpartisipasi dalam berbagai bidang untuk mencapai peningkatan

kualitas hidup. Pengukuran keadilan dalam bidang pendidikan menggunakan indikator pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar yang merupakan hak, terutama bagi golongan margin ekonomi, gender dan isolasi geografis.

Keadilan dalam bidang kesehatan diukur dari kesempatan setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan dengan mutu yang sama termasuk akses ke sumber-pelayanan kesehatan. Keadilan di bidang hukum menunjuk pada kesempatan setiap subyek hukum baik individu maupun institusi untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dan untuk memperoleh rasa adil.

Keadilan politik diukur dari kualitas kehidupan demokrasi politik dalam berbagai dimensi dan aktivitas politik. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, keadilan diukur dari kedudukan dan peranserta setiap individu dalam tugas bela Negara dan pertahanan keamanan. Salah satu yang terpenting adalah keadilan dalam menikmati, memelihara hasil pembangunan dan memikul resiko pembangunan di berbagai bidang.

Adil dan makmur merupakan kondisi ideal yang diharapkan setiap masyarakat NTT di masa akan datang, maka untuk mewujudkannya regulasi pemerintah tentang memberikan kepada setiap masyarakat NTT segala sesuatu menjadi haknya yang semestinya diterima secara sosial, politik, ekonomi dan hukum sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan bertanggungjawab ke arah kemakmuran masyarakat merata melalui produksi terus menerus meningkat dan pendapatan masyarakat tersebar secara merata serta adil kepada semua penduduk sehingga daya beli masyarakat dapat bertambah pula. Kemakmuran dapat dicapai melalui membangun ekonomi yang kokoh secara bertahap, kongkrit dan realistis serta berkelanjutan.

M I S I

Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, makadisusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, dapat dilaksanakan melalui agenda :

- Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
- Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerti terpuji.
- Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
- Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan

memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.

- Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global, dilakukan melalui agenda :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
- Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
- Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan agenda :

- Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
- Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
- Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
- Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
- Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda :

- Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- Menumbuhkan kembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

5. **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan**, dapat dilakukan melalui agenda :
 - Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
 - Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
 - Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
 - Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan
 - Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.
6. **Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat**, dapat dilakukan melalui agenda :
 - Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.
7. **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim**, dapat dilakukan melalui agenda :
 - Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
 - Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah tahun 2019 tidak terlepas dari arah, tahapan dan prioritas RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005-2025. Karena itu, sebelum membahas prioritas pembangunan daerah tahun 2019, akan dibahas dahulu arah, tahapan, dan prioritas jangka panjang daerah.

4.2.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah **Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia** sebagai jabaran dari tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual. Visi pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam arah pembangunan jangka panjang sebagaimana berikut.

4.2.1.1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA DAN BERADAB BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA

1. Pembangunan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya meletakkan dasar bagi perwujudan identitas dan karakter pembangunan nasional serta kesadaran berbudaya yaitu kesadaran terhadap budaya, suku, ras, agama, golongan untuk membangun toleransi, solidaritas, suasana harmonis dan menghindari benturan, diskriminasi dan friksi.
2. Pembangunan agama untuk menguatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mewujudkan agama sebagai peletak moral dan etika pembangunan, membina akhlak, membentuk ethos kerja dan sebagainya. Pembangunan agama akan mendorong toleransi dan kerukunan kehidupan beragama dan hidup berdampingan yang aman dan serasi,
3. Pembangunan moral, etika dan budaya untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial budaya yang berciri Indonesia yang meletakkan dasar bagi pembentukan kepribadian yang taat terhadap kode etik bermasyarakat, berprofesi dan berinteraksi dalam berbagai bidang, sekaligus untuk membentuk karakter masyarakat dan aparatur yang bersih dan berwibawa dalam kerangka pemerintahan yang bersih.
4. Pembangunan budaya untuk menghasilkan ketahanan budaya dan mengembangkan budaya nasional dan daerah mencakup pembentukan masyarakat religius, pembentukan perilaku budaya, pengembangan kreasi budaya baru baik nasional maupun lokal melalui inovasi budaya, pengembangan kearifan budaya lokal, pelestarian budaya dan pengungkapan kreativitas melalui kesenian dalam kerangka membentuk manusia budaya yang berkeseimbangan secara material dan spiritual.
5. Penemuan kembali (*recovery*), pendataan, pembelajaran kembali dan pelestarian budaya lokal sebagai akar dari budaya nasional agar dengan demikian dapat membangun satu mekanisme komunikasi lintas budaya yang mampu memperkuat ketahanan nasional.

4.2.1.2 MEWUJUDKAN MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING GLOBAL

4.2.1.2.1 Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas

1. Untuk mencapai Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan berdaya saing dalam era globalisasi, maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi yang nilai tambah profesionalnya dapat ditawarkan ke ruang persaingan pada skala nasional dan global. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara berkelanjutan merupakan syarat mutlak. Untuk itu pembangunan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat. Pertumbuhan penduduk dengan menunjukkan NRR (*Net Reproduction Rate*) sebesar 1 atau TFR (*Total Fertility Rate*) NTT sebesar 3,49 harus diturunkan ke 2,1
2. Pertumbuhan penduduk dikendalikan melalui kebijakan angka kelahiran yang ditentukan oleh angka kematian. Dua variabel utama pengendali TFR adalah angka kematian dan kelahiran, kecuali angka migrasi yang

bersifat minus. Untuk itu program keluarga berencana harus memperoleh perhatian dan prioritas termasuk program peningkatan kualitas kesehatan reproduksi. Perlu ditingkatkan ketersediaan sarana program yang terjangkau secara ekonomi dan terakses secara lokal. Kepadatan agraris masih harus diatasi dengan strategi penyebaran yang lebih baik terutama ke dalam ruang pemukiman baru. Jenis usaha produktif di ruang nafkah lain, seperti laut, masih perlu diupayakan secara terus menerus untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya beli jasa kesehatan. Peningkatan efektivitas, transparansi, kemutakhiran, kesahihan mencakup keakuratan dan ketepatan informasi dan data administrasi kependudukan.

3. Pembangunan bidang pendidikan dasarnya merupakan investasi sumberdaya insani yang membutuhkan biaya yang besar, konsistensi dan komitmen yang tinggi dengan motto belajar sepanjang hayat (baik melalui jalur formal, nonformal maupun informal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM NTT sebagai modal dasar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing global menjadi tuntutan dan kebutuhan publik dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, profesionalisme dan kesejahteraan guru, manajemen dan layanan pendidikan yang berkualitas dan pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam menciptakan dunia pendidikan yang bermutu. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar bagi kelompok margin, keluarga miskin (*better education for the poor*), percepatan pemberantasan buta aksara fungsional, peningkatan pendidikan anak usia dini dan lain sebagainya. Berkenan dengan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, maka perlu disediakan subsidi biaya pendidikan secara terencana, memadai, konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu diperlukan perhatian yang proporsional bagi pengembangan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta sebagai aset pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas baik secara akademik maupun non akademik. Oleh karena itu kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan pada mutu baik tenaga pendidik dan kependidikan serta tamatan pendidikan pada semua jenis dan jenjang agar dapat bersaing dalam pasar kerja global.
4. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai Nusa Tenggara Timur Sehat dilaksanakan melalui peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan SDM kesehatan menurut jenis keahlian, peningkatan kualitas administrasi dan layanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS, NAPZA, malaria dan penyakit-penyakit menular lainnya. Pengelolaan kesehatan berkaitan langsung dengan masalah fenomena demografis, lingkungan, epidemiologi penyakit, globalisasi demografi dan mobilisasi, IPTEK kesehatan dan kerjasama lintas lembaga.

5. Potensi sumberdaya manusia perempuan dan anak Nusa Tenggara Timur perlu dibangun melalui program pendayagunaan kelompok perempuan. Program pendayagunaan penduduk perempuan bertujuan untuk meningkatkan status, peran, tugas, martabat dan harga diri kelompok perempuan yang memungkinkan perempuan berkesempatan mengaktualisasikan dirinya. Pemberdayaan kelompok perempuan juga bertujuan untuk mensejajarkan kelompok perempuan dengan laki-laki agar proses aktualisasi dirinya dapat berjalan dengan semestinya. Pendidikan kelompok perempuan harus dikembangkan secara wajar melalui semua jalur jenis dan jenjang baik formal dan nonformal sehingga kelompok perempuan memiliki kemungkinan dan aksesibilitas yang lebih besar untuk mencurahkan tenaga, waktu dan keahliannya di semua sektor pembangunan. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan formal dan nonformal diharapkan dapat mencegah perkawinan usia dini. Dengan demikian dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
6. Pembangunan masyarakat yang adil dan setara didasarkan pada kesadaran masyarakat maupun individu untuk tidak melakukan berbagai praktek diskriminasi terhadap golongan, strata, gender, wilayah, standar ganda, kesempatan untuk mendapatkan akses pembangunan di semua bidang.
7. Pembangunan manusia kelompok usia anak dan remaja perlu dilakukan di Nusa Tenggara Timur untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok ini untuk mendapatkan pendidikan dan terhindar dari eksploitasi tenaga anak usia sekolah di sektor produktif terutama sektor informal.
8. Pembangunan kelompok pemuda diarahkan untuk memperkuat jati dirinya sebagai pelaku budaya sekaligus untuk memperoleh ketahanan budaya, peningkatan kualitas ketrampilan dan kesehatan melalui olahraga dan upaya bela negara.

4.2.1.2.2 Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)

1. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dan untuk mengabdikan kepada kemanusiaan dan dipergunakan bagi kesejahteraan manusia khususnya dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan, industri yang *knowledge based* (berbasis pengetahuan). Pembangunan teknologi bertujuan agar masyarakat berkemampuan menguasai, mengadopsi dan mengkombinasikan, menciptakan dan menemukan kembali berbagai hal baru di bidang teknologi yang dipergunakan bagi kepentingan manusia.
2. Pembangunan ilmu pengetahuan di berbagai bidang keilmuan selain untuk menghasilkan SDM berkualitas dan profesional, juga untuk memperkuat daya saing masyarakat dan bangsa melalui peningkatan jumlah paten/hak cipta hasil kajian penelitian dan pengembangan, ekspor teknologi tinggi (manufaktur) untuk meningkatkan besaran kontribusi IPTEKS dan SDM terhadap dunia usaha agar mencapai > 9,6.

Karena siklus satu daur teknologi lebih singkat dari satu periode pendidikan S1 maka ketertinggalan pemahaman dan penguasaan teknologi yang terus meningkat mengakibatkan terjadinya penguasaan dan penggunaan teknologi kadaluarsa, untuk itu perlu dilakukan percepatan transformasi teknologi dan reinventing teknologi yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS, konteks dan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

3. Pembangunan IPTEKS diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan, energi, pertahanan keamanan, kesehatan dan berbagai bidang lainnya. Pengembangan teknologi telekomunikasi dan informatika bertujuan untuk mendukung interaksi global melalui sistem cybernetika/internet dalam cyberspace/dunia maya, mengaktualkan penguasaan IPTEKS, merelevansikan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Pengembangan IPTEKS didukung oleh berbagai bidang dan jenis penelitian baik yang bersifat dasar, terapan dan pengembangan. Oleh karena itu harus ditunjang dengan sarana dan kelembagaan penelitian serta sumberdaya peneliti yang memadai. Pengembangan IPTEKS dipergunakan untuk mendukung rekayasa termasuk inovasi di berbagai bidang pembangunan.

4.2.1.2.3 Menciptakan Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh

1. Pembangunan perekonomian perlu diarahkan kepada pembangunan sektor primer, sekunder dan tersier yang terintegrasi dan saling mendukung, sehingga pertumbuhan sektor primer mendorong pertumbuhan sektor sekunder, dan bersama-sama keduanya mendorong sektor tersier begitu pun sebaliknya.
2. Revitalisasi pertanian perlu dikembangkan dalam upaya pengejawantahan kebijakan pembangunan nasional dalam revitalisasi pertanian melalui pembangunan pertanian spesifik wilayah yang sesuai dengan potensi semiarid dan kelautan Nusa Tenggara Timur serta aspek sosial budayanya.
3. Pembangunan perilaku ekonomi perlu diupayakan ke arah yang lebih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui upaya-upaya yang mendorong pergeseran perilaku produksi, investasi, menabung dan konsumsi ke arah yang lebih memungkinkan terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi. Oleh karena itu perlu dikembangkan pendekatan ekologi manusia yang mampu menyelaraskan kaidah-kaidah sosial ekonomi masyarakat dengan kaidah-kaidah ekonomi.
4. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja guna memutuskan mata rantai kemiskinan.
5. Pada aspek kapital, pembangunan diarahkan kepada peningkatan ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses pada lembaga keuangan mikro dan padat modal guna penguatan modal masyarakat miskin dan perdesaan. Untuk itu perlu diformulasikan dan diimplementasikan sistem perkreditan, kelembagaan koperasi dan bank

yang memungkinkan peranan perbankan sebagai lembaga intermedia yang pro investasi.

6. Pembangunan teknologi diarahkan pada upaya mekanisasi pedesaan melalui upaya diseminasi teknologi tepat guna dan pengembangan bahan bakar nabati untuk kemandirian penyediaan energi pedesaan.
7. Perkuatan perekonomian domestik perlu dikembangkan guna mewujudkan masyarakat berdayasaing yang secara bertahap-berkelanjutan dilaksanakan melalui perbaikan efisiensi ekonomi, pereduksian ketimpangan ekonomi, penstabilan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keterkaitan dengan kebijakan ekonomi internasional.

4.2.1.2.4 Mengoptimalisasikan Eksplorasi, Eksploitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

1. Peningkatan Eksplorasi dan Eksploitasi Potensi Tambang.

Pembangunan di bidang pertambangan diarahkan untuk pemanfaatan secara optimal potensi tambang NTT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sumbangan subsektor pertambangan terhadap PAD serta mengupayakan berbagai tindakan pengamanan untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang yaitu : pembinaan, pengawasan dan pengaturan pemanfaatan potensi tambang. Meningkatkan ketersediaan informasi potensi tambang. Meningkatkan teknologi dan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan potensi tambang. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan potensi tambang. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum dengan tetap memperhitungkan dan menjaga keseimbangan dan keserasian alam serta keberlanjutan sumberdaya alam.

2. Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air dan DAS.

Ketersediaan sumber air yang cukup untuk kebutuhan konsumsi dan produksi masyarakat dengan cara mengatur pemanfaatan sumberdaya air yang berasas lestari, menata regulasi pemanfaatan dan pelestarian sumber air, identifikasi dan pemetaan sumber air potensial, melindungi dan merehabilitasi sumber air dan memulihkan sumber air yang mengalami pengrusakan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya air. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan air. Pembangunan infrastruktur dalam pelestarian air. Konservasi dan rehabilitasi lahan di sejumlah DAS untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya. Pengamanan sungai dan pengembangan daerah aliran sungai, rehabilitasi sungai dan pengembangan daerah aliran sungai dan menjaga tangkapan air (*catcment area*), yang meliputi: pengukuhan dan penataan batas; pengendalian kegiatan budidaya; mengoptimalkan pemanfaatan kearifan lokal dan norma tradisional yang sesuai (*customary law*) dalam menjaga kelestarian air dan DAS.

3. Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan lahan Kritis, diarahkan untuk mencegah bertambahnya lahan kritis dari upaya-upaya pengrusakan lingkungan seperti praktek pertanian dan penggunaan

lahan yang menimbulkan lahan kritis. Pemulihan kembali/rehabilitasi lahan kritis yang sudah rusak dengan usaha penghijauan, reboisasi dan konservasi hutan, tanah dan air yang dipadu dengan pengembangan pertanian, kehutanan. Studi dan pemetaan ulang luas dan sebaran lahan kritis di Nusa Tenggara Timur. Penyediaan/penyusunan informasi dan publikasi yang lengkap tentang perkembangan dan kondisi lahan kritis. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan lahan kritis. Mencegah sistem perladangan berpindah yang menghambat pemudaan vegetasi/tanaman secara alamiah dan mengakibatkan pembentukan lahan kritis. Mengurangi luas lahan kritis terutama di Sumba Timur, Sumba Barat dan Kupang. Mengurangi luas lahan kritis dalam hutan pada DAS dan di luar kawasan hutan. Pendayagunaan lahan kritis melalui rehabilitasi lahan diarahkan menjadi lahan pertanian yang produktif, upaya pemukiman kembali dalam areal pertanian, pengembangan usaha kehutanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat peladang berpindah. Memulihkan fungsi lahan-lahan kritis dan lahan-lahan bekas pertambangan, pembakaran hutan atau kegiatan merusak di dalam hutan maupun di luar hutan baik melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan, bersama-sama dengan masyarakat dan swasta;

4. **Konservasi dan Optimasi Hasil Hutan.** Pembangunan di bidang kehutanan diarahkan pada upaya pelestarian, rehabilitasi dan perluasan hutan untuk mengkonservasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Optimasi pemanfaatan hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan dan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dan penerapan IPTEKS pada sektor kehutanan. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan hutan. Meningkatkan informasi mengenai perkembangan hutan konservasi dan produksi. Meningkatkan teknologi dan management pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Meningkatkan sumbangan subsektor kehutanan terhadap PAD. Penetapan kawasan hutan dalam tata-ruang. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya (pertanian dan pertambangan). Memberi perlindungan terhadap kawasan yang mempunyai nilai historis, nilai tambah maupun nilai ilmiah. Penegakan hukum dalam upaya perlindungan hutan. Pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu. Mencegah kebakaran hutan. Meningkatkan penelitian biologi dan ekologi satwa dan flora langka. Pendayagunaan lahan kritis menjadi lahan produktif untuk pertanian dan perkebunan, pengembangan hutan produksi. Mengembangkan flora dan fauna khas potensial seperti kayu cendana. Pemantapan regulasi pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Pengukuran, pemetaan dan penyusunan informasi; pemantapan perencanaan, koordinasi dan pengawasan lintas wilayah; pengkajian dan penyusunan model pengembangan dan pengelolaan hutan konservasi, lindung dan produksi berbasis masyarakat. Penataan batas dan pemetaan hutan konservasi, lindung dan produksi. Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Melindungi flora dan fauna terutama yang bersifat endemik lokal. Mencegah pemungutan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi. Melestarikan

keanekaragaman hayati. Mengembangkan koleksi plasmanutraf dengan mendirikan herbarium di tingkat provinsi. Mencegah masuknya spesies dan varietas eksotis. Mencegah penggunaan teknologi/teknik yang merusak. Mengantisipasi terjadinya Komersialisasi Bahan Hayati seperti tanaman hasil rekayasa genetik atau tanaman *trans genis* dan Bioprospeksi dan Biopirasi. Meningkatkan pemahaman dalam menilai sumberdaya alam berbasis budaya setempat dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan norma tradisonal yang sesuai (*customary law*)

- 5. Optimasi Manfaat Sumberdaya Pesisir dan Laut.** Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat. Meningkatkan sumbangan subsektor perikanan terhadap PAD. Meningkatkan produksi perikanan dan hasil laut. Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pantai dan pelaku ekonomi terkait. Meningkatkan bahan baku industri pengolahan hasil laut. Pengembangan, perbaikan dan modernisasi sarana dan prasarana usaha perikanan dan kelautan. Kapitalisasi kegiatan ekonomi nelayan. Perbaikan teknologi dan manajemen penangkapan. Diversifikasi dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pantai. Pengembangan model industri hasil laut berbasis masyarakat. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, kemitraan dan kerjasama dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi. Pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan dan kelautan. Memodernisasi sarana dan prasarana penangkapan nelayan, perbaikan teknologi dan manajemen penangkapan. Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan laut; peningkatan kemampuan personil; pemantapan sistim pengamanan dan regulasi pemanfaatan sumberdaya kelautan. Menjaga keamanan wilayah laut sebagai suatu teritori multifungsi. Menjaga sumberdaya laut sebagai kekayaan lestari dari segala gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Menurunkan aktivitas pencurian di wilayah laut. Penegakan hukum bagi pelanggar dan perusak sumber daya pesisir, laur dan pulau-pulau kecil. Peningkatan keselamatan, pengurangan bencana alam laut, dan prakiraan iklim laut. Menjalin kerja sama regional dan internasional untuk menyelesaikan batas laut dengan negara tetangga. Meningkatkan Riset, Teknologi dan Informasi di bidang Sumberdaya Pesisir dan Laut. Meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kelautan. Pengembangan sistem MCS (*monitoring, controlling, and surveillance*) dalam pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non hayati lainnya. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi IPTEKS, SDM, kelembagaan dan peraturan perundangan. Pemantapan sistim imformasi wilayah pesisir dan laut. Meningkatkan teknologi dan manajemen pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Pemantapan sistim informasi perikanan dan kelautan; pengukuran, pemetaan dan penyusunan informasi, pemantapan perencanaan, koordinasi dan

pengawasan lintas wilayah pesisir dan kelautan berbasis masyarakat dan advokasi masyarakat. Memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan pesona keindahan alam sebagai Provinsi kepulauan. Pembangunan pulau-pulau kecil dan perbatasan. Menyerasikan peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah. Terselenggaranya pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara serasi sesuai dengan daya dukung lingkungan. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Nelayan dan Masyarakat Pesisir dan Pantai Memperkuat kelembagaan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir sehingga dapat berfungsi untuk mendukung kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran dan penyediaan imput produksi. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; Penataan dan peningkatan kelembagaan, termasuk lembaga masyarakat di tingkat lokal dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya terbaharukan di pesisir dan pantai (gelombang untuk listrik, olahraga dan pariwisata, dan jasa lainnya).

4.2.1.2.5 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Berkualitas

- 1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan, Jembatan dan Terminal.** Arah pembangunan di bidang sarana dan prasarana jalan dan jembatan 20 tahun mendatang adalah peningkatan kuantitas dan kualitas fisik jalan, jembatan dan terminal untuk memperlancar mobilitas orang dan barang, meningkatkan transaksi ekonomi dan terbukanya isolasi antar wilayah. Pengkajian teknik dan sistem pengelolaan/ penanganan jalan, jembatan dan terminal. Meningkatkan jumlah/panjang jalan yang termasuk kategori baik dan mengurangi yang termasuk kategori rusak dan rusak berat, terutama di beberapa kabupaten yang jalannya cukup banyak rusak dan rusak berat. Mengurangi proporsi jalan kerikil dan tanah dan meningkatkan jalan aspal terutama di Kabupaten yang proporsi jalan kerikil dan tanah cukup tinggi dan juga di pedesaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Membuka beberapa wilayah yang masih terisolasi untuk mengembangkan ekonomi.
- 2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Penyeberangan.** Menyelaraskan semua peraturan perundangan di bidang sarana dan prasarana transportasi, baik yang mencakup investasi maupun peyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha di bidang transportasi. Mendorong peran perbankan dan sumber pendanaan lainnya untuk menunjang investasi di bidang sarana dan prasarana transportasi. Mendorong stakeholder atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan di bidang sarana dan prasarana transportasi. Menciptakan cetak biru (*blue print*) Sistem Transportasi Wilayah. Meningkatkan jumlah dan kualitas kendaraan untuk mendorong mobilitas penduduk dan barang. Menetapkan standard kualitas kendaraan digunakan di jalan umum. Mengembangkan sistem transportasi perkotaan di tiap ibukota

Kabupaten/Provinsi. Menerapkan sistim pajak lingkungan pada kendaraan untuk mengurangi beroperasi kendaraan yang tidak layak jalan dan berdampak pada lingkungan. Mengembangkan pengkajian dan sistem perhubungan darat antar wilayah dan sistem transportasi perkotaan. Pengembangan regulasi perhubungan darat dengan memperhatikan kuantitas dan memperhitungan efeknya pada daya dukung jalan raya, efisiensi penggunaan bahan bakar, keseimbangan lingkungan seperti polusi udara, Pengrusakan ozon, dsb. Meningkatkan arus kunjungan kapal penyeberangan ferry, Meningkatkan volume bongkar muat barang pada pelabuhan penyeberangan ferry. Meningkatkan arus penumpang melalui penyeberangan ferry

- 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.** Pengadaan dan pemeliharaan kapal penumpang dan barang. Pembangunan dan modernisasi dermaga/pelabuhan laut. Meningkatkan peranan transportasi laut untuk mendukung perdagangan dan ekspor import. Meningkatkan volume bongkar muat barang melalui pelabuhan laut. Meningkatkan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut di seluruh wilayah NTT. Meningkatkan arus kunjungan kapal laut. Meningkatkan arus penumpang kapal laut. Mengembangkan sistem jaringan transportasi intra wilayah maupun antar wilayah untuk menjamin kelancaran hubungan transportasi antar negara, antar provinsi, antar pulau, antar kota dan antara kota dengan desa sehingga membentuk kesatuan wilayah yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan peluang-peluang yang ada. Menciptakan sistem perhubungan darat, laut dan udara secara sinkron untuk meningkatkan volume transaksi ekonomi antar wilayah. Mengembangkan transportasi laut untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar. Mendorong peningkatan arus penumpang, arus kunjungan dan volume bongkar muat barang pada pelabuhan. Mengembangkan keterpaduan antara pembangunan sarana dan prasarana jalan dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara.
- 4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Udara.** Meningkatkan jumlah pesawat yang datang menuju dan berangkat dari NTT terutama pada daerah yang cukup rendah dilalui oleh pesawat. Pengembangan sarana dan prasarana bandara untuk mendukung transportasi udara. Mendorong peningkatan arus penumpang udara yang masuk dan keluar NTT. Meningkatkan dan mendorong volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara. meningkatkan route penerbangan pada Kabupaten-Kabupaten yang belum berkembang dan juga ke Provinsi lain di luar NTT. Mengembangkan status bandara yang potensial menjadi bandara bertaraf internasional. Meningkatkan/membuka route penerbangan ke negara-negara lain terutama negara tetangga terdekat seperti Timor Leste dan Australia. Melakukan pengembangan sarana angkutan komoditi khusus dengan pesawat terbang khususnya untuk barang-barang segar (*fresh goods*) dan bernilai ekonomi tinggi.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi.

Meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan luas lahan beririgasi dan meningkatkan intensitas tanam. Mengembangkan lahan tidur dan lahan kritis potensial menjadi lahan produktif dengan meningkatkan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi seperti embung, bendungan dan jaringan irigasi lainnya. Peningkatan luas panen dan produksi padi. Peningkatan lahan beririgasi (irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana, tadah hujan dan pasang surut). Peningkatan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi adalah untuk memanfaatkan sumberdaya air yang tersedia secara optimal dan berkelanjutan untuk menunjang kegiatan pertanian, mendorong peningkatan produksi dan produktifitas pertanian. Pengkajian dan penyusunan model atau sistem pengairan yang efisien. Perbaikan manajemen dan teknologi pengairan. Pengembangan kelembagaan masyarakat pemakai air. Pembangunan dan pemeliharaan bendungan, embung dan saluran irigasi pada daerah berlahan kering seperti embung kecamatan atau desa untuk memperpanjang kalender musim petani, peningkatan ketersediaan pakan ternak dan holtikultura.

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi.

Peningkatan ketersediaan air bersih. Mendorong kemampuan PAM menyediakan air, menemukan sumber air baru, meningkatkan debit air dan mengefisiensi memanfaatkan air yang ada. Mendorong kemampuan PDAM dalam pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan perpipaan dan sumberdaya air. Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih. Pengkajian dan penyusunan model/sistem pengairan yang efisien. Mengembangkan sumber air yang potensial seperti dengan cara konservasi. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan. Mendorong keterlibatan masyarakat dan badan usaha lainnya dalam penyediaan air bersih. Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi. Meningkatkan rumah tangga yang memiliki kamar mandi sendiri. Meningkatkan jumlah dan fasilitas kamar mandi umum. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menangani sampah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi.

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelistrikan.

Mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik rumah tangga, industri, perkantoran, perhotelan dan lain-lain. Meningkatkan jumlah rumah tangga menggunakan layanan PLN. Mengembangkan penggunaan sumber energi matahari, arus laut, tenaga angin dan lain-lain. Mendorong peranan swasta, badan usaha milik negara, pemerintah daerah, masyarakat membangun pembangkit listrik terutama listrik non BBM. Mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik BBM melalui penggunaan energi matahari, biodisel, panas bumi, hidro gas, batu bara, angin, gelombang atau sumber energi lainnya yang potensial di NTT untuk mengatasi luasnya wilayah NTT yang berbentuk kepulauan dengan densitas penduduk yang bervariasi yang menyulitkan pengembangan sistim kelistrikan PLN konvensional.

- 8. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pendidikan.** Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. Membangun rumah sakit dan puskesmas sesuai kebutuhan masyarakat. Meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sesuai standar kesehatan. Membangun sekolah sesuai kebutuhan masyarakat. Merehabilitasi dan merenovasi semua sekolah yang mengalami kerusakan sesuai standar mutu gedung. Dan perlu memperhatikan peluang dan tantangan/persaingan dengan pihak asing dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- 9. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman.** Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman sehingga tercipta lingkungan pemukiman yang memenuhi syarat. Meningkatkan kepemilikan rumah sehat. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pemukiman. Perbaikan kawasan pemukiman penduduk terutama di pedesaan dan pesisir pantai. Mendorong investasi di bidang perumahan. Mendorong peranan perbankan dalam pendanaan pembangunan perumahan dan permukiman
- 10. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Telekomunikasi.** Meningkatkan akses terhadap telekomunikasi melalui system koordinasi antar pusat dan daerah. Mencegah ketimpangan distribusi akses terhadap telekomunikasi antar daerah/wilayah dengan memperhatikan daerah potensial untuk pengembangan sarana telekomunikasi (blog spot). Meningkatkan jumlah telepon swasta dan pemerintah terutama di Kabupaten yang belum berkembang. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kantor pos terutama di Kabupaten yang belum berkembang. Mendorong investasi dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi terutama di daerah potensial dan belum dikembangkan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telekomunikasi.

4.2.1.3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM

1. Arah pembangunan politik diarahkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan menciptakan iklim kehidupan masyarakat dimana setiap anggota masyarakat memiliki kesamaan kedudukan dalam bidang politik dan hukum, peningkatan peranan pers yang bertanggungjawab dan peranan masyarakat sipil; pemantapan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi birokrasi yang efektif dan efisiensi untuk layanan prima kepada masyarakat dan pemanfaatan potensi daerah secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan rakyat.
2. Arah kebijakan hukum berorientasi pada Rekonstruksi sistem hukum. Rekonstruksi struktur merujuk pada rekonstruksi struktur secara nasional dengan tetap membuka peluang bagi akses para pencari keadilan melalui berbagai forum tidak resmi dan melalui berbagai cara yang dipilih sendiri. Forum resmi melegitimasi produk forum tidak resmi sejauh tidak bertentangan dengan hukum positif dan harus memberi

ruang bagi LEGAL PLURALISM dalam masyarakat sehingga tidak ada pengingkaran kebenaran dan kemanusiaan dalam proses hukum.

3. Rekonstruksi substansi hukum meliputi tahap-tahap formulasi, implementasi dan penegakan. Dalam hal formulasi, selain mekanisme baku yang diwajibkan, kajian akademis yang kini dilakukan secara sporadic perlu dibakukan pula.
4. Dalam hal penegakan, sesuai dengan kecenderungan karakter responsive, maka di masa depan kebijakan para fungsionaris hukum mesti lebih diorientasikan pada pemecahan masalah dan perwujudan nilai keadilan. Artinya hukum ditegakkan bukan demi kepentingan penegakan hukum semata melainkan dalam rangka menyelesaikan masalah *termasuk masalah KKN* yang justru menjadi alasannya untuk diformulasikan.
5. Sifat multi dimensi yang inheren dengan gejala pelanggaran HAM di NTT merupakan petunjuk bahwa ini merupakan isu yang mesti didekati dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. Setiap strategi yang digunakan mesti disesuaikan dengan konteksnya. Pencelaan terhadap pelaku saja tidak memadai tanpa dibarengi dengan perbaikan posisi tawar para korban [potensi]. Rekonstruksi realitas sosial artificial mesti mencapai tahap kristalisasi dalam pola pikir [mind-set] individu warga masyarakat NTT.

4.2.1.4 MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI WILAYAH YANG BERKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, POLITIK DAN KEAMANAN

1. Pluralitas masyarakat Nusa Tenggara Timur diarahkan sebagai hal yang positif untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik agar bermanfaat dalam pembangunan perlu peningkatan kualitas SDM dalam berbagai jenis keahlian, peningkatan pemahaman dan penghayatan tentang pluralisme di NTT sebagai suatu realitas sosio-kultural untuk mewujudkan kepentingan sosial, ekonomi, politik, hukum pertahanan dan keamanan masyarakat.
2. Kebudayaan daerah adalah sebagai aset pembangunan daerah yang perlu secara terus menerus dipelihara, dibina dan dikembangkan. Seiring dengan hal tersebut, perlu pula diupayakan terbukanya peluang bagi masyarakat luas untuk makin berperan aktif dalam proses pengembangan kebudayaan daerah tersebut dan dalam menikmati hasil – hasilnya. Perlu pula ditumbuh kembangkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai – nilai sosial budaya daerah yang luhur serta menyerap nilai – nilai dari luar yang positif dan yang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.
3. Dalam pembangunan politik perlu dikembangkan budaya politik kompetitif dari semua proses politik maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian output yang dihasilkan dapat selaras dengan nilai – nilai profesionalisme yang diharapkan dan meningkatkan kesadaran politik kritis agar terhindar dari mobilisasi

politik yang dangkal, optimalisasi fungsi partai politik dan dengan demikian dapat tercipta demokrasi dalam arti sebenarnya.

4. Dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan sebaiknya didahului dengan sebuah research (*policy analysis*) yang memadai untuk mendapatkan informasi yang valid sebelum suatu keputusan ditetapkan.
5. Dalam pembangunan daerah ke depan budaya disiplin hendaknya lebih dimasyarakatkan dan dijadikan sebagai sebuah gerakan masyarakat dalam pembangunan daerah.
6. Dalam rangka menghindari berbagai penyimpangan dan pemborosan pembangunan di daerah maka perlu diberlakukan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
7. Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan KKN perlu terus diupayakan perwujudannya sekalipun disadari bahwa pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala yang amat luas, rumit, dan kompleks. Pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah salah satu **prasyarat good governance**.
8. Pengembangan pendidikan kewarganegaraan dini (*early civic education*) kepada warga masyarakat di NTT agar memperkuat nilai nasionalisme dan identitas nasional dalam tata pergaulan internasional dan dalam interaksi internal sebagai bangsa yang majemuk.
9. Pengembangan pendidikan politik masyarakat yang dapat membuka sekat-sekat primordial (etnisitas) dalam kehidupan bermasyarakat sehingga semua modal sosial (**social capital**) yang dimiliki masyarakat NTT dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan visi dan misi NTT.
10. “Pengawasan dan pemantapan” daerah otonom agar di satu sisi otonomi daerah dapat dijalankan dengan baik tidak saja pada kegiatan pilkada tetapi juga dalam keseluruhan proses politik, di sisi lain agar tidak terjadi disintegrasi dan separatisme yang kontra produktif terhadap tujuan otonomi daerah itu sendiri.
11. Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
12. Pengembangan ekonomi dalam rangka ketahanan dengan berupaya menumbuhkembangkan jiwa wirausaha masyarakat NTT serta perlu dilakukan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

4.2.1.5 MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI WILAYAH YANG MEMILIKI KESEIMBANGAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Terwujudnya NTT yang asri dan lestari yang ditandai membaiknya pengelolaan dan penggunaan SDA dan lingkungan hidup yang

dicerminkan dari terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan lingkungan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari dan terjaminnya fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Arah pembangunan jangka panjang NTT 20 tahun ke depan di bidang lingkungan hidup adalah:

- 1. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup,** diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup; penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk di pulau-pulau kecil; Pengembangan evaluasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral; pendataan dan publikasi potensi sumber daya hutan; pendataan dan penyelesaian tata-batas hutan dan kawasan perbatasan; penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan kekeringan; pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup nasional dan daerah; Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional di tingkat daerah; Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah sebagai alat pendukung pengambilan keputusan publik; Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- 2. Pengembangan dan Perbaikan Kawasan Konservasi/Lindung.** Untuk memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dilakukan penetapan kawasan konservasi atau kawasan lindung di darat dan di laut. Sasaran pemantapan kawasan lindung adalah: meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim (hidrologis); mempertahankan keanekaragaman flora, fauna dan tipe ekosistem serta keunikan alam; menjaga kelestarian lingkungan fisik dan biologis wilayah; menjamin keseimbangan fungsi lingkungan yang menjamin optimalnya fungsi ekologi. Kawasan lindung yang perlu dimantapkan fungsinya di NTT adalah kawasan lindung yang telah ditetapkan, kawasan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni namun mempunyai keunikan dan menjadi tempat perlindungan aneka flora dan fauna dan wilayah-wilayah karena kebutuhan posisi geografisnya berpotensi sebagai kawasan lindung. Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih dan konflik penggunaan tanah antara kepentingan lindung dan budidaya berdasarkan ketentuan. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
- 3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.** Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama generasi muda sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap SDA dan lingkungan. Mendorong cara

pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan produksi dan konsumsi dan menambah nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah. Pengembangan koordinasi kelembagaan; pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Pemberdayaan kelembagaan dan nilai budaya lokal yang mendukung kelestarian lingkungan termasuk didalamnya sanksi adat dan penegakan hukum positif.

4. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Mencegah pencemaran lingkungan hidup baik di darat, air dan udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pemantauan kualitas udara khususnya di perkotaan yang didukung oleh manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan. Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang. Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat provinsi serta fasilitas pemantauan udara (*ambient*) di kota-kota. Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup dan penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan secara hukum. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi. Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal dalam menangani sampah. Meningkatkan upaya pengelolaan sampah perkotaan. Pendirian perusahaan TPA. Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 serta pendirian fasilitas pengelola limbah B3. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas. Meningkatkan harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penagakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir. Merehabilitasi wilayah pesisir dan laut seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, estuaria dan lain-lain. Menurunnya aktifitas pengrusakan sumberdaya kelautan.

5. Pemantapan Kinerja Kelembagaan dan Aparatur Birokrasi dalam Pengelolaan Lingkungan, diarahkan meningkatkan lembaga birokrasi dalam mengelola lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (*good environmental governance*) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengendalian lingkungan hidup. Meningkatkan kemampuan/profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas teknis dan manajemen di bidang lingkungan hidup. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota, pusat; lintas wilayah dan sektor dalam pengelolaan lingkungan serta pengadaan teknologi dan peralatan yang menunjang fungsi dan peran kelembagaan pengelola lingkungan.

6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kawasan Pesisir dan Laut.

Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan lain-lain. Melindungi jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah. Mengurangi pelanggaran dan kerusakan sumber daya pesisir dan laut. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum. Memadukan tata pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Penataan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung lingkungan, yaitu: penyempurnaan rencana tata ruang kawasan perikanan terpadu.

7. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan. Dalam rangka pengelolaan lingkungan yang memiliki keseimbangan tidak saja secara fisik lingkungan tetapi juga perlu adanya penataan hukum yang jelas dalam memberikan tuntunan kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lebih baik. Selain itu perlu di jabarkan secara jelas kewenangan Provinsi sebagai pengendali tata ruang.

4.2.1.6 MEWUJUDKAN POSISI DAN PERAN NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PERGAULAN ANTAR NEGARA, DAERAH DAN MASYARAKAT

Dengan menginteraksikan arah pembangunan dari berbagai bidang di atas, akan dihasilkan kinerja pembangunan yang menempatkan peran wilayah ini sebagai pemimpin, konsultan, defender, transmitter, katalisator dan dinamisator interaksi antar masyarakat, antar provinsi dan antar negara untuk memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam kerangka mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah multidimensi. Terkait dengan hal tersebut, komunikasi pembangunan, provinsi maupun dengan dunia internasional perlu diefektifkan.

Selain itu masyarakat perlu secara terus menerus di dorong melalui berbagai informasi, bimbingan dan dukungan sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing serta dapat melihat serta menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat.

4.2.1.7 MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN DAN MASYARAKAT MARITIM

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan dengan luas lautan lebih besar dari luas daratan sebagaimana tergambar pada bagian depan, maka pengembangan wilayah diarahkan pada pemanfaatan dan pengawasan wilayah laut melalui perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat berbudaya darat diarahkan kepada berbudaya maritim. Bahwa kesatuan daratan dan lautan di NTT dengan ragam potensinya merupakan penghubung yang melahirkan Provinsi kepulauan dengan karakteristik yang unik dan bersahabat dalam

hubungan antar sesama manusia dan daerah. Pemekaran wilayah “daerah otonomi baru” hendaknya memperhatikan wilayah laut, **pulau terpencil/terluar/terdepan** dan tingkat kesulitannya sangat tinggi dalam layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berlandaskan pertimbangan ini, kebijakan fiskal daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum memperhitungkan luas laut bukan saja diukur secara berurutan dengan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah “darat”, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 28.

Disamping itu pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diarahkan untuk memantapkan tata ruang, pola hidup dan habitus kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan pariwisata dan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari; dan meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda sejak dini.

4.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Untuk mencapai visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 membutuhkan waktu dan perhatian semua komponen daerah dalam merencanakan dan melaksanakan skala prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi agenda pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah guna menjawab berbagai permasalahan yang hendak diselesaikan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Atas dasar tersebut perlu ada tahapan dan skala prioritas yang direncanakan sebagai berikut :

a. RPJM Ke- 4 Tahun 2019 – 2023

Berlandaskan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi NTT 2014 – 2018 menjadi rujukan dalam pelaksanaan RPJM ke-4 secara menyeluruh dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia **NTT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.**

Masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan pemerintahan di bumi Republik Indonesia merupakan harapan bersama agar terwujudnya kemadirian, keadilan dan kemakmuran secara merata melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum secara adil dilaksanakan oleh aparatur yang profesional dan moral aparatur yang terpuji dalam memberikan layanan publik prima.

Sejalan dengan itu membutuhkan budaya dan pendidikan politik yang demokratis serta hubungan antar negara, daerah dan masyarakat di Provinsi NTT berjalan aman dan damai khususnya di daerah perbatasan Negara Timor

Leste dan Australia agar terjadi peningkatan arus barang dan jasa dari provinsi NTT ke negara Timor Leste dan daerah tetangga; pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan damai; penegakan supremasi hukum, penurunan konflik politik dan daerah dan penguatan peran masyarakat sipil dan kelembagaan politik serta pengaruh keutamaan gender pada bidang pembangunan dan peranserta kelembagaan agama dalam pembangunan.

Kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan pula dengan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing global antara lain terus meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta daya saing lulusan siap menciptakan lapangan kerja; meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi; peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak. Dengan harapan agar wilayah ini berketahanan ekonomi, sosial, politik dan keamanan didukung oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat yang didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumberdaya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; pembukaan daerah-daerah terisolasi dan terpencil; meningkatnya pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan; peningkatan jaringan infrastruktur transportasi; meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika.

Untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah keseimbangan lingkungan membutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan-lahan kritis; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; Sumberdaya air dan DAS; Akses air bersih dan tata kelola pemukiman yang baik,

Untuk mewujudkan NTT provinsi kepulauan dan masyarakat maritim perlu didukung dengan proses penyadaran masyarakat melalui Gemala; peningkatan sarana dan prasarana perikanan; peningkatan sumberdaya manusia nelayan, perlindungan dan pengawasan habitat laut; kebijakan fiskal daerah berdasarkan luas darat dan laut; regulasi perikanan dan kelautan yang berpihak pada daerah dan masyarakat; dan pemanfaatan potensi laut untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan sekolah kejuruan berdasarkan klasifikasi dan spesifik daerah kepulauan dalam menciptakan daya saing global.

Dengan harapan akan mencapai target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut :

- IPM mencapai angka 80
- Angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80.
- AKB 35/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 200/100.000 KH.
- Kemiskinan 12%
- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%.
- Pendapatan perkapita masyarakat NTT Rp. 9.500.000,-
- Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat.
- Good governance dan penegakan hukum dan HAM

- Pembangunan yang responsif gender
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

4.3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Penyusunan prioritas dan saran pembangunan pada RKPD Tahun 2019 mengacu pada arahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, arahan pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2019. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, yang mana sesuai dengan amanat Pasal 147 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu : ”untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsiperiode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi dengan pembangunan nasional”.

- Dengan demikian substansi RKPD 2019 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Arah kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (nawa cita) sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019;
 2. Visi, misi, prioritas, sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2019-2023 yang terdapat dalam RPJPD 2005-2025;
 3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional maupun provinsi;
 4. Berbagai permasalahan, kondisi faktual dan masukan dari masyarakat terkait pembangunan yang dilaksanakan.

Memperhatikan berbagai arahan kebijakan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya termasuk arah kebijakan nasional dan arahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengambil tema :

“Perluasan dan Percepatan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Tema ini sejalan dengan arahan RPJPD untuk periode keempat RPJMD 2018-2023, yaitu : Terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang berdaya saing tinggi didukung oleh SDM yang berkualitas, dan memperhatikan tema RKP 2019 : **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Sasaran dan indikator makro pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Indikator Makro Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Indikator	Realisasi 2017	Target 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,16	5,45
Inflasi (%)	3,861	4,1 – 4,5

Tingkat Kemiskinan (%)	21,38	18 - 19
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,27	2,56
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,13	64,5
Indeks Gini	0,32	0,32

Hal ini tidak terlepas dari sasaran dan indikator makro pembangunan nasional sebagaimana terdapat pada Rancangan RKP 2019 dan Indikator Makro Pembangunan Tahun 2019 untuk NTT sesuai arahan Rancangan RKP Tahun 2019 :

Tabel 4.2
Indikator Makro Pembangunan Nasional Tahun 2019

Indikator	Target 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 - 5,8
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,2
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,5
Rasio Gini (indeks)	0,38 – 0,39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,98

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2019

Tabel 4.3
Indikator Makre Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2019 sesuai arahan Rancangan RKP Tahun 2019

Indikator	Target 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,66
Tingkat Kemiskinan (%)	18,44%
Tingkat Pengangguran (%)	2,56%

Dalam upaya mewujudkan target dan indikator pembangunan tersebut, maka secara nasioanal wilayah Bali Nusa Tenggara yang memiliki potensi besar pada bidang pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan, yang diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan kawasan minapolitan serta upaya menjadi lumbung ternak nasional. Peningkatan sektor industri pengolahan diarahkan melaui peningkan industri pangan (pengolahan ikan, garam, kopi), industri pengolahan mutiara, dan industri kerajinan tenun.

Memperhatikan berbagai kebijakan dan arahan di atas, maka prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas termasuk wilayah perbatasan
3. Pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri
4. Pemantapan ketahanan pangan, sumber daya air dan energi
5. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mewujudkan target dan indikator pembangunan, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2019 yang juga diarahkan untuk mendukung 5 Program Nasional Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar(PN 1)

1. Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan
 - a. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat
 - b. Pembangunan Resort Kehutanan
 - c. Peningkatan daya dukung DAS
 - d. Bantuan pangan Non Tunai bagi masyarakat di daerah terpencil dan kawasan perbatasan antar negara
 - e. Pembagian Beras Miskin (Rastra) bagi Keluarga Miskin
 - f. Bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu/miskin
2. Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
 - a. Pendampingan Tim Pembina AMP Provinsi Bagi 22 Kab/Kota dalam Rangka Penurunan Kematian Ibu, Neonatal dan Bayi
 - b. Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan keluarga ke Kab/kota
 - c. Menggerakkan Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan program Kesehatan Masyarakat
 - d. Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi, pengolahan data dan Pelaporan hasil diseminasi PSG di Provinsi NTT
3. Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - a. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
 - b. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar
 - c. Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

B. Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman (PN2)

1. Peningkatan Jalan Wailebe - Waiwadan - Sp. Sagu
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
3. Pengadaan Cool Box 300 ltr dan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 100 ton
4. Pembangunan Jalan Bolow - Seba - Mesara
5. Tanggap Darurat Bencana Banjir
6. Pembangunan Sarana Air Bersih UPT Longge Desa Raba Kec. Macang Pacar

C. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya(PN3)

1. Tersedianya Modal Usaha bagi UMKM/Wirausaha/Koperasi
2. Pengembangan Kawasan Jeruk, Mangga, dan Pisang
3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan aneka
4. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
5. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Mesin Alat Pertanian

6. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan
7. Bantuan Paket Budidaya Rumput Laut
8. Paket Bantuan Bioflok

D. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air(PN4)

1. Pembangunan Bendungan
2. Anakan/bibit tanaman untuk konservasi sumber daya air
3. Kawasan Mandiri Pangan
4. Pembangunan PLTMH Wae Laban

E. Stabilitas Keamanan Nasional dan KesuksesanPemilu (PN5)

1. Penguatan Pokja IDI di Daerah

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Pada Bab ini akan dijabarkan arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi, yang merupakan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota masing-masing dalam menyusun RKPD tahun 2019.

Penyusunan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan dalam rangka mencapai target janji dan visi-misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025. Selain itu bab ini disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinergitas antara arah pembangunan nasional dengan arah pembangunan daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

Dalam rangka menjamin output perencanaan agar sinergis, arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT perlu dijabarkan secara garis besar untuk menjamin integrasi perencanaan daerah kedalam perencanaan Pemerintah Provinsi dan Nasional. Untuk itu, dalam RKPD 2019 ini perlu memuat arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT.

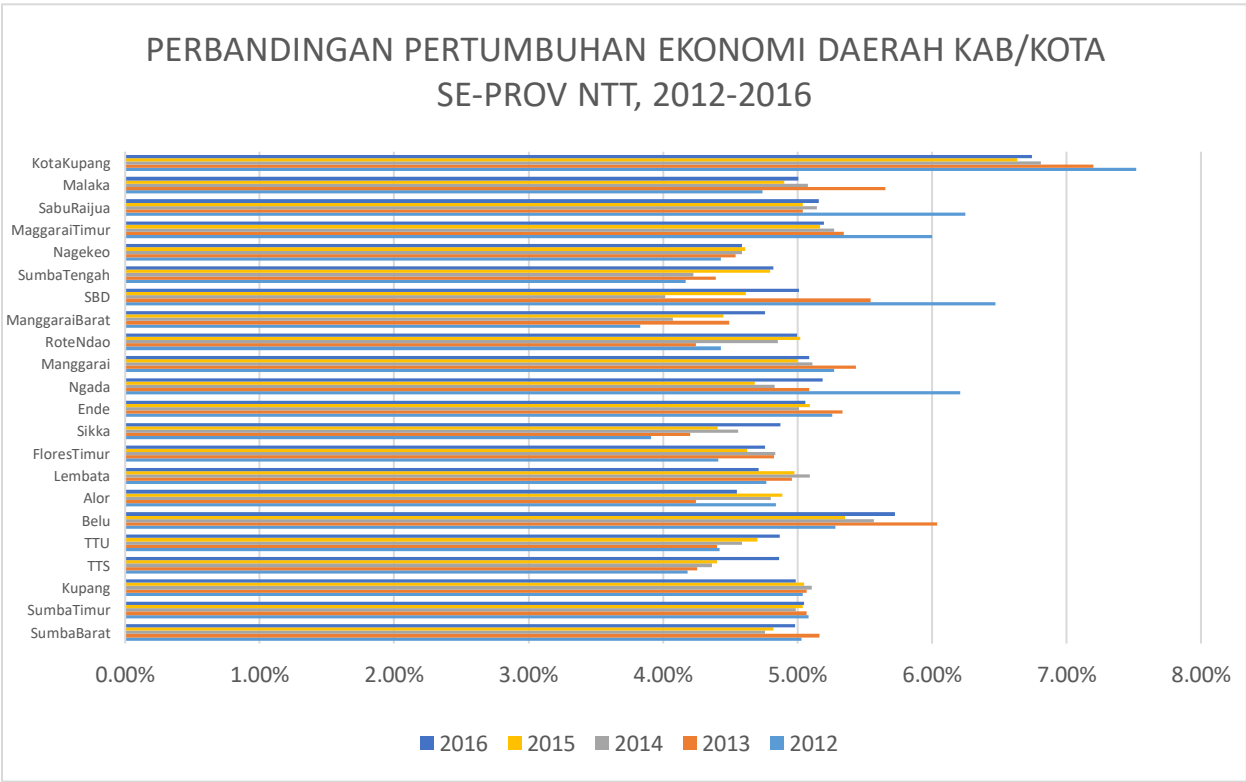
Bab ini akan dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama berisi evaluasi umum pencapaian kinerja ekonomi daerah pada 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2012-2016, bagian kedua, berisi arahan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota pada tahun 2019, dan bagian ketiga memuat mengenai arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

5.1. KINERJA EKONOMI DAERAH KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012-2016

Kinerja ekonomi daerah pada 22 Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTT, 2012-2016 menunjukkan trend positif, meskipun terlihat mengalami sedikit pelambatan pada tahun 2013 – 2016. Kota Kupang tercatat sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi sepanjang 2012-2016, dan menyumbang terhadap pertumbuhan NTT yang tinggi sepanjang periode 2013-2016.

KINERJA EKONOMI DAERAH KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012-2016

NO	Kab/Kota	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	SumbaBarat	5,03%	5,16%	4,76%	4,82%	4,98%
2	SumbaTimur	5,08%	5,07%	4,99%	5,04%	5,05%
3	Kupang	5,04%	5,07%	5,10%	5,05%	4,99%
4	TTS	4,18%	4,25%	4,36%	4,40%	4,86%
5	TTU	4,42%	4,40%	4,58%	4,70%	4,87%
6	Belu	5,28%	6,04%	5,57%	5,35%	5,73%
7	Alor	4,84%	4,24%	4,80%	4,89%	4,55%
8	Lembata	4,77%	4,96%	5,09%	4,98%	4,71%
9	FloresTimur	4,41%	4,82%	4,84%	4,62%	4,76%
10	Sikka	3,91%	4,20%	4,56%	4,40%	4,87%
11	Ende	5,26%	5,33%	5,01%	5,09%	5,06%
12	Ngada	6,21%	5,09%	4,83%	4,68%	5,19%
13	Manggarai	5,27%	5,43%	5,11%	5,00%	5,09%
14	RoteNdao	4,43%	4,25%	4,85%	5,02%	5,00%
15	ManggaraiBarat	3,83%	4,49%	4,08%	4,45%	4,76%
16	SBD	6,47%	5,34%	4,02%	4,62%	5,01%
17	SumbaTengah	4,17%	4,39%	4,22%	4,80%	4,82%
18	Nagekeo	4,43%	4,54%	4,59%	4,61%	4,59%
19	MaggaraiTimur	6,00%	5,34%	5,27%	5,17%	5,20%
20	SabuRaijua	6,25%	5,04%	5,14%	5,04%	5,16%
21	Malaka	4,74%	5,65%	5,08%	4,90%	5,01%
22	KotaKupang	7,52%	7,20%	6,81%	6,63%	6,74%
23	PROVINSI NTT		5,42%	5,26%	5,23%	5,38%



Pada tahun 2012, pertumbuhan Kota Kupang tercatat sebesar 7,52%. Sementara Kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua adalah Kabupaten Sumba Barat Daya (6,47%). Kabupaten dengan catatan pertumbuhan paling rendah pada tahun 2012 adalah Kabupaten Sikka (3,91%). Pada tahun 2013, walaupun sedikit mengalami pelambatan dibanding tahun sebelumnya, ekonomi kota Kupang tercatat sebesar 7,20%, juga adalah yang tertinggi di Provinsi NTT, dan lebih tinggi dari pertumbuhan agregat ekonomi daerah NTT secara keseluruhan (NTT 5,42%). Pada tahun yang sama, rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten lain di Provinsi NTT berkisar antara 4,52% - 6,04%.

Pada tahun fiskal 2014, ekonomi NTT secara agregat tumbuh sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tumbuh 5,26%. Kota Kupang tercatat sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi relatif dibandingkan Kabupaten lain. Ekonomi Kota Kupang tumbuh 6,81% sementara Kabupaten lain tumbuh antara 4,02% - 5,57%. Hampir di setiap Kabupaten/Kota yang ada di NTT mengalami pelambatan pada tahun fiskal 2014.

Pada tahun fiskal 2015, fenomena pelambatan pertumbuhan juga tampak. Secara agregat, ekonomi NTT tumbuh 5,23% yang walaupun masih lebih baik dari capaian pertumbuhan agregat nasional, namun mengalami sedikit pelambatan dibandingkan dengan pencapaiannya ditahun sebelumnya. Dipilah perdaerah, Kota Kupang terlihat sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi 6,63% diikuti Kabupaten. Belu dengan pertumbuhan 5,35%. Ekonomi Kabupaten lain tumbuh berkisar 4,40%-5,17%. Terlihat kecenderungan “konvergensi” pertumbuhan dimana gap antara daerah dengan pertumbuhan yang lambat dengan daerah dengan pertumbuhan yang tinggi semakin kecil.

Ekonomi NTT kembali bergairah pada tahun 2016. Pertumbuhan 2016 masih berada diatas pertumbuhan nasional, dan laju pertumbuhan ekonomi daerah NTT lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kota Kupang masih merupakan kontributor terbesar dalam ekonomi agregat NTT dengan catatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun fiskal 2016 sebesar 6,74%, diikuti oleh Kabupaten. Belu sebesar 5,73%. Rata-rata pertumbuhan Kabupaten lain di NTT berkisar antara 4,59-5,20%.

**5.2. ARAHAN TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NTT PADA TAHUN 2019**

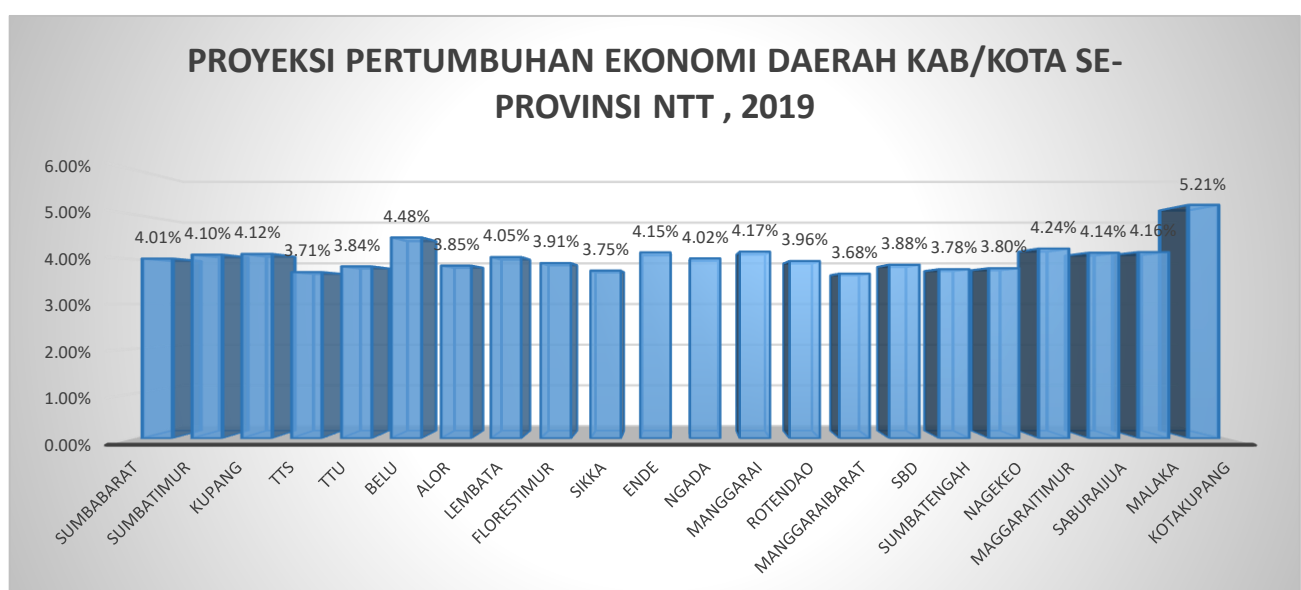
Berdasarkan catatan
kinerja ekonomi daerah

sepanjang 2012-2016, analisis statistik memprediksikan pertumbuhan yang juga melambat sepanjang 2017-2019. Ekonomi NTT diprediksikan tumbuh antara 4,28%-4,5%. Atau pertama kalinya sejak tahun 2012 berada dibawah 5%, *ceteris paribus*. Walaupun demikian, dengan berbagai proyek strategis nasional yang dibangun di Provinsi NTT, menyebabkan

pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT Tahun 2019 ditargetkan akan mencapai 5,1 – 5,45 % apalagi didukung pertumbuhan positif dan stabilnya fluktuasi ekonomi daerah, mengindikasikan ketahanan ekonomi daerah dan tetap produktifnya sektor-sektor unggulan daerah dalam masa-masa recovery pasca resesi ekonomi global dan regional Asia Tenggara.

**PREDIKSI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NTT 2017-2019**

No	Kab/Kota	2017	2018	2019
1	SumbaBarat	4,13%	4,18%	4,01%
2	SumbaTimur	4,23%	4,27%	4,10%
3	Kupang	4,29%	4,29%	4,12%
4	TTS	3,62%	3,85%	3,71%
5	TTU	3,82%	3,99%	3,84%
6	Belu	4,66%	4,69%	4,48%
7	Alor	3,97%	4,01%	3,85%
8	Lembata	4,30%	4,22%	4,05%
9	FloresTimur	4,06%	4,07%	3,91%
10	Sikka	3,68%	3,89%	3,75%
11	Ende	4,33%	4,33%	4,15%
12	Ngada	4,06%	4,19%	4,02%
13	Manggarai	4,37%	4,35%	4,17%
14	RoteNdao	3,92%	4,12%	3,96%
15	ManggaraiBarat	3,61%	3,82%	3,68%
16	SBD	3,90%	4,03%	3,88%
17	SumbaTengah	3,70%	3,92%	3,78%
18	Nagekeo	3,91%	3,95%	3,80%
19	MaggaraTimur	4,42%	4,42%	4,24%
20	SabuRaijua	4,25%	4,32%	4,14%
21	Malaka	4,42%	4,34%	4,16%
22	KotaKupang	5,50%	5,49%	5,21%



Di pilah per Kabupaten/Kota, Proyeksi ekonomi daerah melihat trend sepanjang 2012-2016 masih akan terjadi. Kota Kupang dan Kabupaten Belu

diprediksikan masih akan menjadi kotributor terbesar terhadap pertumbuhan agregat NTT pada tahun 2019. Ekonomi Kota Kupang diprediksikan tumbuh positif 5,21% sementara Kabupaten Belu tumbuh 4,48%. Pelambatan pertumbuhan akan terjadi pada hampir semua Kabupaten di NTT dengan kisaran laju pertumbuhan Ekonomi 3,68%-4,24%. Beberapa daerah yang sepanjang 2012-2016 tumbuh lebih lambat relatif terhadap Kabupaten/Kota lain di NTT juga diprediksikan masih akan mengalami trend serupa di tahun rencana. diperlukan rencana aksi yang lebih baik dalam rangka menggunakan instrument fiskal daerah (APBD) untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah lebih baik dari prediksi statistik di atas.

5.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA

Untuk menjamin sinergitas antara perencanaan Kabupaten/Kota dengan Perencanaan Provinsi, maka perlu penjabaran arah kebijakan Kabupaten pada tahun rencana 2019. Dasar penentuan arahan kebijakan dimaksud adalah arahan umum kebijakan RPJPD Provinsi NTT 2019–2023, dan penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Tabel berikut menjabarkan arahan kebijakan Kabupaten/Kota pada tahun rencana 2019.

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
Berlandaskan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi NTT 2014 – 2018 menjadi rujukan dalam pelaksanaan RPJM ke-4 secara menyeluruh dalam aspek kehidupan dan penghidupanmanusiaN TT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM	Pusat Kegiatan Nasional Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan	Kota Kupang	Menjadikan Kota Kupang sebagai Pusat Aktivitas Perdagangan dan Jasa di Provinsi NTT

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
berkualitas target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu 2019-2013 sebagai berikut : • IPM mencapai angka 80 • Angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80. • AKB 35/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 200/100.000 KH. • Kemiskinan 12% • Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%. • Pendapatan perkapita masyarakat NTT Rp. 9.500.000,- • Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat. • Good governance dan penegakan hukum dan HAM • Pembangunan yang responsif gender • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.	pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi		
	Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Kupang dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut dan pertambangan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Kepelabuhanan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan	Kabupaten. Kupang	Memperkuat Kapasitas Kabupaten Kupang untuk menjadi penyokong aktivitas pada Pusat Perdagangan dan Jasa dengan komoditi unggulan pertanian dan perkebunan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Ekonomi Perwujudan Pengembangan sentra kawasan SDA dan/ Teknologi Tinggi		
	Pusat Kegiatan Wilayah Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut	Kabupaten. TTS	Mendorong meningkatnya produktivitas ekonomi daerah menjadikan Kabupaten. TTS sebagai pusat pertumbuhan baru di Selatan dengan komoditi unggulan peternakan dan perkebunan
	Pusat Kegiatan Wilayah Pusat Kegiatan Strategis Nasional Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional)	Kabupaten. TTU	Memperkuat peranan Kabupaten. TTU sebagai Pusat perdagangan dan Jasa baru di wilayahPerbatasan dengan sektor unggulan pariwisata dan perdagangan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Prerwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Prerwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Prerwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Prerwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut		
	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Pusat Kegiatan Strategis Nasional Prerwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Prerwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Prerwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Prerwujudan pengembangan pariwisata alam darat	Kabupaten. BELU	Memperkuat peranan Kabupaten Belu sebagai sentra perdagangan dan jasa pada wilayah perbatasan.

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	maupun laut		
	Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut	Kabupaten. Malaka	Memperkuat peranan Kabupaten. Malaka sebagai pusat pertumbuhan baru dengan mendorong sektor kelautan perikanan dan pariwisata
	Pusat Kegiatan Lokal Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut	Kabupaten. Rote Ndao	Mendorong penguatan peran Kabupaten. Rote Ndao untuk mendorong produktivitas masyarakat
	Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Andalan Laut Sawu dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata, perikanan dan pertambangan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung	Kabupaten. Sabu Raijua	Memperkuat peranan Kabupaten. Sabu Raijua sebagai Kabupaten. Penghasil produk kelautan dan perikanan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut		
	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten. Flores Timur	Memperkuat peran Kabupaten. Flores Timur dalam mendorong peningkatan produktivitas sektor pariwisata dan kelautan dan perikanan
	Pusat Kegiatan Nasional promosi Kawasan Maumere – Ende, yang memiliki sektor unggulan	Kabupaten. Sikka	Mendorong Kabupaten. Sikka untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Daratan Flores dengan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	pertanian, kehutanan, industri, pariwisata, perikanan dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut		memanfaatkan potensi pariwisata dan kelautan dan perikanan.
	Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Maumere – Ende, yang memiliki sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, pariwisata, perikanan dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki	Kabupaten. Ende	Memperkuat peran Kabupaten. Ende Sebagai pusat perdagangan flores dengan memanfaatkan komoditi pertanian, kehutanan, dan kelautan /Perikanan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan sentra kawasan SDA dan/ Teknologi Tinggi		
	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung	Kabupaten. Nagekeo	Perkuat peran Kabupaten. Nagekeo sebagai Pusat pengembangan Pariwisata di daratan Flores

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi		
	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Kawasan Ruteng – Bajawa, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pertambangan, pariwisata, perikanan dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Perwujudan Pengembangan Desa Tertinggal Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat	Kabupaten. Ngada	Memperkuat peranan Kabupaten. Ngada dalam ekonomi regional Flores dengan komoditi unggulan pertanian, pertambangan, pariwisata, perikanan dan perkebunan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	maupun laut		
	Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Pengembangan Desa Tertinggal Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut	Kabupaten. Manggarai Timur	Mendorong penguatan peranan Kabupaten. Manggarai Timur sebagai daerah pengembangan komoditi perkebunan
	Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Ruteng – Bajawa, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pertambangan, pariwisata, perikanan dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan,	Kabupaten. Manggarai	Memperkuat peranan Kabupaten. Manggarai sebagai sentra produksi Pangan NTT, dan pusat pertumbuhan baru dengan komoditi andalan pertanian dan kehutanan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Perwujudan Pengembangan Desa Tertinggal Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi		
	Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Komodo dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan	Kabupaten. Manggarai Barat	Perkuatan Peran Kabupaten. Manggarai Barat sebagai pusat pengembangan Pariwisata NTT

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi		
	Pusat Kegiatan Nasional promosi Kawasan Sumba, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan	Kabupaten. Sumba Timur	Penguatan Peranan Kabupaten. Sumba Timur sebagai sentra pengembangan Pertanian, pariwisata dan perkebunan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan sentra kawasan SDA dan/ Teknologi Tinggi		
	Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Sumba, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer,	Kabupaten. Sumba Tengah	Mendorong Kabupaten. Sumba tengah sebagai pusat pertumbuhan baru dengan sektor Pertanian, Pariwisata dan Perkebunan sebagai unggulan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut		
	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Kawasan Sumba, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut	Kabupaten. Sumba Barat Daya	Perkuatan Kabupaten. SBD di daratan Sumba sebagai pusat pengembangan pertanian, pariwisata dan Kelautan/ Perikanan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi		
	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Kawasan Sumba, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan	Kabupaten. Sumba Barat	Mendorong penguatan Kabupaten. Sumba Barat sebagai sentra Pengembangan Pariwisata daerah

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATEN ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Strategis Pertumbuhan Ekonomi		
	Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Pengembangan Desa Tertinggal Perwujudan Pengembangan Jaringan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten. Lembata	Penguatan Kabupaten. Lembata sebagai sentra Pertumbuhan baru dengan komoditi andalan kelautan/ perikanan dan pariwisata
	Pusat Kegiatan Lokal Pusat Kegiatan Strategis Nasional Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan	Kabupaten. Alor	

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut		

Arahan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT ini hendaknya menjadi salah satu rujukan dalam perencanaan pembangunan 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT di tahun rencana, agar dapat memperkuat upaya-upaya pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 merupakan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019. Program dan kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan saran pembangunan, prioritas dan target sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dan sinergi baik dalam hal perencanaan, kebijakan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, maupun Lembaga donor/mitra.

Mengingat RPJMD 2013-2018 telah selesai dilaksanakan, dan RPJMD periode 2018-2023 belum ditetapkan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program dan kegiatan sesuai RKPD sebelumnya, namun apabila ada program/kegiatan baru yang perlu dilaksanakan, nomenklatur programnya mengacu pada RPJMN 2015 - 2019. Khusus pada RKPD 2019 ini, sudah berbasis e-planning, dan kebijakannya kegiatan yang dilaksanakan tidak mengenal sub kegiatan. Satu kegiatan mempunyai satu output, dengan demikian, untuk tahun 2019 jumlah program tetap dibatasi, tetapi jumlah kegiatan tidak dibatasi.

Kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta kewenangan masing-masing Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sama dengan tahun 2018. Apabila ada yang perlu diubah, maka dapat diajukan usulannya ke Bappeda saat pembahasan Renja Perangkat Daerah sehingga dapat disempurnakan dalam rancangan RKPD 2019. Rancangan program, kegiatan dan anggaran dalam RKPD 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 selain merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD 2018-2023, juga sekaligus merupakan pelaksanaan tahun pertama periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025. Pada periode terakhir RPJPD Provinsi NTT 2005-2025 tersebut, tema besar Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah : **NTT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.** Untuk mencapai ideal ini diperlukan kerja-kerja pembangunan yang berkualitas untuk semakin menambah daya dorong pencapaian ideal tersebut.

7.1. INDIKATOR KINERJA DAERAH DALAM RPJPD 2005-2025

Dalam rangka mencapai Ideal pembangunan NTT 2018-2023, Dalam periode RPJPD 2018-2023, ditetapkan target-target pembangunan sebagai berikut :

- **IPM mencapai angka 80**

Target IPM sebesar 80 pada akhir periode ke empat ini merupakan kelanjutan dari target IPM sebesar 73,3% pada akhir periode ketiga RPJPD Provinsi NTT. Masih dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dan kerja-kerja yang lebih keras dari segenap komponen pembangunan daerah di daerah ini untuk dapat merealisasikan target tersebut, karena pada tahun 2017 IPM Provinsi NTT baru mencapai 63,73;

- **Angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80**

Pada tahun 2016, APK SD/MI telah mencapai 114,12, atau melewati target RPJPD pada periode 2018-2023, APK SMP/MTs juga telah mencapai 89,5%, dan APK SMA/MA mencapai 79,4%. Hampir semua target yang dicanangkan RPJPD pada periode ini telah terlampaui, kecuali untuk tingkat Pendidikan SMA/MA yang pada tahun 2016 masih sedikit berada dibawah target. Meskipun demikian, pencapaian positif ini perlu dijaga agar tidak mengalami penurunan;

- **AKB 35/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 200/100.000 KH**
- **Kemiskinan 12%**
Pemerintah Provinsi NTT menargetkan penurunan Kemiskinan menjadi 12% pada akhir periode RPJPD 2018-2023, menurun dari target 15% pada akhir periode ketiga. Masih diperlukan upaya yang lebih keras dari segenap komponen pembangunan di NTT karena sampai dengan tahun 2016, prosentase penduduk miskin di Provinsi NTT masih mencapai 22,19%.
- **Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%.**
Dalam RPJPD Provinsi NTT 2005-2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% pada akhir periode keempat. Kinerja ekonomi daerah Provinsi NTT menunjukkan bahwa target ini adalah sesuatu yang realistis. Pada tahun 2016 ekonomi NTT tumbuh 5,2% dan tahun 2017 tumbuh 5,04%. Pertumbuhan yang stabil diikuti dengan bertumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang menjadi pilar ekonomi daerah akan dapat membantu mendorong kesejahteraan masyarakat
- **Pendapatan perkapita masyarakat NTT Rp. 9.500.000,-**
Pada tahun 2015 pendapatan perkapita masyarakat NTT telah mencapai lebih dari Rp. 11 juta pertahun. Meskipun telah melewati target RPJPD 2005-2025, upaya pemerataan perlu terus dilakukan agar Pendapatan Perkapita di daerah ini dapat setara dengan pendapatan perkapita nasional yang mencapai lebih dari Rp. 40 Juta.
- **Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat.**
Tingginya akses dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan menyangkut hajat hidupnya adalah salah satu indikasi kemajuan demokrasi. Oleh sebab inilah pemerintah mendorong meningkatnya partisipasi politik masyarakat.
- **Good governance dan penegakan hukum dan HAM**
Pelaksanaan pemerintahan yang baik adalah salah satu prasyarat penting pembangunan, karena pelaksanaan pemerintahan yang baik akan menjamin keluaran pembangunan yang efektif bagi masyarakat. Penegakan hukum dan HAM juga adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan Daerah ini karena kepastian hukum dan perlindungan HAM akan menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pembangunan manusia yang ada di daerah ini.
- **Pembangunan yang responsif gender**
Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dipandang sebagai tujuan dan cara mencapai keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya pemerintah daerah mendorong upaya pembangunan yang

inklusif dan responsif gender, dan menjadikannya sebagai salah satu target utama pembangunan manusia di Provinsi NTT.

- **Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.**

Upaya pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan kelestarian lingkungan. Pembangunan yang berwawasan kelestarian lingkungan akan menjamin pembangunan yang dilaksanakan akan bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

7.2. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Dalam rangka mencapai ideal pembangunan daerah pada tahun 2019, diperlukan ukuran-ukuran untuk menilai kinerja pencapaian keberhasilan pembangunan dalam bentuk indikator kinerja. Berikut ini adalah indikator kinerja pemerintah daerah pada tahun rencana 2019.

Tabel 7.1

Indikator Makro Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Indikator	Target 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,45
Inflasi (%)	4,1 – 4,5
Tingkat Kemiskinan (%)	18 - 19
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,56
Indeks Gini	0,32
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,5

Tabel 7.2

Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur

No				Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1				2	3	4	5	6	7
Misi.....									
1	1	1	Terpenuhinya kebutuhan administrasi, dan prasarana, pemeliharaan, dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran dan perjalanan dinas luar daerah	Urusan Pada Setiap PD (Rutin)	Seluruh PD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran dan perialanan dinas luar daerah	
				Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kantor	Urusan Pada Setiap PD (Rutin)	Seluruh PD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kantor	
				Persentase keikutsertaan pegawai dalam diklat/bimtek peraturan perundang-undangan	Urusan Pada Setiap PD (Rutin)	Seluruh PD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase keikutsertaan pegawai dalam diklat/bimtek peraturan perundang-undangan	
				Persentase tingkat Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Pegawai	Urusan Pada Setiap PD (Rutin)	Seluruh PD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase tingkat Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Pegawai	
1	2	1	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil daerah di PD	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,	Badan Kepegawaian	Database kepegawaian	(Jumlah seluruh PNS yang ada + Jumlah PNS yang lulus) x 100% Jumlah seluruh PNS	

No			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1			2	3	4	5	6	7
					Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Daerah		yang ideal seharusnya
				Persentase PNS yang belatar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah	Database kepegawaian	Jumlah PNS yang belatar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi x 100% Jumlah seluruh PNS yang ada
				Persentase PNS yang berpendidikan diploma	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah	Database kepegawaian	Jumlah PNS yang berpendidikan diploma (D1, D2, D3, D4)x100% Jumlah seluruh PNS yang ada
				Persentase PNS yang berpendidikan S1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah	Database kepegawaian	Jumlah PNS yang berpendidikan S1 x100% Jumlah seluruh PNS yang ada
				Cakupan penerbitan akta kematian (SPM)	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Database Kependudukan	Jumlah penduduk meninggal yang berakta kematian Jumlah penduduk yang meninggal
				Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat Daerah - Bagian Ekbang	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
				Tersedianya Informasi Pelaksanaan Pembangunan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat Daerah - Bagian Ekbang	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tersedianya Informasi Pelaksanaan Pembangunan
				Terciptanya Sistem Administrasi Manajemen Pembangunan dan Ekonomi Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat Daerah - Bagian Ekbang	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Terciptanya Sistem Administrasi Manajemen Pembangunan dan Ekonomi Daerah

No			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1			2	3	4	5	6	7
				Ketersediaan sistem informasi kepegawaian	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah PNS yang datanya telah diupdate di dalam sistem x 100% Jumlah seluruh PNS yang ada
1	3	1	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis	Persentase keberhasilan kegiatan kemasyarakatan (Bujang Dayang, MTQ, Lomba Desa, Festival Seni, Paskibra dan lain-lain yang melibatkan partisipasi masyarakat)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Kantor Camat Manggar/Kantung /Kelapa KampungDendang/Simpang Pesak/Damar/Simpang Renggiang	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase keberhasilan kegiatan kemasyarakatan (Bujang Dayang, MTQ, Lomba Desa, Festival Seni, Paskibra dan lain-lain yang melibatkan partisipasi masyarakat)
				Prosentase Jumlah aspirasi Masyarakat yang terserap	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat DPRD	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah Perda yang ditetapkan x 100% aspirasi masyarakat
				Persentase Jumlah Ranperda Prakarsa DPRD yang dibahas dan ditetapkan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat DPRD	Jumlah Ranperda Inisiatif	Jumlah perda yang ditetapkan x 100% Jumlah Ranperda Inisiatif
				Persentase rekomendasi DPRD setiap masa sidang kepada pemerintah daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat DPRD	Rekomendasi hasil sidang	Jumlah rekomendasi DPRD kepada Pemerintah daerah pada setiap masa sidang
				Persentase jumlah rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat DPRD	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan
				Persentase Jumlah penyampian aspirasi (Demo, Unjukrasa) masyarakat setiap masa sidang	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat DPRD	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah Penyampian aspirasi (Demo, Unjukrasa), yang direpson dan dimasukkan dalam agenda Pembahasan rapat di DPRD

No			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1			2	3	4	5	6	7
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (IKK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	Jumlah rumah sakit x 1000 Jumlah penduduk
				Cakupan pembantu puskesmas (IKK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	Jumlah pembantu puskesmas x 100% Jumlah seluruh desa
				Cakupan puskesmas (IKK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	Jumlah puskesmas x 100% Jumlah seluruh kecamatan
				Rasio dokter per satuan penduduk (IKK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	Jumlah dokter x 1000 Jumlah penduduk
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk (IKK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	Jumlah tenaga medis x 1000 Jumlah penduduk
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (SPM)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Masyarakat miskin yang terlayani kesehatan dasarnya x 100% Jumlah seluruh masyarakat miskin
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (SPM) (IKK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan, Profil Kesehatan	Jumlah kuniungan pasien miskin di sarana Starta 1 x 100% Jumlah seluruh masyarakat miskin
				Presentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
				Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (MDGs)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian MDGs	penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum
				Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM) (IKK) (MDGs)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan, Profil Kesehatan, Laporan Pencapaian MDGs	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100% Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
				Cakupan Desa Siaga Aktif (SPM)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk
				Proporsi penduduk usia 15 - 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (MDGs)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian MDGs	penduduk usia 15 - 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
				Jumlah SR rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (MDGs)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian MDGs	Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
				Jumlah kegiatan olahraga (IKK)	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah kegiatan olahraga

No			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1			2	3	4	5	6	7
				Jumlah organisasi Kepemudaan (IKK)	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah organisasi Kepemudaan per 1000 penduduk
				Jumlah Klub olahraga (IKK)	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah klub olahraga per 10000 penduduk
				Jumlah lapangan olahraga (IKK)	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah lapangan olahraga di Kabupaten x 1.000 Jumlah penduduk
				Jumlah Gedung Olahraga (IKK)	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
MI SI								
2	1	5	Meningkatnya kesejahteraan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian SPM	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian SPM
				Perkada Tentang SPM	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal
				Laporan Terselenggaranya Program PROVINSI NUSA TENGGARA Timur Sehat	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Laporan PROVINSI NUSA TENGGARA Timur Sehat
				Posyantek Aktif	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Posyantek Aktif selama kurun waktu 1 tahun di PROVINSI NUSA TENGGARA Timur
				Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (IKK)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah kelompok binaan LPM Jumlah LPM
				LPM Berprestasi (IKK)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah LPM berprestasi x 100% Jumlah LPM
				Posyandu Aktif (IKK)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Posyandu Aktif x 100% Total Posyandu
				Terlenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten / kota (SPM)	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Laporan Capaian SPM Bidang Penanaman Modal	Ada/tidak
				Terlengkap dan terintegrasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (SPM)	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Laporan Capaian SPM Bidang Penanaman Modal	kelembagaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang didukung SPIPISE

No			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1			2	3	4	5	6	7
				Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal berupa Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (SPM)	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Laporan Capaian SPM Bidang Penanaman Modal	Ada/tidak
				Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (IKK)	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (IKK)	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN /PMA)
				Rasio daya serap tenaga kerja (IKK)	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah Seluruh PMA/PMDN
				Persentase Luas Pemukiman yang tertata (IKK)	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Luas area pemukiman tertata x 100% Luas area pemukiman keseluruhan
Misi								
3	1	6	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam	jumlah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan Sendiri (IUKS)	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	jumlah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan Sendiri (IUKS)
				rasio elektrifikasi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	rasio elektrifikasi
				rasio desa berlistrik	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	rasio desa berlistrik
				jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLTS	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLTS
				jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLT Biomass	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLTU Biomass
				jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLT Biogas	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLT Biogas
				jumlah kontribusi PDRB sektor pertambangan (IKK)	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan x 100% Jumlah PDRB
				perusahaan yang tertib pelaporan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	perusahaan yang tertib pelaporan
				persentase luas IU P yang diawasi (IUP	Energi dan Sumber	Dinas	Laporan Hasil Pelaksanaan	persentase luas IUP yang diawasi (IUP Operasi

No			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1			2	3	4	5	6	7
				Operasi Produksi)	Daya Mineral	Pertambangan dan Energi	Kegiatan	Produksi)
				persentase luas IU P yang diawasi (IUP Eksplorasi)	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	persentase luas IUP yang diawasi (IUP Eksplorasi)
				persentase luas IPR yang diawasi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	persentase luas IPR yang diawasi
				Persentase Penanganan Sampah di Wilayah Perkotaan (IKK)	Lingkungan Hidup	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Volume sampah yang ditangani x 100% Volume produksi sampah
				Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (IKK)	Lingkungan Hidup	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah daya tampung TPS (m3) x 100% Jumlah penduduk
				Rencana Detil Tata Ruang yang disahkan dengan Peraturan Daerah	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Ada/Tidak
				Dokumen kajian lingkungan hidup strategis	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Ada/Tidak
				Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (SPM)	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang	Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
				Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang (SPM)	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang
				Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya (SPM)	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
				Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja (SPM)	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja
				Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (IKK)	Penataan Ruang	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah bangunan ber-IMB Jumlah bangunan

No			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1			2	3	4	5	6	7
				Ruang publik yang berubah peruntukannya (IKK)	Penataan Ruang	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha) x 100% Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)
				Jumlah penetapan kebijakan mengenai RDTRK, RTRK, dan RTBL (IKK)	Penataan Ruang	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah penetapan kebijakan mengenai RDTRK, RTRK, dan RTBL x 100% Jumlah RDTRK, RTRK, dan RTBL yang harusnya ditetapkan
				Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (IKK)	Penataan Ruang	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Luas ruang terbuka hijau x 100% Luas wilayah ber HPL/HGB

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
		Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA /SMK/MA	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA /SMK/M	83,20	84,14%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	74,59	75,20%	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	93%	95%	
			Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,27%	0,18%	
			Persentase Sekolah SMA/SMK/MA kondisi baik	Dinas Pendidikan	Persentase Sekolah SMA/SMK/MA kondisi baik			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	18,98%	24%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SLB	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SLB			
			Rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/SMK	Dinas Pendidikan	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/SMK	50,71	51,45	
			Persentase Ruang Kelas SMA/SMK/MA kondisi layak/baik	Dinas Pendidikan	Persentase Ruang Kelas SMA/SMK/MA kondisi layak/baik	91,68%	92,75%	
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA			

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
			Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan	Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA	1 : 14	1:28	
			Rasio sekolah terhadap murid SMA/SMK/MA/	Dinas Pendidikan	Rasio sekolah terhadap murid SMA/SMK/MA/	1 : 330	1 : 330	
			Persentase guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi pendidik	Dinas Pendidikan	Persentase guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi pendidik	30,24%	40%	
			Persentase guru SLB yang bersertifikasi pendidik	Dinas Pendidikan	Persentase guru SLB yang bersertifikasi pendidik	18,17%	30%	
			Jumlah Ruang kelas baru SMA/SMK yang dibangun	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang kelas baru SMA/SMK yang dibangun	115	200	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam	Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan Sendiri (IUKS)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan Sendiri (IUKS)	32	90	
	Energi dan Sumber Daya Mineral		rasio elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	rasio elektrifikasi	60,74%	65%	
	Energi dan Sumber Daya Mineral		rasio dusun berlistrik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	rasio dusun berlistrik	40%	60%	
	Energi dan Sumber Daya Mineral		jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLTS	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLTS	1,28 MW	1,38 MW	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
	Energi dan Sumber Daya Mineral		jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLT Biomass	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLT Biomass	1 MW	1 MW	
	Energi dan Sumberdaya mineral		Rasio ketersediaan daya listrik	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Rasio ketersediaan daya listrik	65%	75%	
	Energi dan Sumberdaya masyarakat	Optimalnya sumbangan sektor energi dan sumberdaya mineral terhadap kesejahteraan masyarakat	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,47%	1,50%	
	Perumahan dan Permukiman : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni dan penurunan kawasan permukiman kumuh	Persentase Rumah tangga yang a mendapatkan pelayanan air minum layak (%)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum layak (%)	65,2 %		
	Perumahan dan Permukiman		Persentase rumah b tangga dengan sanitasi layak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	45,31 %		
	Perumahan dan Permukiman		c Rasio Rumah Tangga Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase permukiman yang tertata	29,19%		
	Perumahan dan Permukiman		d Luas Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Berkurangnya luas kawasan kumuh	626,83 ha		

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
	Perumahan dan Permukiman		Persentase pemukiman yang tertata	Dinas Perumahan	Persentase pemukiman yang tertata			
	Kehutanan	Meningkatnya kualitas dan daya dukung ekologi terhadap upaya pembangunan manusia	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Dinas Kehutanan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	2.631.279,63 Ha	7.000 Ha (0.266%) * Target 5 tahun (2018 - 2023)	
	Kehutanan		Kerusakan Kawasan Hutan	Dinas Kehutanan	Kerusakan Kawasan Hutan	14.000 Ha	(2.000 Ha) 0,98% * Target 5 tahun (2018 - 2023)	
	Kehutanan	Meningkatnya sumbangsih sektor kehutanan dalam perekonomian daerah	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	Dinas Kehutanan	Peningkatan Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	91.159.740.000.000. (Total PDRB NTT 2017 termasuk Kehutanan)	10.200.000.000 * Target 5 tahun (2018 - 2023)	
	Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya kualitas Penelitian di bidang pemerintahan di daerah Provinsi dan Kab/Kota berdasarkan peraturan perundang – undangan serta koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinronisasi dengan Pemerintah Pusat/Prov/Kab/ Kota	a Kelitbangan Dokumen Bidang Pemerintahan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya dokumen kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016	6 Dokumen	12 Dokumen	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
			b Dokumen kelitbangan Bidang Ekonomi Pembangunan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya dokumen kelitbangan Bidang Ekonomi Pembangunan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016	12 Dokumen	12 Dokumen	
			c Dokumen kelitbangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya dokumen kelitbangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016	12 Dokumen	12 Dokumen	
			d Dokumen kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya dokumen kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016	6 Dokumen	6 Dokumen	
			e Data base kelitbangan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya data base tahun berjalan			

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
			f Jumlah jurnal dan website Litbang	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya jurnal dan website kelitbangan tahun berjalan	Jurnal 2, Web 1		
			g Hasil kelitbangan yang dipublikasikan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya hasil kelitbangan yang dipublikasi melalui jurnal tiap tahun berjalan	4 Jurnal		
			h Forum Koodinasi dan Kajian Strategi Daerah Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terselenggaranya forum koordinasi dan dokumen jakstrada (Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah IPTEK , Agenda Riset Daerah)	Forum : 5 Jakstrada : 1		
	Kesehatan	Menurunnya kasus kematian ibu, bayi dan balita	Kasus kematian ibu	Dinas Kesehatan	Kasus kematian ibu			
	Kesehatan		Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI).			
	Kesehatan		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.			

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
	Kesehatan		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.			
	Kesehatan		Kasus kematian bayi	Dinas Kesehatan	Kasus kematian bayi			
	Kesehatan		Kasus kematian balita	Dinas Kesehatan	Kasus kematian balita			
	Kesehatan		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.			
	Kesehatan		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.			
	Kesehatan		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.			
	Kesehatan		Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.			
	Kesehatan		Persentase desa yang mencapai UCI	Dinas Kesehatan	Persentase desa yang mencapai UCI			

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
	Kesehatan		Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis (Case Notification Rate)	Dinas Kesehatan	Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis (Case Notification Rate)			
	Kesehatan		Prevalensi HIV pada populasi penduduk dewasa usia (15-49 tahun)	Dinas Kesehatan	Prevalensi HIV pada populasi penduduk dewasa usia (15-49 tahun)			
	Kesehatan		Angka kesakitan diare	Dinas Kesehatan	Angka kesakitan diare			
	Kesehatan		Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (MDGs)	Dinas Kesehatan	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (MDGs)			
	Kesehatan		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM) (IKK) (MDGs)	Dinas Kesehatan	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM) (IKK) (MDGs)			
	Kesehatan		Cakupan Desa Siaga Aktif (SPM)	Dinas Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif (SPM)			
	Kesehatan		Proporsi penduduk usia 15 - 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (MDGs)	Dinas Kesehatan	Proporsi penduduk usia 15 - 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (MDGs)			

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
	Kesehatan		Jumlah SR rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (MDGs)	Dinas Kesehatan	Jumlah SR rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (MDGs)			
	Lingkungan Hidup		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	-		
	Lingkungan Hidup	Sungai lintas Kab/Kota	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Sungai lintas Kab/Kota	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Sungai Aesesa, Noelmina, Benanain, Kab. Ngada-Nagekeo, TTS, TTU dan Malaka) Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Flores Timur, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya (10 Kab/Kota)	Sungai Aesesa, Noelmina, Benanain Kab. Ngada-Nagekeo, TTS, TTU dan Malaka)	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
	Lingkungan Hidup	Pemantauan di laksanakan di 4 titik mewakili: Perkantoran Pemukiman Transportasi Industri	Peningkatan Indeks Kualitas Udara		Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU,Belu, Flores Timur, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya (10 Kab/Kota)	22 Kabupaten/K ota	
	Lingkungan Hidup	Meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provnsi NTT	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Tahun 2018 sebesar 61,87%	Meningkat menjadi 65,00%	pada Tahun 2017 kegiatan ini belum dilaksanakan namun Baseline yang disajikan adalah indeks kaulitas Tutupan Lahan untuk Tahun 2018
	Lingkungan Hidup	Meningkatnya sanitasi dan kualitas lingkungan hidup pemukiman	Persentase Penanganan Sampah di Wilayah Perkotaan (IKK)	Dinas Lingkungan hidup	Persentase Penanganan Sampah di Wilayah Perkotaan (IKK)	-	22 Kab/Kota	
	Lingkungan Hidup	meningkatnya kualitas sanitasi kawasan pemukiman	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (IKK)	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (IKK)	-		
			Tersedianya fasilitas Pengurangan sampah di perkotaan	Dinas Lingkungan hidup	Tersedianya fasilitas Pengurangan sampah di perkotaan	-	22 Kab/Kota	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
	Penataan Ruang		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (IKK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (IKK)			SAMA
	Lingkungan Hidup		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Lingkungan hidup	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB			SAMA
	Lingkungan Hidup		Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar			

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
	Lingkungan Hidup	Optimalnya administrasi pengelolaan lingkungan daerah yang berkualitas dan taat hukum	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH Provinsi	-	Penyusunan RPPLH Provinsi ditargetkan dilaksanakan setelah penyusunan instrumen lingkungan lainnya sebagai dasar dalam penyusunan RPPLH seperti Daya Dukung dan Daya Tampung LH (D3TLH), Inventarisasi SDA danIndks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	1. RPPLH Provinsi NTT belum tersusun 2. Penyusunan RPPLH Provinsi direncanakan disulkan pada tahun Anggaran 2020
	Lingkungan Hidup	Semua Dokumen Perencanaan maupun pemanfaatan SDA	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Provinsi	-	Terintegrasinya RPPLH dalam semua rencana pembvangan an provinsi dan pmanfaatan SDA	1. RPPLH Provinsi NTT belum tersusun 2. Penyusunan RPPLH Provinsi direncanakan disulkan pada tahun Anggaran 2020

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
	Lingkungan Hidup	Terintegrasinya KLHS untuk KRP Tingkat Provinsi	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Dinas Lingkungan Hidup	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	Penyusunan KLHS untuk semua KRP yang menjadi kewenangan prvinsi	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT belum diberikan dukngan pnganggaran dalam penyusunan KLHS Provinsi yang menjadi kewenangan dan tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup
	Lingkungan Hidup	15 MHA Lintas Kab	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Dinas Lingkungan Hidup	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	6 MHA lintas Kab	(6 MHA/ 15 MHA) *100%
	Lingkungan Hidup	15 MHA Lintas Kab	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Dinas Lingkungan Hidup	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	-	6 MHA lintas Kab	(6 MHA/ 15 MHA) *100%
	Lingkungan Hidup	15 MHA Lintas Kab	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Dinas Lingkungan Hidup	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	6 MHA lintas Kab	(6 MHA/ 15 MHA) *100%
	Lingkungan Hidup	15 MHA Lintas Kab	Penetapan hak MHA	Dinas Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA	-	-	Penetapan dilaksanakan pada th. 2021
	Lingkungan Hidup	15 MHA Lintas Kab	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Dinas Lingkungan Hidup	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	-	-	Kegiatan dilaksanakan pada tah. 2022 - 2023

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
	Lingkungan Hidup	15 MHA Lintas Kab	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Dinas Lingkungan Hidup	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	-	-	Kegiatan dilaksanakan pada tah. 2022 - 2023
	Lingkungan Hidup	15 MHA Lintas Kab	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	-	Kegiatan dilaksanakan pada tah. 2022 - 2023
	Lingkungan Hidup	Masyarakat, Kota, Sekolah	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kalpataru = 12 Penghargaan, Adipura : 1 Penghargaan, Adiwiyata : Tidak Dilaksanakan	Kalpataru = 12 Penghargaan, Adipura : 1 Penghargaan, Adiwiyata : 3 Penghargaan	
	Lingkungan Hidup	Masyarakat, Pemilik usaha/Kegiatan	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Provinsi , lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Provinsi , lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Provinsi	3 Pengaduan	3 Pengaduan	1. Privasitasi Pantai Pede Labuan Bajo - Mabar, 2. Proyek PLTP desa Ulubelu Kec. Golewa - Ngada, 3. Disreksi Pertambangan Rakyat di Manggarai Timur
	Lingkungan Hidup		Persentase cakupan area pelayanan	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase cakupan area pelayanan	-	22 Kab/Kota	
	Lingkungan Hidup	Meningkatnya volume sampah yang ditangani	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase jumlah sampah yang tertangani	-	22 Kab/Kota	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
	Lingkungan Hidup		Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	-	22 Kab/Kota	
	Lingkungan Hidup	Meningkatnya peran swasta dalam penanganan sampah	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	1 pengelola swasta limbah B3 Pt.Mitra Tata Lingkungan Baru (MTLB)	22 Kab/Kota	
	Perhubungan dan Trnasportasi	Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan dan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas angkutan	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur perhubungan	Dinas Perhubungan	Tersedianya sumberdaya aparatur sipil negara perhubungan yang berkualitas		5 orang	
		meningkatkan akses sarapras transportasi pada daerah tertinggal/ terpencil perdesaan dan wilayah perbatasan	Meningkatnya kualitas sarpras aparatur	Dinas Perhubungan	Terbangunnya gedung kantor UPT yang memadai		2 Gedung UPT	
			Meningkatnya kualitas sarpras aparatur	Dinas Perhubungan	Terbangunnya rumah dinas		5 unit rumah dinas	
			Meningkatnya kualitas sarpras aparatur	Dinas Perhubungan	Tersedianya kebdaraan dinas operasional		2 mobil, 5 Motor	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
			meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi daerah	Dinas Perhubungan	terwujudnya pelayanan perijinan dan pengawasan kepada masyarakat		5 UPT	
			tersusunnya berbagai regulasi peraturan daerah dan peraturan gubernur	Dinas Perhubungan	tersedianya profil dinas perhubungan		1 dokumen	
			Peningkatan Kinerja Pendapatan daerah bidang transportasi		Terlaksananya operasi pemeriksaan kendaraan angkutan umum bersana instansi terkait		100%	
		Optimalnya pengoperasian pelabuhan guna mendukung kegiatan bongkar muat barang, penumpang dan hewan serta kendaraan	terlaksananya rehabilitasi/ pengembangan prasarana perhubungan	dinas perhubungan	terlaksananya rehabilitasi / pengembangan sarana perhubungan laut		terselesaikan nya 1 paket rehabilitasi, 1 paket pengembangan dan terpenuhinya kebutuhan 3 paket SBNP	
		Tersedianya dokumen pendukung (studi kelayakan , studi rencana induk pelabuhan dan SID dan DED) pembangunan pelabuhan laut dan penyeberangan	Tersedianya dokumen pendukung studi kelayakan , studi rencana induk pelabuhan dan SID dan DED pelabuhan laut dan penyeberangan	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Studi kelayakan		2 dokumen	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
					Terlaksananya studi rencana induk pelabuhan		2 dokumen	
					terlaksananya studi SID dan DED		2 Dokumen	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
		Meningkatnya kesadaran pengelola pelabuhan dalam hal kesiapan dokumen perencanaan	tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan fasilitas perhubungan	dinas perhubungan	terlaksananya survey penerbitan ijin		4 dokumen RIP dan DLKr-DLKp Pelabuhan, pengumpan regional. Pembangunan dan pengeoperasian pelabuhan pengumpan regional, izin usaha, badan usaha di pelabuhan pengumpan regional, izin pengembangan pelabuhan dan pengeoperasian selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, izin pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan untuk pelabuhan pengumpan regional	
	Rancangan RKPD Provinsi NTT Tahun 2019							Bab VII - 28

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
							terlaksananya a perencanaan pembanguna n prasarna dan fasilitas perhubungan penyebranga n aimere, nagekeo, dan teluk gurita (3 paket)	
							Terlaksananya a pengadaan peta rupa bumi indonesia dan peta laut indonesia (1 Paket)	
		tersedianya informasi pendukung aktivitas perhubungan	tersedianya data pelabuhan khusus, depo peti kemas, dan pelabuhan RIPN	dinas perhubungan	terlaksananya koordinasi pembangunan fasilitas perhubungan		pendataan depo peti kemas (4) paket	
							pendataan pelabuhan khusus (4 paket)	
							terbangunnya a pelabuhan khusus (4 paket)	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
		Optimalnya pengawasan terhadap pembangunan pelabuhan laut dan penyebrangan	Terlaksananya pengawasan terhadap pembangunan pelabuhan laut dan penyebrangan	dinas perhubungan	Terlaksananya pengawasan terhadap pembangunan pelabuhan laut dan penyebrangan		studi kelayakan RIP, SID, DED, Amdal, DLKr/DLKp, Ijin pengoperasian, Ijin usaha Badan Usaha Pelabuhan, Ijin Pengerukan (8 Paket)	
							pemantauan dan penilaian kegiatan di pelabuhan penyebrangan (5 paket)	
							identifikasi calon lokasi pelabuhan (2 paket)	
		Tersedianya tim pendamping dalam rangka proses penerbitan ijin (FS, RIP, Amdal, SID, DED, DLKp/DLKr)	optimalnya pengawasan terhadap pembangunan pelabuhan di Kabupaten/Kota yang belum masuk dalam RIPN	dinas perhubungan	terdatanya pelabuhan		5 paket	
					teridentifikasinya calon lokasi SBNP		5 paket	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
		optimalnya pengelolaan terminal penumpang tipe B	terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe B yang optimal		Tersedianya perda retribusi		1 perda	
					tersedianya pengelola terminal tipe B bagi pengelola terminal		8 orang pengelola	
		tersedianya terminal penumpang Type B di 4 Kabupaten (Sumba Timur, Malaka, Nagekeo, Manggarai Timur)			pembangunan terminal tipe B		8 terminal	
		meningkatnya mutu pelayanan operator dan moda angkutan	meningkatnya mutu pelayanan operator dan moda angkutan		terlaksananya pengawasan terhadap sistem pelayanan di terminal		8 dokumen	
					terlaksananya survey load factor AKDP		22 Kab/Kota	
		lancarnya arus lalu lintas di hari besar keagamaan dan tahun baru			Terlaksananya pemantauan angkutan paskah		22 Kab/Kota	
					terlaksananya pemantauan angkutan lebaran		22 Kab/Kota	
		adanya kepastian tarif angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek dan dalam trayek		dinas perhubungan	tersedianya SK tarif AKDP		1 dokumen	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
					terlaksananya pemantauan tarif angkutan umum tidak dalam trayek		1 dokumen	
		meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ketentuan dan sistem pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek		dinas perhubungan	terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan dan sistem pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek		30 pengusaha angkutan	
					terlaksananya pengusahaan angkutan umum tidak dalam trayek yang tertib administrasi		30 pengusaha angkutan	
					terlaksananya penertiban dan penegakkan peraturan menteri perhubungan nomor 108 tahun 2017		5 kabupaten	
					terwujudnya keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		5 kabupaten	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
		Berkurangnya angka kecelakaan pelayaran	Menurunnya angka kecelakaan pelayaran	dinas perhubungan	terlaksananya pemeriksaan alat keselamatan diatas kapal motor penyebrangan dan kapal layar motor		11 KMP	
					terlaksananya sosialisasi keselamatan diatas kapal motor penyebrangan		1 dokumen	
					terlaksananya sosialisasi peraturan tentang keselamatan berlayar		1 dokumen	
					terlaksananya pengawasan pelayanan angkutan laut dan angkutan penyebrangan pada hari-hari besar keagamaan		2 pelabuhan	
		meningkatnya efektivitas pengawasan melekat dalam rangka mendorong praktek kepemerintahan yang baik	meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Inspektorat	terlaksananya Penyusunan dan Penerapan Kode etik dan Norma pengawasan sesuai dengan tuntutan regulasi	100%	100%	
					Pemeriksaan kinerja Pemprov NTT	100%	100%	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
		meningkatnya akses masyarakat perbatasan terhadap pelayanan jasa publik	terpenuhinya pelayanan dasar kepada masyarakat di daerah perbatasan	badan pengelola perbatasan	koordinasi perencanaan pembangunan jaringan air bersih di kawasan perbatasan			
					koordinasi perencanaan pembangunan jaringan listrik di kawasan perbatasan			
					koordinasi perencanaan pembangunan sarana prasarana pendidikan di kawasan perbatasan			
					koordinasi perencanaan pembangunan sarana prasarana Kesehatan di kawasan perbatasan			
					koordinasi perencanaan pembangunan Perumahan kawasan perbatasan			

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
		meningkatkan koordinasi antar level pemerintahan dalam implementasi program dan kegiatan pemerintah dibidang sosial budaya, kesehatan, pendidikan, hukum dan pariwisata	terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Biro Umum	terlaksananya rapat koordinasi MUSPIDA		100%	
					terlaksananya rakor pejabat pemerintah daerah		100%	
					terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah		100%	
		terlaksananya tertib perijinan daerah, dan meningkatnya daya tarik investasi daerah	tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah yang berkualitas	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT	Tersedianya data potensi investasi			
					Terlaksananya pemetaan potensi dan peluang investasi			
					Peningkatan kemitraan pelaku usaha dengan UKMK			
					Pengaplikasian sistem informasi potensi investasi daerah			

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
		Tersedianya aparatur sipil negara yang berkualitas dan memiliki kompetensi pada bidang tugasnya		Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNSD	500 Orang	1.920 Orang	
					Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan	438 orang	318 orang	
					Pelaksanaan Diklat Tekhnis dan Fungsional	diklat tekhnis dan fungsional 2017=180 orang, diklat pemerintahan dan sosial kultural 2017 = 120 orang	diklat tekhnis dan fungsional , target 120 orang, diklat pemerintahan dan sosial kultural target 150 orang	
		meningkatnya peran pariwisata daerah dalam mendorong pertumbuhan daerah	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, meningkatnya jumlah lama tinggal, dan rata-rata belanja perhari	dinas Pariwisata	peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	wisnus = 825.000 orang, wisman = 65.499 orang		
					peningkatan belanja wisatawan di daerah	belanja wisnus Rp. 247 Milyar, belanja wisman : Rp. 210 milyar		
					meningkatkan rata-rata lama tinggal (length of stay)	rata-rata lama tinggal : 3,83 hari		

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
		penataan dalam pengelolaan pertambangan dan energi daerah	pengembangan dan pengelolaan air tanah, pertambangan mineral, batubara, dan energi terbarukan	Dinas ESDM	Terlaksananya aktivitas konervasi dan pengendalian air tanah			
					terlaksananya pembinaan dan pengembangan EBT			
					Meningkatnya rasio elektrifikasi di Kab/Kota	60%		
		Optimalnya koordinasi penanganan kesejahnteraan dan masalah-masalah sosial lainnya	efektifnya koordinasi lintas unit kerja yang menagnani permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial	Biro Kesejahteraan rakyat	terlaknsananya koordinasi dibidang kesejahteraan sosial		100%	
		meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan korban kekerasan anak		Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	persentase kab/Kota yang melaksanakan kegiatan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak		100%	
		meningkatnya wirausahawan di Provinsi NTT yang dapat mendorong pengurangan pengangguran	meningkatnya wirausahawan di Provinsi NTT	dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	jumlah orang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap	2,10%	4%	

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR YANG DAPAT DI UKUR	BASELINE (2017)	TARGET (2019)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	11
		meningkatnya produktivitas perikanan daerah dalam rangka menopang ketahanan pangan daerah	terlaksananya pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan ruang laut dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan	Dinas kelautan dan perikanan	Terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia		100%	
					terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan		100%	
					Terlaksananya pengembangan perbenihan dan perikanan budidaya		100%	
					Terlaksananya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil		100%	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode yang akan datang dengan era kepemimpinan Kepada Daerah yang baru, sebagai perwujudan dari pelaksanaan pesta demokrasi yaitu Pemilu pada secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia tahun 2018. Untuk itu, dalam mengisi kekosongan pada masa transisi dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan pedoman penyusunan RKPD tahun pertama periode RPJMD selanjutnya, maka diharuskan menetapkan pedoman rancangan program indikatif 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah periode RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 ini berakhir.

Perencanaan pembangunan tahun 2019 ini diharapkan menjadi tonggak dan pijakan yang kokoh dalam mencapai target-target pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yang diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD Tahun 2019 dilakukan melalui pendekatan keterpaduan dan sinkronisasi, dimulai dari pelaksanaan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat, dengan melibatkan seluruh *stake holder* pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas berbasis masyarakat dengan memperhatikan hukum dan regulasi yang berlaku. Keterlibatan seluruh *stake holder* pembangunan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi diharapkan dapat menciptakan sinergi dan harmoni di setiap tingkatan pembangunan berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun yang sama, penyusunan KUA dan PPAS, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2019. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan RKPD dengan APBD, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan APBD pada kurun waktu yang telah ditentukan.

Dalam rangka meningkatkan hasil pembangunan yang lebih berkualitas, isu strategis, prioritas pembangunan, program prioritas, dan program pembangunan, serta kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan dirumuskan melalui pendekatan perencanaan holistik-tematik, terintegrasi, dan spasial adalah sebagai berikut :

- a). Holistik-tematik dimaknai bahwa adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi K/L dan antar PD, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar Perangkat Daerah di tingkat Provinsi/ Kabupaten;
- b). Prioritas pembangunan merupakan hasil konsolidasi dan pemetaan program/kegiatan substansial yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dan bersifat akomodatif terhadap proses perubahan kewenangan;
- c). Spasial dimaknai bahwa aspek lokasi/kewilayahan telah di pertimbangkan dalam penetapan prioritas pembangunan melalui pendekatan berbasis tata ruang dan analisis kebutuhan. Serta di selenggarakannya proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyepakati prioritas pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.

Untuk memastikan RKPD Tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap Kepala Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan berpedoman pada rancangan program indikatif transisi dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019. Rancangan Akhir Renja- Perangkat Daerah diverifikasi oleh Bappeda untuk menjamin penyusunan Renja-PD sudah sesuai dengan tahapan dan tata cara yang berlaku, dan substansi Renja-PD telah selaras dengan RKPD Tahun 2019.
2. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penyelarasan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 untuk mewujudkan sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mendukung pencapaian prioritas nasional Tahun 2019.
3. Gubernur menyusun KUA dan PPAS Tahun 2019 berdasarkan RKPD Tahun 2019 dan diajukan kepada DPRD untuk di bahas bersama.
4. Setiap Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan pada saat penyusunan Renja-PD Tahun 2019; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2019 pada saat menyusun DPA SKPD Tahun 2019; dan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2019 setiap triwulan pada Tahun 2019.
5. Bappeda melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2019 pada saat menyusun DPA SKPD Tahun 2019, dan evaluasi hasil RKPD Tahun

2019 semester dan tahunan pada Tahun 2019 berdasarkan evaluasi hasil Renja-PD.

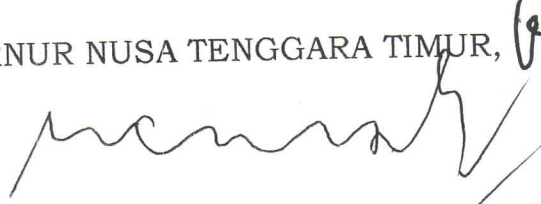
Dengan komitmen, koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan, maka diharapkan RKPD Tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mengsucceskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019, demi mewujudkan keberhasilan implementasi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara menyeluruh.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

2019 semester dan tahunan pada Tahun 2019 berdasarkan evaluasi hasil Renja-PD.

Dengan komitmen, koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan, maka diharapkan RKPD Tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019, demi mewujudkan keberhasilan implementasi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara menyeluruh.

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA